

LAPORAN KINERJA

**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas capaian Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada tahun 2025. Seluruh target dan sasaran kinerja telah tercapai dan turut berkontribusi positif kepada pencapaian kinerja Ombudsman Republik Indonesia. Namun peningkatan dan perbaikan tetap diperlukan sehingga kinerja selalu lebih baik dari tahun sebelumnya, baik secara kualitas, kuantitas, efektifitas, dan akuntabilitas.

Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah “Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data, Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas”. Dalam mencapai hal tersebut diukur melalui indikator Indikator kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dengan target 212 laporan kegiatan hubungan Masyarakat dan informasi, 1 layanan pengelolaan perpustakaan, 2 layanan pengelolaan data dan informasi, 1 sistem informasi pemeliharaan dan pengembangan sistem, 1 layanan pengelolaan operasional. Realisasi yang dicapai yaitu 238 laporan kegiatan hubungan Masyarakat dan informasi, 1 layanan pengelolaan perpustakaan, 2 layanan pengelolaan data dan informasi, 1 sistem informasi pemeliharaan dan pengembangan sistem, 1 layanan pengelolaan operasional. Kinerja Keuangan: dari alokasi anggaran Rp 4.947.127.000 direalisasikan Rp 4.000.940.746 (99,57%), dengan tercapainya semua target di tahun 2025, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 17.140.254.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan berikan penghargaan kepada seluruh pihak internal maupun eksternal dari Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi atas bantuan dan kerjasamanya dalam mendukung dan ikut mengawal pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sepanjang tahun 2025. Seluruh masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja secara terus menerus. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kendala struktural dan kebijakan anggaran, tantangan SDM dan manajemen beban kerja, permasalahan teknis, infrastruktur dan teknologi, krisis sumber daya manusia dan kapasitas kompetensi TI, kondisi kritis infrastruktur dan keamanan sistem, sarana, dan prasarana.

Harapan yang mungkin dapat dilakukan antara lain transformasi sumber daya manusia dan kapasitas teknis, optimalisasi anggaran dan strategi efisiensi, penguatan tata kelola operasional dan standar prosedur (SOP), pengembangan konten kreatif dan relasi media, manajemen layanan kontak dan PPID, pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas SDM. Selain itu dapat juga dilakukan manajemen infrastruktur dan optimalisasi aset, tata kelola data, statistik, dan kelembagaan, optimalisasi layanan dukungan TI dan komunikasi, manajemen anggaran dan kebijakan strategis.

Kami menyusun Laporan Tahunan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi tahun 2025 ini, dengan harapan semoga dapat memberikan gambaran secara umum pelaksanaan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, dan memberi manfaat juga bagi pemangku jabatan dan kepentingan di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dalam rangka pengelolaan DIPA APBN Tahun 2025, maupun informasi mengenai evaluasi kinerja bagi pihak yang berkepentingan dan bagi perencanaan mendatang.

Jakarta, Januari 2026

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Teknologi Informasi

#

DODI WAHYUGI ST, MMSI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi adalah sebuah unit kerja (eselon II) di dalam Lembaga Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok selaku pengelola dan penanggung jawab Pelayanan Informasi dan Kehumasan, Teknologi Informasi, serta Sistem Data dan Informasi (Sisdatin), dan Layanan Kepustakaan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Serta menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan dan layanan hubungan masyarakat; koordinasi pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi; koordinasi pengelolaan data dan layanan kepubstakaan; dan pelaksanaan administrasi Biro.

Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah “Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data, Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas”. Dalam mencapai hal tersebut diukur melalui indikator Indikator kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dengan target 212 laporan kegiatan hubungan Masyarakat dan informasi, 1 layanan pengelolaan perpustakaan, 2 layanan pengelolaan data dan informasi, 1 sistem informasi pemeliharaan dan pengembangan sistem, 1 layanan pengelolaan operasional. Realisasi yang dicapai yaitu 238 laporan kegiatan hubungan Masyarakat dan informasi, 1 layanan pengelolaan perpustakaan, 2 layanan pengelolaan data dan informasi, 1 sistem informasi pemeliharaan dan pengembangan sistem, 1 layanan pengelolaan operasional. Kinerja Keuangan: dari alokasi anggaran Rp4.947.127.000 direalisasikan Rp4.000.940.746 (99,57%), dengan tercapainya semua target di tahun 2025, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 17.140.254. (*Realisasi Anggaran Berdasarkan POK Biro HMTI*).

Selain program kerja yang telah direncanakan, terdapat juga beberapa pekerjaan tambahan yang datang dari unit kerja internal maupun dari instansi lain. Dengan harapan pemahaman dan kompetensi insan Ombudsman dapat lebih meningkat khususnya dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara komprehensif kontribusidalam memastikan ketersediaan, keandalan, serta peningkatan kualitas layanan teknologi informasi guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Fungsi, Tugas, Dan Wewenang	6
1.3 Organisasi Dan Sumber Daya Manusia	10
BAB II RENCANA KINERJA	16
2.1 Perjanjian Kinerja.....	20
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	22
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	23
3.3 Realisasi Anggaran.....	190
PENUTUP	194
LAMPIRAN	196

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu alat untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja, yang diatur dalam pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu instrumen utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan *outcome* yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Untuk pelaksanaan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki lima Kelompok Kerja/Layanan yang saling bersinergi satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mengusung efektifitas dan efisiensi dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya berbentuk anggaran.

Keberhasilan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang dapat mempengaruhi organisasi dalam suatu proses

perencanaan dan cara memecahkan permasalahan tersebut. Permasalahan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dapat dilihat dari aspek-aspek berikut;

- a. Terbatasnya sumber daya (Pegawai, Anggaran, Sarana-Prasarana dan lain-lain) yang tersedia untuk pengembangan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi; dan
- b. Belum tertibnya administrasi dalam lingkup internal sehingga memperlambat proses pelaksanaan kegiatan di Ombudsman RI.

Pada umumnya capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kinerja, namun kondisi sosial budaya yang dinamis dan perkembangan teknologi yang semakin maju, menuntut Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi untuk selalu melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja yang terus menerus sehingga dapat beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi, terutama yang terjadi pada ranah pelayanan publik di era digital saat ini yang sangat dinamis.

1.2 Fungsi, Tugas, Dan Wewenang

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi adalah sebuah unit kerja di dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia pada lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pengawas pelayanan publik di Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diatur dalam pasal 17 dan 18, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mengidentifikasi peran strategis Biro pada lembaga Ombudsman Republik Indonesia, antara lain:

- a. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sebagai salah satu unit di Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai peran dan fungsi yang sangat

- strategis dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan keberhasilan kinerja Ombudsman RI;
- b. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menjadi unit vital dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga dapat memberikan pelayanan dan dukungan optimal terhadap tercapainya keberhasilan kinerja organisasi;
 - c. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki peranan penting dalam pelayanan publik khususnya terkait implementasi keterbukaan informasi publik;
 - d. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menjadi penyedia dukungan teknologi informasi bagi unit-unit kerja di Ombudsman RI;
 - e. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menjadi pengelola data dan informasi di organisasi; dan
 - f. Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan layanan kepastakaan yang menjadi salah satu sumber ilmu bagi Insan Ombudsman RI dan Masyarakat.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan pada bagian kelima pasal 54 bahwa Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat dan pengelolaan teknologi informasi. Kemudian pada pasal 55 disebutkan bahwa Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat;
- b. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
- c. pengelolaan data dan layanan kepastakaan;
- d. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan hubungan masyarakat dan teknologi informasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Biro.

Program dan Kegiatan Layanan Data dan Informasi, dan Layanan Teknologi Informasi, terdiri dari 5 (lima) Tim/Kelompok Kerja, antara lain:

A. Tim/Kelompok Kerja Data dan Statistik

Tim Pengelolaan Data dan Statistik sesuai kedudukan, tugas serta fungsinya telah menyusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan/Pelaksanaan Satu Data Ombudsman;
- b. Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS);
- c. Memenuhi permintaan data dan perbaikan data pada aplikasi SIMPeL4;
- d. Terlaksananya pengelolaan "Dashboard Monitoring Penyelesaian Laporan Masyarakat".

B. Tim/Kelompok Kerja Aplikasi dan Helpdesk

Tim Pengelolaan Aplikasi dan Helpdesk sesuai kedudukan, tugas serta fungsinya telah menyusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Asistensi Aplikasi
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
- c. Website JDIH
- d. Website Reformasi Birokrasi
- e. Aplikasi Kanusa
- f. Aplikasi SIMPeL 4
- g. Aplikasi Humanusia
- h. Aplikasi Helpdesk
- i. Pekerjaan Konsultansi Senior Solution Architect
- j. Pengembangan Kapasitas SDM
- k. Workshop Pengelolaan Social Media JDIH Ombudsman
- l. Pelatihan Cobit 5 Foundation

C. Tim/Kelompok Kerja Keamanan Sistem dan SPBE

Tim Sistem Keamanan Informasi dan SPBE sesuai kedudukan, tugas serta fungsinya telah menyusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Mail Server Zimbra (ombudsman.go.id)
- b. Pengelolaan Tanda Tangan Elektronik
- c. Pengelolaan Sisdatin
- d. Pengelolaan Website Intranet
- e. Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi

D. Tim/Kelompok Kerja Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Internet

Tim Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Internet Melakukan koordinasi dan memastikan perangkat infrastruktur teknologi informasi, jaringan internet, dan Pusat Data Nasional (PDN) berfungsi dengan optimal, sebagai mana kedudukan, tugas serta fungsinya telah menyusun rencana kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi dan Jaringan
- b. Penerapan dan Konfigurasi Aplikasi di Lingkungan Server
- c. Monitoring Perangkat Server dan Jaringan
- d. Fasilitasi Rapat Daring

E. Tim/Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi

Tim Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi sesuai kedudukan, tugas serta fungsinya diminta untuk menyusun rencana program dan kegiatan dan membuat 1 (satu) Kebijakan terkait Teknologi Informasi, pada Triwulan I Tahun 2025 periode Januari-Maret 2025 membuat Kajian “Penerapan Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Pegawai di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia”, yang terdiri dari:

- a. Manfaat Penerapan WFA
- b. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi WFA
- c. Mekanisme Implementasi WFA
- d. Rekomendasi Kebijakan

1.3 Organisasi Dan Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Kepala Biro (setingkat Eselon II.a); b. Subbagian Tata Usaha (setingkat Eselon IV); c. Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Humas, Pranata Komputer, Statistisi, dan Pustakawan), dan d. Jabatan Pelaksana (JFU), dengan rincian sebagai berikut:

1) Kepala Biro

Kepala Biro memiliki tugas sebagai Kepala atau Pemimpin Unit Kerja setingkat Eselon II di Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha dan administrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

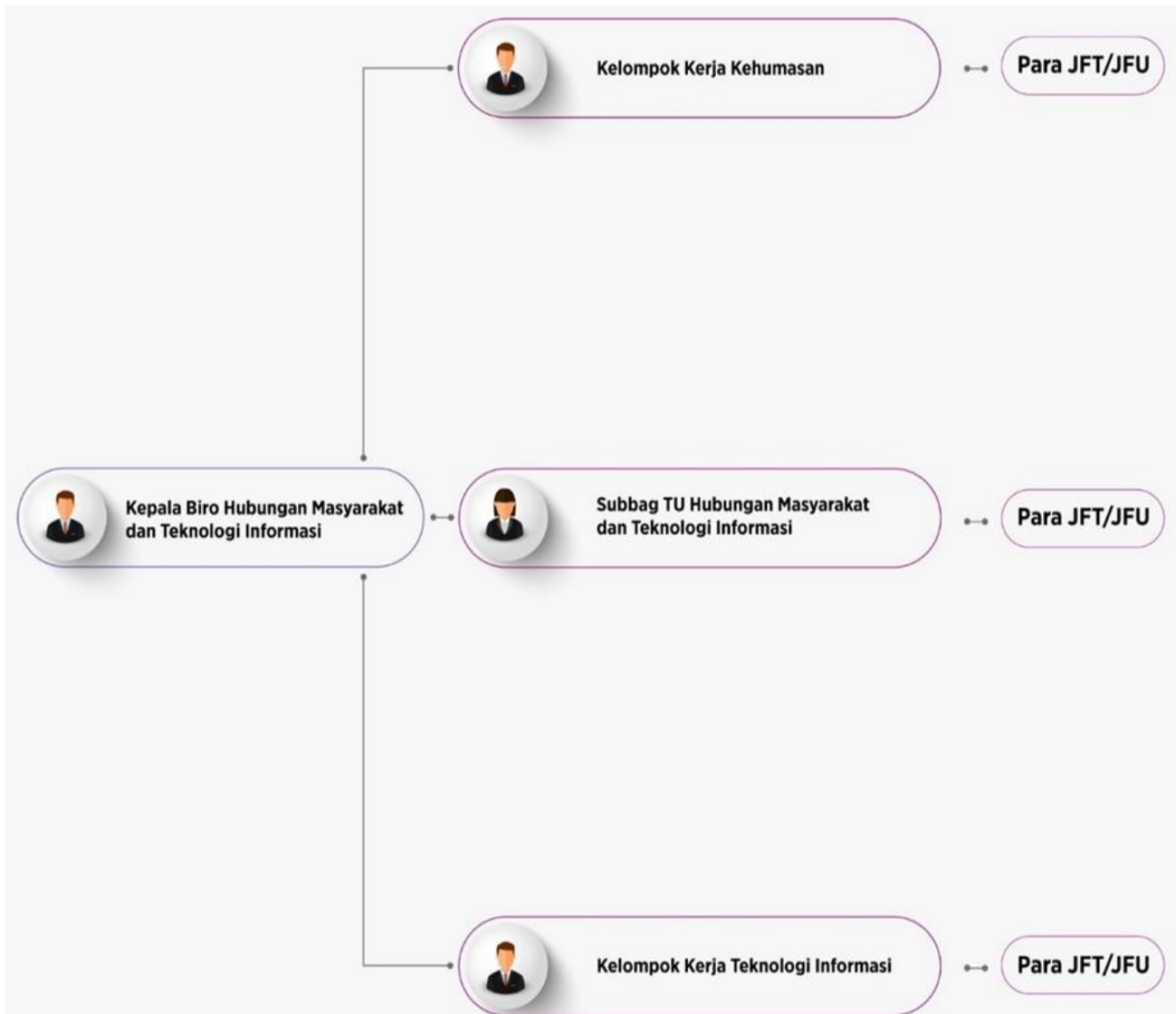
3) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada Tahun 2025 juga telah membuat Tim/Kelompok Kerja, yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro (Eselon II) selaku Pimpinan di unit kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Perpustakaan, Nomor 11/KP.06-SJ/II/2025 tanggal 3 Januari 2025
2. Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Website, Desain Grafis dan Pemberitaan, Nomor 10/KP.06-SJ/II/2025 tanggal 3 Januari 2025

3. Tim/Kelompok Kerja Sistem Keamanan informasi dan SPBE, Nomor 13/KP.06-SJ/I/2025 tanggal 3 Januari 2025
4. Tim/Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi, Nomor 8/KP.06-SJ/I/2025 tanggal 3 Januari 2025
5. Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Internet, Nomor 6/KP.06-SJ/I/2025 tanggal 3 Januari 2025
6. Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Data dan Statistik, Nomor 4/KP.06-SJ/I/2025 tanggal 3 Januari 2025
7. Tim/Kelompok Kerja Hubungan Antar Lembaga, Komunikasi Publik dan Media Handling, Nomor 7/KP.06-SJ/I/2025 tanggal 3 Januari 2025
8. Tim/Kelompok Kerja Peliputan dan Dokumentasi, Pengelolaan Media Sosial dan Contact Center, Nomor 9/KP.06-SJ/I/2025 tanggal 3 Januari 2025
9. Tim/Kelompok Kerja PPID, Monitoring dan Evaluasi Kehumasan, dan Perpustakaan, Nomor 12/KP.06-SJ/I/2025 tanggal 3 Januari 2025.
10. Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Aplikasi dan Helpdesk, Nomor 5/KP.06-SJ/I/2025 tanggal 3 Januari 2025
11. Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Administrasi dan Keuangan, Nomor 14/KP.06-SJ/I/2025 tanggal 3 Januari 2025



Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 39 Orang baik di Kantor Pusat maupun Perwakilan, yang terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Biro, 2 (dua) orang Jabatan Fungsional Ahli Madya, 7 (tujuh) orang Jabatan Fungsional Ahli Muda, 9 (sembilan) orang Jabatan Fungsional Ahli Pertama, 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional Tingkat Terampil, 14 (tiga belas) orang Staf Pelaksana/Fungsional Umum di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan, 2 (dua) orang Staf Sekretariat/Tenaga Pendukung, dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha Biro.



Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2025

Sumber Daya Manusia

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi didukung sumber daya manusia sejumlah 39 orang, 9 diantaranya di Kantor Perwakilan sedangkan di Kantor Pusat sebanyak 30 orang terdiri atas: 1 orang Eselon II, 21 orang jabatan fungsional, 14 orang jabatan pelaksana (JFU), 1 orang Subbagian Tata Usaha dan 2 orang tenaga pendukung (Staf Sekretariat), dengan struktur dan rincian tugas/fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Biro : 1 Orang
2. Kepala Subbagian Tata Usaha : 1 Orang
3. Jabatan Fungsional Tertentu
 - Pranata Komputer* : 10 Orang
 - Pranata Humas* : 8 Orang
 - Pustakawan* : 2 Orang
 - Statistisi* : 1 Orang
4. Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana
 - Kantor Pusat* : 7 Orang
 - Kantor Perwakilan* : 7 Orang
5. Tenaga Pendukung : 2 Orang

No	Nama	Jabatan
1	Dodi Wahyugi	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
2	Heru Tjahjono	Pranata Humas Ahli Madya
3	M.A Junior Gregorius	Pranata Komputer Ahli Madya
4	Maharandy Fadlan Monoarfa	Pranata Humas Ahli Muda
5	Fuad Mushofa	Pranata Humas Ahli Muda
6	Anita Widyaning Putri	Pranata Humas Ahli Muda
7	Aprilisty Dwi Hanafi	Pranata Komputer Ahli Muda
8	Firman Yudi Putra	Pranata Komputer Ahli Muda
9	Stefanus Lugas Prastowo	Pranata Komputer Ahli Muda
10	Indra Dwi Aprianto	Pranata Komputer Ahli Muda
11	Gosanna Oktavia Harianja	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro
12	Nurul Istiamuji	Pranata Humas Ahli Pertama
13	Yemima Dwi Kurnia	Pranata Humas Ahli Pertama
14	Siti Fatimah	Penelaah Teknis Kebijakan
15	Muhammad Fatra Dasa Mura	Jurnalis
16	Gunawan Riyanto	Pranata Komputer Ahli Pertama

17	Ganjar Yoga Supratama	Pranata Komputer Ahli Pertama
18	Bayu Victoria Warman	Pranata Komputer Terampil
19	Nurwalid Akhri Hidayat	Pranata Komputer Ahli Pertama
20	Fefa Bianca Belladina	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
21	Muhammad Ridho	Pengelola Layanan Operasional
22	Eko Wahyu Wijiantoro	Pengolah Data dan Informasi
23	Zenia Annabel	Pustakawan Ahli Pertama
24	Tety Yuniarty	Pranata Komputer Ahli Pertama
25	Imanda Kartika Sari	Pranata Humas Ahli Pertama
26	Hasti Aulia	Jurnalis
27	Yasin Jauhari	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
28	Victor Riandani Iwisara	Asisten Perpustakaan Terampil
29	Soesilowaty Widarshanty	Staf Sekretariat/ Tenaga Pendukung
30	Zaenal Arifin	Staf Sekretariat/ Tenaga Pendukung
31	<i>Tengku Reza Pahlepi</i>	<i>Statistisi Terampil</i>
32	<i>Abdul Latif (Jambi)</i>	<i>Pranata Humas Ahli Pertama</i>
33	<i>Reihana Ferdian (Jambi)</i>	<i>Penelaah Teknis Kebijakan</i>
34	<i>Oktavuri R.P (Maluku)</i>	<i>Penelaah Teknis Kebijakan</i>
35	<i>Marisya Fadhila (Sumbar)</i>	<i>Pengolah Data dan Informasi</i>
36	<i>Intan Dewi (Bengkulu)</i>	<i>Pengolah Data dan Informasi</i>
37	<i>Arwifan Arsyad (Sulsel)</i>	<i>Pengolah Data dan Informasi</i>
38	<i>Salima S. Putuhena (Sulsel)</i>	<i>Penelaah Teknis Kebijakan</i>
39	<i>Ditiro Alam Ben</i>	<i>Penelaah Teknis Kebijakan</i>

Daftar nama Pegawai dan Jabatan di Biro HMTI (Kantor Pusat dan Perwakilan)

BAB II

RENCANA KINERJA

Renstra Ombudsman 2025–2029 ditetapkan melalui Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Dalam Renstra 2025-2029 disebutkan visi Ombudsman RI adalah **“Menjadi Lembaga Pengawas Pelayanan Publik yang Efektif, Dipercaya, dan Berkeadilan Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas”**, dengan misi:

1. Mewujudkan Pengawasan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Partisipatif;
2. Mewujudkan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Hasil Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia; dan
3. Mewujudkan Profesionalisme Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Selanjutnya, dalam Renstra Ombudsman RI juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 **“Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik yang Berkeadilan”**. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan sasaran strategis **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemahaman dan Partisipasi Pengguna Layanan Publik melalui Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik”** yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Ombudsman RI pada periode Renstra tahun 2025-2029. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Ombudsman RI 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik yang Berkeadilan	Indeks Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3,46
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	Persentase K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi	38,15%

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Publik serta Pemahaman dan Partisipasi Pengguna Layanan Publik melalui Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3%
Sasaran Program: Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Persentase temuan maladministrasi yang telah diselesaikan serta Tindakan korektif dan rekomendasi yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	94,73%
	Persentase K/L/D yang meningkat kualitas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publiknya	N/A
	Persentase kelompok masyarakat peduli maladministrasi yang terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	85%
	Tingkat kepuasan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	3,36
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Persentase daerah dengan laporan/pengaduan masyarakat yang meningkat pada lokasi penyelenggaraan akses pengaduan pelayanan publik	90%
	Rata-rata waktu penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat	125 Hari
	Rata-rata waktu Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik	180 Hari
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Persentase saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan	70%
	Tingkat pemahaman kelompok masyarakat terkait pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	60
	Persentase K/L/D yang melaksanakan saran penyempurnaan Opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	N/A

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
	Persentase Asisten Ombudsman yang memanfaatkan data manajemen pengetahuan	10%
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Konsisten dan Efektif sesuai Standar Mutu	Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	99%
	Rata-rata waktu penyelesaian aduan	46,77 Hari
Sasaran Program: Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	84,72
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantuan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks kinerja perencanaan dan keuangan	3,30
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3,46
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks kinerja kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi	3,02
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks kinerja pengawasan internal	2,84
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi	3,36
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan, Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, dan kerumahtanggaan	3,25

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 Ombudsman berperan pada pembangunan nasional melalui berbagai upaya pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden. RPJMN 2025-2029 telah menyebutkan kontribusi Ombudsman dalam Prioritas Nasional 7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” yang diturunkan ke dalam Program Prioritas “Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan”.

Program Prioritas ini diturunkan lagi ke dalam Kegiatan Prioritas “Tata kelola pelayanan publik” yang diimplementasikan dalam satu kegiatan prioritas yaitu Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kualitas tertinggi, serta Proyek Prioritas “Penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik” yang diimplementasikan dalam 6 (enam) RO Prioritas yaitu: 1) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat; 2) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan; 3) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 4) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; dan 6) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam kerangka RPJMN 2025-2029 Ombudsman juga berperan dalam mendukung Prioritas Nasional 2, “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” yang diturunkan ke dalam Program Prioritas “Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi”. Program Prioritas ini diturunkan lagi ke dalam Kegiatan Prioritas “Proses akses Indonesia ke OECD” dan Proyek Prioritas “Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD” yang diimplementasikan dalam 4 (empat) RO Prioritas yaitu: 1) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 2) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 3) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; dan 4) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional-Program Prioritas-Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas pada RKP 2025 yang terkait dengan Ombudsman RI

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi	Proses aksesi Indonesia ke OECD	Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan	Tata kelola pelayanan publik	Penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik

2.1 Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi serta struktur organisasi. Program dan Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi terdiri dari 5 (tiga) Layanan, yaitu: Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Data dan Informasi (Data Informasi dan Teknologi Informasi), Layanan Perpustakaan (Umum), Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem dan Layanan Pengelolaan Operasional. Melaksanakan sasaran kegiatan, indikator, dan target sesuai Perjanjian Kinerja. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi yang diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah menandatangani Perjanjian Kinerja (unit eselon II).

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berikut matriks Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2025 yang telah ditetapkan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya layanan kehumasan, data, sistem, dan teknologi informasi yang berkualitas	Jumlah Laporan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Informasi	212 Laporan
	Jumlah Pengelolaan Layanan Perpustakaan	1 Layanan
	Jumlah Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	2 Layanan
	Jumlah pemeliharaan dan pengembangan sistem	1 Sistem Informasi
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	
Output 1: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp 664.417.000
Output 2: Layanan Umum	Rp 201.967.000
Output 3: Layanan Data dan Informasi	Rp 496.093.000
Output 4: Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	Rp 750.000.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp 2.829.050.000
Total	Rp 4.941.527.000

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
TEKNOLOGI INFORMASI,



Dodi Wahyugi
NIP. 198106222003121003

Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi memiliki 5 indikator kinerja, yakni jumlah laporan kegiatan Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan target 212 laporan, jumlah pengelolaan Layanan Perpustakaan dengan target 1 layanan, jumlah pengelolaan Layanan Data dan Informasi dengan target 2 layanan, jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem dengan target 1 Sistem Informasi, dan jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dengan target 1 Layanan. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 102,4 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	212	Laporan Kegiatan	238	112%
Layanan Umum	1	Layanan	1	100,00%
Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	2	100,00%
Layanan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	1	Sistem Informasi	1	100,00%
Layanan Pengelolaan Operasional	1	Layanan	1	100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target; dan
- 3) Tidak terdapat target dengan capaian realiasi di bawah 100.

Pengukuran kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diharapkan. Untuk menghitung indeks kinerja Biro dilakukan pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja Kelompok Kerja/Layanan pada Biro Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi

Informasi. Perjanjian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi telah terealisasi melebihi target yang telah ditentukan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi didapatkan dari realisasi atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada awal tahun 2025, sehingga kinerja Biro *measurable* dan *accountable*. Berikut perhitungan capaian kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan				Capaian (%)	Ket
			I	II	III	IV		
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data, Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Jumlah Laporan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Informasi	212 Laporan	59 Laporan	100 Laporan	147 Laporan	238 Laporan	112%	<ul style="list-style-type: none"> • Januari: 16 • Februari: 25 • Maret: 18 • April: 13 • Mei: 18 • Juni: 10 • Juli: 15 • Agustus: 10 • September: 22 • Oktober: 38 • November: 31 • Desember: 14
	Jumlah Pengelolaan Layanan Perpustakaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
	Jumlah Pengelolaan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	100%	

Layanan Data dan Informasi								
Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	
Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	

Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, dengan jumlah laporan kinerja Hubungan Masyarakat dan Informasi sebesar 238 laporan kegiatan atau 112% kegiatan terlaksana, dengan rincian 16 laporan kegiatan di Bulan Januari, 25 laporan kegiatan di Bulan Februari, 18 laporan kegiatan di Bulan Maret, 13 laporan kegiatan di Bulan April, 18 laporan kegiatan di Bulan Mei, 10 laporan kegiatan di Bulan Juni, 15 laporan kegiatan di Bulan Juli, 10 laporan kegiatan di Bulan Agustus, 22 laporan kegiatan di Bulan September, 38 laporan kegiatan di Bulan Oktober, 31 laporan kegiatan di Bulan November, dan 14 laporan kegiatan di Bulan Desember.

Jumlah dokumen Laporan Triwulan/Tahunan terdiri dari laporan triwulan I, II, III dan IV Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi tahun 2025, Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2025, serta Laporan Tahunan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2025.

Perjanjian kinerja (Kepala Unit Kerja) ini kemudian akan dievaluasi setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran. Realisasi perjanjian kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan Rincian Output (RO), sebagai berikut:

1. Layanan Hubungan Masyarakat
Laporan Pengelolaan Media Sosial, Laporan Pengelolaan Call Center, Laporan Pengelolaan Website, Laporan Pengelolaan Media Monitoring, Laporan Dokumentasi dan Peliputan, Laporan Indeks Kepuasan Layanan Informasi, Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Laporan Triwulan I, II, III, IV Layanan Hubungan Masyarakat, Laporan Tahunan Layanan Hubungan Masyarakat.
2. Layanan Data dan Informasi (Data Informasi dan Teknologi Informasi)
Laporan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Laporan Pengelolaan Keamanan Jaringan, Laporan Pengelolaan Pengembangan Aplikasi, Laporan Pengelolaan SPBE, Laporan Pengelolaan Sisdatin, Laporan, Laporan Triwulan I, II, III, IV Layanan Data dan Informasi, Laporan Tahunan Layanan Data dan Informasi.
3. Layanan Perpustakaan (Umum)
Laporan Pembangunan Pojok Baca Ombudsman (PBO), Laporan Pembangunan Pojok Baca Digital (Pocadi), Laporan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan, Laporan Triwulan I, II, III, IV Layanan Perpustakaan, Laporan Tahunan Layanan Perpustakaan.

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi pada tahun 2025 mencapai dan berhasil dalam melaksanakan kegiatan dan penghargaan, yaitu diantaranya:

1. Tim/Kelompok Kerja PPID, Monitoring dan Evaluasi Kehumasan, dan Perpustakaan

Rincian Pelaksanan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Ombudsman RI dimulai dari beberapa kegiatan dilaksanakan oleh PPID antara lain:

a) Penyusunan Kebijakan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Dalam proses pemutakhiran ini, PPID menyampaikan pemberitahuan untuk meminta masukan setiap unit kerja untuk menginformasikan Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan yang ada disetiap unit kerja untuk dianalisa dan sebagai bahan pembahasan rapat pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). Berikut tahapan yang dijalankan PPID Ombudsman Republik Indonesia dalam pemutakhiran DIP dan DIK Tahun 2025 antara lain:

1. Menyampaikan Nota Dinas Pemutakhiran DIP dan DIK kepada Setiap Kepala Unit Kerja

2. Menginventarisasi setiap informasi yang disampaikan kepala unit kerja terkait DIP dan DIK
3. Melakukan Sosialisasi Secara Daring tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan pada Bulan April 2025
4. Melakukan Uji konsekuensi atas daftar informasi Dikecualikan Tahun 2025 selama bulan Mei 2025 bersama setiap unit kerja secara luring.
5. Menyusun Draft Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Ombudsman RI.
6. Setiap unit kerja di Ombudsman RI diharapkan mampu memahami setiap klasifikasi dan jenis informasi yang diproduksinya. Sehingga pada ujungnya, akan tercipta keterbukaan informasi publik di lingkungan Ombudsman R

b) Sidang Sengketa Informasi Publik

Pada tanggal 25 Februari 2025 Atasan PPID Ombudsman RI menerima surat Panggilan Sidang nomor 069/II/KIP-RLS/2025 dan 070/II/KIP-RLS/2025 dari Komisi Informasi Pusat untuk menghadiri sidang pemeriksaan awal pada Selasa, 4 Maret 2025 di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat , Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB.

Sidang yang ditujukan ke pada Atasan PPID Ombudsman RI tersebut di berikan Kuasa kepada 3 Orang yaitu : Heru Tjahjono (Pranata Humas Ahli Madya), Panji Jaya Laksana (Analisis Hukum Ahli Muda) dan Eko Wahyu Wijiantoro (Pengelola Administrasi Pemerintahan) untuk menghadiri Sidang tersebut. Sidang pemeriksaan awal tersebut ditunda karena pihak pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen sah atas organisasi yang pemohon wakili.

Pada hari Jumat, 14 Maret 2025 Atasan PPID Ombudsman RI menerima surat Panggilan Sidang nomor 099/III/KIP-RLS/2025 dan 100/III/KIP-RLS/2025 dari Komisi Informasi Pusat untuk menghadiri sidang pemeriksaan awal ke II pada Rabu, 19 Maret 2025 di Ruang Sidang Komisi Informasi Pusat , Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB.

Sidang yang ditujukan ke pada Atasan PPID Ombudsman RI tersebut di berikan Kuasa kepada 3 Orang yaitu : Heru Tjahjono (Pranata Humas Ahli Madya), Panji

Jaya Laksana (Analis Hukum Ahli Muda) dan Eko Wahyu Wijiantoro (Pengelola Administrasi Pemerintahan) untuk menghadiri Sidang tersebut.

Namun, pada hari pelaksanaan Sidang, yaitu Rabu, 19 Maret 2025, Panitera Pengganti Komisi Informasi Pusat menyampaikan bahwa Pemohon Bpk Nurchalis Patty an. Pemerhati Aplikasi dan Siber, mengajukan pencabutan atas permohonan sidang sengketanya tersebut diatas.

Selama Triwulan III Tahun 2025, PPID Ombudsman RI mendapatkan panggilan Sidang Sengketa lanjutan dengan:

1. Nomor Register 007/II/KIP-PSI/2019
2. Nomor Register 008/III/KIP-PSI/202
3. Nomor Register 026/V/KIP-PSI/2019

Sidang dimulai pada 18 Juni 2025 untuk pemeriksaan awal, dan dilanjutkan pada Rabu, 2 Juli 2025 dengan pembacaan tuntutan pemohon terhadap Ombudsman RI. Pada hari Selasa, 15 Juli 2025 dilakukan mediasi atas hasil sidang 2 Juli 2025 untuk Nomor Register 026/V/KIP-PSI/2019 yang dimediasi oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Dr. Donny Yoegiantoro, M.M., MPA.

Sidang selanjutnya pada hari Senin, 21 Juli 2025, berupa Sidang Pembacaan Putusan Mediasi atas sengketa nomo register 026/V/KIP-PSI/2019. Pada Kami 31 Juli 2025 Ombudsman RI mendapatkan panggilan sidang lanjutan untuk nomor register 007/II/KIP-PSI/2019 dan 008/III/KIP-PSI/2022 untuk sidang pada Senin, 4 Agustus 2025 dengan agenda Pemeriksaan Lanjutan / Penyerahan Hasil Uji Konsekuensi. Untuk menjawab panggilan tersebut PPID Ombudsman melalui Koordinator Hukum, mengirimkan dokumen Kesimpulan dan Daftar Bukti atas nomor register diatas. Pada tanggal 3 September 2025 PPID Ombudsman RI menghadiri Pembacaan Putusan atas nomor register 008 dan 007 berdasarkan kesimpulan dan juga bukti persidangan.

c) Pelayanan Keberatan Atas Informasi Publik

Pada Tahun 2025 ini PPID Ombudsman RI menerima 3 (tiga) Keberatan Atas Informasi yang masuk yaitu atas nama:

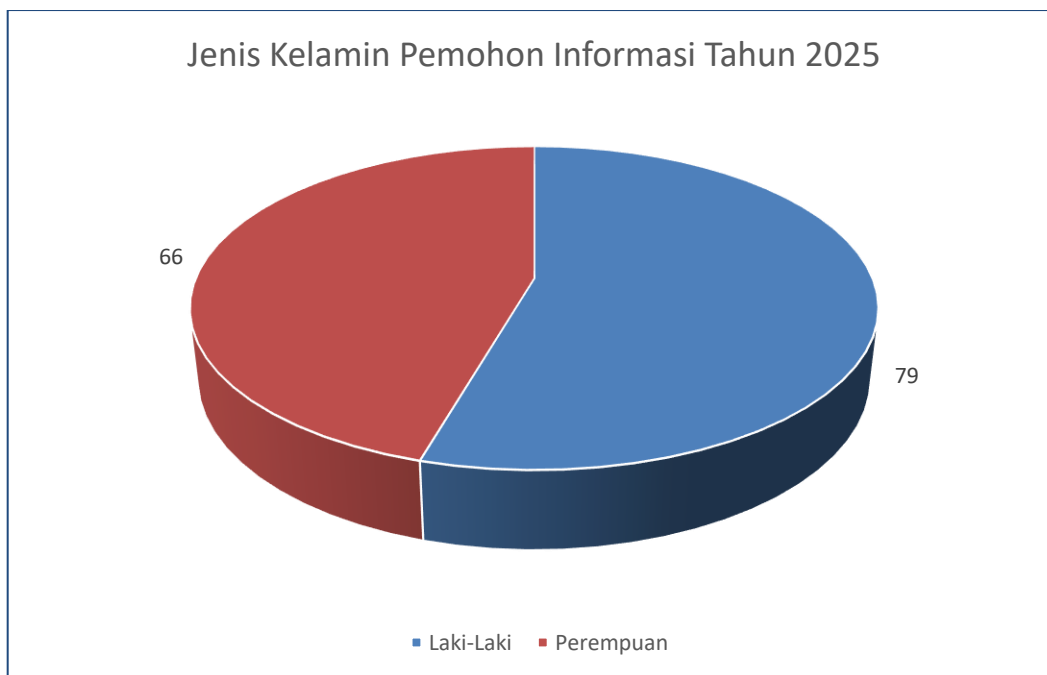
1. Pemohon Informasi Bpk. NP.
2. Bukit Darbis Sitompul, S.H & Associate
3. Bukit Darbis Sitompul, S.H & Associate

d) Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, PPID menerima Permohonan Informasi sebanyak 145 Permohonan dengan mayoritas permohonan diajukan secara daring / online. Dari data permohonan yang dikelola PPID kami sampaikan beberapa data pemohon informasi mulai dari Jenis Kelamin, Pekerjaan Pemohon, Saluran / Media yang digunakan untuk mengajukan permohonan informasi, Substansi Informasi yang dimohonkan serta Status Pemenuhan Atas Permohonan Informasi yang dilayanan PPID Ombudsman RI selama Tahun 2025.

1) Permohonan Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin Pemohon

Berdasarkan data pemohon informasi sepanjang tahun 2025 permohonan informasi PPID yang masuk berdasarkan jenis kelamin cukup seimbang yaitu 54,48% atau 79 pemohon informasi berjenis kelamin Laki-laki dan 45,52% atau 66 pemohon informasi berjenis kelamin Perempuan. Dari data ini PPID Ombudsman RI tidak pernah menjadikan jenis kelamin menjadi sebuah penghalang mengajukan permohonan informasi, selama semua persyaratan permohonan dipenuhi maka, PPID Ombudsman RI akan melayanannya sesuai dengan Standar Layanan.

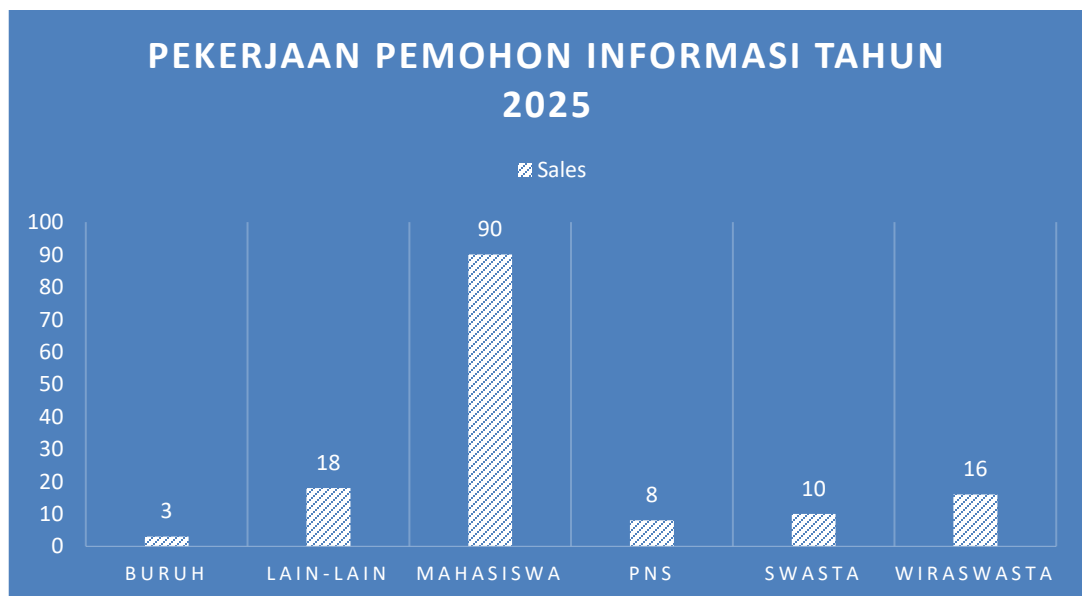


2) Permohonan Informasi Berdasarkan Pekerjaan Pemohon

Berdasarkan data pemohon informasi sepanjang tahun 2025 permohonan informasi PPID yang masuk berdasarkan Pekerjaan Pemohon, antara lain 62,07% atau 90 pemohon informasi berprofesi sebagai Mahasiswa, 12,41% atau 18 pemohon informasi menjawab profesinya sebagai lain-lain / tidak menjelaskan secara spesiifik profesinya saat ini, 11,03% atau 16 Pemohon berprofesi sebagai Wiraswasta, 6,9% atau 10 Pemohon bekerja sebagai Pegawai Swasta, 5,52% atau 8 Pemohon berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dan 2.07% atau 3 Pemohon informasi bekerja sebagai Buruh Pabrik.

Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa PPID Ombudsman RI paling banyak menerima permohonan informasi dari Mahasiswa dan keperluannya sebagian besar dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan ataupun Tugas Akhir. Untuk profesi pemohon informasi lainnya juga menggambarkan bahwa masyarakat yang membutuhkan informasi dari PPID Ombudsman RI cukup beragam, baik itu dari Sektor Swasta maupun Pemerintahan seperti ASN/PNS.

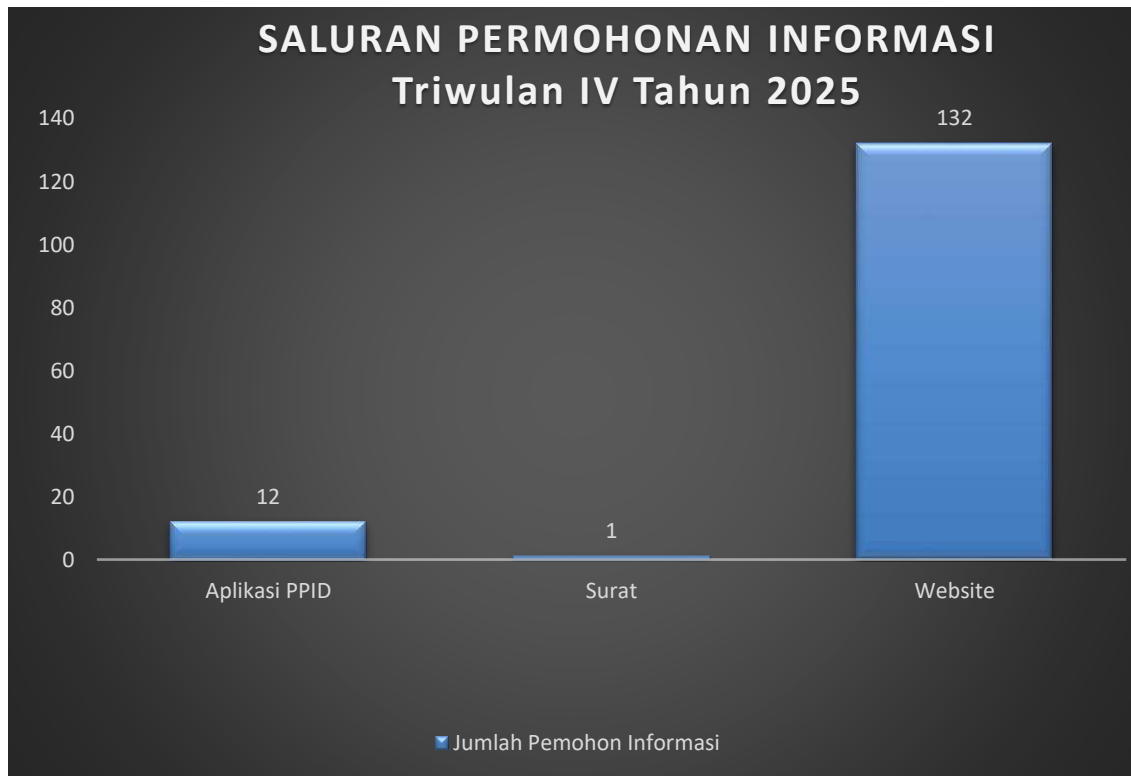
Hal ini dapat disimpulkan bahwa Ombudsman RI sebagai Instansi Pemerintah sudah banyak dikenal khususnya oleh akademisi seperti mahasiswa. Kedepan Ombudsman RI khususnya perlu lebih banyak melakukan sosialisasi agar masyarakat yang berpartisipasi baik itu menyampaikan aduan atas pelayanan publik maupun permohonan informasi publik di Ombudsman RI lebih meningkat dan dapat dilayani dengan lebih baik.



3) Permohonan Informasi Berdasarkan Saluran Permohonan

Dari grafik diatas menjelaskan bahwa 91,03 % atau 132 Permohonan mengajukan permohonan melalui Website <http://ppid.ombudsman.go.id/permohonan>, dan sebanyak 8,28% atau 12 Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi PPID baik itu pada sistem operasi Android maupun sistem operasi iOs Apple.

Pemohon terlihat lebih menyukai penggunaan Website PPID karena kemudahan dan kepraktisan dibandingkan aplikasi ppid yang perlu melakukan pemasangan/instalasi terlebih dahulu. Oleh sebab itu, perlu sekali mengembangkan Website PPID menjadi lebih baik sehingga masyarakat yang melakukan permohonan informasi merasa lebih dimudahkan.

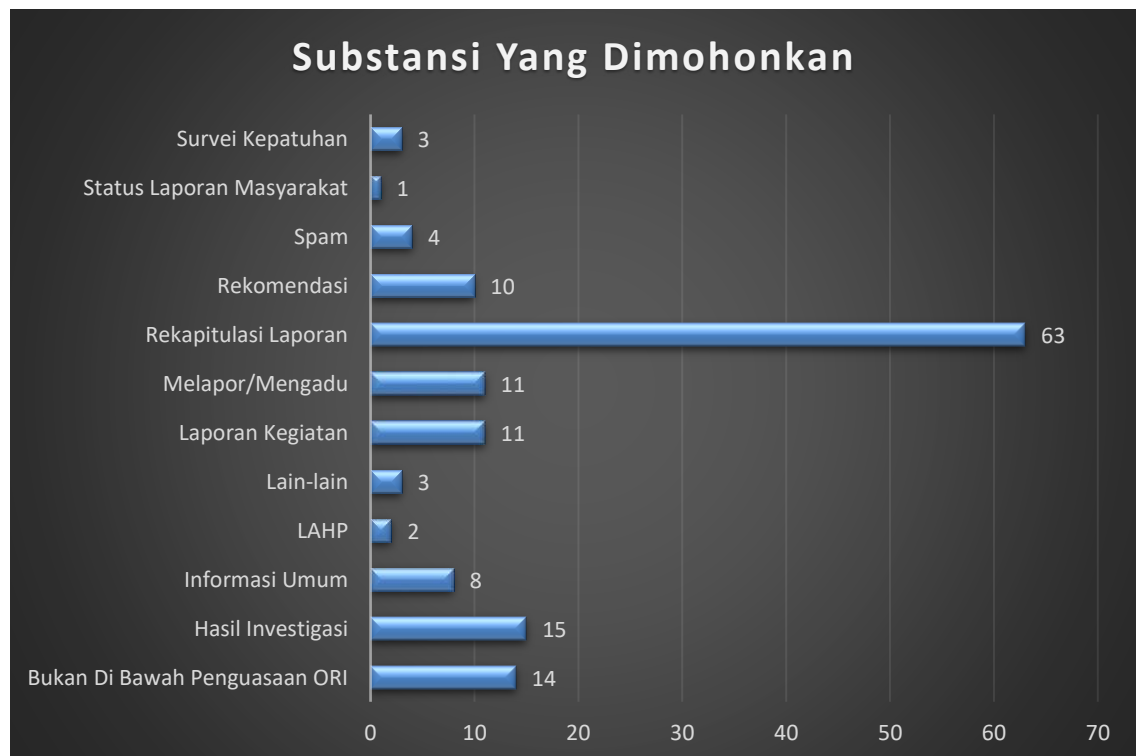


4) Permohonan Informasi Berdasarkan Substansi

Berdasarkan data permohonan informasi publik tahun 2025, 43,45% atau 63 Pemohon memohonkan informasi dengan Substansi Rekapitulasi Laporan, 10,34% atau 15 Pemohon memohonkan informasi terkait Hasil Investigas, 9,66% atau 14 Pemohon memohonkan informasi

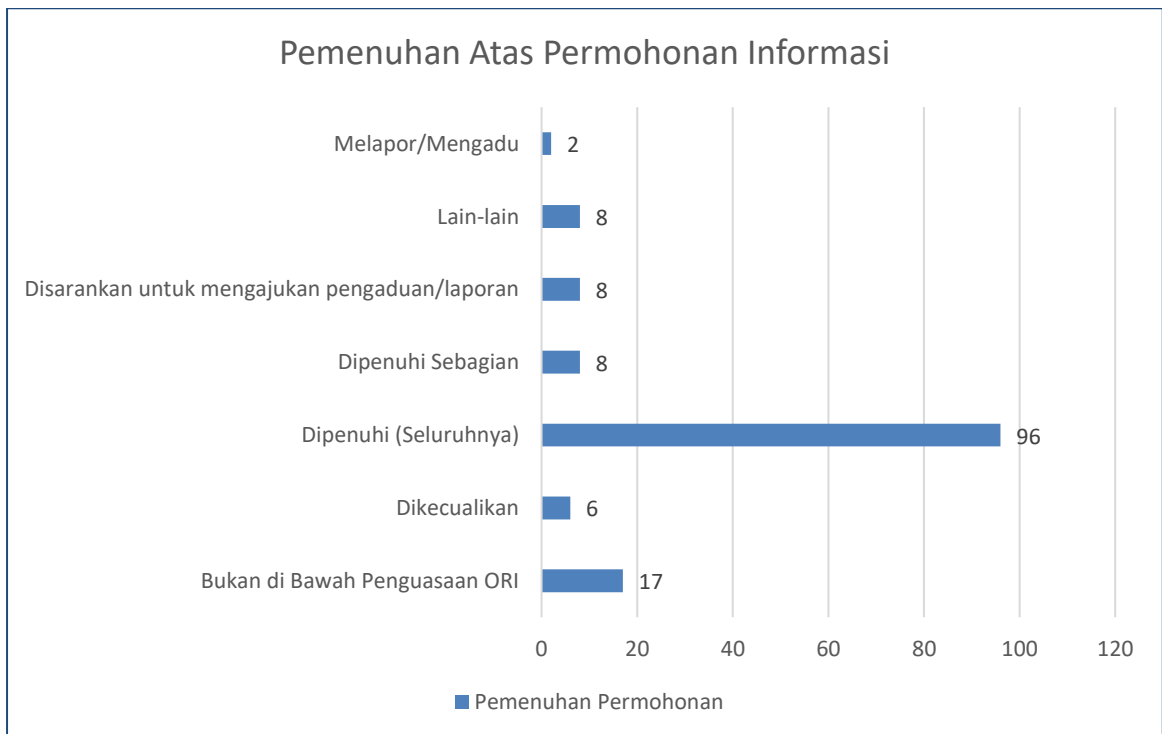
yang Bukan Di bawah Penguasaan Ombudsman, 7,59% atau 11 Pemohon memohon informasi terkait cara Melapor/Mengadu serta telah di rekomendasikan untuk mengajukan laporan, 7,59% atau 11 Pemohon memohon informasi terkait Laporan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman RI, 6,90% atau 10 Pemohon memohonkan informasi terkait Rekomendasi yang telah di keluarkan Ombudamsan RI. 5,52% atau 8 Pemohon memohonkan informasi umum, seperti Rencana Strategis dan anggaran, 2,76% atau 4 Pemohon dianggap “Spam” karena tidak mengisi formulir permohonan secara lengkap serta informasi yang dimohonkan tidak jelas, 2,07% atau 3 Permohonan memohonkan informasi terkait Survei Kepatuhan, 2,07% atau 3 pemohon memohonkan informasi hal lain-lain seperti melamar pekerjaan serta mengajukan magang, 1,38% atau 2 Pemohon memohonkan informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan 0,69% atau 1 Pemohon memohonkan informasi tindak lanjut laporannya di Ombudsman RI.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hampir disetiap tahun permohonan informasi yang masuk ke Ombudsman RI sebagian besar terkait Data Laporan Masyarakat, sehingga perlu diberikan perhatian khusus untuk mengelola data tersebut.



5) Permohonan Informasi Berdasarkan Pemenuhan Permohonan

Berdasarkan data permohonan informasi Tahun 2025, pemenuhan atau penjawaban atas permohonan informasi yang masuk ke PPID Ombudsman RI yaitu 96 Permohonan informasi telah dipenuhi seluruh permohonan informasinya, 17 permohonan informasi di tolak karena informasi yang dimohonkan Bukan Di Bawah Penguasaan Ombudsman RI, 8 Permohonan sudah di penuhi sebagian permohonannya sebagian lainnya di kecuialikan atau Bukan Di Bawah Penguasaan Ombudsman RI, 8 permohonan disarankan untuk mengajukan pengaduan/pelaporan ke Ombudsman RI, 8 Permohonan status **pemenuhannya** lain-lain karena tidak mengisi formulir dengan benar dan tidak melampirkan informasi yang lengkap sehingga kami sarankan untuk mengajukan permohonan ulang, 6 permohonan ditolak karena memohonkan informasi yang dikecuialikan, dan 2 Permohonan merupakan bentuk Laporan/ Aduan Masyarakat sehingga kami jawab dengan jelas bagaimana pemohon dapat melapor atau mengadu ke Ombudsman RI.



Capaian Kinerja sepanjang Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Kegiatan	Target	Realisasi Tahun 2025				Capaian (%) Realisasi/ Target x100%	Keterangan
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV		
1	Jumlah kegiatan kemitraan strategis, pengembangan jejaring, dan keikutsertaan kegiatan pameran / pencetakan bahan souvenir	70 kegiatan	45 kegiatan	30 Kegiatan	43 Kegiatan	42 Kegiatan	228.57 %	38 Pelayanan Informasi. 1 Kegiatan Sharing Knowledge 1 Sosialisasi dan Pembahasan Kerja Sama 1 Monev Pelayanan Informasi Publik di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 1 Monev KIP 2025
2	Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik	Indeks 3,50	Indeks 3,37	Indeks 3.42	Indeks 3.03	Indeks 3,77	Indeks Rata -Rata 3.27 (97.07%)	Berdasarkan waktu penjawaban layanan permohonan informasi yang dipenuhi

Indeks Ketepatan Waktu Penjawaban Permohonan Informasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik khususnya yang berkaitan dengan waktu penjawaban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Ombudsman RI

telah menghitung Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik. Indeks ini dihitung berdasarkan jangka waktu penjawaban setiap permohonan informasi publik dengan perhitungan berikut:

- Nilai 4** : Penjawaban 1-10 hari kerja
Nilai 3 : Penjawaban 11-13 hari kerja
Nilai 2 : Penjawaban 14-16 hari kerja
Nilai 1 : Penjawaban 17 hari ke atas

Setelah diberikan nilai diatas maka diambil rata-rata dalam jangka waktu triwulan atau tahunan didapatkan Indeks ketepatan waktu penjawaban.

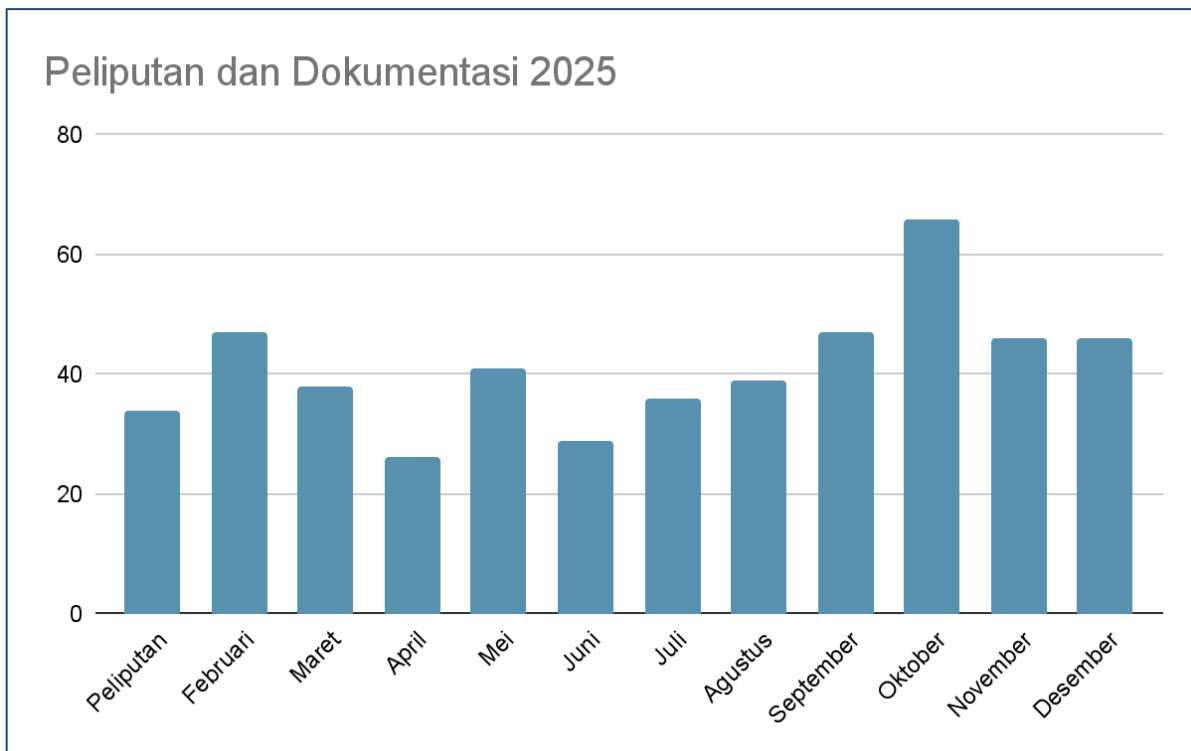
2. Layanan Pemberitaan, Publikasi Dan Dokumentasi

1) Peliputan Kegiatan Pimpinan

Selama Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 terdapat 495 kegiatan di kantor Pusat. Peliputan kegiatan pimpinan dilakukan untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Pimpinan Ombudsman RI. Pendokumentasian kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti jadwal kegiatan pimpinan, kemudian melakukan dokumentasi dalam kegiatan tersebut.

NO	BULAN	KEGIATAN
1	Januari	34
2	Februari	47
3	Maret	38
4	April	26
5	Mei	41
6	Juni	29
7	Juli	36

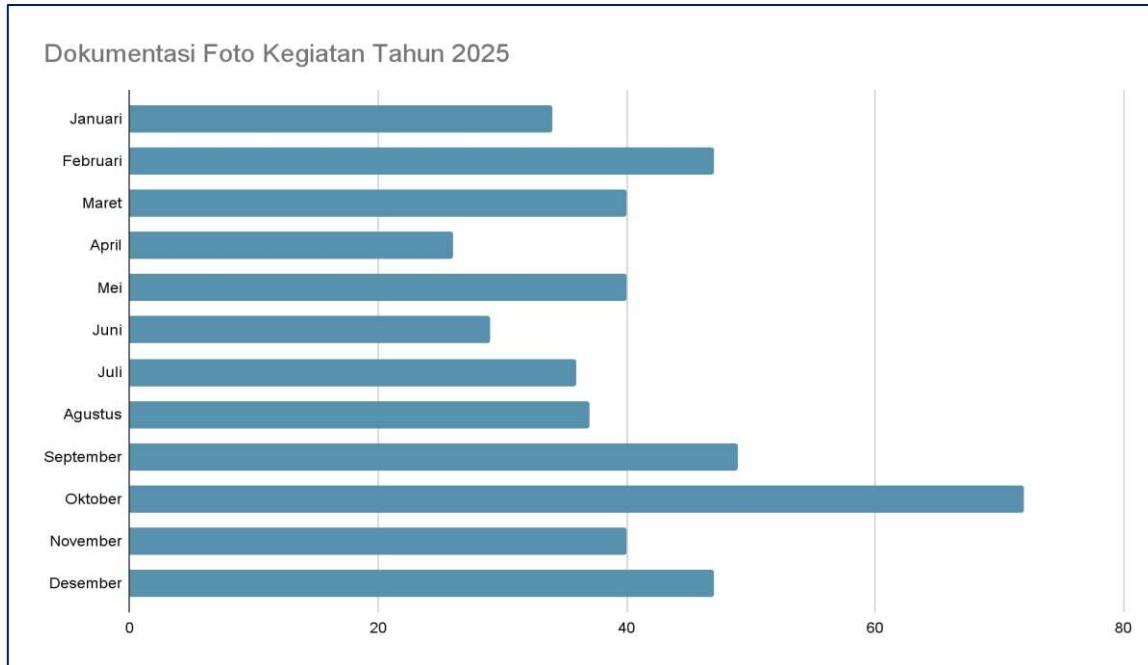
8	Agustus	39
9	September	47
10	Oktober	66
11	November	46
12	Desember	46
TOTAL		597



Peliputan dan Dokumentasi sepanjang Tahun 2025

2) Arsip Dokumentasi (NAS)

Pengarsipan Dokumentasi/ NAS (*Network Attached Storage*) di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia sepanjang tahun 2025 terhitung sejumlah 497 kegiatan di dalam maupun di luar kantor dan memakai penyimpanan sebesar 1,35 Terabyte. Berikut adalah tabel dan grafik penggunaan penyimpanan sisdatin untuk foto dan video kegiatan Ombudsman RI selama tahun 2025.



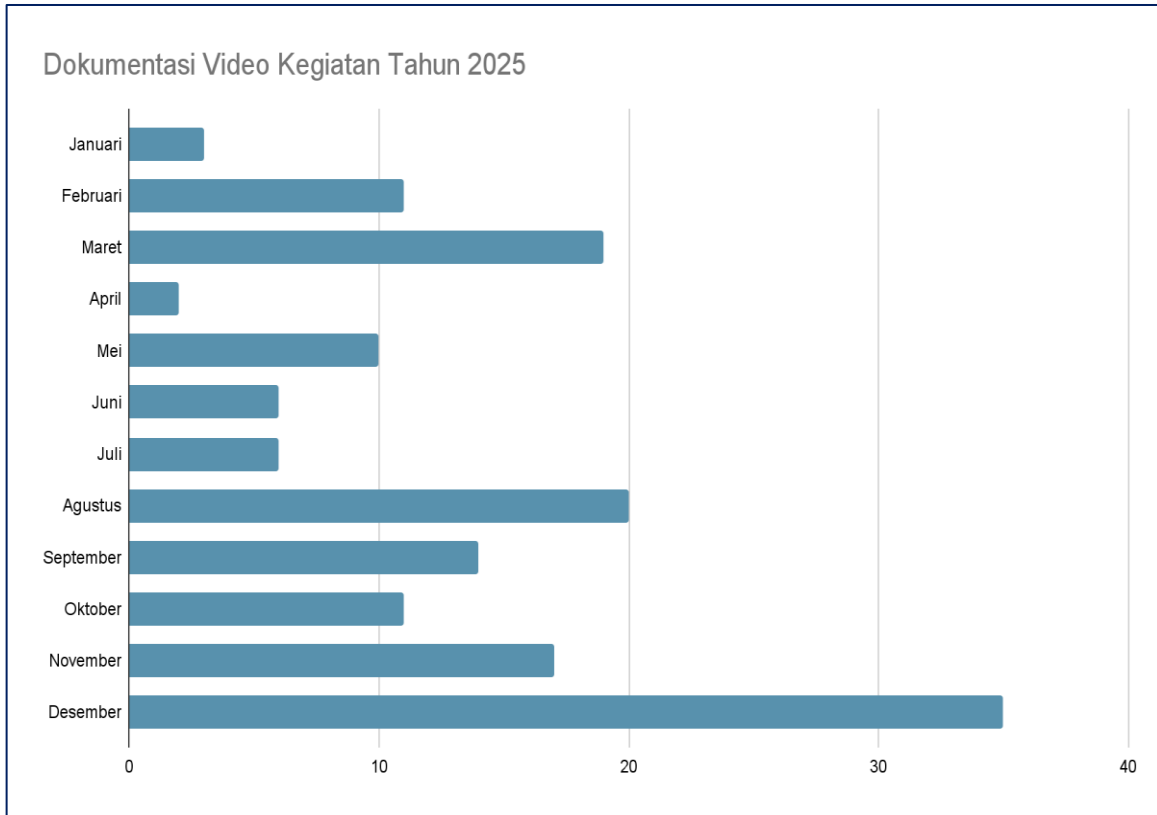
Grafik dan Tabel Jumlah Penggunaan Sisdatin untuk Foto kegiatan Ombudsman RI Tahun 2025

Foto (Tahun 2025)			
No	Bulan	Kegiatan	Penyimpanan/Storage (GB)
1	Januari	34	68,22
2	Februari	47	113,36
3	Maret	40	83,94
4	April	26	42,57
5	Mei	40	94
6	Juni	29	89,63
7	Juli	36	95,6
8	Agustus	37	163,71
9	September	49	118,49
10	Oktober	72	189,9

11	November	40	180
12	Desember	47	139,3
Jumlah		497	1.35 TB

Video (Tahun 2025)			
No	Bulan	Kegiatan	Penyimpanan/Storage (GB)
1	Januari	3	61,9
2	Februari	11	30,28
3	Maret	19	62,9
4	April	2	3,89
5	Mei	10	23,26
6	Juni	6	19,35
7	Juli	6	2,98
8	Agustus	20	48,21
9	September	14	110
10	Oktober	11	36,33
11	November	17	100,22
12	Desember	35	36,42
Jumlah		154	535,74

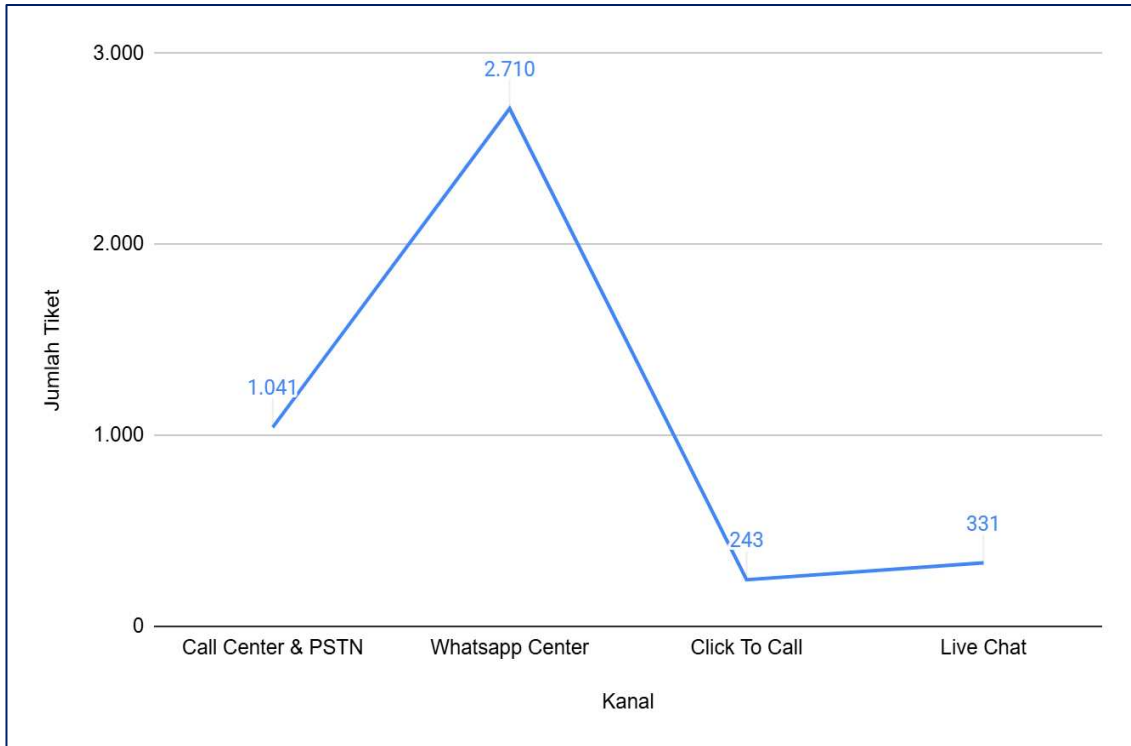
Tabel Jumlah dan Ukuran Video Kegiatan bulan Januari-Desember Tahun 2025



3) Pengelolaan Contact Center

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, Ombudsman RI memiliki layanan kontak Halo Ombudsman melalui jaringan telepon serta layanan pesan. Halo Ombudsman dapat diakses melalui jaringan telepon di nomor 137 dan Public Switch Telephone Network (PSTN) 021-22513737, aplikasi pesan Whatsapp pada nomor 082137373737, serta live chat dan click to call di website www.ombudsman.go.id. Halo Ombudsman pada tahun 2025 dikelola oleh Tim Kerja Hubungan Masyarakat bersama dengan rekanan PT. Global Alih Daya.

Selama tahun 2025, Halo Ombudsman telah melayani 4.325 tiket interaksi dari lima kanal tersebut di atas. Pada grafik di bawah ini terdapat data tiket selama tahun 2025 dari lima kanal (kanal call center dan PSTN digabung). Kanal call center dan PSTN melayani 1.041 tiket, kanal whatsapp center melayani 2.710 tiket, kanal click to call 243 tiket, dan kanal live chat 331 tiket. Kanal whatsapp dan live chat merupakan kanal yang paling banyak digunakan karena kemudahan akses dan berbiaya rendah.



Grafik Jumlah Tiket Halo Call Center Ombudsman Tahun 2025

Seluruh tiket tersebut kemudian dibagi menjadi empat jenis tiket yaitu permintaan informasi/konsultasi, penyampaian laporan, tindak lanjut laporan, dan kelengkapan data (khusus kanal whatsapp center). Tabel di bawah ini merupakan rincian layanan tiket berdasarkan jenis tiket

Tiket Halo Ombudsman Tahun 2025

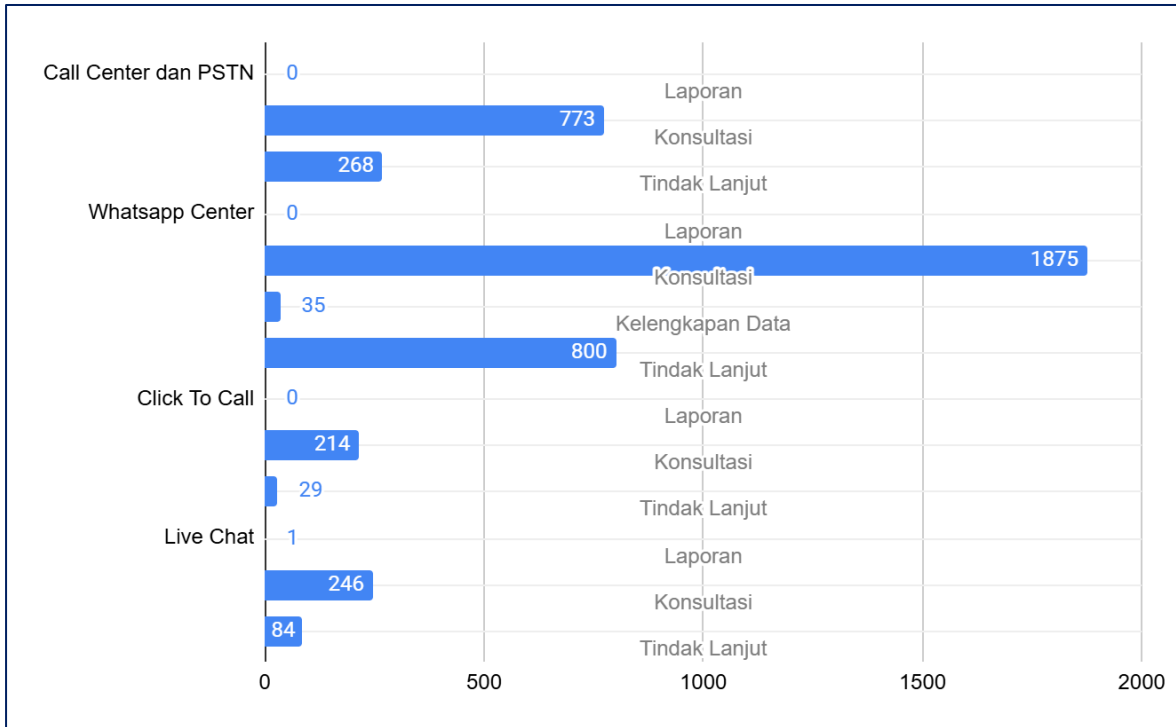
Jenis Tiket	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan-Des
Call Center & PSTN													
Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsultasi	31	51	57	51	92	59	101	62	74	71	59	65	773
Tindak Lanjut	6	13	20	28	10	17	31	31	37	40	31	4	268
Whatsapp Center													
Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jenis Tiket	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan-Des
Konsultasi	81	0	0	301	159	106	227	174	173	225	156	273	1875
Kelengkapan Data	11	0	0	0	0	0	5	4	5	5	4	1	35
Tindak Lanjut	129	0	0	74	30	57	89	100	81	115	57	68	800
Click To Call													
Laporan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsultasi	58	0	0	0	0	5	23	21	22	31	27	27	214
Tindak Lanjut	5	0	0	0	0	7	8	3	1		2	3	29
Live Chat													
Laporan	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Konsultasi	24	37	17	13	5	0	18	17	31	23	34	27	246
Tindak Lanjut	2	4	18	2	3	0	10	9	11	16	6	3	84

Pada tahun 2025, tiket permintaan informasi/konsultasi masih merupakan jumlah tiket paling banyak. Permintaan informasi/konsultasi merupakan pelapor atau masyarakat yang memohon informasi terkait Ombudsman ataupun berkonsultasi mengenai masalah-masalah pelayanan publik yang dialami. Jumlah tiket permintaan konsultasi tahun 2025 adalah 773 pada kanal telepon, 1.875 pada kanal whatsapp, 246 pada kanal live chat, dan 214 pada kanal click to call.

Dari ketiga kanal tersebut, jumlah tiket permintaan informasi paling tinggi terdapat pada kanal whatsapp di mana informasi yang paling banyak ditanyakan adalah substansi kepegawaian, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

Kemudian tiket penyampaian laporan dibuat apabila pelapor sudah memberikan data seperti NIK, bukti kirim email ke Unit Pengaduan Masyarakat, dan bukti lainnya yang menyatakan pelapor memang sudah serius membuat laporan. Tiket penyampaian laporan tahun 2025 berasal dari kanal Live Chat sebanyak satu tiket



Tiket tindak lanjut laporan merupakan tiket yang dibuat jika pelapor atau masyarakat bertanya tentang tindak lanjut atau progress dari laporan yang pernah disampaikan ke Ombudsman baik melalui Halo Ombudsman maupun langsung ke melalui email ke Unit Pengaduan Masyarakat, bersurat atau datang langsung. Tiket tindak lanjut paling tinggi pada tahun 2025 berasal dari kanal Whatsapp yaitu 800 tiket.

Tiket kelengkapan data merupakan tiket yang hanya terdapat pada kanal Whatsapp karena memiliki fitur untuk pengiriman dokumen. Pada tahun 2025, tiket kelengkapan data berjumlah 35 tiket.

4) Pengelolaan Media Sosial

Selama tahun 2025, seluruh kanal media sosial Ombudsman RI memiliki performa yang meningkat. Hal ini disebabkan karena isu-isu yang diangkat dalam media sosial adalah isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik. Adapun kenaikan performa media sosial Ombudsman RI bisa dilihat dari kenaikan jumlah followers (pengikut) per tanggal 31 Desember 2025.

Tabel Total Konten Terpublish dan Total Followers

Bulan	Instagram	Facebook	X	Youtube	TikTok
Januari	27	27	17	2	5
Februari	24	24	18	5	23
Maret	35	35	18	2	28
April	25	25	1	3	8
Mei	19	7	2	5	6
Juni	40	20	27	23	12
Juli	20	20	15	7	23
Agustus	96	42	124	19	45
September	147	57	127	14	58
Oktober	57	57	97	25	60
November	49	49	92	14	49
Desember	39	40	51	17	37

Bulan	Instagram	Facebook	X	Youtube	TikTok
Januari	121.497	48.430	220.403	14.759	10.245
Februari	123.707	48.571	221.090	14881	10.433
Maret	125.008	49.443	221.706	14919	10.555
April	120.931	47.705	213.891	14995	10.228
Mei	125.074	49.553	221.399	15005	10.596
Juni	125.070	49.544	221.572	15222	10.676
Juli	127.936	49.699	221.707	15258	11.028
Agustus	129.765	49.823	222.008	15.650	11.605
September	130.315	49.868	222.392	15.700	12.082
Oktober	130.492	49.927	222.307	15.800	12.265
November	130.993	50.020	221.604	15.800	13.423
Desember	131.159	50.141	221.736	15.900	13.431

Selama tahun 2025, platform media sosial Instagram dan TikTok menunjukkan performa yang paling menonjol. Aktivitas posting di Instagram dan Facebook relatif stabil sepanjang tahun, dengan jumlah posting yang cukup tinggi, terutama pada bulan Agustus dan September. TikTok menunjukkan lonjakan yang signifikan dalam jumlah posting dan pengikut, terutama di bulan-bulan terakhir tahun ini, yang mencerminkan peningkatan fokus pada platform tersebut.

Dalam hal jumlah pengikut, Instagram mengalami pertumbuhan yang konsisten dan mencapai puncaknya di bulan Desember, sementara Facebook mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Platform X (Twitter) menunjukkan kenaikan yang stabil, namun tidak sebesar Instagram atau TikTok, dengan pengikut yang terus bertambah meskipun jumlah posting cenderung fluktuatif. Sedangkan YouTube, meskipun memiliki jumlah pengikut yang lebih rendah, tetap menunjukkan kenaikan pengikut yang positif sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, tahun 2025 menunjukkan bahwa Instagram dan TikTok menjadi fokus utama dalam strategi konten dan peningkatan pengikut, dengan X dan YouTube mengalami pertumbuhan cukup signifikan.

3. Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Website, Desain Grafis dan Pemberitaan

Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Website, Desain Grafis dan Pemberitaan sepanjang Triwulan IV dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

1. Pengelolaan Website Ombudsman RI (www.ombudsman.go.id)

Sepanjang bulan Oktober - Desember 2025, PPID menerima Permohonan Informasi Ruang lingkup pengerjaan yang dilakukan antara lain melakukan pengelolaan konten website ombudsman.go.id, meliputi menu Profil (sekilas Ombudsman, Profil Pimpinan, Visi Misi, Tugas dan Fungsi, Maklumat, Struktur Organisasi, SPIP, e-LHKPN), menu Perwakilan yang terdiri dari Profil Perwakilan, Kabar Perwakilan, Kliping Perwakilan, Siaran Pers Perwakilan, dan Artikel/Opini Perwakilan.

Kemudian menu Informasi yang meliputi Kabar Ombudsman, Kliping Pusat, Siaran Pers Pusat, Pengumuman, Agenda Pimpinan, Agenda Ombudsman, serta Artikel/Opini Pusat. Selain itu juga melakukan pemutakhiran konten menu

produk-produk Ombudsman RI seperti Rekomendasi, Laporan, MoU, dan Pustaka. Menu lain yang juga dikelola ada foto slider, galeri foto dan video.

- **Pemutakhiran Konten Website**

Sepanjang Tahun 2025, konten website yang diperbaharui dan ditayangkan yaitu:

No	Menu Website	Keterangan
1	Pop Up	Pengumuman Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI Masa Jabatan 2025-2031
		Pengumuman Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI Masa Jabatan 2026-2031
		Pengumuman Hasil Tes Objektif dan Pembuatan Makalah Calon Anggota Ombudsman RI Masa Jabatan Tahun 2026-2031
		Pengumuman Layanan daring 1-2 September 2025
		Pengumuman Survei dalam rangka Opini Ombudsman RI
		Pengumuman Penerimaan Laporan Dialihkan Secara Daring
2	Pengumuman	Pengumuman Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI Masa Jabatan 2025-2031
		Pengumuman Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI Masa Jabatan 2025-2031

Adapun untuk konten foto slider, sepanjang Tahunan 2025 terdapat 429 foto slider yang sudah tayang di website Ombudsman RI. Dengan rincian menayangkan Pimpinan Ombudsman RI sebagai berikut:

No	Pimpinan	JUMLAH TAYANG
1	Mokhammad Najih	96
2	Bobby Hamzar Rafinus	39
3	Dadan S Suharmawijaya	25

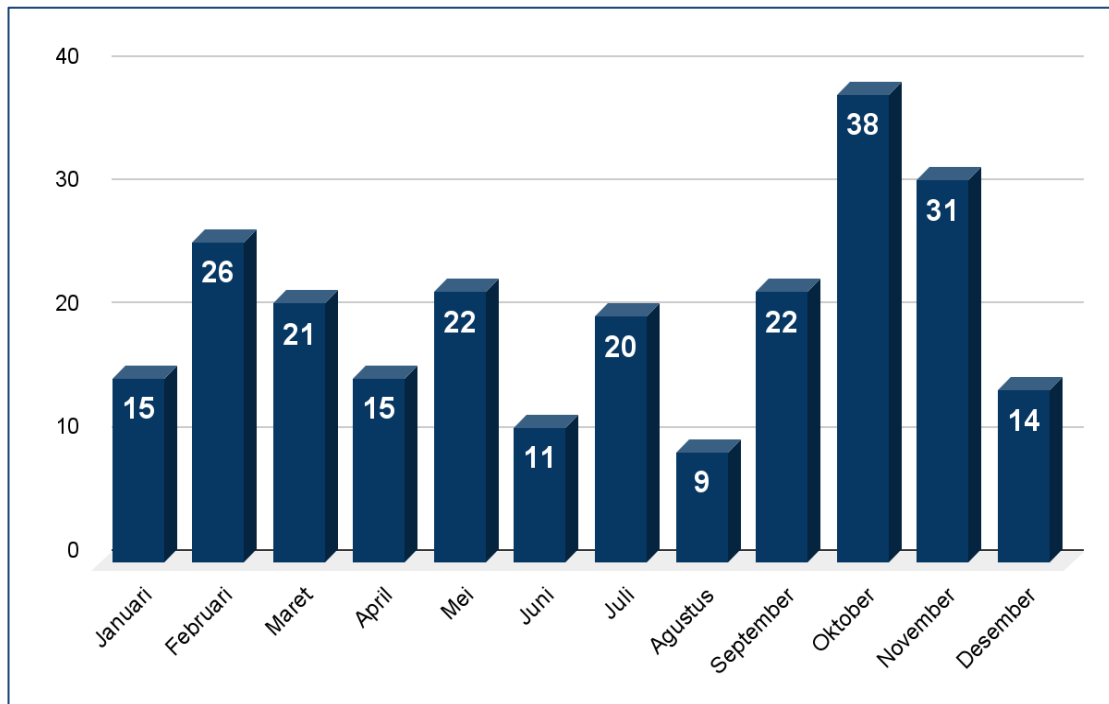
4	Hery Susanto	34
5	Indraza Marzuki Rais	32
6	Jemsly Hutabarat	49
7	Johanes Widijantoro	25
8	Robert Na Endi Jaweng	22
9	Yeka Hendra Fatika	66
10	Suganda Pandapotan P.	36

- **Pemberitaan Pusat di Website**

Pengelolaan pemberitaan pusat di website meliputi Kabar Ombudsman, Siaran Pers Pusat, Kliping Pusat dan Artikel/Opini Pusat.

1) Kabar Ombudsman

Jumlah Kabar Ombudsman yang tayang selama Tahun 2025 sebanyak 244 Berita dengan rincian sebagai berikut:

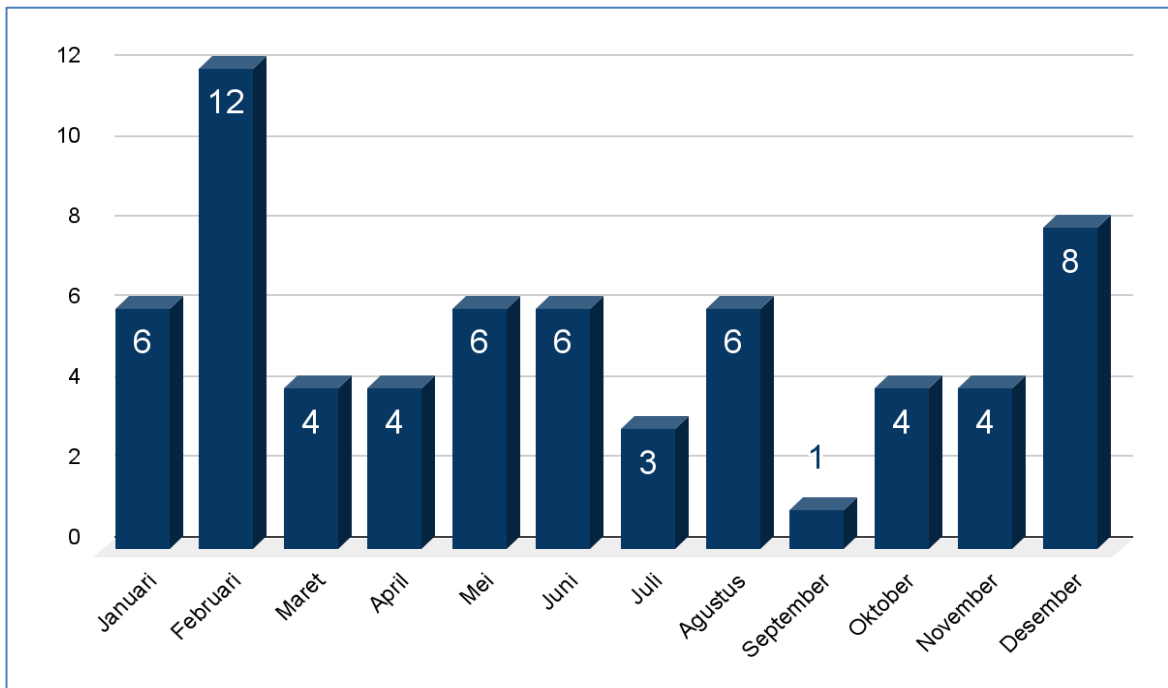


Dari 244 Kabar Ombudsman tersebut, berikut rincian penayangan Pimpinan Ombudsman RI

No	Pimpinan	JUMLAH TAYANG
1	Mokhammad Najih	64
2	Bobby Hamzar Rafinus	16
3	Dadan S Suharmawijaya	14
4	Hery Susanto	30
5	Indraza Marzuki Rais	16
6	Jemsly Hutabarat	37
7	Johanes Widijantoro	17
8	Robert Na Endi Jaweng	7
9	Yeka Hendra Fatika	26
10	Suganda Pandapotan P.	17

2) Siaran Pers Pusat

Siaran Pers Pusat yakni press release yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI terkait isu-isu pelayanan publik tertentu. Sepanjang Tahun 2025, website Ombudsman RI telah menayangkan total 64 siaran pers.

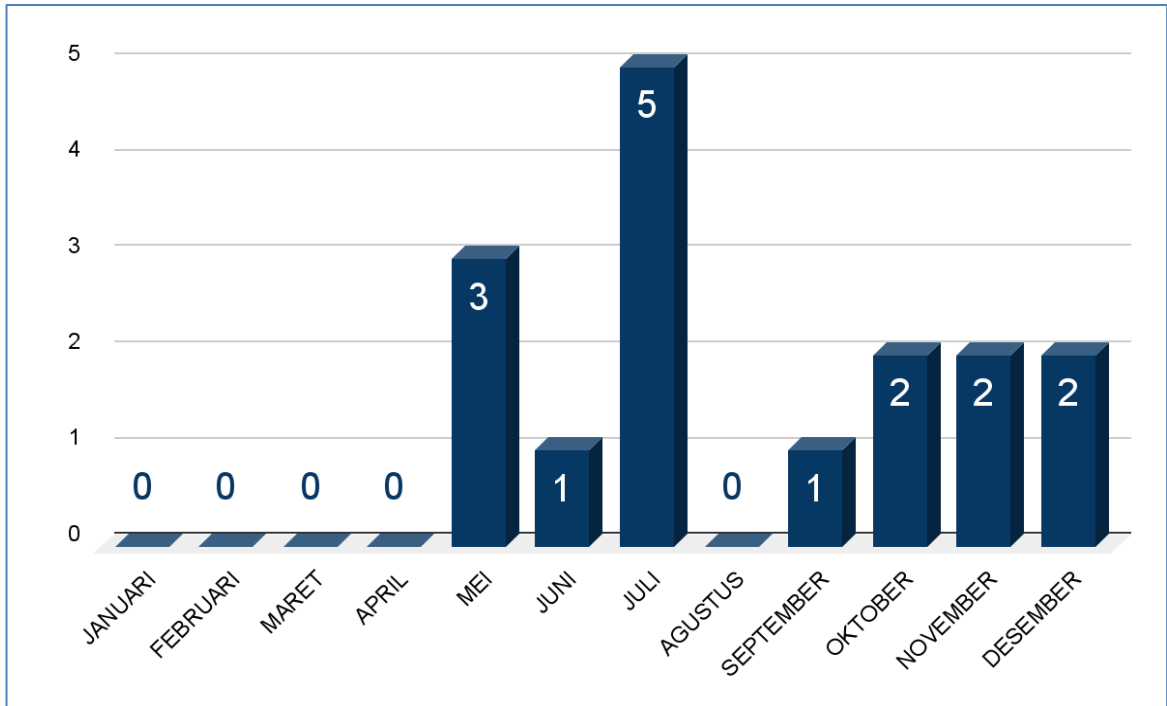


Dari 64 Siaran Pers yang pernah diterbitkan Ombudsman RI, berikut rincian Pimpinan Ombudsman RI yang mengeluarkan siaran pers tersebut:

No	Pimpinan	JUMLAH TAYANG
1	Mokhammad Najih	17
2	Bobby Hamzar Rafinus	2
3	Dadan S Suharmawijaya	1
4	Hery Susanto	2
5	Indraza Marzuki Rais	3
6	Jemsly Hutabarat	1
7	Johanes Widijantoro	6
8	Robert Na Endi Jaweng	6
9	Yeka Hendra Fatika	26

3) Artikel/Opini Pusat

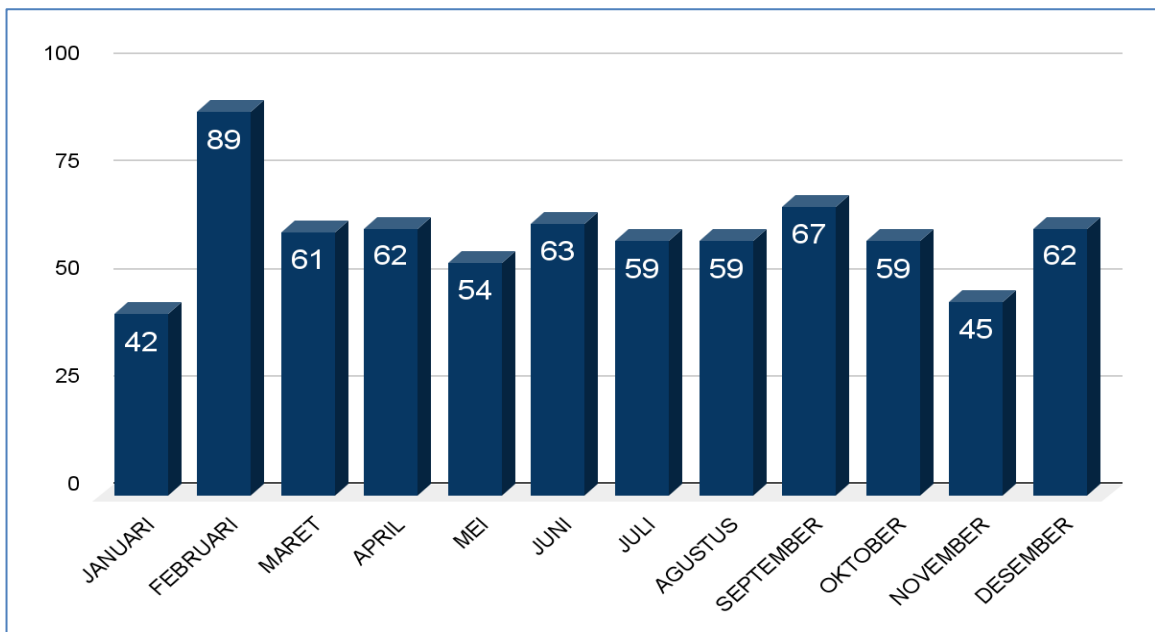
Artikel/Opini Pusat yakni artikel yang berisi pendapat atau opini yang ditulis oleh Insan Ombudsman RI di Kantor Pusat terkait isu-isu pelayanan publik tertentu. Namun sepanjang Tahun 2025, terdapat 16 Artikel/Opini Pusat yang tayang di website Ombudsman RI. Dengan rincian penulis sebagai berikut:



- **Pemberitaan Perwakilan di Website**

- 1) Kabar Perwakilan Ombudsman RI

Jumlah Kabar Perwakilan yang terpublish selama Tahun 2025 adalah sebanyak 722 berita dengan rincian sebagai berikut:

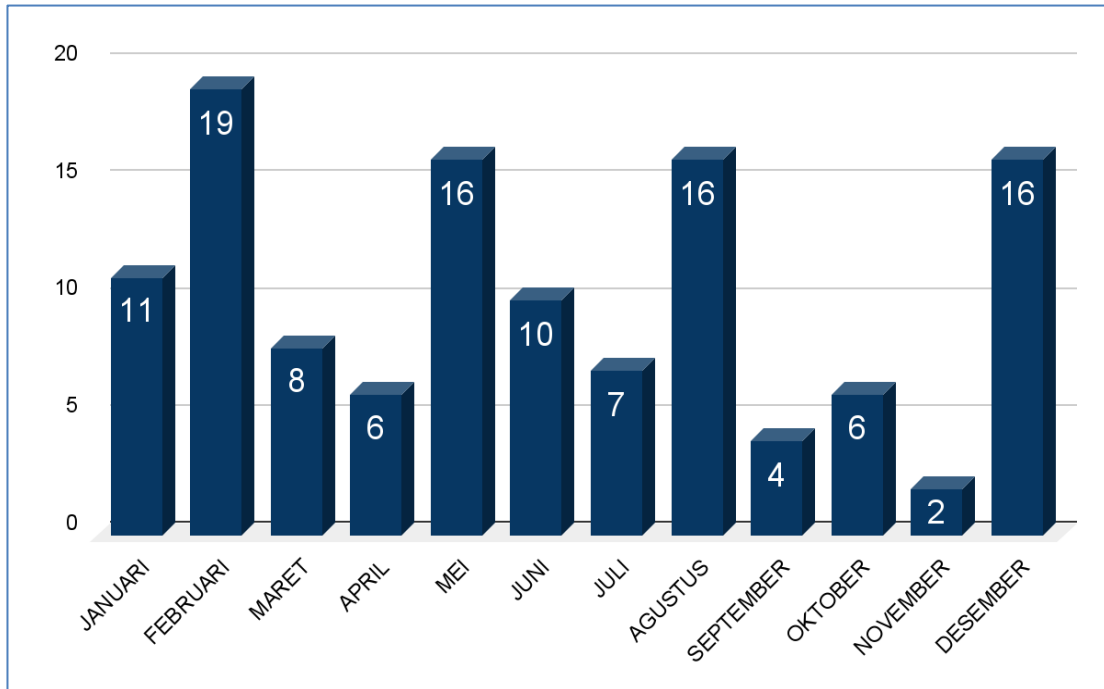


Adapun rincian di tiap Kantor Perwakilan sebagai berikut:

No	Perwakilan	Jumlah
1	PAPUA BARAT	123
2	NTT	77
3	KALIMANTAN SELATAN	70
4	KALIMANTAN BARAT	60
5	SULAWESI SELATAN	60
6	BENGKULU	42
7	GORONTALO	32
8	KALIMANTAN TIMUR	30
9	KEP. BANGKA BELITUNG	28
10	MALUKU	23
11	SULAWESI TENGGARA	21
12	SUMATERA SELATAN	20
13	PAPUA	20
14	DI YOGYAKARTA	19
15	SUMATERA UTARA	19
16	SULAWESI BARAT	13
17	KEP. RIAU	12
18	JAMBI	11
19	JAWA TENGAH	8
20	KALIMANTAN TENGAH	6
21	NTB	5
22	BALI	5
23	LAMPUNG	4
24	SUMATERA BARAT	3
25	MALUKU UTARA	3
26	JAKARTA RAYA	3
27	RIAU	2
28	JAWA TIMUR	1
29	JAWA BARAT	1
30	SULAWESI TENGAH	1
31	ACEH	0
32	BANTEN	0
33	KALIMANTAN UTARA	0
34	SULAWESI UTARA	0
JUMLAH PERBULAN		722

2) Opini Perwakilan Ombudsman RI

Opini Perwakilan yakni artikel yang berisi pendapat atau opini yang ditulis oleh Insan Ombudsman RI terkait isu-isu pelayanan publik tertentu. Sepanjang Tahun 2025, website Ombudsman RI menayangkan artikel Opini Perwakilan sebanyak 121 opini dengan detail sebagai berikut:



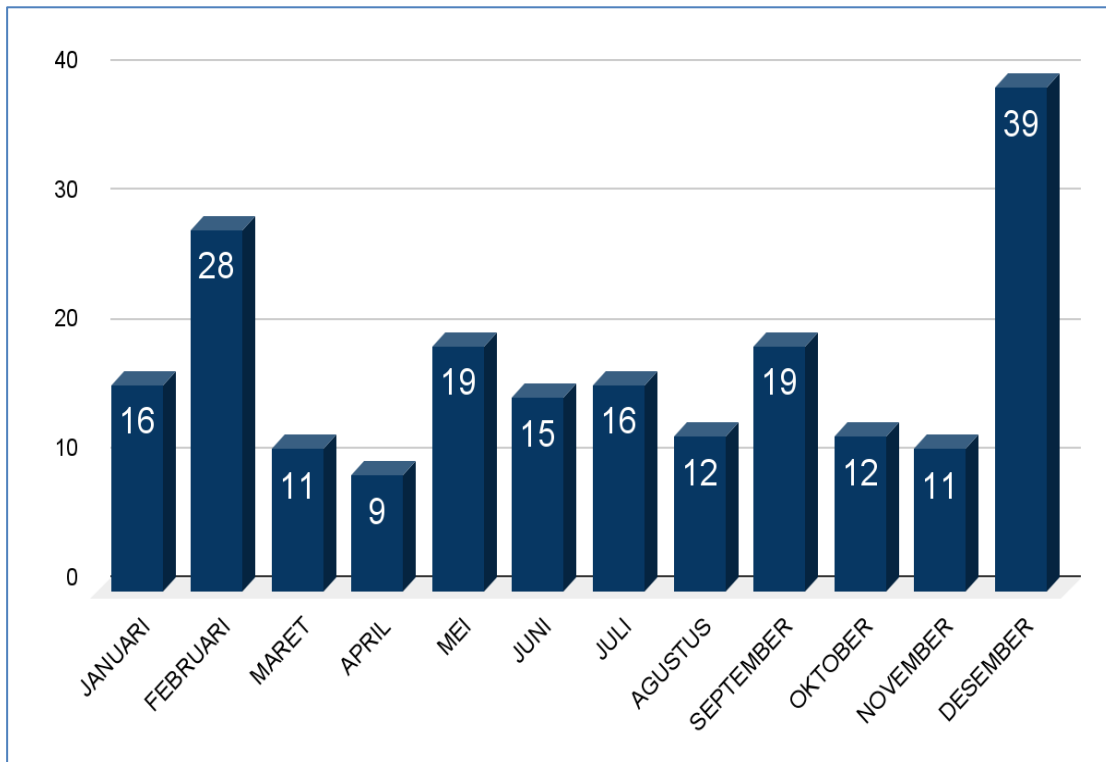
Dengan rincian penulis sebagai berikut:

No	Perwakilan	Jumlah
1	KALIMANTAN SELATAN	31
2	JAWA BARAT	16
3	KEP. BANGKA BELITUNG	15
4	KEP. RIAU	9
5	KALIMANTAN BARAT	8
6	PAPUA	7
7	KALIMANTAN TENGAH	5
8	SULAWESI SELATAN	4
9	MALUKU	4

10	NTT	4
11	NTB	3
12	LAMPUNG	2
13	SULAWESI TENGAH	2
14	BENGKULU	2
15	SULAWESI UTARA	2
16	SUMATERA BARAT	1
17	SUMATERA SELATAN	1
18	JAWA TENGAH	1
19	DI YOGYAKARTA	1
20	KALIMANTAN UTARA	1
21	MALUKU UTARA	1
22	ACEH	0
23	SUMATERA UTARA	0
24	RIAU	0
25	JAMBI	0
26	JAKARTA RAYA	0
27	JAWA TIMUR	0
28	BANTEN	0
29	BALI	0
30	KALIMANTAN TIMUR	0
31	SULAWESI TENGGARA	1
32	GORONTALO	0
33	SULAWESI BARAT	0
34	PAPUA BARAT	0
JUMLAH PERBULAN		121

- 3) Siaran Pers Perwakilan Ombudsman RI
 Siaran Pers Perwakilan yakni press release yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman RI terkait isu-isu pelayanan publik

tertentu. Sepanjang Tahun 2025, website Ombudsman RI telah menayangkan total 198 Siaran Pers Perwakilan.



Dengan rincian sebagai berikut:

No	Perwakilan	Jumlah
1	KEP. BANGKA BELITUNG	40
2	JAWA TENGAH	29
3	KEP. RIAU	25
4	ACEH	16
5	GORONTALO	14
6	JAMBI	10
7	BANTEN	9
8	KALIMANTAN TIMUR	8
9	SULAWESI TENGAH	8
10	KALIMANTAN SELATAN	7
11	SULAWESI SELATAN	6

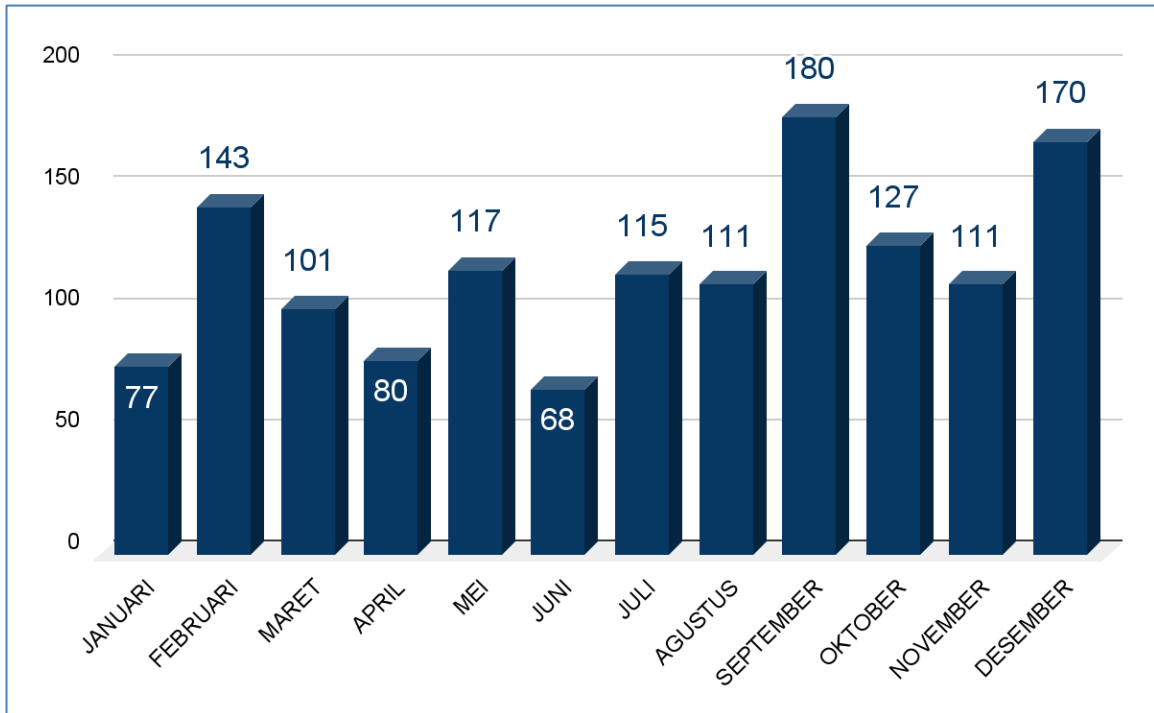
12	DI YOGYAKARTA	6
13	PAPUA	5
14	SUMATERA SELATAN	3
15	LAMPUNG	3
16	SUMATERA UTARA	2
17	BENGKULU	2
18	MALUKU	2
19	SUMATERA BARAT	1
20	JAWA BARAT	1
21	MALUKU UTARA	1
22	RIAU	0
23	JAKARTA RAYA	0
24	JAWA TIMUR	0
25	BALI	0
26	NTB	0
27	NTT	0
28	KALIMANTAN BARAT	0
29	KALIMANTAN TENGAH	0
30	KALIMANTAN UTARA	0
31	SULAWESI UTARA	0
32	SULAWESI TENGGARA	0
33	SULAWESI BARAT	0
34	PAPUA BARAT	0
JUMLAH PERBULAN		198

4) Kliping Perwakilan Ombudsman RI

Sebagai upaya untuk menyimpan penelusuran (*tracking*) berita terkait Ombudsman RI, Perwakilan Ombudsman RI melakukan kliping berita. Kliping ini berisi berita-berita terkait dengan Perwakilan Ombudsman RI yang pada umumnya diambil dari berbagai media daring, yang

selanjutnya dikutip dan disalin seluruhnya sebagai hasil kliping berita untuk diunggah ke website Ombudsman RI.

Adapun rincian kliping berita yang telah dilakukan Perwakilan Ombudsman RI Tahun 2025 berjumlah 1400 berita, dengan rincian antara lain:



Dengan rincian sebagai berikut:

No	Perwakilan	Jumlah
1	KEP. BANGKA BELITUNG	40
2	JAWA TENGAH	29
3	KEP. RIAU	25
4	ACEH	16
5	GORONTALO	14
6	JAMBI	10
7	BANTEN	9
8	KALIMANTAN TIMUR	8

9	SULAWESI TENGAH	8
10	KALIMANTAN SELATAN	7
11	SULAWESI SELATAN	6
12	DI YOGYAKARTA	6
13	PAPUA	5
14	SUMATERA SELATAN	3
15	LAMPUNG	3
16	SUMATERA UTARA	2
17	BENGGKULU	2
18	MALUKU	2
19	SUMATERA BARAT	1
20	JAWA BARAT	1
21	MALUKU UTARA	1
22	RIAU	0
23	JAKARTA RAYA	0
24	JAWA TIMUR	0
25	BALI	0
26	NTB	0
27	NTT	0
28	KALIMANTAN BARAT	0
29	KALIMANTAN TENGAH	0
30	KALIMANTAN UTARA	0
31	SULAWESI UTARA	0
32	SULAWESI TENGGARA	0
33	SULAWESI BARAT	0
34	PAPUA BARAT	0
JUMLAH PERBULAN		1400

2. Pengerjaan Desain Grafis

Pengerjaan desain grafis yang telah dikerjakan sepanjang Tahunan total sebanyak desain termasuk flyer, poster, backdrop LED, dan berbagai materi presentasi lainnya.

No	Jenis Desain	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Flyer	16	15	20	18	69
2	Backdrop	9	25	9	18	61
3	Poster/ Pengumuman	7	11	15	2	35
4	Spanduk	1	-	-	-	1
5	Twibbon	2	1	1	-	4
6	Laporan	2	1	-	1	4
7	Logo	1	-	-	-	1
8	Cover	2	2	2	2	8
9	Virtual Background	3	-	-	-	3
10	Lainnya	6	8	-	-	14
JUMLAH		49	63	47	41	200

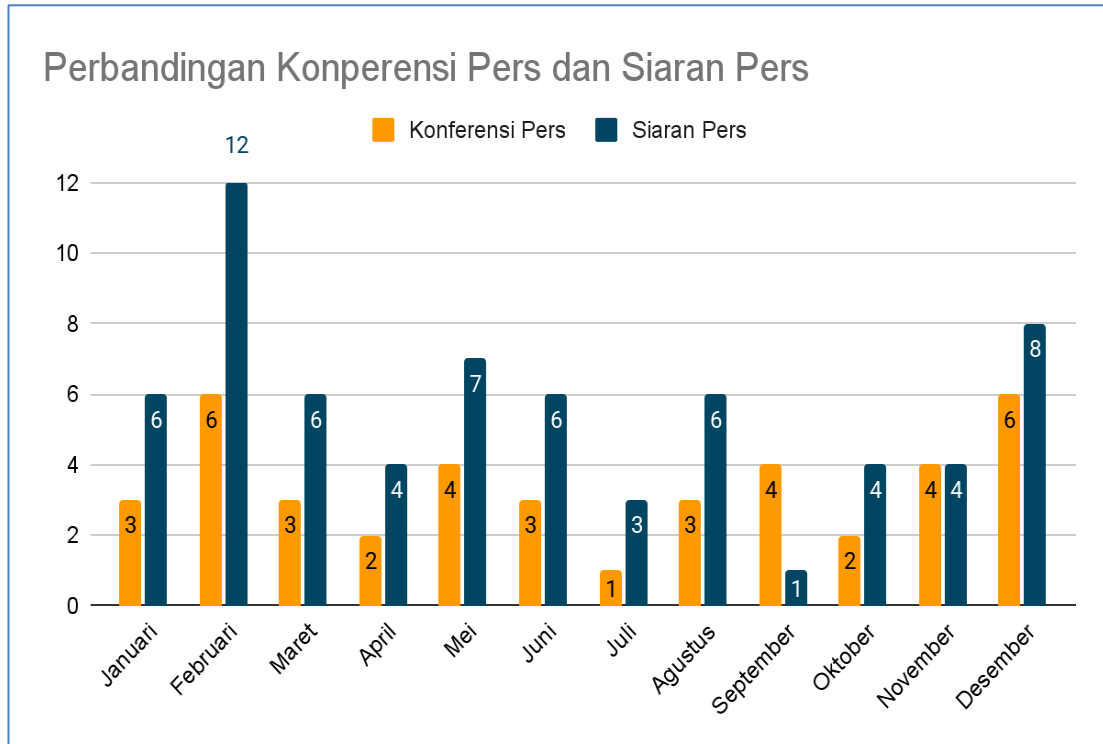
No	Jenis Desain	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Backdrop LED	2	2	1	18	23
2	Video Kegiatan	7	9	9	4	29
3	Bumper Acara	5	11	10	35	61
JUMLAH		14	22	20	57	113

3. Layanan Hubungan antar Lembaga (Tim Kerja Publikasi dan Kehumasan)

Media Relations

Tim Publikasi Kehumasan mengundang kontak Media Massa untuk hadir dalam konferensi pers Ombudsman RI. Selain itu juga menyiapkan tempat penyelenggaraan, serta materi yang akan disampaikan baik itu berupa Siaran Pers maupun bahan paparan untuk media massa.

Konferensi Pers maupun acara yang mengundang media sebanyak 41 (empat puluh satu) kali selama kurun waktu 1 Januari-31 Desember 2025.



Grafik Perbandingan Konferensi Pers dan Siaran Pers Periode Januari - Desember 2025

Tanggal	Judul Konferensi Pers	Viewer Youtube	Kode Pimpinan
16/01/2025	Konferensi Pers “Capaian Penyelesaian Laporan Ombudsman RI Tahap Resolusi dan Monitoring Tahun 2025”	187	MN
21/01/2025	Konferensi Pers: Catatan Pengawasan Pelayanan Publik Bidang Kemaritiman dan Investasi 2025 dan Proyeksi 2025 Ombudsman RI	190	HS
22/01/2025	Coffee Morning Ombudsman RI: Hasil Pengawasan Pelayanan Publik 2025	192	MN
03/02/2025	Konferensi Pers Hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Ombudsman RI Permasalahan Pagar Laut di Kabupaten Tangerang Banten	222	YHF
06/02/2025	Launching Dashboard Monitoring Penyelesaian Laporan Masyarakat, Sosialisasi Fitur Tracking Laporan		MN

Tanggal	Judul Konferensi Pers	Viewer Youtube	Kode Pimpinan
	Masyarakat dan Website Ombudsman Versi Bahasa Inggris, serta Logo dan Tagline 25 Tahun Ombudsman RI		
12/02/2025	Penyampaian 2 Rekomendasi Ombudsman RI kepada Pemprov Sumatera Selatan dan BP Batam	766	BHR
13/02/2025	Diskusi Publik: Transformasi Layanan Publik Digital yang Merata: Implementasi Strategis Permendagri No. 7 Tahun 2025		HS
24/02/2025	Penandatanganan MoU antara Ombudsman RI dengan Ombudsman Selandia Baru.	74	MN
26/02/2025	Diskusi Publik Membangun Ekosistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Humanis dan Modern	328	YHF
11/03/2025	Doorstop: Pertemuan antara Pimpinan Ombudsman dengan Plt. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga terkait Tata Kelola Pengadaan BBM untuk Publik	-	YHF
13/03/2025	Doorstop: Pimpinan Ombudsman Terima Audiensi Perwakilan CASN TA 2025 terkait Penundaan TMT		RNE
21/03/2025	Doorstop: Pimpinan Ombudsman Bertemu Menteri Perdagangan Bahas Pengawasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Minyak Goreng terkait Permasalahan Kualitas/Kuantitas Peredaran Minyak Goreng Kemasan yang Tidak Sesuai Volume	-	YHF
29/04/2025	Konferensi Pers: Uji Petik tentang Pencegahan Maladministrasi pada Rencana Implementasi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sebagai Titik Serah Penyaluran Pupuk Bersubsidi	706	YHF
30/04/2025	Konferensi Pers: Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tentang Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	84	MN
07/05/2025	Diskusi Publik Keasistenan Utama VI "Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal: Dukungan atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun	428	RNEJ

Tanggal	Judul Konferensi Pers	Viewer Youtube	Kode Pimpinan
	2025”		
08/05/2025	Diskusi Publik “Pencegahan Maladministrasi dan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Sektor Perbankan”	518	YHF
14/05/2025	Doorstop dengan BGN terkait pendalaman informasi terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)	257	YHF
22/05/2025	Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2025: Meneguhkan Pengawasan Memajukan Pencegahan Maladministrasi	276	MN
12/06/2025	Dikusi Tematik dengan tema “Problematika Koperasi Desa Merah Putih: Tantangan dan Dampak terhadap Pemerintahan Desa dan Keberlanjutan KUD dan BUMDes”	8,889	DDS
24/06/2025	Penyerahan Rekomendasi Ombudsman RI terkait Maladministrasi Atas Belum Dibayarkannya Insentif Kesehatan Tahun 2021–2022 oleh Walikota Semarang	307	MN
25/06/2025	Konferensi Pers Bersama (Joint Press Conference) Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan NoJusticeInPain: Mengakhiri Penyiksaan sebagai Prasyarat Keadilan	-	MN, JW
11/07/2025	Konferensi Pers Pertemuan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI masa Jabatan Tahun 2026-2031	174	MN, BHR
07/08/2025	Penyampaian Hasil Pengawasan dan Forum Publik “Seleksi CPNS 2025-2025: Evaluasi Berbasis Hasil Pengawasan Ombudsman RI”	1,132	MN, RNE
08/08/2025	Konferensi Pers Mengurai Masalah Layanan Publik dalam Pusaran Polemik Beras Oplosan	-	YHF
26/08/2025	Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional	1,098	YHF
03/09/2025	Diskusi Publik “Menjamin Hak Publik atas Beras Berkualitas dan Terjangkau”	278	YHF
25/09/2025	Diskusi Publik "Evaluasi Tata Kelola Subsidi Pupuk Saat	356	YHF

Tanggal	Judul Konferensi Pers	Viewer Youtube	Kode Pimpinan
	Ini"		
30/09/2025	Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	487	YHF
30/09/2025	Sosialisasi Pengawasan Pelayanan Melalui Transformasi Digital Mendukung Inovasi Industri Pangan	2.089	YHF
02/10/2025	"Konferensi Pers Penyampaian Hasil Kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Pengawasan atas Sistem Merit ASN dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ombudsman RI."	210	RNE
23/10/2025	Launching Buku "Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan."	857	YHF
10/11/2025	Pembukaan Rapat Kerja Nasional II Ombudsman RI Tahun 2025 dan Penandatanganan MoU Ombudsman RI dengan Pemkot Malang, Pemkot Batu dan Pemkab Malang	-	MN
18/11/2025	Penandatanganan MoU dan PKS antara Ombudsman RI dengan BPJD Kesehatan Serta Penyampaian Laporan Hasil Reviu Sistemik dan Diskusi Publik Optimalisasi Pelayanan Kesehatan di RS Pratama	-	RNE
21/11/2025	Diskusi Publik dan Penyerahan Laporan Hasil Analisis Kajian Sistemik "Integrasi Sistem Pengawasan Perlintasan Orang Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang"	140	MN, JW
27/11/2025	Diskusi Publik dan Penyerahan Laporan Hasil Analisis Kajian Sistemik "Layanan Pemeriksaan Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional dan Penerapan All Indonesia	279	BHR, JH
05/12/2025	Diskusi Tematik bertajuk: "Reformasi POLRI dan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat"	569	MN, JW
09/12/2025	Focus Group Discussion (FGD) dan Peluncuran Buku "Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik	279	6
10/12/2025	Penandatanganan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan, penyampaian hasil investigasi dan diskusi publik Setelah 10 Tahun BPJS Ketenagakerjaan.	225	RNE

Tanggal	Judul Konferensi Pers	Viewer Youtube	Kode Pimpinan
12/12/2025	Konferensi Pers Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Penanggulangan Kebencanaan, Pangan, Energi, dan Pertanian di Lokasi Bencana Provinsi Sumatera Barat.	84	YHF
17/12/2025	Penyampaian Laporan Hasil Kajian Sistemik "Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Trap	954	HS
18/12/2025	Catatan Akhir Tahun Ombudsman RI 2025 Sektor Perekonomian 1 "Mengawal Hak Masyarakat: Dari Pengaduan, Penyelamatan, hingga Perbaikan Sistemik Tata Kelola Kebijakan".	198	YHF

Tabel Jumlah Konferensi Pers Periode Januari-Desember 2025

Selain itu Tim Publikasi Kehumasan juga telah mempublikasikan 65 (enam puluh lima) Siaran Pers terkait kegiatan Ombudsman RI. Dari 65 siaran pers tersebut, 64 (enam puluh empat) dokumen siaran pers internal dan 1 (satu) dokumen siaran pers bersama dengan Kementerian/Lembaga lainnya).

Nomor SP	Tanggal SP	Judul Siaran Pers
01/HM.01/I/2025	09/01/2025	Ombudsman RI: Penggusuran di Tembesi Tower Batam Melukai Keadilan Masyarakat
02/HM.01/I/2025	15/01/2025	Ombudsman Desak KKP Bongkar Pagar Laut Ilegal di Banten
03/HM.01/I/2025	16/01/2025	Sepanjang 2024, Ombudsman RI Memberi Manfaat kepada Masyarakat Sebesar Rp 333,9 Miliar Melalui Tahap Resolusi dan Monitoring
04/HM.01/I/2025	16/01/2025	Memasuki Tahap Akhir Seleksi CASN TA 2024, Ombudsman RI: Perlu Evaluasi Komprehensif
05/HM.01/I/2025	21/01/2025	Ombudsman RI Beri Catatan Pelayanan Publik di Pertambangan, Perhubungan, Kelautan-Perikanan dan Pemandangan IKN
06/HM.01/I/2025	22/01/2025	Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat

Nomor SP	Tanggal SP	Judul Siaran Pers
07/HM.01/II/2025	01/02/2025	Ombudsman RI Soroti Potensi Maladministrasi pada Pending Claim BPJS Kesehatan, Ini Lima Poin Perbaikannya
08/HM.01/II/2025	03/02/2025	Ombudsman: Tuntaskan Pembongkaran Pagar Laut
09/HM.01/II/2025	04/02/2025	Ombudsman RI Minta Pemerintah Libatkan Pengecer Dalam Rantai Pasok LPG 3 Kilogram
10/HM.01/II/2025	06/02/2025	Ombudsman RI Luncurkan Dashboard Monitoring, Fitur Tracking Laporan Masyarakat, dan Website Versi Bahasa Inggris
11/HM.01/II/2025	11/02/2025	Masalah Penyaluran LPG 3 Kg: Ombudsman RI Soroti Ketidaktepatan Sasaran dan Pengawasan
12/HM.01/II/2025	12/02/2025	Banyak Dikeluhkan Pengguna, Ombudsman Ingatkan Potensi Maladministrasi pada Coretax
13/HM.01/II/2025	12/02/2025	Ombudsman RI Terbitkan Rekomendasi Terkait Maladministrasi Legalitas Lahan di Tembesi Tower, Batam
14/HM.01/II/2025	12/02/2025	Terbukti Maladministrasi PPDB Jalur Prestasi, Ombudsman RI Terbitkan Rekomendasi
15/HM.01/II/2025	13/02/2025	Ombudsman RI: Efisiensi Anggaran Menjadi Tantangan, Pengawasan Pelayanan Publik Jalan Terus
16/HM.01/II/2025	24/02/2025	Ombudsman Selandia Baru dan Ombudsman Indonesia menandatangani Pengaturan Bilateral
17/HM.01/II/2025	25/02/2025	Identifikasi Tantangan Modern, Ombudsman RI Diskusi Pelayanan Publik Bersama DPR dan Perguruan Tinggi
18/HM.01/II/2025	28/02/2025	Ombudsman RI Minta Pertamina Beri Kepastian Penyediaan BBM untuk Masyarakat
19/HM.01/III/2025	04/03/2025	Ombudsman RI Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Seorang Insan Ombudsman
20/HM.01/III/2025	11/03/2025	Ombudsman RI Bertemu dengan Pertamina Patra Niaga, Tekankan Kepastian Hukum dan Transparansi dalam Pengadaan BBM
21/HM.01/III/2025	11/03/2025	Pengangkatan CASN TA 2024 Tertunda, Ombudsman

Nomor SP	Tanggal SP	Judul Siaran Pers
		RI Buka Suara
22/HM.01/III/2025	14/03/2025	Ombudsman RI Dorong Inovasi dan Keberlanjutan Makan Bergizi Gratis
23/HM.01/III/2025	21/03/2025	Bertemu Menteri Perdagangan, Ombudsman RI Sampaikan Temuan Uji Petik Pengawasan Minyakita
25/HM.01/IV/2025	16/04/2025	Harga Ayam Hidup Anjlok Pascalebaran, Ombudsman RI Minta Pemerintah Segera Intervensi
26/HM.01/IV/2025	27/04/2025	Kawal Jalannya UTBK-SNBT 2025, Ombudsman RI Buka Posko Pengaduan Online
27/HM.01/IV/2025	29/04/2025	Ombudsman RI Soroti Kesiapan Gapoktan Sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi
28/HM.01/IV/2025	30/04/2025	Terbukti Maladministrasi, Pemkab Raja Ampat Terima Rekomendasi Ombudsman RI
30/HM.01/V/2025	08/05/2025	Kasus Pinjol Kian Marak, Ombudsman RI Tegaskan Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Korban
31/HM.01/V/2025	09/05/2025	Masyarakat Tidak Boleh Dirugikan, Ombudsman RI Kawal Penggusuran Sempadan Irigasi Curug Agung Subang
32/HM.01/V/2025	14/05/2025	Ombudsman RI Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
33/HM.01/V/2025	20/05/2025	Ombudsman RI dan Wali Kota Probolinggo Selesaikan Masalah Bangunan Eks Papelrada melalui Pencabutan SK Penguasaan Bangunan
34/HM.01/V/2025	22/05/2025	Luncurkan Laporan Tahunan 2024, Ombudsman RI Tekankan Urgensi Penguatan Kelembagaan
35/HM.01/V/2025	28/05/2025	Ombudsman Akan Surati Menteri ATR/BPN Minta Investigasi Persoalan Hak Atas Tanah di Kampung Baru Dadap
36/HM.01/VI/2025	10/06/2025	Ombudsman RI Soroti Potensi Maladministrasi pada Penolakan Pasien BPJS Kesehatan, Ini Poin Perbaikannya
37/HM.01/VI/2025	12/06/2025	Ombudsman RI Minta Pemerintah Pastikan Pembentukan Koperasi Desa Berdampak Pada Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat

Nomor SP	Tanggal SP	Judul Siaran Pers
38/HM.01/VI/2025	13/06/2025	Ombudsman RI Dorong Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola DAK Fisik Sektor Pendidikan
039/HM.01/VI/2025	16/06/2025	Awasi SPMB, Ombudsman Ingatkan Pungutan Di Luar Ketentuan Harus Dikembalikan
040/HM.01/VI/2025	24/06/2025	Insentif 2.047 Nakes Belum Dibayarkan, Ombudsman RI Sampaikan Rekomendasi kepada Pemkot Semarang
Rilis Bersama 041/HM.01/VI/2025	25/06/2025	(tagar)NoJusticeInPain: Mengakhiri Penyiksaan sebagai Prasyarat Keadilan
042/HM.01/VII/2025	11/07/2025	Ombudsman RI Terima Audiensi Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2026–2031
043/HM.01/VII/2025	15/07/2025	Ombudsman RI Apresiasi Program Pembinaan WBP di Lapas Sukamiskin, Dorong Dukungan Lintas Kementerian untuk Ketahanan Pangan
044/HM.01/VII/2025	18/07/2025	Ombudsman RI Dorong Penguatan Keamanan Dokumen Nasabah Perbankan
045/HM.01/VIII/2025	08/08/2025	Ombudsman RI Dorong Pemerintah Utamakan Ketersediaan Pangan dan Segera Lepas Stok Beras Bulog
046/HM.01/VIII/2025	11/08/2025	Ombudsman RI Sidak Pasar Induk Cipinang: Omzet Pedagang Turun hingga 20-50% Imbas Polemik Beras 'Oplosan'
47/HM.01/VIII/2025	15/08/2025	Korban Kian Bertambah, Ombudsman RI Minta Pemerintah Segera Tetapkan Rencana Aksi Nasional TPPO 2025-2029
48/HM.01/VIII/2025	26/08/2025	Ombudsman RI Dorong Konsistensi Kebijakan Perberasan untuk Jamin Akses Pangan
49/HM.01/VIII/2025	29/08/2025	Tindakan Represif Aparat dalam Pengamanan Aksi: Ombudsman RI Tuntut Evaluasi Menyeluruh
50/HM.01/VIII/2026	31/08/2025	Ombudsman RI Minta Presiden Akhiri Tindakan Represif Aparat dan Desak Transparansi DPR
51/HM.01/IX/2027	03/09/2025	Ombudsman RI: Harga Beras Mahal Bukan Karena Kurangnya Stok, Tetapi Tata Kelola yang Buruk
52/HM.01/X/2025	01/10/2025	Ombudsman RI Temukan Empat Potensi

Nomor SP	Tanggal SP	Judul Siaran Pers
		Maladministrasi dalam Program Makan Bergizi Gratis
53/HM.01/X/2025	13/10/2025	Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Kembalinya Marwah Jaminan Sosial Sebagai Pelayanan Publik
54/HM.01/X/2025	23/10/2025	Luncurkan Buku Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan, Ombudsman RI Dorong Pembentukan Badan Sawit Nasional
55/HM.01/X/2025	29/10/2025	Ombudsman RI Sampaikan Temuan Pelaksanaan SPMB 2025, Dorong Pemerataan dan Transparansi
56/HM.01/XI/2025	11/11/2025	Rakernas II Ombudsman RI 2025 Dibuka, Dorong Perubahan Budaya Pelayanan Publik
57/HM.01/XI/2025	21/11/2025	Ombudsman RI Dorong Integrasi Sistem Pengawasan Perlintasan Orang untuk Cegah TPPO
58/HM.01/XI/2025	21/11/2025	Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi, Ombudsman RI: Perbaiki Layanan Jadi Kunci
58/HM.01/XI/2025	27/11/2025	Ombudsman RI Dorong Digitalisasi dan Integrasi Lintas Sektor dalam Layanan Keimigrasian dan Aplikasi All Indonesia Bandara Internasional
059/HM.01/XII/2025	04/12/2025	Ombudsman RI Tekankan Urgensi Penanganan Luar Biasa untuk Banjir Bandang Sumatera
60/HM.01/XII/2025	05/12/2025	Ombudsman RI Minta Dirjen Pendis Kemenag Perbaiki Tata Kelola PPDB Madrasah 2025
61/HM.01/XII/2026	05/12/2025	Ombudsman RI Dorong Reformasi Polri yang Menyeluruh dan Terukur
062/HM.01/XII/2025	08/12/2025	Ombudsman RI Minta Pemerintah dan PLN Pastikan Akurasi Informasi Pemulihan Listrik di Aceh
063/HM.01/XII/2025	09/12/2025	Perkuat Pengawasan Internal, Ombudsman RI Luncurkan Buku 'Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik'
064/HM.01/XII/2025	12/12/2025	Ombudsman RI Soroti Ketidaksinkronan Informasi dan Lambatnya Pemulihan Layanan Dasar dalam Respons Bencana
065/HM.01/XII/2025	17/12/2025	Ombudsman RI Tekankan Penguatan Tata Kelola Investasi dan Hilirisasi Menuju Indonesia Bebas dari Middle Income Trap

Nomor SP	Tanggal SP	Judul Siaran Pers
066/HM.01/XII/2025	18/12/2025	Ombudsman RI Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp1,603 Triliun 5 Tahun Terakhir
60/HM.01/XII/2025	05/12/2025	Ombudsman RI Minta Dirjen Pendis Kemenag Perbaiki Tata Kelola PPDB Madrasah 2025
61/HM.01/XII/2026	05/12/2025	Ombudsman RI Dorong Reformasi Polri yang Menyeluruh dan Terukur
062/HM.01/XII/2025	08/12/2025	Ombudsman RI Minta Pemerintah dan PLN Pastikan Akurasi Informasi Pemulihan Listrik di Aceh
063/HM.01/XII/2025	09/12/2025	Perkuat Pengawasan Internal, Ombudsman RI Luncurkan Buku 'Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik'
064/HM.01/XII/2025	12/12/2025	Ombudsman RI Soroti Ketidaksinkronan Informasi dan Lambatnya Pemulihan Layanan Dasar dalam Respons Bencana
065/HM.01/XII/2025	17/12/2025	Ombudsman RI Tekankan Penguatan Tata Kelola Investasi dan Hilirisasi Menuju Indonesia Bebas dari Middle Income Trap
066/HM.01/XII/2025	18/12/2025	Ombudsman RI Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp1,603 Triliun 5 Tahun Terakhir

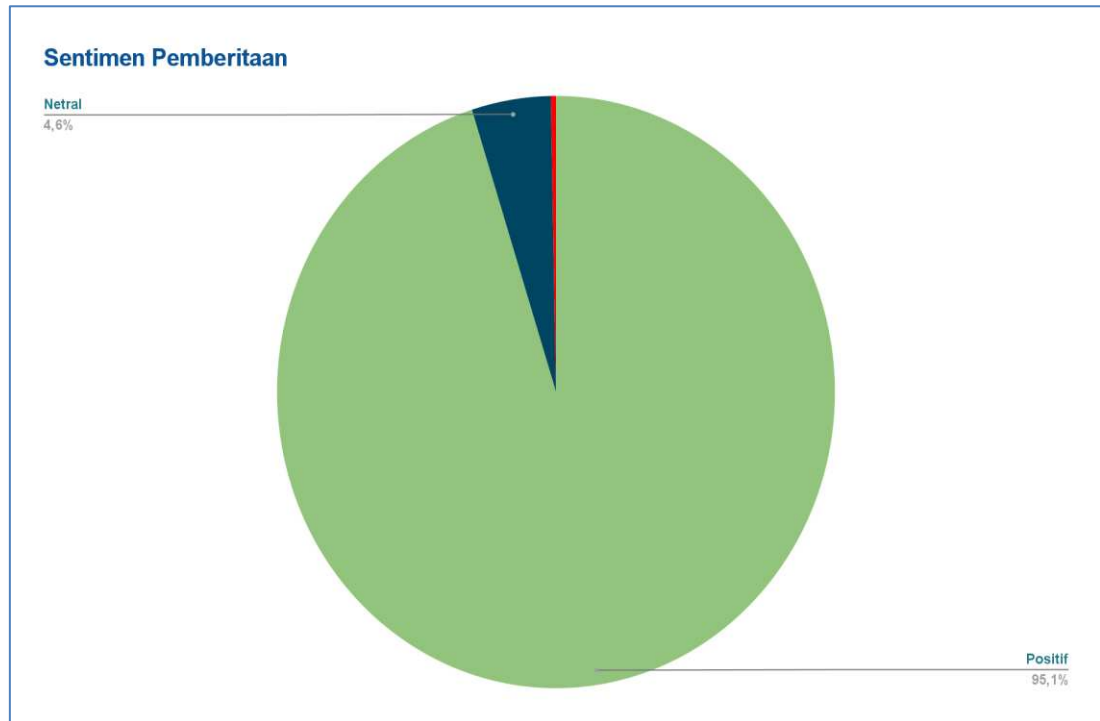
Tabel Jumlah Siaran Pers Periode Januari-Desember 2025

a. Media Monitoring

Sepanjang tahun 2025 Ombudsman RI muncul dalam pemberitaan di media massa sebanyak 38.572 artikel berita. Pada Januari - Desember 2025, Ombudsman RI muncul dalam pemberitaan di media massa sebanyak 38.572 artikel berita. Sebaran media terbanyak pada media online dengan total 36.528 ekspos, kemudian 1.561 ekspos pada media cetak, dan 483 tayangan berita televisi.

Media dalam memberitakan Ombudsman RI cenderung menyebarkan narasi positif yaitu dengan sebaran pemberitaan positif mencapai 94% (36.690 ekspos), lalu 5% (1.768 ekspos) pemberitaan lainnya dengan sentiment netral. Terdapat 1% (114 ekspos) pemberitaan negatif pada periode ini pemberitaan terkait Ketua Ombudsman RI Tak Hormati Proses Hukum PTUN, Kena Efisiensi Ombudsman: Kami Senang Saja Tetap Digaji tapi Enggak Kerja, Penanganan Kurang

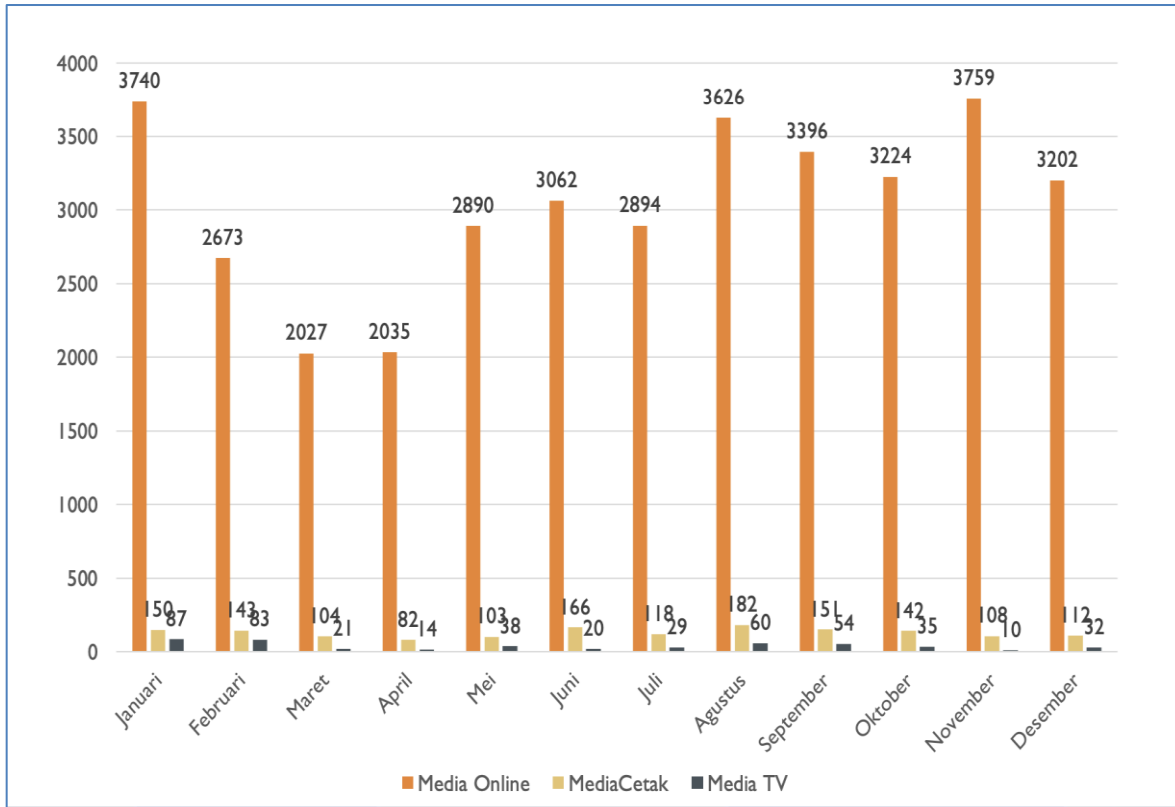
Profesional Pos-Pera Minta Bubarkan Saja ORI DIY, Seorang Sopir Gantung Diri di Gedung Ombudsman RI, serta Ombudsman Republik Indonesia Mati Suri.



Grafik Sentimen Pemberitaan 2025

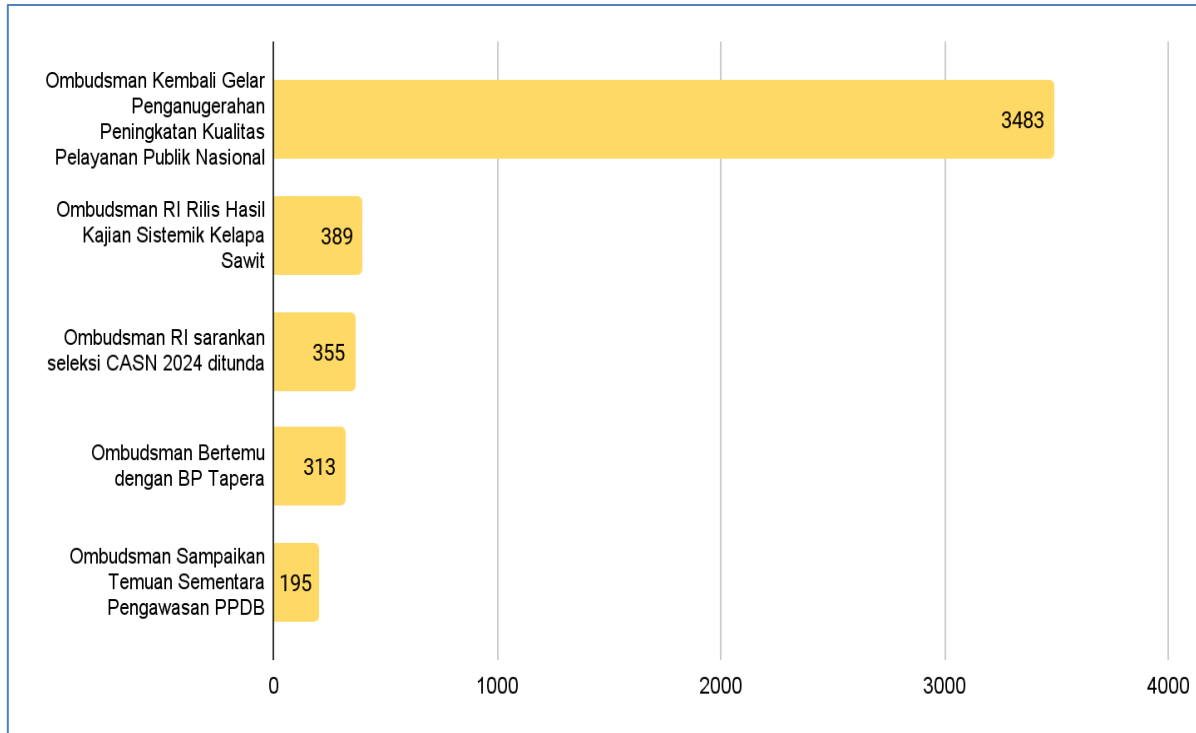
Grafik berikut menunjukkan perbandingan total ekspos pemberitaan yang dikutip dari media periode 1 Januari-31 Desember 2025.

Lima topik tertinggi pemberitaan pada 2025 adalah Anugerah Kepatuhan 2025, Hasil Kajian Tata Kelola Kelapa Sawit, Ombudsman Sarankan seleksi CASN ditunda, Pertemuan Ombudsman dengan BP Tapera dan Temuan pengawasan PPDB 2025. Selain itu, kunjungan langsung Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih ke Kota Ambon, untuk meninjau langsung pelaksanaan MBG dan Koperasi Merah Putih juga cukup menarik perhatian.



Grafik Ekspos Pemberitaan Ombudsman RI Periode Januari - Desember 2025

Secara keseluruhan, Ombudsman RI mendapat citra yang baik dalam persepsi media saat merespons suatu isu. Jika melihat dari tren top 20 isu pemberitaan Ombudsman RI selama 2025, topik-topik yang lebih mendapat perhatian media yakni topik-topik yang menunjukkan keberhasilan kinerja Ombudsman RI dalam menyelidiki dan menindaklanjuti penemuan-penemuan potensi maladministrasi di beberapa penyelenggara pelayanan publik.



Grafik 5 TOP Pemberitaan 2025

a. Fasilitas Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga

Fasilitas atau pendampingan kunjungan antar lembaga ini merupakan kegiatan dimana Ombudsman RI menerima kunjungan dari lembaga atau instansi lain yang ingin melakukan audiensi, konsultasi atau studi tiru. Kegiatan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai saluran dalam menyampaikan informasi terkait tugas dan fungsi Ombudsman kepada instansi lain.

Tim Publikasi Kehumasan melakukan fasilitas kunjungan baik yang bersifat ke dalam maupun keluar Ombudsman. Era modern yang berkembang dengan pesat menuntut Humas untuk lebih proaktif dalam membangun sebuah relasi yang baik dengan beberapa pihak seperti media, instansi, kementerian dan lembaga pemerintahan. Salah satunya dengan melakukan kunjungan. Kunjungan selain untuk menjalin hubungan baik juga dapat menjadi sarana dalam menyampaikan informasi terkait institusi dan meminta masukan dari kacamata luar Ombudsman.

Selama bulan 1 Januari-31 Desember 2025, Bagian Humas melakukan kegiatan koordinasi antar lembaga sebanyak 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kunjungan eksternal dan 6 (enam) internal:

No	Tanggal	Kegiatan	Asal/ Tujuan	Sifat	Diterima oleh
1	05/02/2025	Pertemuan dengan Viaeight	Sales Manager Viaeight	Internal	Humas
2	07/03/2025	Pertemuan dengan <u>Insider.id</u>	Tim <u>Insider.id</u>	Internal	Humas
3	16/04/2025	Pertemuan dengan <u>Media Indonesia</u>	Account Executive	Internal	Humas
4	23/04/2025	Rapat koordinasi dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan	Kabiro Humas dan TI	Eksternal	Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan RI
5	23/05/2025	Bakohumas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Humas Ombudsman	Eksternal	Wakil Menteri Kemendikdasmen
6	10/07/2025	Bakohumas DPR RI	Humas Ombudsman	Eksternal	Sekjen DPR RI
7	17/07/2025	Bakohumas BP Tapera	Humas Ombudsman	Eksternal	Komisioner BP Tapera
8	30/07/2025	Bakohumas Kemenlu	Humas Ombudsman	Eksternal	Ketua Bakohumas
9	19/08/2025	Bakohumas MPR RI	Humas Ombudsman	Eksternal	Ketua Bakohumas
10	22/08/2025	Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Antar Lembaga dalam Pengelolaan Isu Politik dan Keamanan	Kabiro Humas dan TI	Eksternal	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi
11	25/08/2025	Bakohumas Badan Gizi Nasional	Humas Ombudsman	Eksternal	Ketua Bakohumas
12	26/08/2025	Bakohumas Divhumas Polri	Humas Ombudsman	Eksternal	Kepala Divhumas Polri
13	04/09/2025	Focus Group Discussion Pendalaman Kapasitas dan Kesiapan Komunikasi Krisis Kementerian/Lembaga/Daerah	Humas Ombudsman	Eksternal	Humas Komdigi
14	24/09/2025	Bakohumas Badan Kepegawaian Negara	Humas Ombudsman	Eksternal	Kepala BKN

No	Tanggal	Kegiatan	Asal/ Tujuan	Sifat	Diterima oleh
15	08/10/2025	Bakohumas Badan Informasi Geospasial (BIG)	Humas Ombudsman	Eksternal	Sekretaris Utama BIG
16	14/10/2025	Bakohumas Kemenhan "Sinergi Komunikasi Publik dalam Penguatan Pertahanan Negara; Pengenalan Peran, Tugas, dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional"	Humas Ombudsman	Eksternal	Ketua Bakohumas
17	20/10/2025	Bakohumas Kemenkeu "Penyebaran Informasi Terkait Kemudahan Pelaporan SPT Tahunan 2025 Melalui Coretax"	Humas Ombudsman	Eksternal	Dirjen Pajak Keuangan
18	10/11/2025	Pertemuan dengan <u>Realiti.co</u> dan Monitoring Indonesia	AE <u>Realiti.co</u>	Internal	Humas Ombudsman
19	12/11/2025	Menghadiri Anugerah Media Indonesia	Humas Ombudsman	Eksternal	Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi
20	12/11/2025	Pertemuan dengan ASP	Humas Ombudsman	Eksternal	Tim ASP
21	27/11/2025	Bimtek Media Monitoring "FOMO (Forum Media Monitoring): Mendengar Lebih Dekat, Bertindak Lebih Cepat"	Humas Ombudsman	Eksternal	Dirjen Informasi Publik Komdigi
22	05/12/2025	Pertemuan dengan Media Indonesia	Tim Media Indonesia	Internal	Humas Ombudsman
23	22/12/2025	Pertemuan dengan TVRI	Humas TVRI	Internal	Humas Ombudsman

Tabel Jumlah Kunjungan Keluar/Dalam Periode Januari-Desember 2025

b. Media Placement

Selama periode Oktober-Desember 2025, Ombudsman RI telah melaksanakan kerja sama media placement dengan Media Indonesia sebanyak 2 kali dengan *output* pemberitaan media cetak, media online dan postingan media sosial X

Media Indonesia. Adapun anggaran yang dipergunakan sebesar Rp 47.310.000.

No	Tanggal	Kegiatan	Jenis Media	Tautan	Dokumentasi
1	05/12/2025	Diskusi Tematik "Reformasi POLRI dan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat"	Media Cetak	-	<p>Ombudsman RI Dorong Reformasi Polri yang Menyeluruh dan Terukur</p>  <p>OMBUDSMAN RI menegaskan urgensi reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai orientasi utama. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan, reformasi Polri harus dimulai dari penanaman tata kelola pelayanan kepada masyarakat agar Kepolisian kembali tampil sebagai sahabat publik yang bekerja dengan humanis dan melayani sepermis hant.</p> <p>"Polri merupakan pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2002, sehingga perbaikan layanan adalah syarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik," ujarnya dalam Diskusi Publik dengan tema "Reformasi Polri dan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat" di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).</p> <p>Najih mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir Ombudsman RI menerima 3.308 laporan terkait pelayanan Kepolisian, yang menempatkan Polri dalam 5 (lima) besar instansi dengan laporan terbanyak. Temuan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan fundamental seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, hingga tidak meratanya layanan di berbagai wilayah. Karena itu, menurutnya, reformasi Polri bukan hanya kebutuhan internal institusi tetapi juga kebutuhan publik untuk memastikan layanan hukum yang profesional, modern, dan akuntabel.</p> <p>DIBUKA LEBAR</p> <p>Anggota Ombudsman RI, Johannes Widjantoro menambahkan, bahwa ruang reformasi harus dibuka lebih lebar mengingat tugas dan kewenangan Polri saat ini semakin besar sehingga rentan menimbulkan penyimpangan.</p> <p>"Polri secara konsisten masuk dalam 3 (tiga) besar laporan terbanyak ke Ombudsman RI, terutama terkait penyelidikan, penyidikan, dan</p> <p>penetapan tersangka selama periode 2021-2025. Persoalan profesionalitas dan integritas menjadi titik tantangan yang harus dibenahi," tegasnya.</p> <p>Kemudian, ia menekankan bahwa kualitas layanan menjadi faktor utama kepuasan publik, mulai dari pelayanan saat menerima laporan, transparansi proses hukum, responsivitas terhadap aduan, perilaku anggota, hingga kemudahan akses informasi dan layanan digital.</p> <p>Ombudsman RI berharap diskusi publik ini dapat memperjelas arah reformasi Kepolisian dan memastikan prosesnya dapat diuji secara terbuka oleh publik. Reformasi Polri, menurut ketua pimpinan Ombudsman tersebut, harus diakses sehingga Polri dapat benar-benar menjadi institusi yang dipercaya masyarakat.</p> <p>Hadir sebagai narasumber, Wakil Kepala Kepolisian RI 2013-2014, Komjen Pol. (Purn) Oegrosono, Komisiner KPK Tahun 2011-2015, Bambang Widjojanto, Perwira Tinggi Polri, Advokat HAM dan Dosen STH Indonesia Jember, Adinawati, dan Wakapolri 2013-2014 Komjen Pol. (Purn) Andri Wibowo.</p> <p>KESIMPULAN</p> <p>Beberapa poin kesimpulan</p> <p>dari diskusi ini di antaranya, reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh mencakup aspek instrumental, struktural, dan kultural agar mampu menjawab tuntutan publik.</p> <p>Sebagai pilar keamanan dan ketertiban, Polri dituntut meningkatkan kinerja berbasis integritas dan profesionalisme sehingga mampu hadir sebagai institusi yang modern dan melayani.</p> <p>Polri sebagai pengawal demokrasi juga perlu membangun praktik penegakan hukum yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas diskriminasi. Untuk itu, responsif tugas dan kewenangan dinilai penting agar Polri fokus melakukan perubahan tanpa penyalahgunaan wewenang.</p> <p>Selain itu, budaya kinerja yang kompetitif melalui mekanisme panah and reward perlu diperkuat untuk membentuk karakter polisi yang humanis dan terpercaya.</p> <p>Lebih lanjut, Johannes Widjantoro menegaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, Ombudsman RI akan menyampaikan surat kepada Tim Percepatan Reformasi Polri berisi masukan dan pokok-pokok pikiran untuk mendorong Reformasi Polri yang bersifat permanen dan berkelanjutan. (H-1)</p>
			mediaindonesia.com	https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/837261/ombudsman-3308-laporan-masyarakat-keluhkan-layanan-kepolisian	

			X	<p>https://x.com/mediaindonesia/status/1998386057365377454?s=46</p>	 <p>Media Indonesia @mediaindonesia</p> <p>Translated by Grok</p> <p>Ombudsman: 3.308 Laporan Masyarakat Keluhkan Layanan Kepolisian @OmbudsmanRI137</p> <p>Ombudsman 3.308 Laporan Masyarakat Keluhkan Layanan... From mediaindonesia.com</p> <p>12.00 · 08/12/25 · 288 Views</p>
2	09/01/2025	Focus Group Discussion (FGD) dan Peluncuran Buku “Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik”	Media Cetak	-	<p>Perkuat Pengawasan Internal, Ombudsman RI Luncurkan Buku ‘Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik’</p>  <p>OMBUDSMAN RI menegaskan komitmen memperkuat integritas dan menjaga mutu kinerja pengawasannya dengan meluncurkan buku <i>Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik</i>, yang merangkum praktik pengawasan internal selama lima tahun terakhir, Selasa (9/12/2025) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam sambutannya saat <i>focus group discussion</i> (FGD) menegaskan bahwa pengawasan internal merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas kerja lembaga.</p> <p>“Salah satu akar persoalan dalam pengawasan publik adalah belum optimalnya fungsi pengawasan internal di berbagai instansi. Atas dasar itu, Ombudsman RI juga telah menyampaikan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 agar Ombudsman RI dilengkapi badan pengawas independen sehingga pengendalian mutu dan integritas lembaga dapat lebih optimal,” ucap Najih.</p> <p>Lebih lanjut ia menjelaskan, pengawasan internal Ombudsman RI dilaksanakan melalui <i>White Blowing System</i> (WBS). Pengaduan WBS mengenai dugaan pelanggaran etika dikelola Inspektoral, sedangkan terkait ketidakpuasan masyarakat atas kinerja penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi, serta mekanisme penjaminan mutu oleh Keasistenan Utama Manajemen Mutu.</p> <p>Peluncuran buku ini menjadi momentum penting bagi Ombudsman RI untuk mengkampanyekan bahwa pengawasan mutu tidak hanya dijalankan dalam praktik, tetapi juga telah didokumentasikan secara komprehensif.</p> <p>Buku ini merangkum praktik terbaik pengawasan internal selama lima tahun terakhir, meliputi penanganan WBS, penjaminan mutu penyelesaian laporan masyarakat, mekanisme <i>clearance</i> Rekomendasi, serta strategi menjamin mutu dalam penyusunan saran perbaikan kebijakan publik. “Buku ini adalah kristalisasi pengalaman penjaminan mutu yang dijalankan setidaknya lima tahun terakhir,” ujar Najih.</p> <p>PERFORMA PENGAWASAN INTERNAL</p> <p>Dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus mengapresiasi performa pengawasan internal 2021-2025. Keasistenan Utama Manajemen Mutu menerima aduan WBS sebanyak 58 laporan pada 2021, 91 laporan pada 2022, 90 laporan pada 2023, 109 laporan pada 2024, dan 78 laporan pada 2025. Dari keseluruhan aduan tersebut, 62% mengandung temuan pelanggaran administratif, prosedural, atau substantif.</p> <p>Selain itu, penjaminan mutu yang dilaksanakan di 42 unit kerja menemukan isu berulang seperti keterlambatan penrosesan laporan, ketidaksesuaian prosedur, ketidaklengkapan dokumen, dan minimnya pemutakhiran data pada SIMPEL. Secara keseluruhan, Ombudsman mengidentifikasi lima risiko utama yang perlu dibendalikannya: risiko kepatuhan, operasional, kebijakan, fraud, dan reputasi.</p> <p>“Peningkatan kualitas pengawasan internal tidak hanya penting bagi integritas lembaga, tetapi juga menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik,” tegas Bobby.</p> <p>HARUS HUMAN CENTERED</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB, Rini Widyantini menekankan bahwa pelayanan publik yang ideal harus <i>human-centered</i> dan inklusif. “Pemerintah jangan terlalu asik membuat pedoman, tetapi harus memastikan bagaimana pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Kepuasan masyarakat adalah tujuan utama pelayanan publik.”</p> <p>Rini juga mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang tidak hanya mengawasi dan memperbaiki kualitas pengawasan internalnya. FGD ini juga menghadirkan Pi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu, Sudarto sebagai pemapar, serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sa’dikin dan Anggota Komisi Komite Akreditasi Nasional, Waiyoyo Martowiyoto sebagai penanggap. (H 1)</p>

			<p>mediaindonesia.com</p>	<p>https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/838367/perkuat-akuntabilitas-ombudsman-ri-luncurkan-buku-mengawal-mutu-pengawasan-pelayanan-publik</p>	
		<p>X</p>		<p>https://x.com/mediaindonesia/status/1998386057365377454?s=46</p>	

c. Pembaruan Database Kementerian Lembaga Dan Pers

Salah satu tugas Layanan Hubungan Antar Lembaga adalah melakukan pembaruan database kontak kantor Kementerian, Lembaga dan Pers. Adapun pembaruan tersebut dimaksudkan agar data tersebut dapat digunakan sebagai bahan kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas kehumasan dengan Kementerian, Lembaga dan Pers. Adapun data yang sudah dikumpulkan

sampai saat ini adalah sebanyak 48 Kementerian, 106 Lembaga Negara Non-Struktural, 68 Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian dan 1.935 data Media Terverifikasi Dewan Pers.

No	Nama Media	Jenis Media	Penanggung Jawab	Provinsi	Alamat	Desk	Badan Hukum
2477	radarsurabaya.jawapos.com	Siber	Wijayanto	Jawa Timur	Jalan Kembang Jepun No. 167 Surabaya		Radar Media Surabaya
2478	serambinews.com	Siber	Zainal Arifin	Aceh	Jalan Raya Lambaro KM 4,5 Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh		Aceh Media Grafika
2479	radarmukomuko.disway.id	Siber	Amris Tanjung	Bengkulu	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko		Harian Radar Mukomuko Digital
2480	Prokni.id	Siber	Amran Chan	Kepulauan Riau	Lytech Home Center Jl.Bengkong Kolam Sadai Kec, Bengkong Ota Batam Kepulauan Riau 29444, In Lancang Kuning Namanya		
2481	Selimburcaya.com	Siber	Dedi Hardiansyah Putra	Bengkulu	Jalan NatadiriJa No.310 RT/RW. 02/01 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota El		Sumber Cahaya Medika
2482	pewartapos.com	Siber	D.Wahjoe Harjanto	Jawa Timur	Jl. Taman Apsari No. 15-17 RT 04 RW II Kelurahan Embong Kalasin, Kec. Genteng		Media Utama Jatim
2483	GresikSatu.com	Siber	Aries Wahyudianto	Jawa Timur	Jl. Raya Bunder Terminal Blok. B No. 50 Rt. 001 Rw.001 Kelurahan Banjarsari, kecamatan Cerme		Gresik Satu Media
2484	Bola.net	Siber	Erwin Fitriansyah	Jawa Timur	Kapanlagi Malang, Jl. Pondok Blimbing Indah A1-3 No 7, Komplek Araya, Kecamatan Blimbing, Kota I		Kapan Lagi Dot Com Networks
2485	Fimela.com	Siber	Elin Yunita Kristanti	DKI Jakarta	Jl. RP Soeroco No 18 RT9/5, Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta		Kapanlagi Dot Com Networks
2486	Kepri.co.id	Siber	Anwar Saleh	Kepulauan Riau	Gedung Golden City Lantai 3 Jl. Golden Prawn Nomor 1 Depan Masjid Cheng Hoo Samping Polek E		Suara Online Indonesia
2487	holopis.com	Siber	Utami Widowati	DKI Jakarta	Villa Noah Blok 1, Jl. Ampera Raya Nomor 847, RT.4/RW.4, Cilandak Timur, Pasar Minggu		Holopis Nusantara Media
2488	berauterkini.co.id	Siber	Robittoh Johan Palupi	Kalimantan Timur	Jalan Durian III, Komplek Ruko, Penunham Berau Indah, Blok D6, No 3 Rt 08, Kelurahan Gunung Pai		Media Utama Berau
2489	Jatengnews.id	Siber	Rudal Afgani Dirgantara	Jawa Tengah	Semarang Town Square (SETOS) 3rd Floor Jalan Inspeksi Gajah Mada No.6, Semarang Tengah		Biwara Media Group
2490	sewaktu.com	Siber	Faturrohman S Kanday	Jawa Barat	Gd Graha Pena Lt 3 Jl KHR Abdullah Bin Nuh No 30 Taman Yasmin Kota Bogor		Sewaktu Media Nusantara
2491	Harapan Kita ID	Cetak	Taufik Rahman	Lampung	Jl. Bojonegara Antasari No.48, Tanjung Karang, RT. 02/14, L. Tanjung Karang Timur		Artha Kita Media

Gambar Database Media

No	Nama Kementerian/Lembaga	Alamat	Susunan Organisasi	CP	Kontak
2	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI)	Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 Indonesia	Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa; Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN; Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral; Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik; Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; Inspektorat Jenderal; Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi; Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; dan Staf Ahli Bidang Manajemen; Pusat Pendidikan dan Pelatihan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.	Tomy	Novel 081215141/35 (sespn) 081283801036 (+6221) 3441508 (Direk

Gambar Database Kementerian dan Lembaga

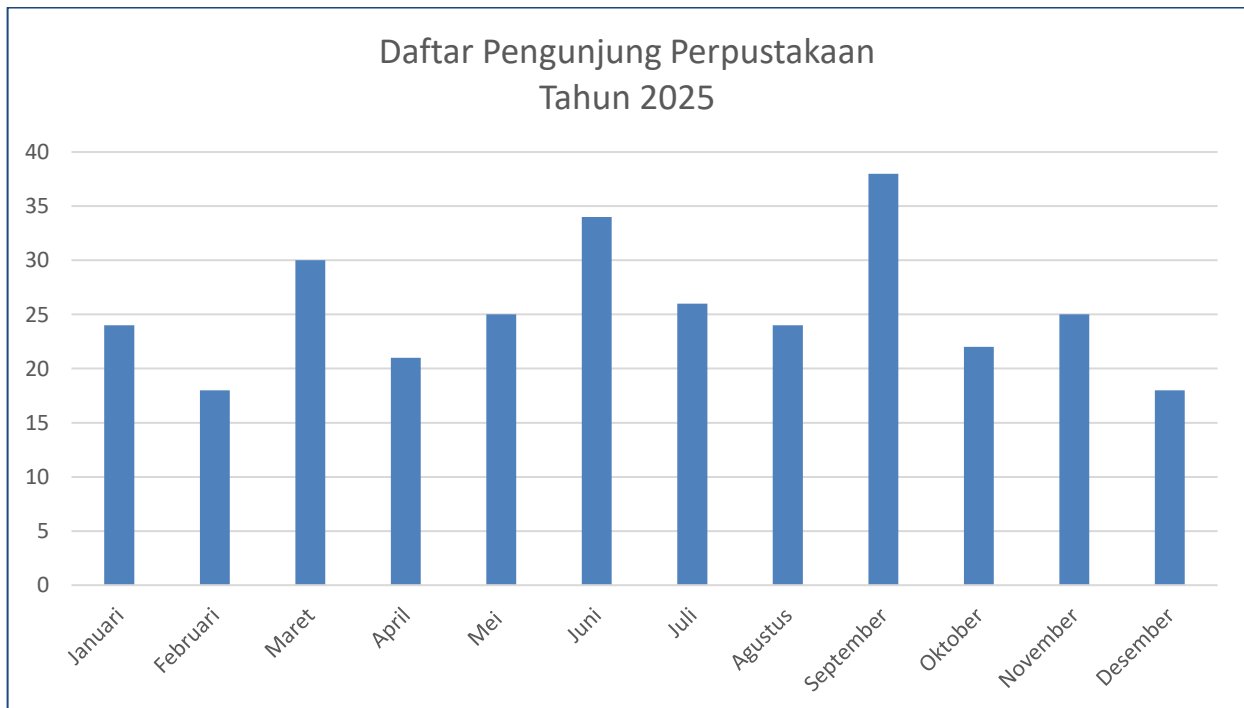
Capaian Kinerja Layanan Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Perpustakaan

Selama Tahun 2025, Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Perpustakaan telah melakukan:

a. Pelayanan Perpustakaan

Pada tahun 2025, jumlah pemustaka yang hadir dan memanfaatkan Perpustakaan dan Pojok Baca Digital (POCADI) adalah sebanyak 305 orang. Data dibawah ini belum menggambarkan jumlah pemustaka secara keseluruhan karena banyak pemustaka yang tidak menulis daftar hadir manual. Selain itu konsultasi dan permintaan koleksi terkait layanan perpustakaan juga dilaksanakan secara daring yaitu melalui WhatsApp.



b. Promosi Koleksi Perpustakaan

Sebagai upaya dalam meningkatkan akses koleksi Perpustakaan baik yang berupa buku maupun koleksi yang tersedia secara digital, dilakukan promosi koleksi perpustakaan. Promosi ini dilakukan dalam bentuk flyer ataupun pesan *broadcast* yang disebarakan melalui surat elektronik maupun pesan singkat. Upaya ini cukup meningkatkan kegiatan sirkulasi peminjaman koleksi buku di Perpustakaan Ombudsman RI.

PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN

Kokain? Atau Kasus?

Baca selengkapnya

• SERI KLASIK PERUKA •

The Sign Of Four

Misteri Bapak Tonda

SHERLOCK HOLMES

SIR ARTHUR CONAN DOYLE

Tersedia di Perpustakaan ombudsman RI

perpustakaan.ombudsman.go.id

PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN

Resensi Buku

9 CARA SUKSES MENJALIN RELASI KARYA DALE CARNEGIE

1. Cara menjadi orang yang berkeselamatan
2. Cara mengigitkan teman baru & mempertahankan teman lama
3. Cara membangun kolaborasi dan berfikir kolektif
4. Cara membangun kepercayaan
5. Cara mengevaluasi & memahami kepribadian orang lain
6. Cara berikap saat menghadapi orang yang sulit
7. Cara memberikan tanggapan tidak setuju tanpa ekspresi yang tidak menyenangkan
8. Cara untuk mendapatkan peteyaman yang lebih baik
9. Cara menguasai emosional diri sendiri dan orang lain

TERSEDIA DI PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN

PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN

Buku bacaan untuk akhir pekan ini

KENALI Dirimu

1. **Tentukan Kepribadianmu**
Setiap manusia memiliki kepribadian berbeda-beda dan ciri khas tersendiri.
2. **Kenali dan Pertajam Kemampuanmu**
Setiap orang memiliki kecenderungan belajar dan minat yang berbeda-beda.
3. **Hubungan Cinta dan Pertemanan**
Mengetahui gaya cinta sendiri maupun pasangan dapat membuat kita lebih bisa memahami perasaan masing-masing.
4. **Tes Gambar**
Tes kepribadian ini dapat mengungkapkan sifat asli yang kamu miliki.
5. **Kokologi**
Kokologi merupakan serangkaian permainan psikologis yang khusus dirancang untuk mengetahui sifat-sifat emosional dan perilaku dari seseorang.

perpustakaan.ombudsman.go.id

PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN

Sehat dan Bugar dengan diet GM

"Kesehatan adalah tabungan yang sangat berharga."

Sehatkan dirimu!
Diet GM sangat populer di Amerika dan kini telah populer di Indonesia. Apakah kamu sudah siap untuk memulai diet ini?

Bagaimana caranya?
Program diet ini dikenal sebagai 7 hari tanpa gula, protein yang rendah dan rendah lemak. Untuk itu, kamu harus mematuhi aturan-aturan diet ini.

Bagaimana agar diet berhasil?

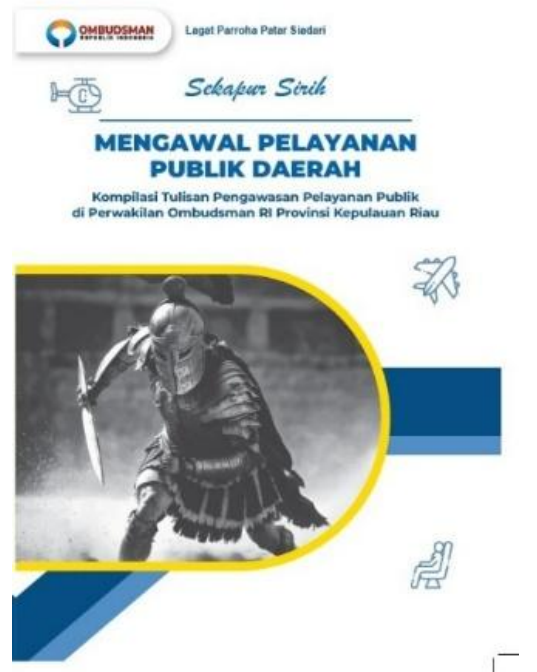
- Temukan Motivasi**
Tentukan apa yang kamu inginkan dari diet ini. Apakah kamu ingin menurunkan berat badan?
- Pertahankan Konsistensi**
Jika kamu memutuskan untuk memulai diet ini, pastikan kamu konsisten melakukannya.
- Milihlah gula!**
Pilih makanan yang rendah gula. Hindari makanan yang mengandung gula tambahan.
- Belahlah lemak!**
1. Hindari lemak jenuh dan lemak trans.
2. Pilih lemak baik.
3. Hindari lemak hewani.
4. Pilih lemak nabati.
5. Hindari lemak trans.
6. Pilih lemak baik.
- Prinsip Dieting**
1. Pilih makanan yang rendah karbohidrat dan tinggi protein.
2. Hindari gula.
3. Hindari lemak jenuh.
4. Pilih lemak baik.
5. Hindari lemak trans.
6. Pilih lemak baik.

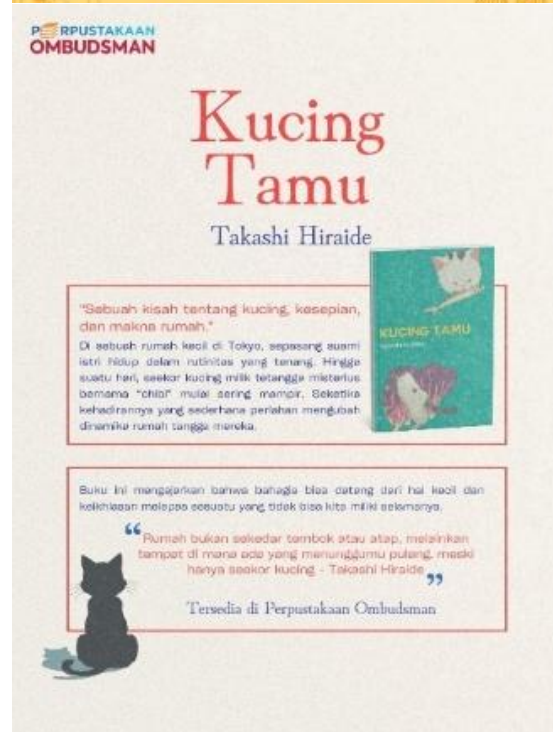
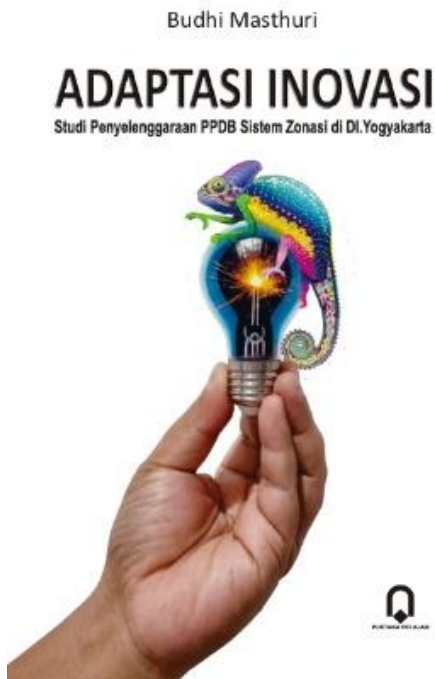
3 tipe bentuk tubuh:

Baca selengkapnya

Sehat dan Bugar dengan Diet GM

perpustakaan.ombudsman.go.id





PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN



STRATEGI CERDAS BERKOMUNIKASI DENGAN LAWAN BICARA

Siapakah Lawan Bicara Anda?
Gestur Lawan Bicara
Meyakinkan Lawan Bicara



Buku ini berisi tentang seni menaklukkan lawan bicara di kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang sosok, karakter, dan teknik percakapan lawan bicara serta cara anda untuk menundukkannya. Panduan teknis dan contoh praktiknya disertakan sehingga anda akan mudah menerapkan konsep-konsep dan berbagai triknya.

Tersedia Di Perpustakaan Ombudsman

PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN

3 TAHAP PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

PLACEMENT (PENEMPATAN)
"Masukkan uang ke slotem" - seperti memasukkan kedaiam mesin tapi masih terlihat bentuk dan asalnya.

LAYERING (PENGABURAN)
"Bikin ramei jejaknya" - seperti air lewat banyak pipa supaya susah dilacak.

INTEGRATION (INTEGRASI)
"Hasil seakan-akan jadi halal dan thayyiban" - uang legal muncul kembali sebagai keuntungan usaha yang sah.

Korupsi merugikan kita semua. Saatnya belajar bagaimana penelusuran aliran uang hingga bisa kembali ke negara, temukan selengkapnya di buku karya Prima Idwan Mariza ini!



Tersedia di Perpustakaan Ombudsman!

PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN

Seperti Apa Bahagiamu?

liburan bersama orang tersayang? main game favorit? atau sekedar rebahan sehabis di rumah?

bahagia, persehabatan, dan cinta merupakan tiga hal sederhana yang membentuk makna hidup. Zikrana mengajak pembaca mencari "bahagia versimu sendiri", lewat kata, gambar, dan refleksi ringan.



Tersedia di Perpustakaan Ombudsman!




perpustakaan.ombudsman.go.id

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SAWIT

ANTARA EMAS HIJAU DAN DURI PENGELOLAAN



YEKA HENDRA FATIKA



PERPUSTAKAAN OMBUDSMAN

Membunuh Commendatore

Sebuah kisah tentang seorang pelukis yang hidupnya berubah setelah menemukan lukisan misterius berjudul *Membunuh Commendatore* di rumah terpencil di pegunungan.

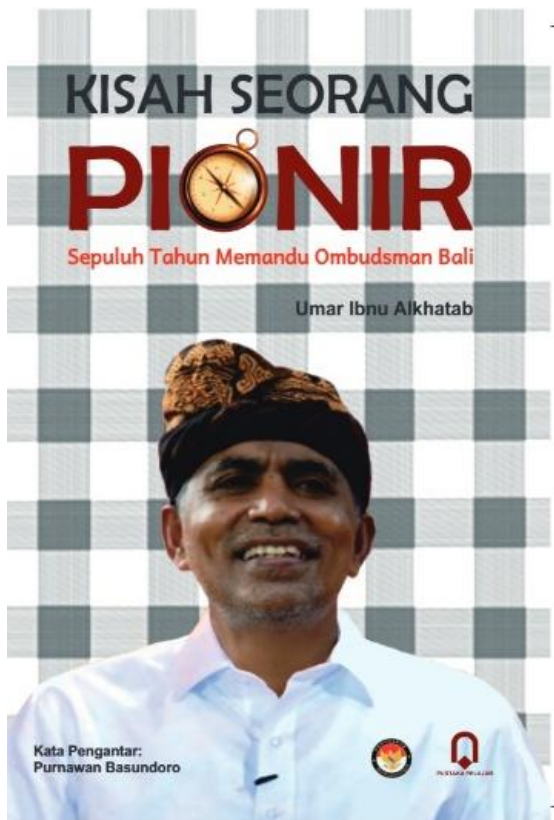
Dari situ, dunia nyata dan dunia ide mulai berburai — muncul sosok misterius, suara lonceng di malam hari, dan perjalanan batin yang membuka makna seni dan eksistensi.

Haniki Murakami menghadirkan kisah magical realism yang puitis, misterius, dan penuh renungan.

Buku ini cocok untuk kamu yang suka kisah reflektif, simbolis, dan filosofis tentang percantian diri, kesepian, dan seni.

"From a distance, most things look beautiful."
— Haniki Murakami,

Tersedia di Perpustakaan Ombudsman!



c. Peluncuran Buku Sawit

Bekerja sama dengan Keasistenan Utama III, Ombudsman RI melaksanakan peluncuran buku berjudul “Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan” pada hari Kamis, 23 Oktober 2025 bertempat di Aula Serbaguna Lantai 1 Gedung Ombudsman RI. Peluncuran buku ini adalah salah satu upaya dalam diseminasi pengetahuan kepada masyarakat agar lebih mudah diakses. Peluncuran Buku ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Prof. Rachmat Pambudy untuk memberikan sambutan. Kegiatan ini juga mengundang beberapa praktisi sebagai Penanggap yaitu Withaksana Daromosarkoro selaku Praktisi Perkebunan Kepala Sawit, Tungkot Sipayung selaku Direktur Eksekutif *Palm Oil Agribusiness Strategic Institute* (PASPI) sekaligus sebagai Pengamat Senior Industri Kepala Sawit Nasional dan Internasional, serta Petrus Gunarso yaitu Pengamat Kehutanan dan Lingkungan *Business Development Advisor* PT Transgasindo.

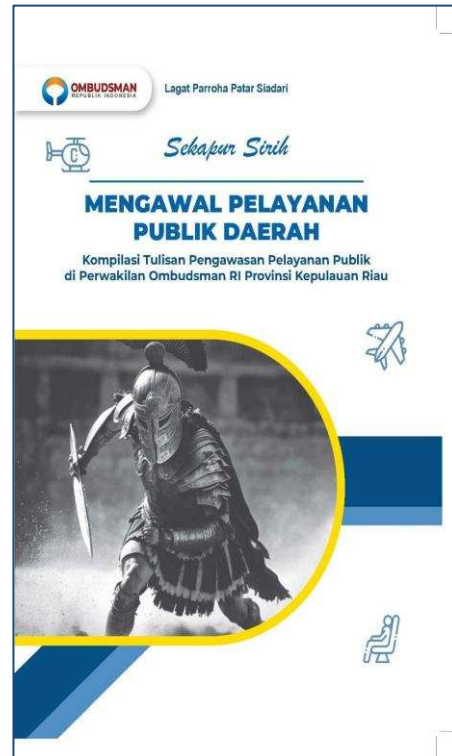
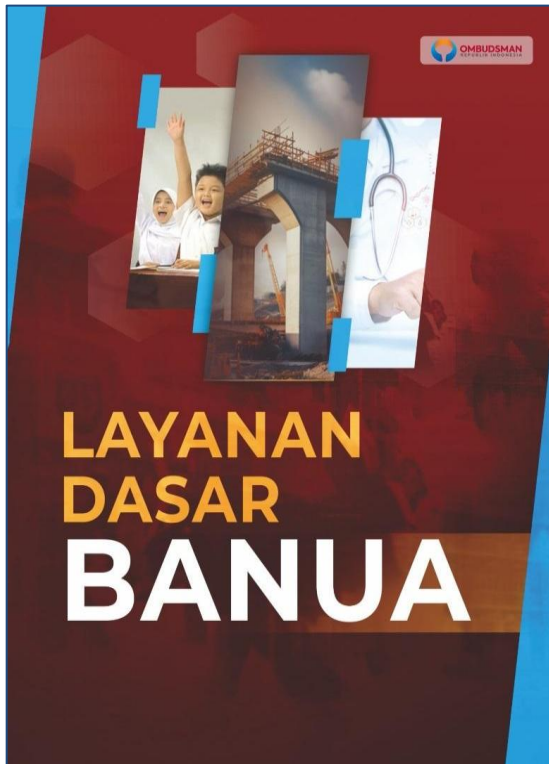


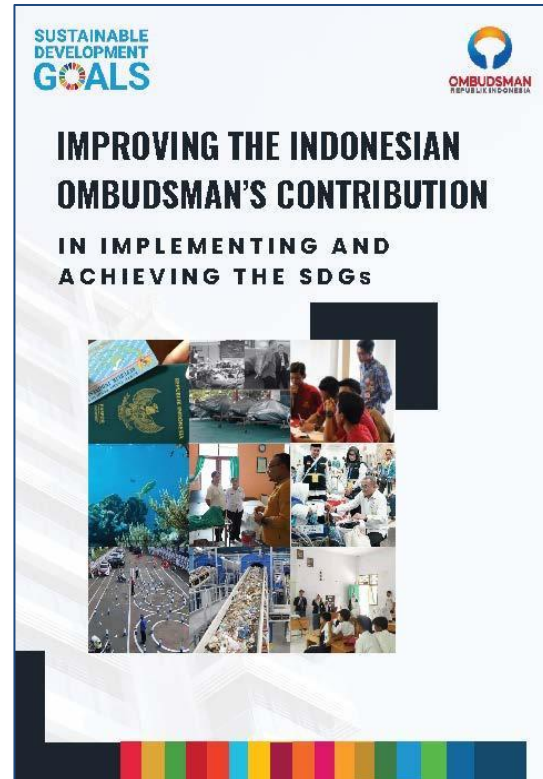
Peluncuran Buku "Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan"

d. ISBN

Pada tahun 2025, Perpustakaan Ombudsman juga mencatat tingginya permintaan permohonan ISBN. Terdapat sejumlah 8 (delapan) judul koleksi buku telah diterbitkan dengan nomor ISBN. Hal ini menggambarkan tingkat minat menulis pada

Insan Ombudsman cukup tinggi pada tahun 2025. Berikut adalah buku karya Ombudsman RI yang terbit dengan ISBN:





Terbitan Ombudsman RI yang memiliki ISBN

e. Kelas Literasi: Cerdas Cermat Ombudsman

Kelas Literasi adalah program yang diusung oleh Perpustakaan Ombudsman RI dibawah Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dan memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi kontekstual, pengetahuan dan wawasan secara khusus

untuk Insan Ombudsman RI. Secara perdana program ini diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan Cerdas Cermat Ombudsman RI yang secara antusias diikuti oleh Insan Ombudsman RI di Kantor Pusat secara luring dan Kantor Perwakilan secara daring. Juara 1 (satu) Cerdas Cermat luring diraih oleh Perwakilan Jakarta Raya, dan juara 1 (satu) Cerdas Cermat daring diraih oleh Kantor Perwakilan Bengkulu.





Cerdas Cermat Ombudsman RI

f. Persiapan Awal Penerbitan Jurnal Ilmiah Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, tentu menghasilkan pengetahuan yang dapat menjadi rujukan, rekomendasi kebijakan, serta bahan evaluasi sistemik terhadap pelayanan publik. Dan salah satu upaya untuk menyebarkan pengetahuan ini adalah melalui penguatan budaya literasi dan publikasi ilmiah di lingkungan internal Lembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Ombudsman RI memberikan arahan kepada Perpustakaan Ombudsman serta tim lainnya untuk mengembangkan rumah jurnal di lingkungan Ombudsman RI. Kegiatan ini diimplementasikan dengan melaksanakan *Sharing Knowledge Open Journal System (OJS)*. *Sharing Knowledge Open Journal System (OJS)* dilaksanakan untuk mengetahui praktik-praktik apa saja yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam pengelolaan rumah jurnal hingga terkait *Open Journal System (OJS)*. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom dan luring di Ruang Auditorium Antonius Sujata, Lantai Dasar Gedung Ombudsman RI. Peserta kegiatan ini terdiri dari Pimpinan Ombudsman RI serta seluruh Insan Ombudsman RI dari Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan. Dalam kegiatan ini Ombudsman RI mengundang Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., Asisten Profesor di Universitas Muhammadiyah Malang selaku Narasumber.



Setelah Ombudsman RI mengadakan *Sharing Knowledge Open Journal System (OJS)*, maka tindakan selanjutnya adalah dengan bagaimana Ombudsman RI dapat menyediakan rumah jurnal. Untuk itu, dilaksakan Rapat pendampingan awal

pengelolaan *Open Journal System* (OJS). Dalam rapat ini mengundang narasumber dari Dosen Teknologi Informasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku Relawan Jurnal Indonesia yang akan memandu bagaimana instalasi dan mengoperasikan platform Rumah Jurnal.

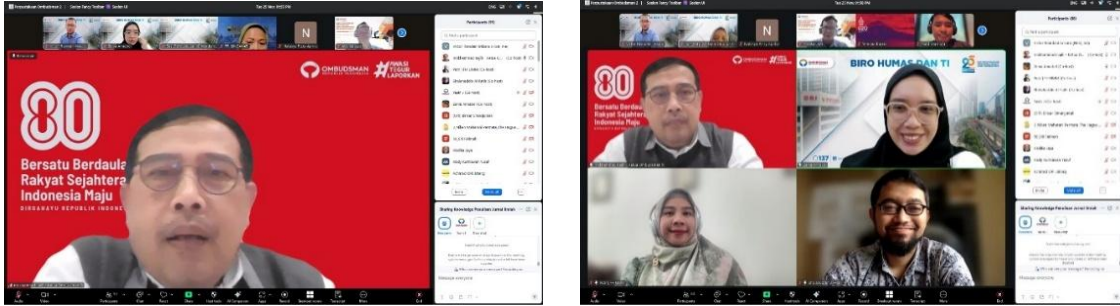


Open Journal System (OJS)

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom dan luring. Peserta rapat ini terdiri dari Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Bapak Tri Andi selaku narasumber, Tim Pengelolaan Perpustakaan, Tim Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Internet, Tim Pengelolaan Aplikasi dan Helpdesk juga sebagian Calon Asisten yang bertugas untuk pengelolaan Jurnal Ombudsman.

Saat ini rumah jurnal di lingkungan Ombudsman RI telah dipasang serta dalam masa uji coba. Rumah jurnal tersebut dapat diakses melalui tautan <https://journal.ombudsman.go.id/index.php/JPPM>.

Tidak hanya sampai disitu, Perpustakaan Ombudsman kembali menyelenggarakan Kelas Literasi. *Sharing Knowledge* terkait penulisan jurnal ilmiah. Dengan adanya 3 (tiga) kegiatan ini, diharapkan pada tahun selanjutnya Ombudsman RI dapat mewujudkan penerbitan jurnal ilmiah dan dapat secara aktif memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu kebijakan pelayanan publik, dan pengawasan pelayanan publik serta memperluas pengaruh Ombudsman RI dalam diskursus akademik.



Kelas Literasi: Sharing Knowledge Penulisan Jurnal Ilmiah

g. Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pada tahun 2025 dilakukan pengembangan koleksi dengan membeli koleksi untuk dilayankan pada Perpustakaan Ombudsman RI. Koleksi yang dibeli berasal dari daftar permintaan Insan Ombudsman serta pertimbangan akan kebutuhan informasi dan referensi yang sesuai dengan kebutuhan Ombudsman RI. Tabel berikut merupakan daftar buku baru hasil pengembangan koleksi pada tahun 2025.

NO	JUDUL	PENULIS	QTY
1	<i>Demystifying Disability: Apa yang Perlu Diketahui, Dikatakan, dan Cara Menjadi Sekutu bagi Komunitas Disabilitas</i>	Emily Ladau	1
2	Penelitian Hukum edisi revisi	Peter Mahmud Marzuki	2
3	Manajemen Resiko Pengadaan Pemerintah	Dr. Wawan Zulmawan	2
4	Konstitusi & Konstitusionalisme	Jimly Asshiddiqie	1
5	<i>101 Essays That Will Change the Way You Think</i>	Brianna Wiest	1
6	<i>Secret of Divine Love</i>	A. Helwa	1
7	<i>Rock Paper Scissors</i>	Alice Feeney	1
8	Filosofi teras	Henry Manampiring	1
9	Metodologi Penelitian Kuantitatif	H. Djaali	1
10	<i>The 100-Year-Old Man Who Climbed Out Of The Window And Disappeared</i>	Jonas Jonasson	1
11	Novel Corat-Coret Di Toilet	Eka Kurniawan	1
12	Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Proposal - Laporan - Publikasi	Tri Cahyono	1
13	<i>The Power of Habit</i>	Charles Duhigg	1

NO	JUDUL	PENULIS	QTY
14	<i>Quiet: kekuatan senyap pribadi introver di dunia yang tak berhenti bicara</i>	Susan Cain	1
15	Lelaki Tanpa Perempuan	Haruki Murakami	1
16	<i>Human Kind</i>	Rutger Bregman	1
17	<i>The Metamorphosis</i>	Franz Kafka	1
18	Hukum Administrasi Indonesia	Rusdianto Sesung	1
19	Terampil Berkomunikasi Tulisan dan Lisan	Defina dkk	1
20	Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi	Rohana Thahier dan Makmur	1
21	Manajemen Pelayanan Publik	Hayat	2
22	Menemukan Kembali Pembangunan Hukum Nasional	Bagir Manan	1
23	<i>Adult Children of Emotionally Immature Parents: Memulihkan Diri dari Orangtua yang Berjarak, Menolak, dan egois</i>	Lindsay C. Gibson	1
24	Laut Bercerita	Leila S. Chudori	1
25	Sapi, Babi, Perang dan Tukang Sihir: Menjawab Teka-teki Kebudayaan (Terjemahan)	Marvin Harris	1
26	Demian	Hermann Hesse	1
27	<i>Funiculi Funicula (Kōhī Ga Samenai Uchi Ni--Before the Coffee Gets Cold)</i>	Toshikazu Kawaguchi	1
28	Pangeran Cilik: <i>Le Petit Prince</i>	Antoine de Saint-Exupéry	1
29	Menggali Kualitas Pelayanan Publik Di Lembaga Pemerintahan	Rira Nuradhawati, Danny Permana & Yovinus	1
30	Teori administrasi: <i>administrative executive</i>	Nurman, dkk	1
31	Tenaga kerja: hukum ketenagakerjaan	Werdhi Sutisari	1
32	Dinamika otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia	Prof. Dr. Made Subawa, dkk	1
33	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Potret Implementasi Undang-Undang Penanggulangan Bencana	Yohan Frans Unmehopa	1
34	Hukum administrasi negara: fenomena hukum di ruang public	Ardiansyah	2

NO	JUDUL	PENULIS	QTY
35	Perspektif Ilmu Ilmu Sosial di Era Digital: Disrupsi Emansipasi Dan Rekognisi	M. Falikul Isbah, Gregorius Ragil Wibawanto (Editor)	1
36	<i>Regulatory Impact Analysis</i> (Analisis Dampak Regulasi): Konsep dan Penerapannya	Ambar Widaningrum, dkk.	1
37	Seni Pidato Publik	Suwarna Dwijonogoro	1
38	<i>Artificial Intelligence</i> : Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial	Saludin Muis; Rully Pramudita; Dewi Ariani	1
39	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Bidang Perpustakaan	Tisyo Haryono; Bambang Supriyo Utomo	1
40	Pengantar Metode Penelitian Hukum	Amiruddin	1
41	Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika	H. Amran Suadi	1
42	Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan	Tedi S.	2
43	Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah	Tedi S. & Endra W	1
44	<i>Never Split the Difference</i>	Chris Voss	1
45	<i>This is Me Letting You Go</i>	Heidi Priebe	1
46	<i>Educated</i>	tara westover	1
47	<i>Collaboration, e-government</i> & manajemen sektor public	Arman	1
48	Manajemen Konflik	Andri Kristanto	1
49	Implementasi Kebijakan Publik Edisi 2 Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduksi	Novita Tresiana, Noverman Duadji	2
50	Pedoman dan Tata Cara Penulisan Disertasi	Soetandyo Wignjosoebroto	2
51	Menulis Artikel Ilmiah yang Komunikatif	Wahyu Wibowo	1
52	Sejarah dan Tradisi Hukum	Ibnu Sina Chandranegara, Syaiful Bakhri	1
53	Etika Administrasi Negara	Wahyudi Kumorotomo	1

NO	JUDUL	PENULIS	QTY
54	Kinerja Organisasi Publik: Akuntabilitas, Kompetisi, Organisasi, SDM	Amir Imbaruddin	1
55	Strategi integrasi data dalam mewujudkan transformasi digital pelayanan publik	Andi Fitri Rachmadany, dkk	2
56	Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik	Bambang Sugianto dan Evi Purnamawati	1
57	Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia	Augustin Rina Herawati	1
58	Perkembangan Teori Administrasi Publik	La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin dan Rininta Andriani	2
59	<i>New public service: democratic, collaborative, and trust</i>	Syafei Ibrahim	1
60	Metode Penelitian Kualitatif	Imam Gunawan	1
61	Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia	Majda El-Muhtaj, M.Hum	1
62	<i>Cyber Bullying</i>	Sayid Muhammad Rifqi Noval	1
63	Pedoman Perjanjian Kerja Bersama	Ahmad Rizki Sridadi	1
64	Manajemen Pelayanan Prima: fokus pada organisasi publik dan peningkatan kualitas aparatur	Donni Juni Priansa	2
65	Pelayanan Publik dan <i>E-Government</i> : Sebuah Teori dan Konsep	Amy Y. S. Rahayu	2
66	<i>Good governance</i> : pemerintahan yang baik di era digital	Siti Marwiyah ... [et al.]	1
67	Metode kualitatif penelitian administrasi publik: tinjauan filosofis dan implikasi praktis	Dr. Yacob Noho Nani, S.Pd., dkk	2
68	Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan	Endrianto Bayu Setiawan, ... [et al.]	1
69	Studi kebijakan publik: teori, proses dan isu kontemporer	Ramaditya Rahardian	1
70	Babel	R.F Kuang	1

NO	JUDUL	PENULIS	QTY
71	Pelukis Bisu (<i>The Silent Patient</i>)	Alex Michaelides	1
72	Ngapain Jadi Orang Baik	Michael schur	1
73	<i>E-Government</i> (Konsep, Esensi dan Studi Kasus)	Bambang Irawan dan Muhammad Nizar Hidayat	2
74	Pengawasan Dalam Badan Layanan Umum	Sheila Miranda Hasibuan	2
75	Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Filmon M. Polin	1
76	Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik	Gabriel Lele	1
77	Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif Dan Kolaboratif Edisi Kedua	Agus Dwiyanto	1
78	Metode Penelitian Pembangunan Sosial	Susetiawan, dkk.	1
79	Penulisan Ilmiah: Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Artikel	Jogiyanto Hartono	1
80	Manajemen dan Administrasi Publik	Rizky Arif Nugroho	2
81	<i>Atomic Habits</i> : Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa	James Clear	1
82	Another Monster: The Investigative Report	Werner Weber	1
83	Keajaiban Toko Kelontong Namiya	Keigo Higashino	1
84	Devotion of Suspect X (Kesetiaan Mr. X)	Keigo Higashino	1
85	Almustafa Republish 2025	Khalil Gibran	1
86	The Vegetarian	Han Kang	1
87	Animal Farm	George Orwell	1
88	Seni Berperang Sun Tzu	Amber Books	1
89	Perlindungan Privasi dan Data Pribadi	Zaid M.H	1
90	Hukum dan HAM	Prof. Heru Susetyo, S.H.	1
91	Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak	M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H	1
92	Perlindungan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasca-BPJS (2025)	Kencana	1
93	Human Acts	Han Kang	1
94	The Alter Ego Effect	Todd Herman	1
95	The Psychology Of Linelines	Zehra Erol	1
96	Hak Asasi Manusia (2021)	Nuruddin Hady	1
97	Pengantar manajemen Pelayanan Publik	imam rozikin	1

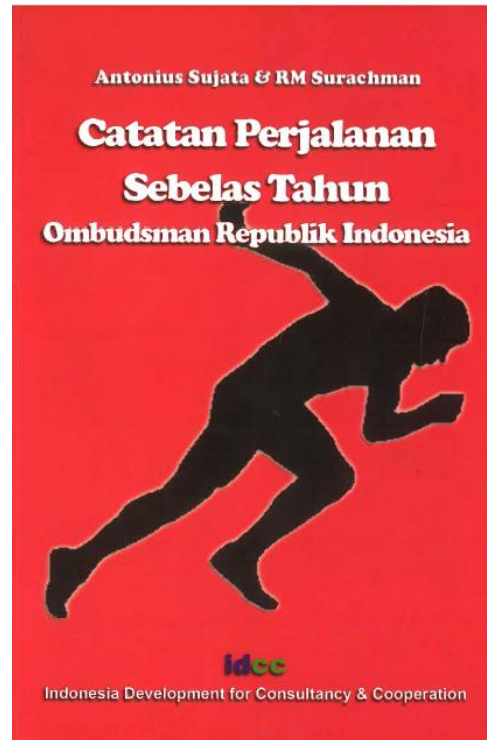
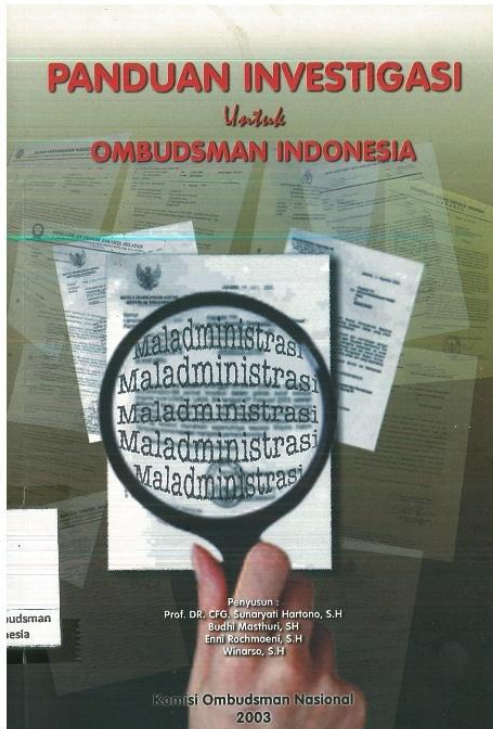
NO	JUDUL	PENULIS	QTY
98	Toko Buku Abadi	Yudhi Herwibowo	1
99	Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik (2022)	Prabowo Hadi, Suwanda, Syfri, Wirman	1
100	Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi	Prof Hafied Cangara	1
101	Motivasi dan Motivasi Pelayanan Publik dalam Manajemen SDM Sektor Publik	Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D.	1
102	<i>Colaborative Governance</i>	Kadek Wiwin Dkk	1
103	Sistem Manajemen Mutu	Imam Subekti	1
104	Sistem Manajemen Mutu	Totok Dermawan	1
105	<i>The Book You Wish Your Parents Had Read / Orang Tuamu Wajib Membaca Buku Ini dan Anakmu Akan Senang Jika Kamu Melakukannya</i>	Philippa Perry	1
106	<i>Joy At Work / Bekerja Bahagia: Berbenah Fisik dan Mental di Ranah Profesional</i>	Marie Kondo & Scott Sonenshein	1
107	Dari terminal ke terminal	M. Faizi	2
108	Melihat Indonesia dan Angkutan Umum	M. Faizi	1
109	<i>Beauty and The Bis</i>	M. Faizi	1
110	Tirakat Jalanan	M. Faizi	1
111	Ruang Kelas Berjalan	M. Faizi	1
112	<i>This Is why I Need You</i>	Brian Khrisna	1
113	Sherlock Holmes: Lembah Ketakutan	Sir Arthur Conan Doyle	1
114	<i>Dreams and the stages of life</i>	The Essential Jung	1
115	Tsukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya	Haruki Murakami	1
116	Dengarlah Nyanyian Angin	Haruki Murakami	1
117	Teori Administrasi Publik	Harbani Pasolong	1
118	Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Prof.Dr.Arifin Tahir	1
119	Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji dan Kebijakan Sosial	Edi Suharto	1
120	<i>13 Things Mentally Strong People</i>	Amy Morin	1
121	<i>Feel-good Productivity</i>	Ali Abdaal	1

NO	JUDUL	PENULIS	QTY
122	<i>Womenpreneur: Kunci Sukses Membangun Networking dan Kompetensi</i>	Librina Tria Putri; Zulkarnain; Frinov Feldiko Ibhar	1
123	Tindak Pidana Pencucian Uang	Rahman A	1
124	Mengenal Hak Cipta, Lisensi dan Best Practice Pengelolaan Jurnal	Muhamad Ratodi...[et.al.]	1
125	90 hari menulis buku : cara asyik dan menarik serta penuh tantangan dalam menulis sebuah buku	Nasrul Syarif, M.Si	1
126	<i>Tuesdays With Morrie</i>	Mitch Albom	1
127	Orang-orang tepi kali	Dedy Vansophi	1
128	<i>The Let Them Theory</i>	Mel Robbins	1
129	<i>I Who Have Never Known Men</i>	Jacqueline Harpman	1
130	Setiap Hari Stoik: 366 Renungan untuk Menjalani Kehidupan,	Ryan Holiday dan Stephen Hanselman,	1
131	<i>The Things You Can See Only When You Slow Down</i>	Haemin Sunim	1
132	<i>Leader who had no title</i>	Robin Sharma	1
133	<i>You can Read Anyone</i>	David J Lieberm	1
134	Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja	Lijan Poltak	1
135	<i>The Art of Laziness: Mengatasi Rasa Malas</i>	Library Mindset	1
136	Era Baru Strategi Komunikasi Sektor Publik	Eri Hariyanto	1
137	<i>Fir Flight Information Region dan Kedaulatan Negara di Udara</i>	Chappy Hakim	1
138	Pesawat Terbang Itu Berbahaya	Chappy Hakim	1
139	Kebijakan Publik dan Kekuasaan di Indonesia	Adam Amin Bahar, Kacung Marijan, Antum Mardiynta	1
140	<i>The Psychology of Stupidity</i>	Jean, Francois Marmion	1
141	<i>Surrounded by Idiots</i>	Thomas Erikson	1
142	<i>The Book You Want Everyone You Love to Read</i>	Philippa Perry	1

NO	JUDUL	PENULIS	QTY
143	<i>The Ombudsman Handbook: Designing and Managing an Effective Problem-Solving Program</i>	James T. Ziegenfuss, Patricia O'Rourke	1
144	<i>Is it Bad or Good Habits: Bagaimana Rutinitas dan Kebiasaan Dapat Memengaruhi Kehidupan</i>	Sabrina Ara	1
145	Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik	Yudhi Setiawan, dkk	1
Total Eksemplar			161

h. Alih Media Koleksi Ombudsman RI

Dalam upaya untuk melestarikan informasi terkait Ombudsman di Indonesia, pada tahun 2025 Perpustakaan Ombudsman melaksanakan pemindaian koleksi terbitan Ombudsman RI. Koleksi yang dilakukan digitalisasi berjudul "Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia" yang diterbitkan Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2003. Selain itu Perpustakaan Ombudsman juga melakukan pemindaian koleksi berjudul "Catatan Perjalanan Sebelas Tahun Ombudsman Republik Indonesia" yang diterbitkan pada tahun 2011 yang dibagikan secara terbatas. Pemindaian dan pelayanan koleksi digital ini merupakan salah satu bentuk konservasi informasi tentang Sejarah Ombudsman RI.



Koleksi Digital

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%) Realisasi/ Targetx100	Keterangan
1	Indeks kepuasan pengguna layanan perpustakaan	80 (Skala 100)	80	100%	Memiliki beberapa tahapan: 1. Persiapan pelaksanaan survei 2. Menentukan tahapan survei 3. Menentukan metodologi/uji survei 4. Menentukan responden 5. Menyusun pertanyaan 6. Melakukan uji validitas terkait pertanyaan 7. Membuat gform terkait pelaksanaan survei 8. Melakukan survey 9. Melakukan analisis hasil survei 10. Menarik kesimpulan terkait hasil indeks 11. Membuat laporan hasil survei

Capaian Kinerja Kelompok Kerja Teknologi Informasi, terdiri dari 5 (lima) Tim selama (Oktober-Desember) Triwulan IV Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Tim/Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Teknologi dan Informasi:

Tetap Melakukan optimalisasi kinerja Teknologi Informasi dengan menyesuaikan dari anggaran yang ada terkait efisiensi anggaran TA 2025 sesuai Inpres No. 1/2025 dan UU No. 37/2008 tanpa mengurangi kualitas Pelayanan Publik yang efektif.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Tim Monitoring dan Evaluasi Teknologi dan Informasi membuat 1 (satu) Kajian yaitu, “Penerapan Kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Pegawai di lingkungan Ombudsman RI”, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Manfaat Penerapan WFA

- Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Kinerja
Banyak penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai. Dengan bekerja dari lokasi yang nyaman dan minim gangguan, pegawai dapat lebih fokus menyelesaikan tugasnya dengan efisien.
- Efisiensi Anggaran Operasional Pemerintah
Dengan berkurangnya kehadiran fisik pegawai di kantor, biaya operasional seperti listrik, air, konsumsi harian, dan pemeliharaan gedung dapat dikurangi secara signifikan.
- Meningkatkan Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan (Work-Life Balance)
WFA memungkinkan pegawai mengatur ritme kerja yang lebih sehat, sehingga mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Pegawai yang memiliki work-life balance yang baik cenderung lebih loyal dan produktif
- Mengurangi Kemacetan dan Emisi Karbon
Sistem kerja fleksibel dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di kota-kota besar, serta menekan emisi karbon akibat penggunaan kendaraan pribadi.
- Pemerataan Ekonomi dan Pelayanan Publik
Dengan WFA, pegawai tidak harus terkonsentrasi di ibu kota atau kota besar. Mereka dapat bekerja dari daerah asal masing-masing, sehingga turut mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah.

B. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi WFA

- Keterbatasan Pengawasan Kinerja

- Tantangan: Pengawasan kerja pegawai menjadi lebih sulit jika tidak dilakukan secara langsung. Solusi:
- Menggunakan Performance Management System (PMS) berbasis teknologi untuk menilai kinerja pegawai berdasarkan output kerja.
- Menerapkan key performance indicators (KPI) yang jelas untuk setiap pegawai.
- Kendala Koordinasi dan Komunikasi
 - Tantangan: Koordinasi antarpegawai bisa menjadi kurang efektif tanpa tatap muka langsung.
 - Solusi:
 - Mengoptimalkan penggunaan aplikasi komunikasi digital seperti Microsoft Teams, Zoom, dan Google Meet.
 - Menetapkan hari tertentu untuk pertemuan tatap muka (hybrid)
 - Kesenjangan Akses Teknologi
 - Tantangan:

Tidak semua pegawai memiliki perangkat atau koneksi internet yang stabil untuk bekerja secara optimal dari luar kantor.
 - Solusi:

Instansi dapat menyediakan bantuan fasilitas kerja, seperti subsidi internet atau laptop bagi pegawai yang memenuhi syarat

C. Mekanisme Implementasi WFA

1. Penentuan Kategori Pekerjaan yang bisa WFA

Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari luar kantor. Oleh karena itu, perlu diklasifikasikan kategori pekerjaan yang memungkinkan WFA, seperti pekerjaan administratif, analisis kebijakan, dan pekerjaan berbasis data.
2. Penerapan Model Hybrid (Kombinasi WFA dan WFO)

Pegawai tetap diwajibkan untuk hadir di kantor dalam waktu tertentu, misalnya dua kali seminggu atau berdasarkan kebutuhan koordinasi pada masing-masing unit kerja.
3. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Penggunaan dashboard digital berbasis KPI untuk memantau kinerja pegawai secara real-time. Lalu melaksanakan evaluasi bulanan terhadap efektivitas WFA, dengan mekanisme sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi standar kerja.
4. Penyediaan Infrastruktur Teknologi

Setiap unit kerja perlu mengembangkan sistem kerja berbasis digital agar pegawai dapat bekerja secara efektif dari lokasi mana pun

D. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendukung implementasi WFA secara permanen, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah berikut:

1. Menyusun Regulasi Khusus tentang WFA bagi pegawai
Regulasi ini harus mengatur syarat, hak, kewajiban, serta mekanisme pengawasan pegawai yang bekerja dalam sistem WFA.
2. Meningkatkan Infrastruktur Digital di Lingkup Pemerintahan
Setiap instansi perlu memperkuat sistem informasi kepegawaian dan teknologi komunikasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan WFA.
3. Memberikan Pelatihan Digital bagi Pegawai
Pegawai perlu diberikan pelatihan tentang keterampilan digital, manajemen waktu, dan keamanan data dalam bekerja secara fleksibel.
4. Menetapkan Mekanisme Evaluasi yang Ketat
Harus ada sistem evaluasi berkala untuk memastikan bahwa WFA tidak mengurangi kualitas pelayanan publik

E. Kesimpulan:

Penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi Pegawai merupakan langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi modern yang efisien, fleksibel, dan berbasis hasil. Dengan dukungan regulasi yang jelas, teknologi yang memadai, serta sistem monitoring yang ketat, WFA dapat menjadi solusi yang meningkatkan kinerja pegawai, menghemat anggaran operasional, serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, solusi berbasis teknologi dan manajemen kinerja dapat memastikan keberhasilan program ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan yang memungkinkan WFA diterapkan dengan tetap menjamin kualitas pelayanan publik.

2. Layanan Pengelolaan Data dan Statistik

Selama Tahun 2025, Tim/Kelompok Kerja Data dan Statistik telah melakukan:

1. Penyelenggaraan Satu Data Ombudsman

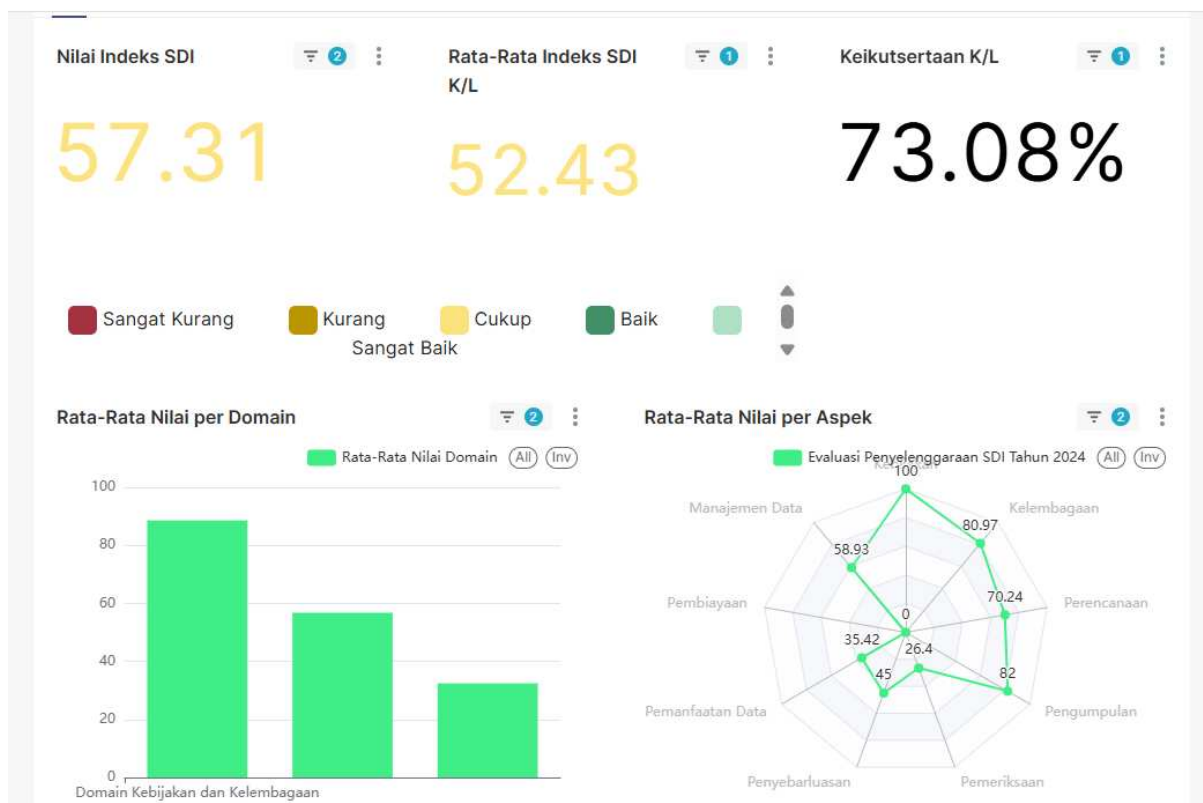
Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, turut berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan **Satu Data Indonesia** dan, secara spesifik, Ombudsman juga proaktif dalam membangun **Satu Data Ombudsman**. Perencanaan data prioritas telah dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2025 dan pada 28 Agustus 2025, Ombudsman RI turut serta dalam Forum SDI

Tingkat Pusat: Penyepakatan Rencana Induk Data Prioritas jangka Menengah 2025-2029. Setelah pelaksanaan Forum SDI, data prioritas telah disepakati pada bulan September 2025 oleh Walidata pada masing-masing instansi.

Selain itu, Ombudsman berkomitmen penuh untuk berperan aktif dalam pencapaian **Indeks Satu Data Indonesia (SDI)** yang optimal. Peran aktif ini bukan sekadar mengejar angka penilaian, melainkan upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap data yang dikelola Ombudsman mulai dari data laporan masyarakat hingga hasil Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan teknis.

Pada penilaian indeks SDI tahun 2025, Ombudsman mendapatkan nilai 57,31 (predikat cukup) naik 22,14 poin dari penilaian di tahun sebelumnya yaitu 35,17 (predikat kurang).

Dashboard Indeks SDI (K/L)



Indeks SDI Ombudsman RI

2. Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Dalam upaya memperkuat tata kelola data yang akuntabel dan terintegrasi, Ombudsman Republik Indonesia secara resmi telah menerima Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral dari Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina Data Statistik Sektoral. Pencapaian ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan bukti komitmen Ombudsman dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dengan adanya rekomendasi ini, setiap kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan oleh Ombudsman telah dinyatakan memenuhi standar kaidah statistik yang berlaku secara nasional.

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Kompilasi Data Laporan Masyarakat di Lingkungan Ombudsman RI
Penyelenggara	: Ombudsman Republik Indonesia
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-25.0000.100
Rekomendasi	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Setiap indikator statistik yang dihasilkan dan disediakan untuk publik idealnya mudah diakses oleh seluruh pengguna. Indikator statistik tersebut dapat disampaikan melalui berbagai media, salah satunya adalah website resmi instansi penyelenggara statistik. 2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)</i> yang berlaku secara internasional. <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. 3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. <ul style="list-style-type: none"> a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian. <i>Softcopy</i> publikasi dapat diunggah pada tautan berikut: http://s.bps.go.id/Hasil-K-25-0000-100.

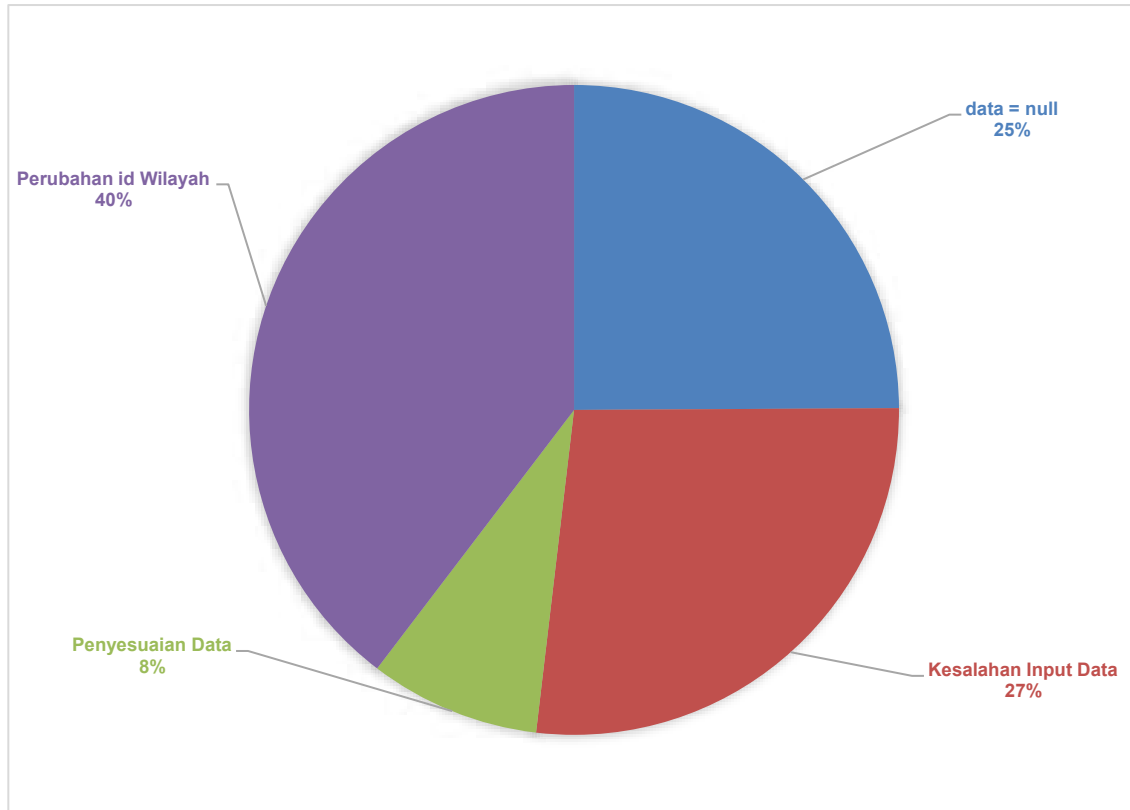
Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Kompilasi Data Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia
Penyelenggara	: Ombudsman Republik Indonesia
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-25.0000.106
Rekomendasi	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses penyusunan Kompilasi Data Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia tahun 2025, disarankan agar setiap data yang disajikan didukung dengan analisis komprehensif yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Hal ini penting agar laporan tidak hanya menyajikan angka dan statistik, tetapi juga mampu memberikan interpretasi mendalam terkait perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, metode pengumpulan data dan sumber data perlu dijelaskan secara jelas dan transparan guna menjamin keakuratan data serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap informasi yang disajikan. 2. Laporan hasil sebaiknya disajikan dalam format yang menarik dan mudah dipahami, seperti menggunakan infografis serta memastikan kemudahan dalam aksesibilitas data agar berbagai pihak dapat memanfaatkan informasi tersebut secara optimal. Hal ini juga akan mendukung keberlanjutan data dan bukti pendukung sebagai elemen utama untuk menilai efektivitas sekaligus menjamin perbaikan kebijakan yang berkelanjutan. 3. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i>(GSBPM) yang berlaku secara internasional. <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. 4. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. <ul style="list-style-type: none"> a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil</p>

Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral di Lingkungan Ombudsman RI

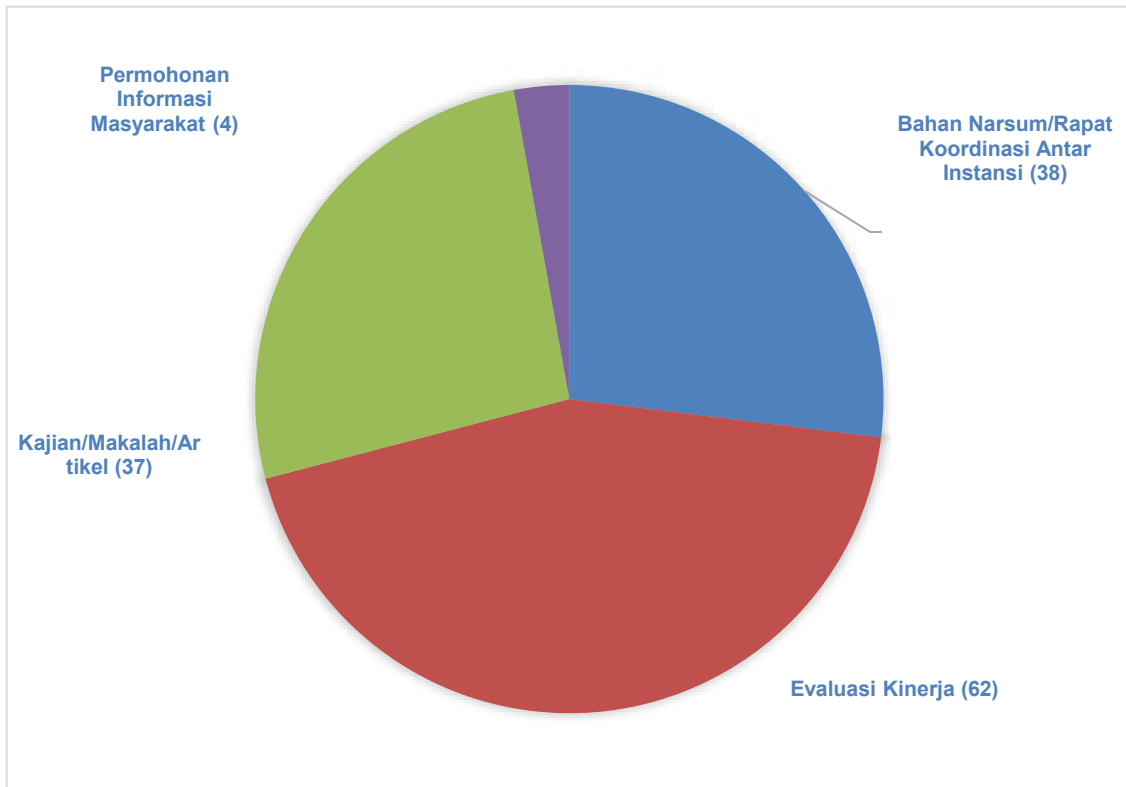
3. Memenuhi Permintaan Data dan Perbaikan Data pada Aplikasi SIMPEL4

Pada tahun 2025 Kelompok Kerja Data dan Statistik telah menyelesaikan **141 permintaan data** baik dari Kantor Pusat maupun Perwakilan dan memperbaiki data berdasarkan temuan dan permintaan pengguna aplikasi sebanyak **37,145 data**.



Periode Perbaikan	Jumlah Perbaikan Data
Triwulan I	2,621
Triwulan II	15,378
Triwulan III	8,216
Triwulan IV	10,930

Jumlah Perbaikan Data selama Tahun 2025



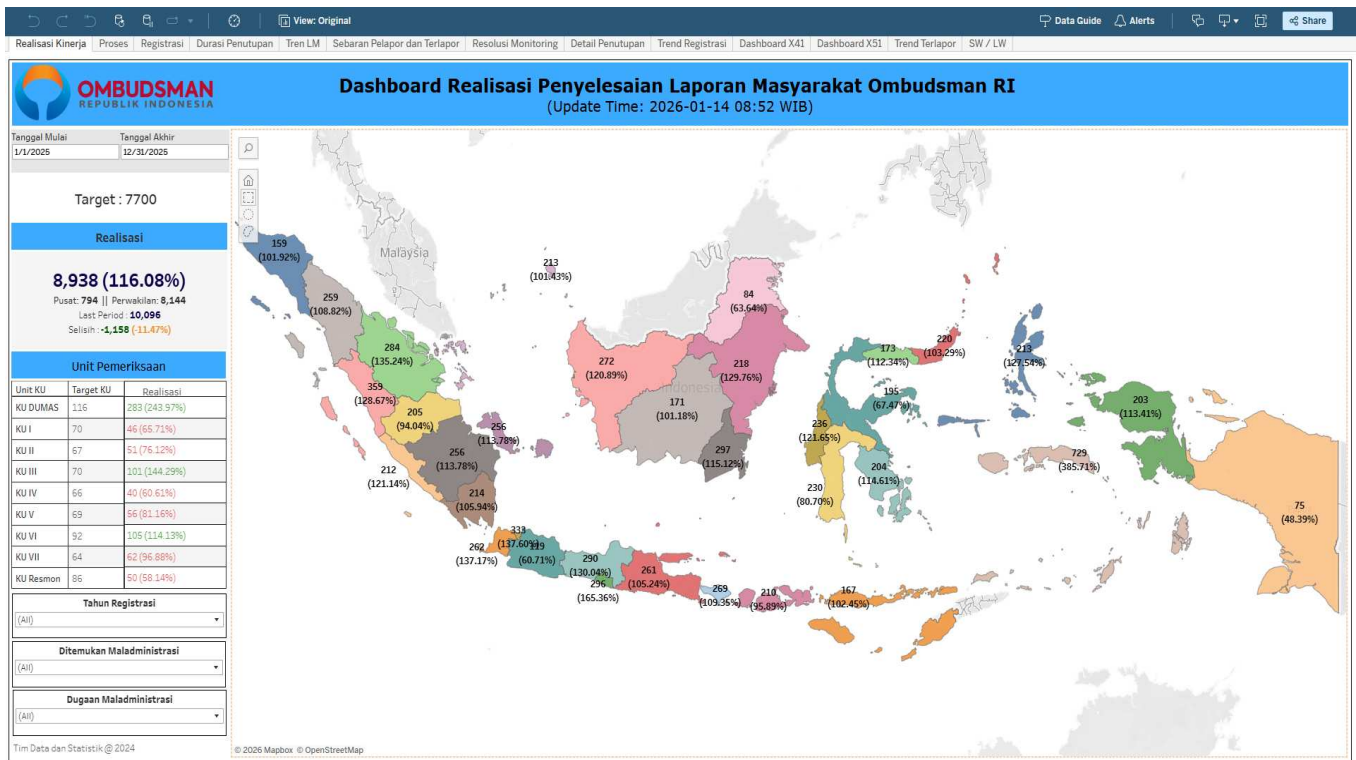
Periode Perbaikan	Jumlah Permintaan Data
Triwulan I	60
Triwulan II	20
Triwulan III	24
Triwulan IV	37

Jumlah Permintaan Data selama Tahun 2025

4. Launching dan Pengembangan Berkelanjutan "Dashboard Monitoring Penyelesaian Laporan Masyarakat

Pada tanggal 6 Februari 2025 telah dilaksanakan peluncuran "Dashboard Monitoring Penyelesaian Laporan Masyarakat" di Aula Lantai 1, Kantor Pusat Ombudsman RI. Kegiatan ini turut mengundang Tim Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik RI yang merupakan Pembina Kegiatan Statistik Sektor

Ombudsman RI pada penilaian EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) tahun 2024.



Peluncuran *dashboard* ini sejalan dengan Keputusan Menteri Bappenas tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2024, di mana data laporan masyarakat Ombudsman RI telah ditetapkan sebagai bagian dari Data Prioritas Nasional. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi Bappenas yang merangkap sebagai Sekretaris I Sekretariat Satu Data Indonesia, Bapak Dr. Agung Indrajit, ST, M.Sc. diundang sebagai narasumber dan membagikan strategi efektif untuk mengubah data menjadi sebuah Keputusan.



Foto Bersama dalam Kegiatan Launching Dashboard Monitoring Penyelesaian Laporan Masyarakat

Dalam rangka peningkatan berkelanjutan dan peningkatan kompetensi SDM pada bidang Teknologi Informasi khususnya pengembangan dan pengelolaan *Big Data* serta Artificial Intelligence (AI), Tim Data dan Statistik melaksanakan magang pada Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 Mei 2025 sampai dengan 23 Mei 2025.

Pada kesempatan tersebut tim yang ditugaskan mempelajari infrastruktur dan regulasi yang telah diterapkan oleh Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas untuk membangun sebuah RAG (Retrieval-Augmented Generation). Selain itu, pada 11 Juni 2025 juga berkesempatan untuk mengetahui berbagai pemanfaatan data untuk menganalisa perilaku yang telah dilaksanakan oleh United Nations Global Pulse yang saat ini berkerjasama juga dengan Bappenas.



Kunjungan Tim Ombudsman ke Kantor UN Global Pulse

3. Layanan Pengelolaan Aplikasi dan Helpdesk

Selama Tahun 2025, Layanan Pengelolaan Aplikasi dan Helpdesk telah melakukan:

1. Asistensi Aplikasi

Berdasarkan grafik Statistik Jumlah Keluhan/Kendala Aplikasi Tahun 2025, tercatat total 599 keluhan dan permintaan layanan yang ditangani sepanjang tahun. Jenis keluhan yang paling dominan adalah Perubahan Data Laporan dengan jumlah 267 kasus, yang menunjukkan bahwa aktivitas penyesuaian dan pembaruan data laporan merupakan kebutuhan utama pengguna aplikasi.

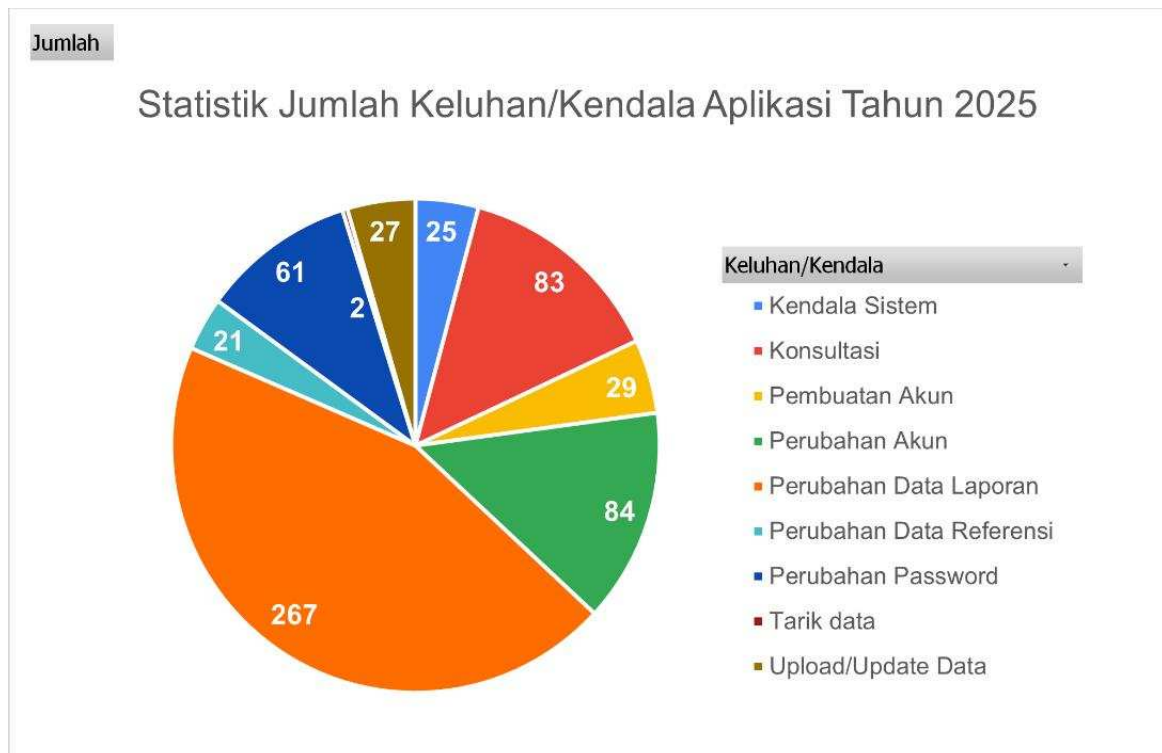
Keluhan/Kendala	Jumlah
Kendala Sistem	25
Konsultasi	83
Pembuatan Akun	29
Perubahan Akun	84
Perubahan Data Laporan	267
Perubahan Data Referensi	21

Perubahan Password	61
Tarik data	2
Upload/Update Data	27
	599

Rekapitulasi Jumlah Keluhan/Kendala Aplikasi Tahun 2025

Selanjutnya, Perubahan Akun dan Konsultasi masing-masing tercatat sebanyak 84 dan 83 kasus, yang mengindikasikan tingginya kebutuhan pengguna terhadap pengelolaan akun serta pendampingan penggunaan aplikasi. Perubahan Password juga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 61 kasus, mencerminkan pentingnya aspek keamanan dan akses pengguna.

Sementara itu, Pembuatan Akun tercatat sebanyak 29 kasus, Upload/Update Data sebanyak 27 kasus, dan Kendala Sistem sebanyak 25 kasus. Adapun Perubahan Data Referensi tercatat sebanyak 21 kasus, dan Tarik Data merupakan jenis keluhan dengan jumlah paling sedikit, yaitu 2 kasus.



Statistik Jumlah Keluhan/Kendala Aplikasi Tahun 2025

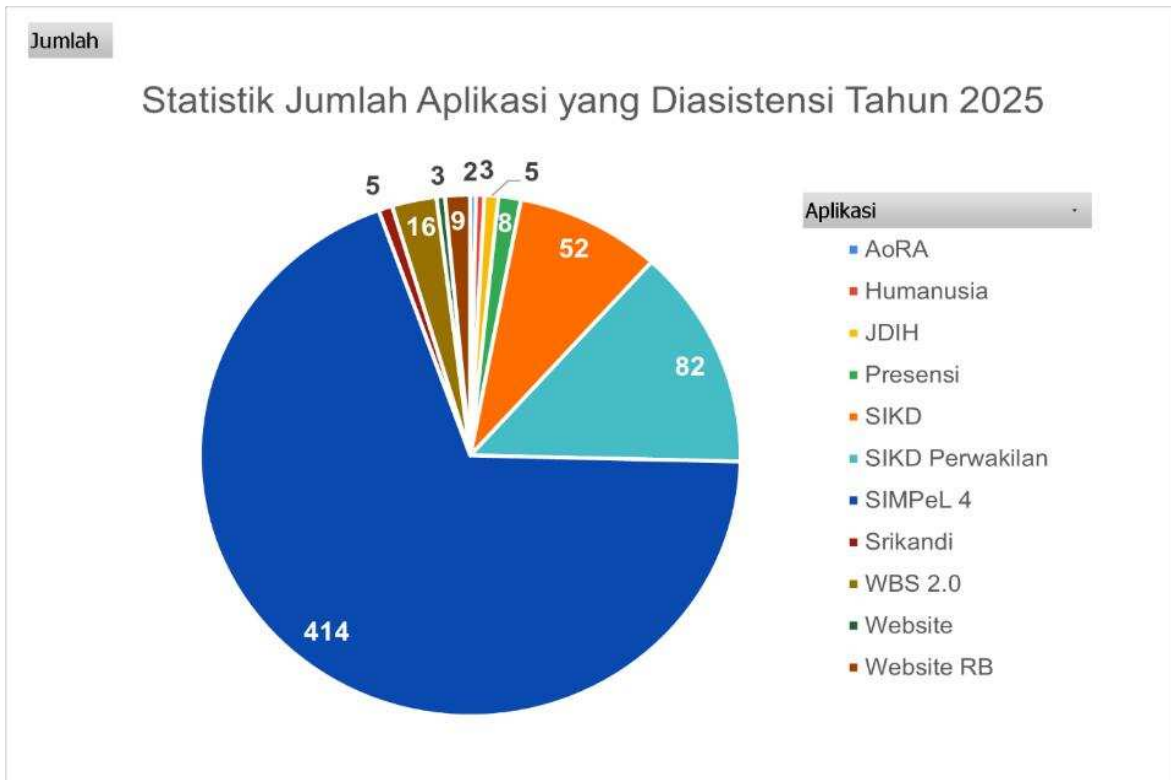
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan dan kendala yang diterima berkaitan dengan pengelolaan data dan akun pengguna, sehingga dapat menjadi dasar bagi Tim Pengelolaan Aplikasi dan Helpdesk dalam menetapkan prioritas peningkatan sistem, penyempurnaan prosedur layanan, serta penguatan dukungan teknis pada tahun berikutnya.

Selain data jumlah kendala, terdapat juga statistik aplikasi mana yang paling banyak dilakukan asistensi selama tahun 2025. Dari data yang tercatat, aplikasi SIMPeL 4 menjadi aplikasi yang paling sering mendapatkan asistensi dengan 414 kali asistensi, disusul oleh SIKD Perwakilan dengan 82 kali asistensi, dan SIKD Pusat dengan 52 kali asistensi. Beberapa aplikasi lainnya seperti WBS 2.0, Website JDIH, dan aplikasi Srikandi juga mendapatkan asistensi dengan frekuensi yang bervariasi.

Keluhan/Kendala	Jumlah
Kendala Sistem	25
Konsultasi	83
Pembuatan Akun	29
Perubahan Akun	84
Perubahan Data Laporan	267
Perubahan Data Referensi	21
Perubahan Password	61
Tarik data	2
Upload/Update Data	27
	599

Rekapitulasi Jumlah Aplikasi yg diasistensi Tahun 2025

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan variasi jumlah aplikasi yang dikelola serta frekuensi asistensi yang diberikan selama tahun 2025, dengan beberapa aplikasi menjadi fokus utama baik dari segi jumlah maupun dukungan teknis yang diberikan.



Statistik Jumlah Aplikasi yang Diasistansi Tahun 2025

2. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi

a. Website JDIH

Pada tahun 2025 Tim Pengelolaan Aplikasi dan Helpdesk mengelola website JDIH Ombudsman dengan melakukan sinkronisasi berkala metadata dokumen-dokumen hukum produk Ombudsman dengan website JDIH Nasional.

Adapun sinkronisasi baru dapat dilaksanakan pada bulan Maret, dikarenakan website JDIH Nasional pada bulan Januari-Februari tidak dapat diakses (maintenance). Berikut tangkapan layar hasil kegiatan sinkronisasi metadata JDIH Ombudsman pada website JDIH Nasional;

SELAMAT DATANG DI DASHBOARD PENGELOLAAN DATA INTEGRASI JDIHN

Halaman dashboard ini berisi rekap hasil pengintegrasian data dari Anggota

260

Proses Sinkron Data ✓

299

Dokumen Ditampilkan Di JDIHN ☰

Sync / Update

Silahkan Tekan Ikon Berikut! ↻

LOG SINKRON ANGGOTA

Show entries Search:

Nomor	Tanggal	Sync	Data	API	Keterangan
1	March 14, 2025 9:31 AM	Sukses Sync	50	https://jdi.h.ombudsman.go.id/integrasi/sampe_API?token=abc	Sukses dengan 50 data.
2	March 14, 2025 9:25 AM	Sukses Sync	50	https://jdi.h.ombudsman.go.id/integrasi/sampe_API?token=abc	Sukses dengan 50 data.
3	March 14, 2025 9:20 AM	Sukses Sync	50	https://jdi.h.ombudsman.go.id/integrasi/sampe_API?token=abc	Sukses dengan 50 data.

b. Website Reformasi Birokrasi

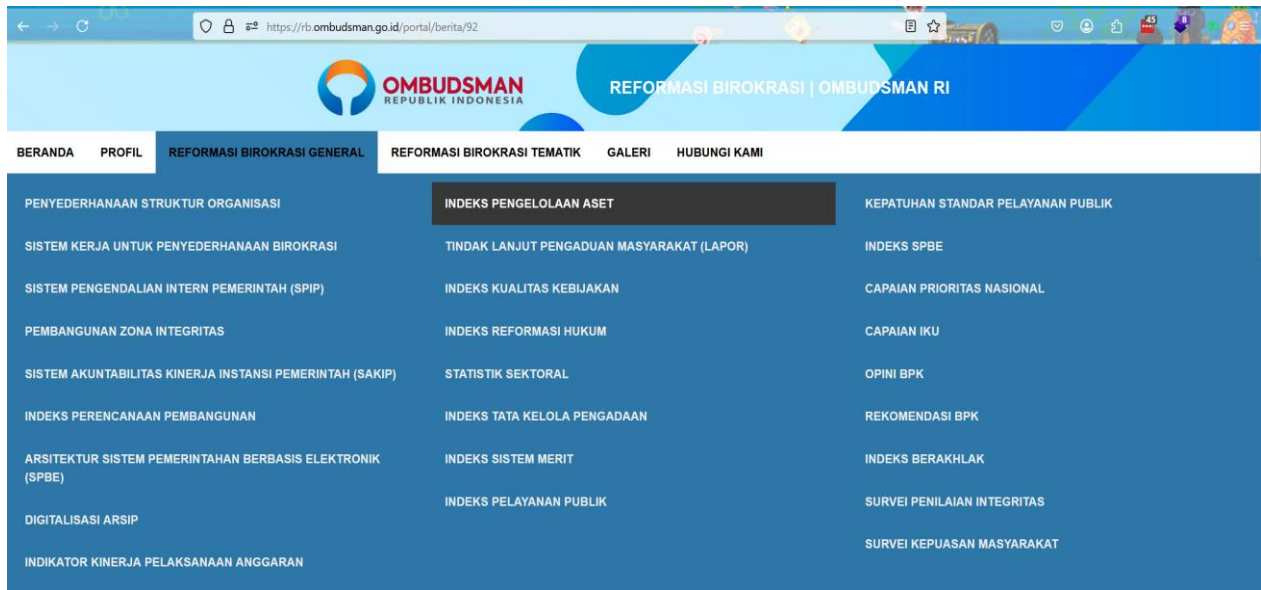
Pengelolaan pada website Reformasi Birokrasi tahun 2025 diantaranya ialah permintaan upload berita terbaru pada website Reformasi Birokrasi juga update Menu pada halaman Beranda.



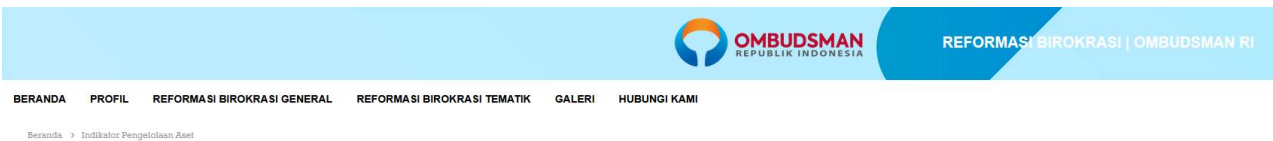
JAKARTA – Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ombudsman RI Tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 dengan nilai 67.60 dengan kategori B (Baik) menjadi nilai 68.05 dengan kategori B (Baik) di tahun 2024. Hal tersebut memberikan highlight bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Ombudsman RI Tahun 2024 sudah baik pada instansi pemerintah dan Sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Demi menjaga tren positif nilai AKIP tersebut dan mencapai target kategori yang lebih tinggi, Ombudsman RI terus melakukan pembenahan untuk tahun 2025. Ombudsman RI mengadakan kegiatan Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan di tahun 2025. Kegiatan yang diadakan pada Jumat (24/1/2025) di Aula Serba Guna Lantai Dasar Gedung Ombudsman RI ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur beserta jajaran, Para Kepala Biro, Para Kepala Keasistenan Utama, dan Tim Kerja Perencanaan.

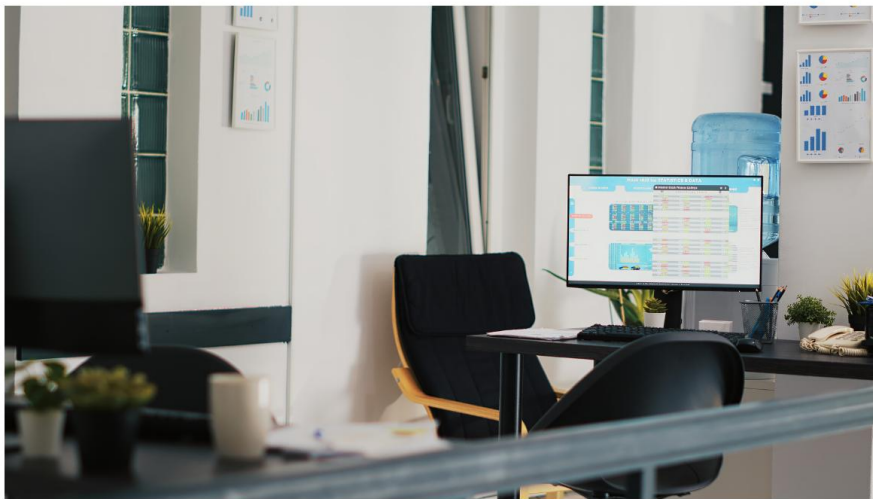
Pada akhir kegiatan disepakati beberapa poin penting yaitu, agar dapat sesegera mungkin dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja dari tiap unit kerja sehingga Perjanjian Kerja yang sedang disusun Tim Kerja Perencanaan dapat disesuaikan, penyusunan Pohon Kinerja yang cascading dari kinerja Lembaga Ombudsman RI, pelaporan kinerja harus senantiasa diperhatikan dan dipenuhi kelengkapannya dari setiap unit kerja, serta perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Internal tiap unit kerja untuk mengidentifikasi hal-hal yang menghambat pencapaian kinerja termasuk penyusunan rencana tindak lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut.



Update Menu Indeks Pengelolaan Aset

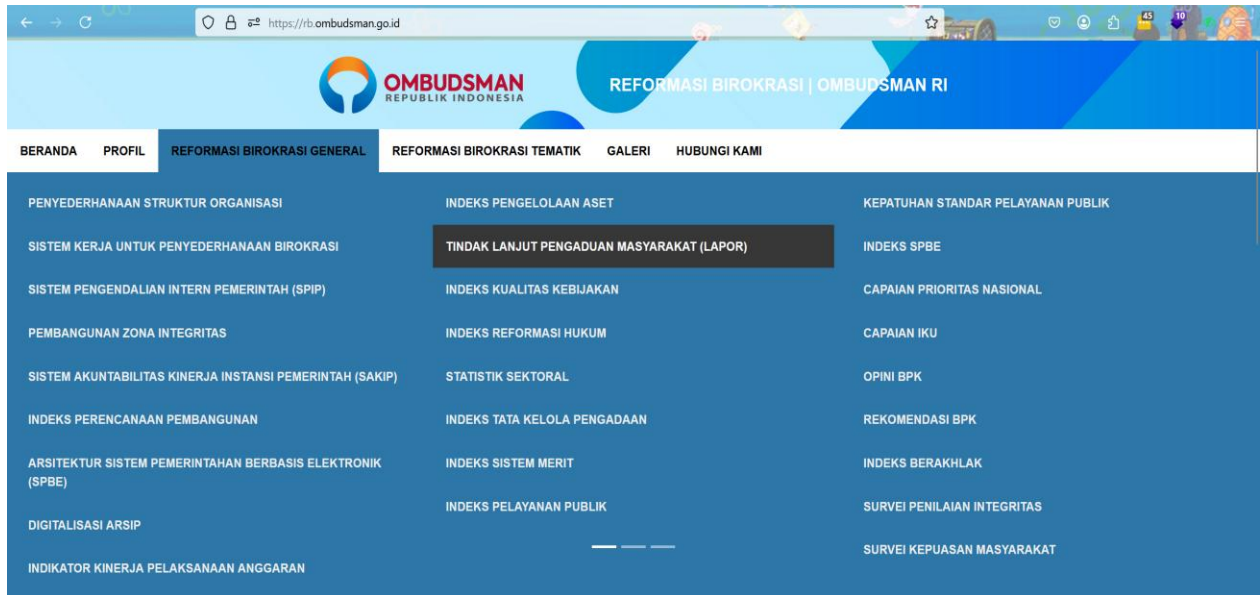


Indikator Pengelolaan Aset

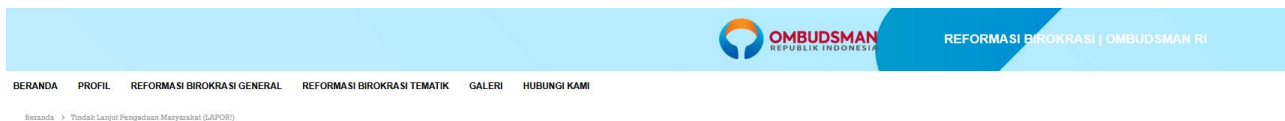


Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN/D meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dan diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tampilan Konten Menu Indeks Pengelolaan Aset yang Sudah Diupdate



Update Menu Tindak Lanjut Pengaduan



Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)



Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan pembentukan, dimana salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat. Pada tahun 2013, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik. Peraturan ini mengatur mengenai hak, kewajiban, mekanisme, serta sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik nasional yang bertujuan untuk melindungi pengguna pelayanan dalam mendapatkan Pelayanan Publik yang berkualitas, wajar dan adil. Melalui SP4N diharapkan publik dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan serta aspirasi terkait dengan Pelayanan Publik.

Tampilan Konten Menu Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

c. Aplikasi KANUSA (Kawal Nutrisi Untuk Bangsa)

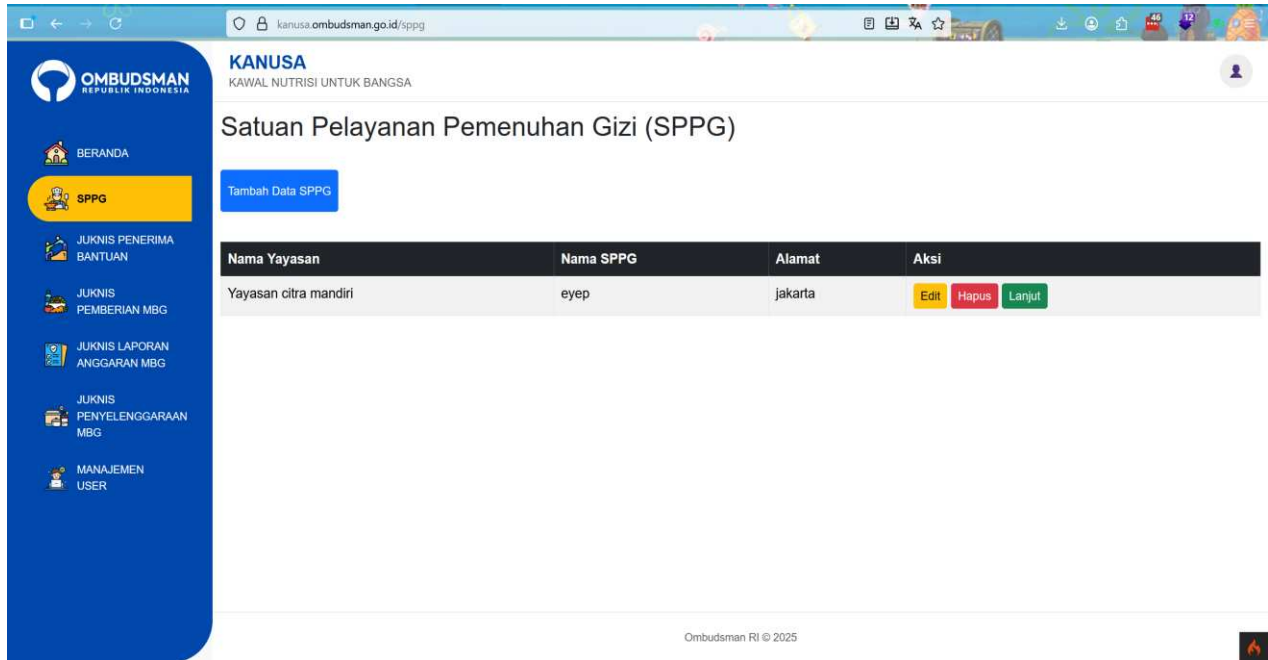
Pada Tahun 2025, kegiatan pengembangan Aplikasi KANUSA (Kawal Nutrisi Untuk Bangsa) telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis) dari BGN. KANUSA merupakan inovasi digital yang dirancang oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pelayanan publik yang disiapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan Ombudsman khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fokus utama pengembangan pada periode ini meliputi:

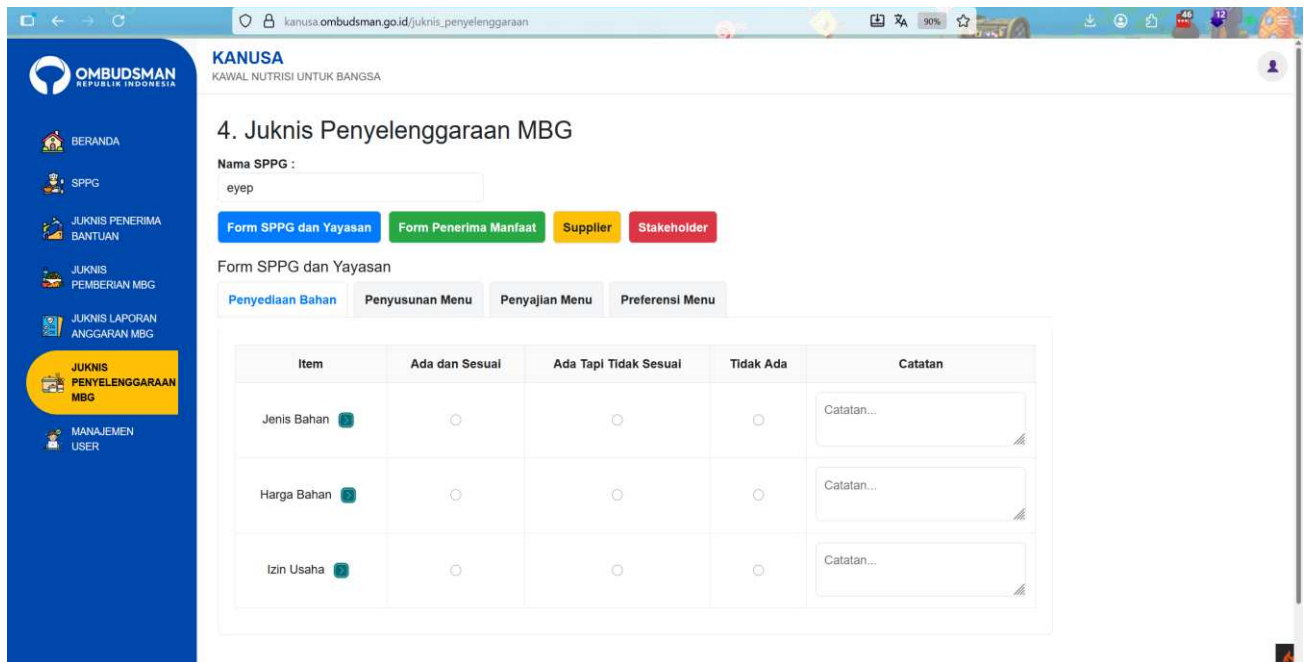
- Perancangan dan sistem aplikasi dengan menggunakan tampilan yang user friendly sehingga memudahkan pengguna
- Pekerjaan coding dasar terutama untuk bagian front end yang diambil dari rancangan desain yang sudah dibuat sebelumnya
- Perancangan dan pembuatan basis data, untuk menunjang kinerja aplikasi sekaligus media penyimpanan data yang diinput pada aplikasi
- Penyusunan tampilan antarmuka (UI/UX) yang lebih responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat, baik komputer maupun ponsel pintar.
- Pembuatan API (*Application Programming Interface*) dengan standar RESTFUL API, untuk memudahkan dalam berbagi pakai data



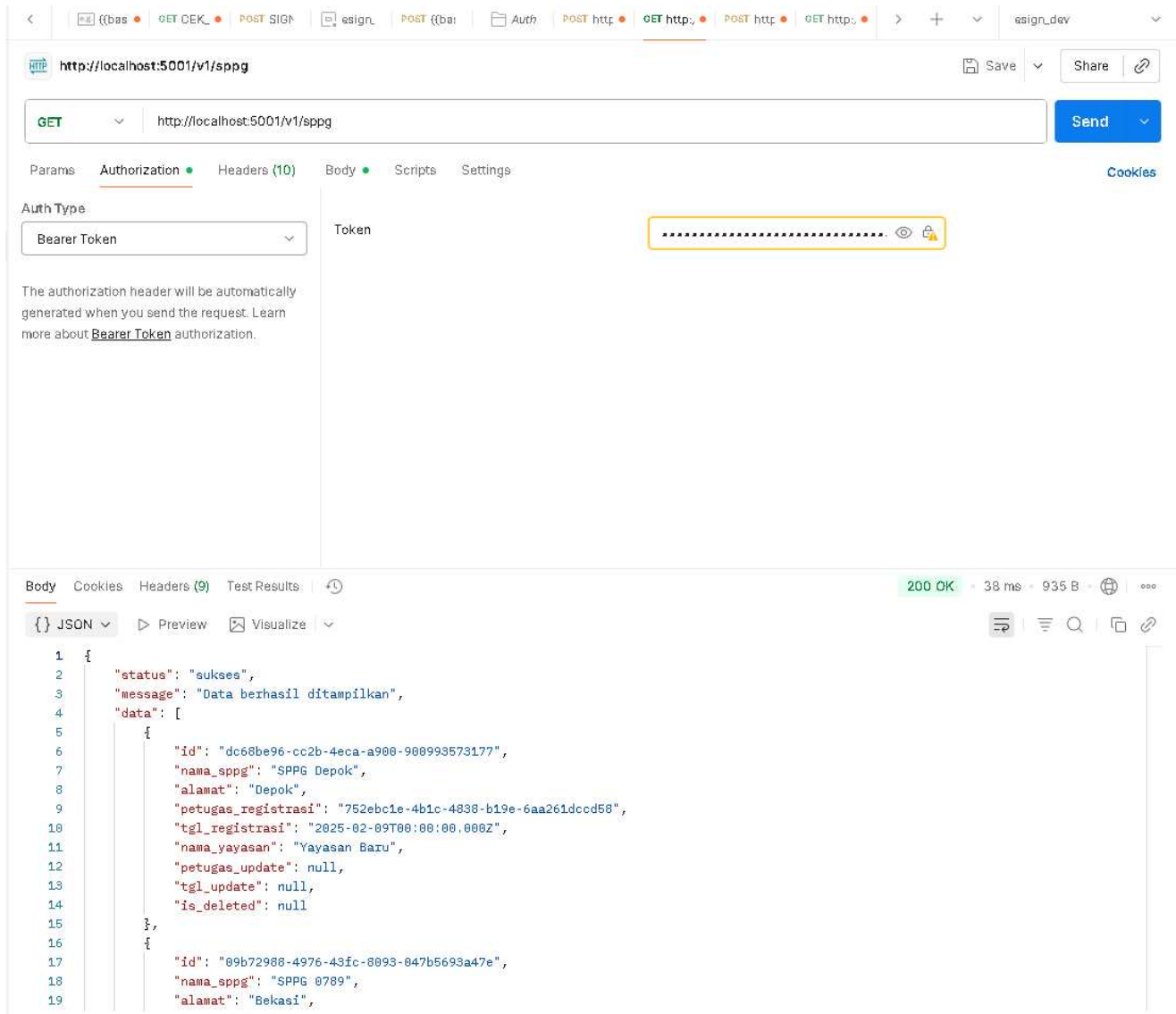
Tampilan Halaman Beranda Aplikasi KANUSA



Tampilan Halaman "SPPG" Aplikasi KANUSA



Tampilan Halaman "Juknis" Aplikasi KANUSA



Tampilan Koneksi Database Aplikasi KANUSA

d. Aplikasi SIMPeL 4

1) Pengadaan Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi SIMPeL 4

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan laporan masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia senantiasa berupaya mengembangkan sistem informasi yang mampu mendukung tugas dan fungsi pengawasannya terhadap pelayanan publik. Salah satu sistem informasi yang telah dikembangkan adalah Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL), yang berfungsi sebagai platform utama dalam pengelolaan laporan masyarakat, mulai dari penerimaan hingga penyelesaian.

Adapun pada akhir tahun 2023, Ombudsman RI telah membuat Peraturan Ombudsman No 58 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyelesaian Laporan sebagai respon akan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam melaporkan permasalahan terkait pelayanan publik ke Ombudsman RI, dan belum dilakukan penyesuaian dari sisi Aplikasi SIMPeL 4 untuk mengakomodir Peraturan Ombudsman ini. Untuk memastikan penyelesaian laporan yang handal dan berkualitas, dan supaya selaras dengan Peraturan Ombudsman No 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyelesaian Laporan, maka diperlukan pengembangan aplikasi SIMPeL 4.

- Proses tender tahap 1 (25 April – 27 Mei 2025)

Proses tender berjalan sesuai dengan jadwal, namun pada tahap Proses Sanggah Prakuifikasi, terdapat vendor yang mengajukan proses sanggah pada tanggal 12 Mei 2025 dan sanggahnya diterima oleh panitia tender yang menyebabkan proses tender dibatalkan dan diulang.

Tahap Tender Saat Ini [10026576000] Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIMPEL Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025				
No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan	
1	Pengumuman Prakuifikasi	25 April 2025 16:30	29 April 2025 07:59	Tidak Ada
2	Download Dokumen Kualifikasi	29 April 2025 08:00	6 Mei 2025 07:59	Tidak Ada
3	Penjelasan Dokumen Prakuifikasi	29 April 2025 17:00	2 Mei 2025 11:59	Tidak Ada
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi	2 Mei 2025 12:00	6 Mei 2025 07:59	Tidak Ada
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	6 Mei 2025 08:00	7 Mei 2025 08:59	Tidak Ada
6	Pembuktian Kualifikasi	7 Mei 2025 09:00	8 Mei 2025 10:59	Tidak Ada
7	Penetapan Hasil Kualifikasi	8 Mei 2025 11:00	8 Mei 2025 14:59	Tidak Ada
8	Pengumuman Hasil Prakuifikasi	8 Mei 2025 15:00	9 Mei 2025 12:59	Tidak Ada
9	Masa Sanggah Prakuifikasi	9 Mei 2025 13:00	14 Mei 2025 07:59	Tidak Ada
10	Download Dokumen Pemilihan	14 Mei 2025 08:00	19 Mei 2025 08:59	Tidak Ada
11	Pemberian Penjelasan	14 Mei 2025 08:01	16 Mei 2025 12:59	Tidak Ada
12	Upload Dokumen Penawaran	16 Mei 2025 13:00	19 Mei 2025 08:59	Tidak Ada
13	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	19 Mei 2025 10:00	20 Mei 2025 12:59	Tidak Ada
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	20 Mei 2025 13:00	20 Mei 2025 14:59	Tidak Ada
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	20 Mei 2025 15:00	22 Mei 2025 08:59	Tidak Ada
16	Penetapan Pemenang	22 Mei 2025 09:00	22 Mei 2025 12:59	Tidak Ada
17	Pengumuman Pemenang	22 Mei 2025 13:00	22 Mei 2025 15:59	Tidak Ada
18	Masa Sanggah	22 Mei 2025 16:00	26 Mei 2025 12:59	Tidak Ada
19	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	26 Mei 2025 13:00	27 Mei 2025 09:59	Tidak Ada
20	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	27 Mei 2025 10:00	27 Mei 2025 12:59	Tidak Ada

- Proses tender tahap 2 (15 Mei – 20 Juni 2025)

Proses seleksi pemilihan penyedia berjalan sesuai dengan jadwal, dan terdapat lagi vendor yang mengajukan sanggah pada Proses Masa

Sanggah, namun kali ini panitia tidak menerima dengan alasan sudah sesuai prosedur.

Tahap Tender Saat Ini [10032887000] Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIMPEL Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025				
No Tahap		Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Prakuifikasi	15 Mei 2025 18:00	20 Mei 2025 11:59	Tidak Ada
2	Download Dokumen Kualifikasi	15 Mei 2025 19:00	21 Mei 2025 08:59	Tidak Ada
3	Penjelasan Dokumen Prakuifikasi	16 Mei 2025 08:00	19 Mei 2025 11:59	Tidak Ada
4	Kirim Persyaratan Kualifikasi	16 Mei 2025 08:00	21 Mei 2025 08:59	Tidak Ada
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21 Mei 2025 09:00	26 Mei 2025 08:59	Tidak Ada
6	Pembuktian Kualifikasi	26 Mei 2025 09:00	27 Mei 2025 16:59	Tidak Ada
7	Penetapan Hasil Kualifikasi	27 Mei 2025 17:00	28 Mei 2025 08:59	Tidak Ada
8	Pengumuman Hasil Prakuifikasi	28 Mei 2025 09:00	28 Mei 2025 11:59	Tidak Ada
9	Masa Sanggah Prakuifikasi	28 Mei 2025 12:00	2 Juni 2025 12:59	Tidak Ada
10	Download Dokumen Pemilihan	2 Juni 2025 13:00	10 Juni 2025 08:59	Tidak Ada
11	Pemberian Penjelasan	3 Juni 2025 10:00	5 Juni 2025 15:59	Tidak Ada
12	Upload Dokumen Penawaran	3 Juni 2025 11:00	10 Juni 2025 08:59	Tidak Ada
13	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	10 Juni 2025 09:00	11 Juni 2025 15:59	Tidak Ada
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	11 Juni 2025 16:00	11 Juni 2025 17:59	Tidak Ada
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	11 Juni 2025 18:00	13 Juni 2025 13:59	Tidak Ada
16	Penetapan Pemenang	13 Juni 2025 15:00	13 Juni 2025 16:59	Tidak Ada
17	Pengumuman Pemenang	13 Juni 2025 17:00	13 Juni 2025 23:59	Tidak Ada
18	Masa Sanggah	14 Juni 2025 00:00	17 Juni 2025 09:59	Tidak Ada
19	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	17 Juni 2025 10:00	18 Juni 2025 12:59	Tidak Ada
20	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18 Juni 2025 10:00	20 Juni 2025 13:59	Tidak Ada
21	Penandatanganan Kontrak	20 Juni 2025 14:00	20 Juni 2025 14:59	Tidak Ada

Jadwal Seleksi Pemilihan Penyedia Tahap 2

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, PT Techno International Mandira ditetapkan sebagai pemenang seleksi pada tanggal 13 Juni 2025. Surat penunjukan penyedia jasa diterbitkan pada 18 Juni 2025, dan penandatanganan dokumen – dokumen administrasi kontrak dilakukan pada 25 Juni 2025.

Pasca pemenang seleksi pemilihan penyedia sudah diketahui, Tim Pengelolaan Aplikasi dan Helpdesk mulai melakukan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi SIMPeL Ombudsman Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2025.

Pekerjaan ini bekerja sama dengan PT Techno International Mandira selaku pemenang seleksi pengadaan, dengan durasi pekerjaan selama bulan Juli sampai dengan Desember 2025.

Beberapa capaian utama dari proses pengembangan mencakup:

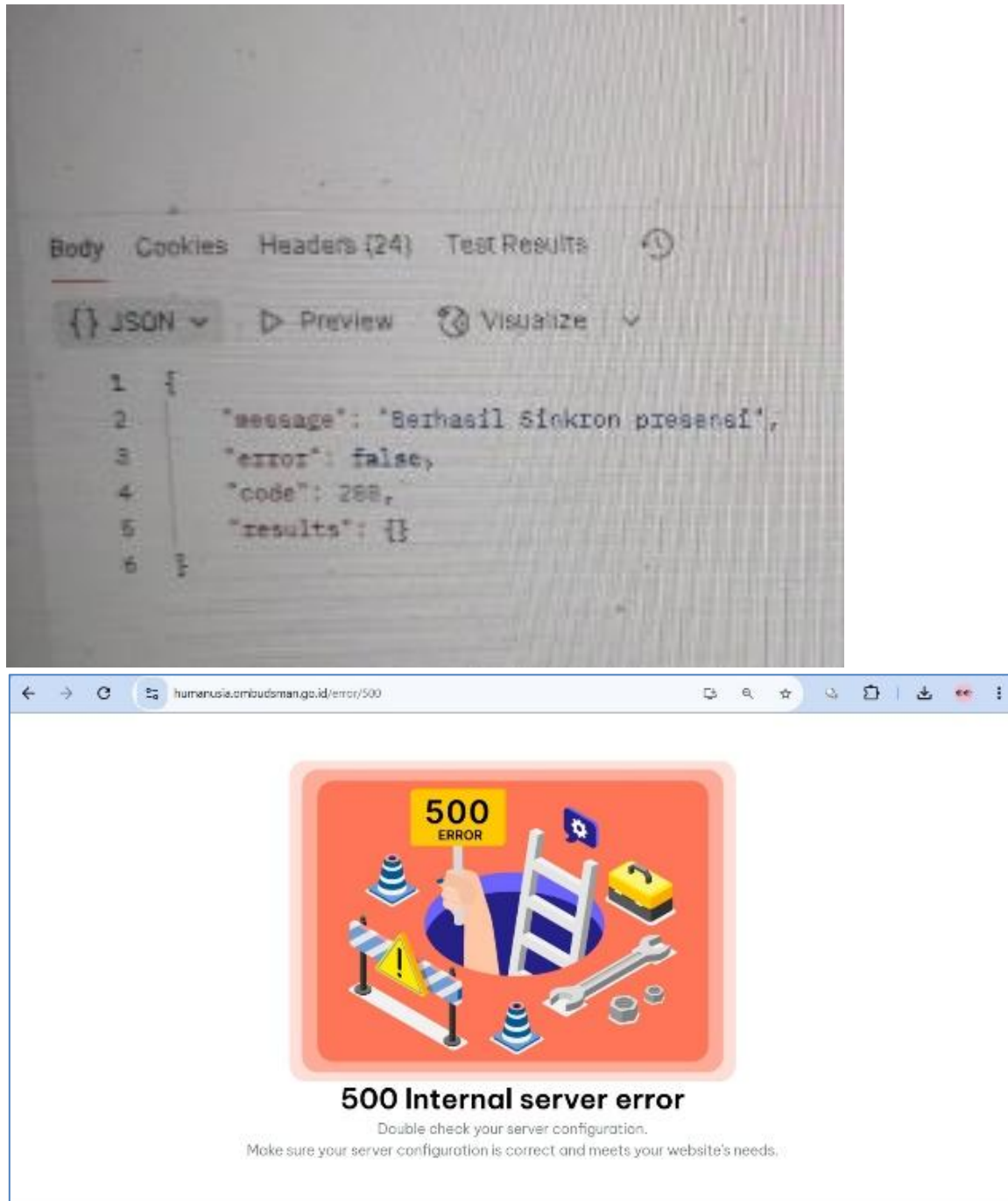
- Pemantauan kendala dan hambatan teknis pada proses penutupan verifikasi formil dan materil
- Penyediaan data statistik laporan per asisten per tahun sebagai bahan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- Penyempurnaan fitur pada menu Lampiran Final, termasuk penambahan fungsi unggah dokumen untuk laporan yang telah ditutup serta pada tahap awal registrasi (kategori Konsultasi dan LM) Dari sisi *DevOps Engineer*, telah dilakukan penyesuaian terhadap struktur folder, *environment variable*, dan konfigurasi dasar yang digunakan tim developer. Selain itu, telah dilakukan optimalisasi pipeline pengembangan agar proses deploy dan integrasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan, atau biasa disebut dengan *CI (Continuous Integration) / CD (Continuous Deployment)*.

Pada periode ini, tim pengembangan telah melaksanakan *Sprint Planning* untuk memastikan fokus pengembangan. Sprint yang direncanakan memiliki durasi waktu selama dua minggu dengan lingkup pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Proses ini menghasilkan backlog prioritas yang telah disepakati bersama, dan akan menjadi acuan selama pelaksanaan sprint berjalan.

Secara keseluruhan, proses pengembangan berjalan sesuai dengan rencana awal. Tahap eksplorasi sistem eksisting dan penyusunan ulang alur pengembangan telah memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan fitur lanjutan di bulan berikutnya.

e. Aplikasi Humanusia

Pada awal tahun 2025, Tim Pengelolaan Aplikasi dan Helpdesk telah memperbaiki *bugs* dan *error* yang terdapat pada aplikasi Humanusia yaitu pada fitur untuk sinkronisasi data presensi dari *finger print* ke aplikasi humanusia. Dalam memperbaiki bugs tersebut tim berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan ditemukan solusi perbaikan yaitu dengan melakukan konfigurasi pada server (nginx) *time out*.



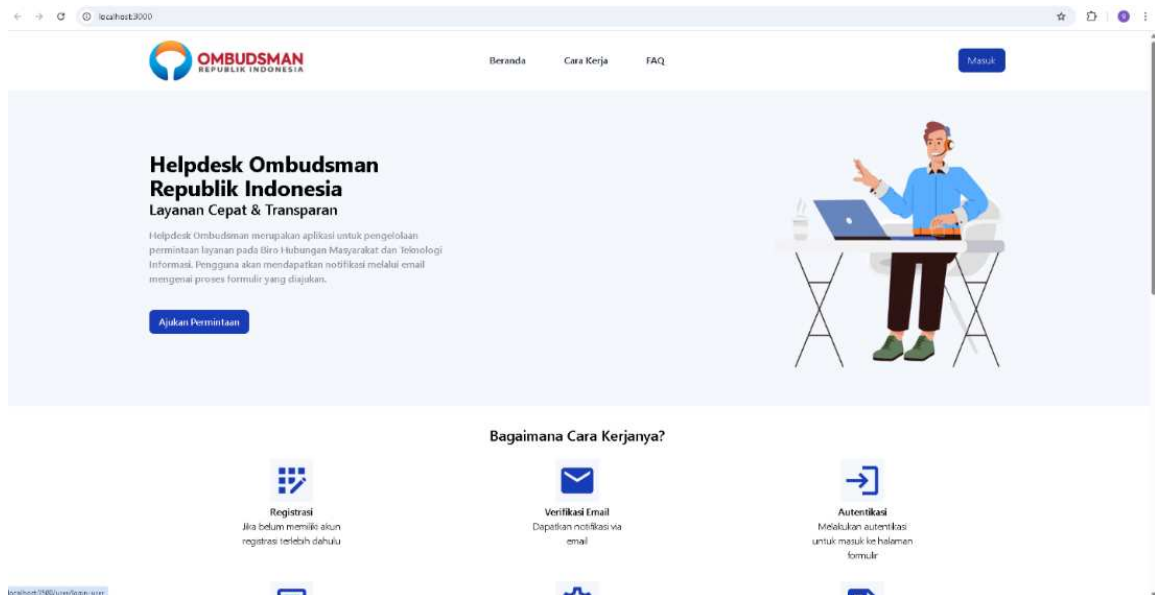
f. Aplikasi Helpdesk

Telah dilakukan pengembangan aplikasi Helpdesk yang semula Notialahuti. Aplikasi Helpdesk aplikasi untuk pengelolaan permintaan layanan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

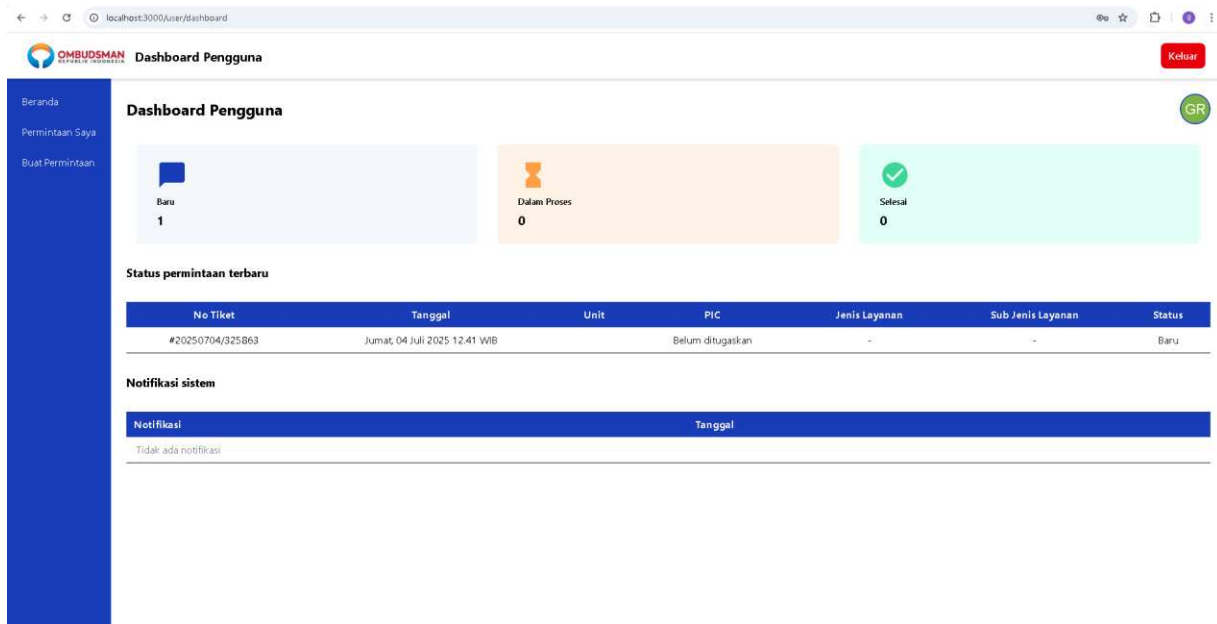
Aplikasi ini terdiri dari 3 Modul, yaitu:

Modul	Keterangan
Halaman User	Merupakan form isian keluhan/permintaan layanan oleh user.
Halaman Admin	Sebagai halaman admin yang dapat menerima, memilah layanan yang dibutuhkan, dan meng-assign PIC untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Halaman admin juga bisa menambahkan akun PIC, manajemen layanan, dan merekap data statistik
Halaman PIC	Halaman untuk menerima permintaan layanan/keluhan oleh user, menindaklanjuti dan melihat rekap data statistik. Aplikasi helpdesk dapat dilihat pada laman: https://helpdesk.ombudsman.go.id/

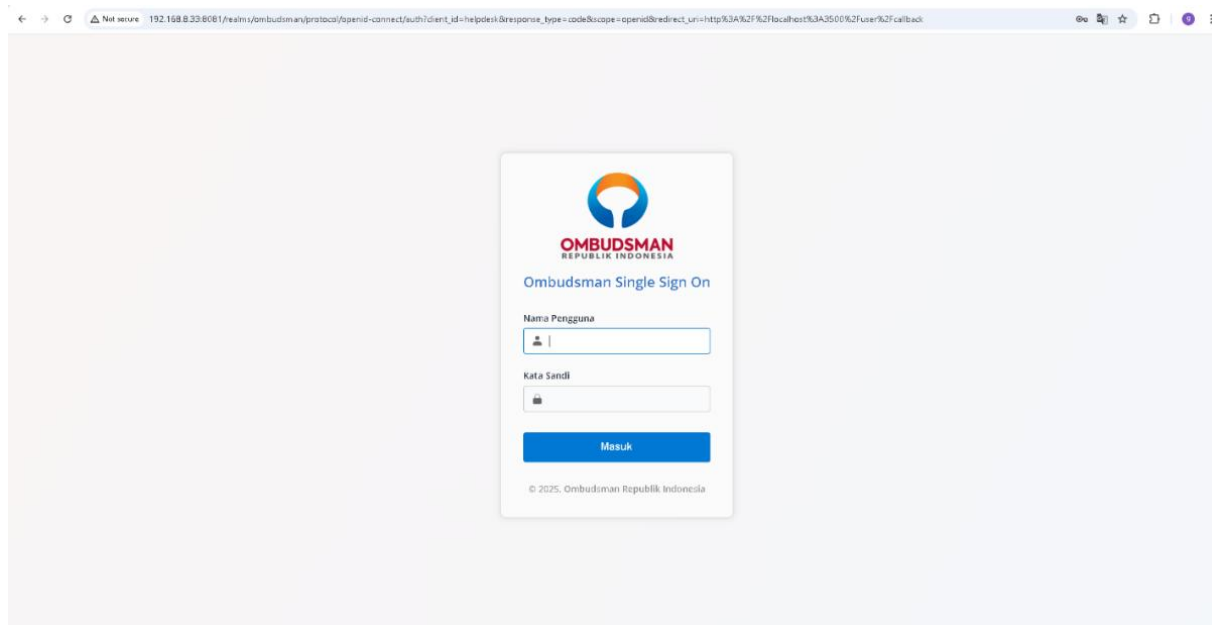
Dalam pengembangan aplikasi Helpdesk, Tim Kerja Pengelolaan Aplikasi dan *Helpdesk* melakukan penambahan fitur pada aplikasi ini yaitu fitur login dengan *Single Sign On (SSO)* menggunakan akun email. Dengan adanya fitur SSO ini, diharapkan dapat memudahkan para pengguna terutama dalam proses login ke aplikasi.



Tampilan Halaman Depan Aplikasi Helpdesk



Tampilan Halaman Dashboard Aplikasi Helpdesk



Tampilan Halaman Login Aplikasi Helpdesk

3. Pekerjaan Konsultansi Senior Solution Architect
 Pada Tahun 2025, Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan kegiatan konsultansi di bidang teknologi informasi melalui penugasan Konsultan Senior

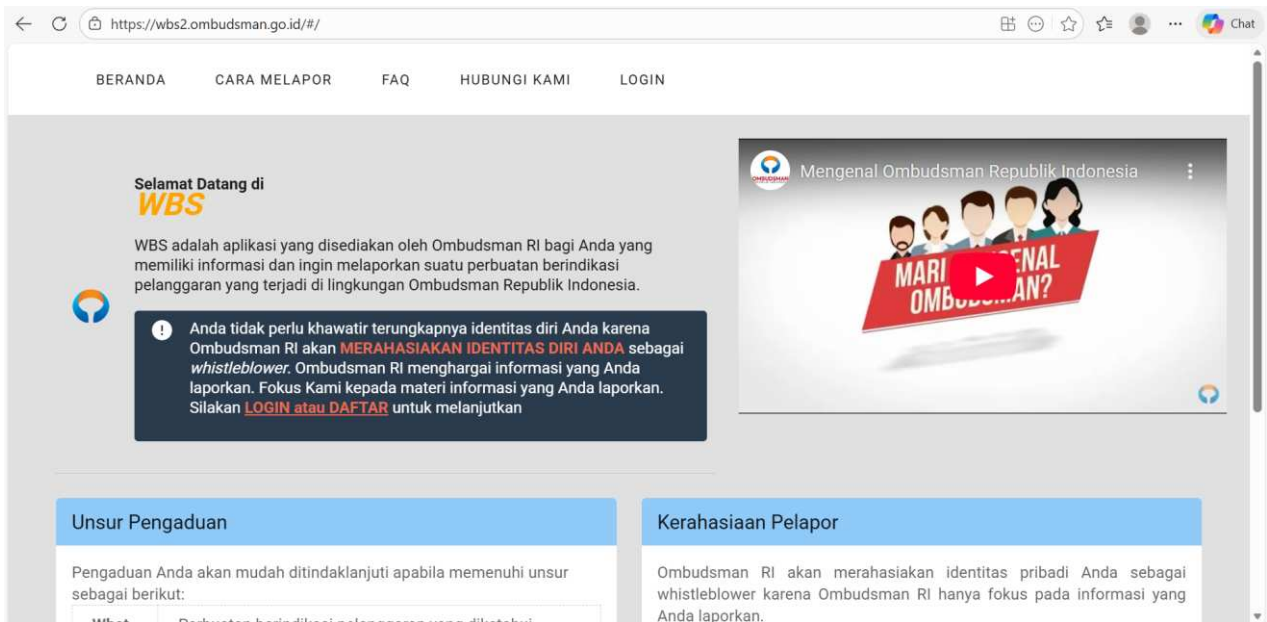
Solution Architect. Kegiatan ini difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan publik, khususnya melalui penguatan sistem dan arsitektur teknologi Aplikasi Sistem Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL).

Pelaksanaan pekerjaan diawali dengan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi eksisting teknologi informasi di lingkungan Ombudsman RI. Kegiatan ini mencakup pemetaan aplikasi internal dan eksternal yang digunakan, kajian terhadap infrastruktur teknologi yang diterapkan, serta evaluasi peran aplikasi dalam mendukung proses bisnis dan operasional Ombudsman RI. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta telaah dokumen dan regulasi yang relevan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Ombudsman RI telah memiliki berbagai aplikasi pendukung pelayanan publik dan tata kelola internal, dengan SIMPeL sebagai aplikasi strategis yang berperan utama dalam pengelolaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan masyarakat. Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja aplikasi tersebut, dilakukan kajian mendalam terhadap arsitektur sistem, teknologi infrastruktur, serta teknologi pengembangan aplikasi yang digunakan, termasuk penerapan arsitektur berbasis microservices dan pengelolaan infrastruktur on-premises.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Konsultan Senior Solution Architect menyusun rekomendasi solusi teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Ombudsman RI. Rekomendasi mencakup aspek infrastruktur, bahasa pemrograman, framework pengembangan aplikasi, integrasi sistem, serta penguatan keamanan dan keandalan sistem. Selain itu, disusun pula rencana pengembangan aplikasi SIMPeL sebagai panduan strategis untuk pengembangan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan pengelolaan laporan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan konsultasi ini memberikan kontribusi penting dalam menyediakan landasan teknis dan strategis bagi Ombudsman RI dalam pengembangan sistem teknologi informasi, khususnya SIMPeL, agar selaras dengan kebutuhan organisasi, regulasi yang berlaku, serta perkembangan teknologi. Seluruh rangkaian pekerjaan ini telah dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2025, dan hasilnya menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Ombudsman RI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan.



Halaman Utama Aplikasi WBS 2.1

4. Pengembangan Kapasitas SDM

a. Workshop Pengelolaan Social Media JDIH Ombudsman

Pada tanggal 6 hingga 9 Mei 2025, Biro Hukum dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Workshop/Training Pengelolaan Sosial Media JDIH yang bertempat di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi peserta dalam mengelola media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana penyebaran informasi hukum kepada Masyarakat.

Workshop ini diikuti oleh para pengelola JDIH dari berbagai satuan kerja, termasuk pengelola JDIH dari kantor perwakilan. Salah satu peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah Ganjar Yoga Supratama sebagai salah satu perwakilan pengelola JDIH dari Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan selama 15 jam pelajaran (JP).

Materi yang disampaikan dalam workshop mencakup:

- Strategi komunikasi digital di lingkungan lembaga publik
- Teknik penulisan konten hukum yang ramah media sosial
- Visualisasi dan desain konten berbasis tren platform digital
- Penggunaan tools pendukung pengelolaan media sosial secara efektif dan efisien









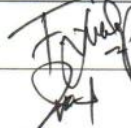
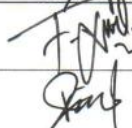
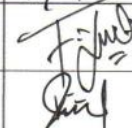



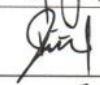



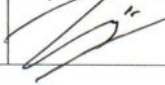


b. Pelatihan Cobit 5 Foundation

Pada Tahun 2025, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang tata kelola teknologi informasi melalui Pelatihan COBIT 5 Foundation. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat pemahaman dan penerapan tata kelola serta manajemen teknologi informasi yang selaras dengan tujuan institusi, khususnya dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan public.

Pelatihan COBIT 5 Foundation diselenggarakan selama empat hari, pada tanggal 8 sampai dengan 11 Desember 2025, dan diikuti oleh lima orang peserta yang berasal dari unit kerja terkait pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Ombudsman RI. Pelaksanaan pelatihan dirancang secara komprehensif dengan mengombinasikan pemaparan konsep, diskusi, studi kasus, praktik, serta simulasi ujian sertifikasi, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan aplikatif yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

**DAFTAR HADIR PESERTA
PELATIHAN COBIT 5 FOUNDATION
8 S.D 11 DESEMBER 2025**

No	Nama	Tanggal			
		8 Desember 2025	9 Desember 2025	10 Desember 2025	11 Desember 2025
1	MA. Junior Gregorius				
2	Aprilistyo Dwi Hanafi				
3	Firman Yudi Putra				
4	Indra Dwi Aprianto				
5	Stefanus Lugas Prastowo				

Materi pelatihan mencakup pemahaman prinsip dasar COBIT 5 sebagai kerangka kerja tata kelola dan manajemen teknologi informasi, termasuk konsep pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan, pendekatan end-to-end, penerapan kerangka kerja terintegrasi, pendekatan holistik, serta pemisahan yang jelas antara fungsi tata kelola dan manajemen. Selain itu, peserta dibekali pemahaman mengenai lima domain utama COBIT 5, yaitu Evaluate, Direct and Monitor (EDM), Align, Plan and Organise (APO), Build, Acquire and Implement (BAI), Deliver, Service and Support (DSS), serta Monitor, Evaluate and Assess (MEA).



Dalam pelatihan ini juga dilakukan pendalaman mengenai Goals Cascade untuk menerjemahkan tujuan strategis institusi ke dalam tujuan teknologi informasi, penilaian tingkat kapabilitas dan kematangan proses TI, serta penyusunan roadmap implementasi COBIT 5 yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Ombudsman RI. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong teknologi informasi tidak hanya berperan sebagai fungsi pendukung, tetapi sebagai strategic enabler dalam pencapaian tujuan kelembagaan.

Hasil evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa peserta mampu menyerap materi dengan baik, baik pada aspek teori maupun praktik, dengan capaian nilai rata-rata yang berada pada kategori baik hingga sangat baik. Pelatihan ini juga memberikan perubahan perspektif peserta dalam memandang tata kelola teknologi informasi, dari pendekatan yang bersifat teknis-operasional menuju pendekatan yang berbasis nilai, risiko, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan.



Melalui pelaksanaan Pelatihan COBIT 5 Foundation ini, Ombudsman Republik Indonesia memperoleh fondasi pengetahuan dan pemahaman yang lebih kuat dalam penerapan tata kelola teknologi informasi yang akuntabel, terukur, dan selaras dengan tujuan institusi. Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2025, serta menjadi bagian dari komitmen Ombudsman RI dalam memperkuat kapasitas internal dan tata kelola kelembagaan berbasis teknologi informasi.



s|c|i|e|ncom

CERTIFICATE

31595/SC/12/25

Diberikan Kepada

Aprilistyo Dwi Hanafi

sebagai peserta

Pelatihan COBIT 5 Foundation

yang diselenggarakan oleh PT. Silka Teguh Sejahtera (SCIENCOM)

pada tanggal 8 s.d. 11 Desember 2025

dengan jumlah jam pelatihan 32 jam

Jakarta, 11 Desember 2025



Budi Tjandra Negara
Direktur

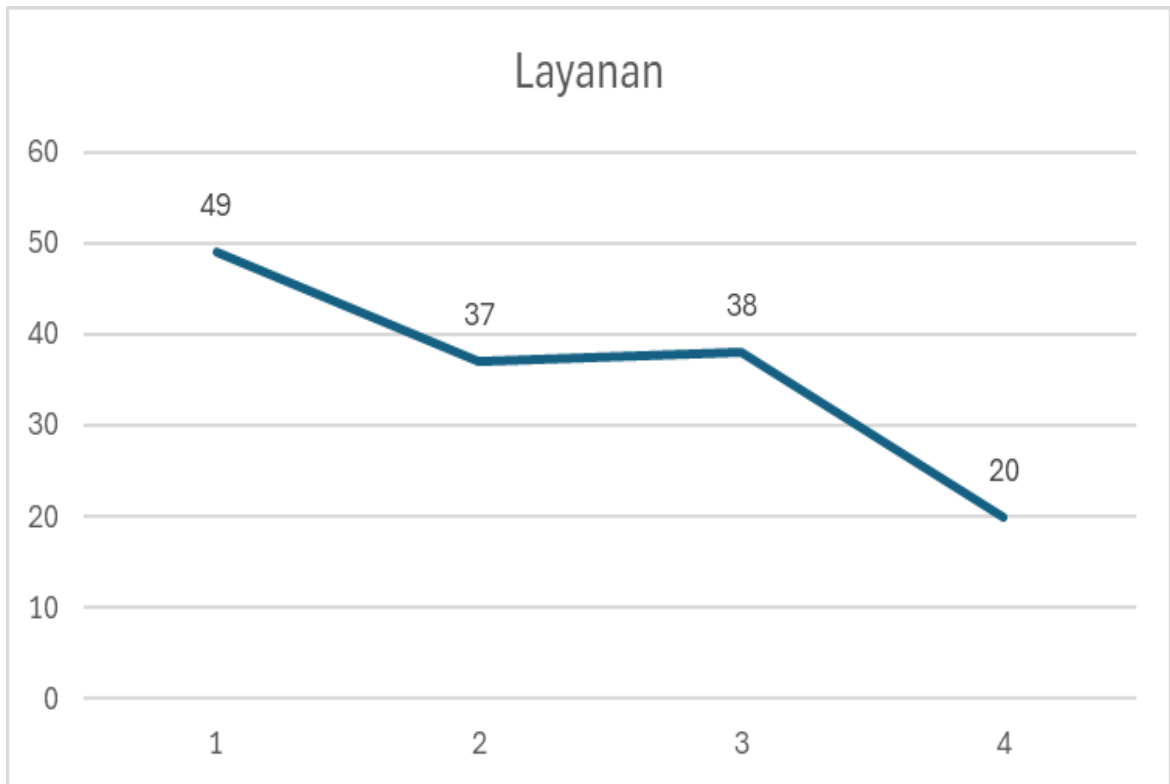
Dokumentasi kegiatan

4. Layanan Keamanan Sistem Informasi dan SPBE

Selama Tahun 2025 Tim/Kelompok Kerja Keamanan Sistem Informasi dan SPBE telah melakukan:

1. Pengelolaan Email Zimbra Ombudsman

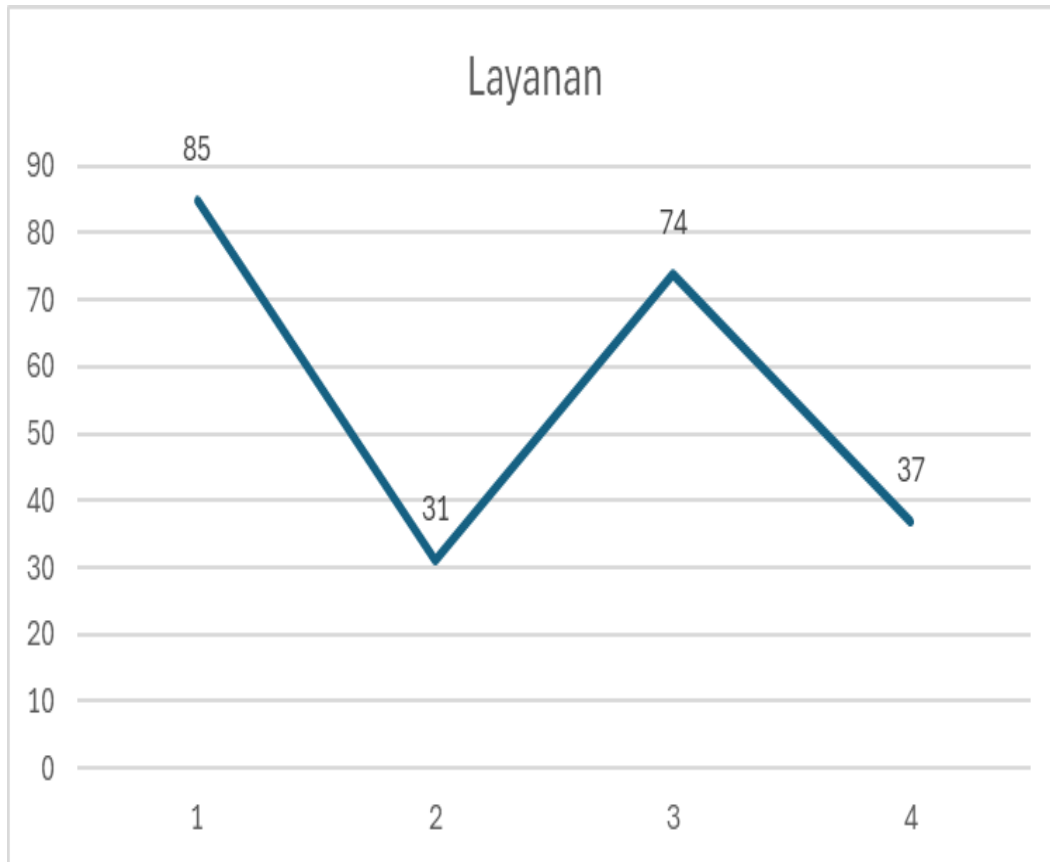
Selama tahun 2025, Timja Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi dan SPBE telah menangani sebanyak 144 permintaan layanan terkait Pengelolaan Akun Email Zimbra. Layanan yang diberikan meliputi pembuatan akun baru, reset password, penutupan akun karena resign, penyesuaian akun, pengelolaan distribution list, serta pemblokiran dan blacklist domain email spam. Seluruh layanan tersebut dilaksanakan guna mendukung kelancaran komunikasi internal dan eksternal, menjaga keamanan data, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sistem email di lingkungan Ombudsman RI.



Grafik layanan zimbra triwulan 1-4

2. Pengelolaan Tanda Tangan Elektronik

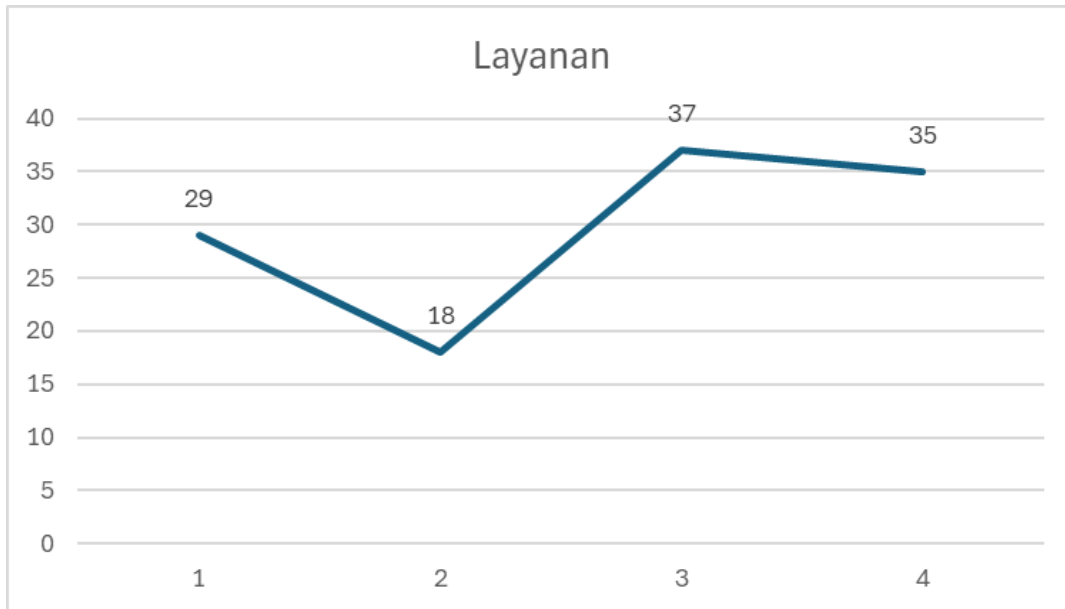
Selama tahun 2025, Timja Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi dan SPBE telah menangani sebanyak 227 permintaan layanan terkait Pengelolaan Tanda Tangan Elektronik. Layanan tersebut meliputi aktivasi dan reset passphrase, perpanjangan sertifikat elektronik, serta penutupan akun karena resign. Seluruh layanan ini dilaksanakan guna mendukung kelancaran penggunaan tanda tangan elektronik dalam proses administrasi, menjaga keamanan autentikasi dokumen, serta meningkatkan efisiensi tata kelola persuratan di lingkungan Ombudsman RI.



Grafik layanan TTE triwulan 1-4

3. Pengelolaan Sisdatin

Selama tahun 2025, Timja Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi dan SPBE telah menangani sebanyak 119 permintaan layanan terkait Pengelolaan Sisdatin. Layanan tersebut meliputi reset password, pembuatan akun baru, penyesuaian akses folder, penutupan akun karena resign, serta penyesuaian akun akibat mutasi. Seluruh layanan ini diberikan untuk memastikan kelancaran akses pengguna, mendukung pengelolaan arsip dan data secara efektif, serta meningkatkan efisiensi operasional di lingkungan Ombudsman RI.



Grafik layanan Sisdatin triwulan 1-4

Selama tahun 2025, dilakukan monitoring terhadap resource storage Sisdatin. Dari total kapasitas penyimpanan sebesar 113,42 TB, saat ini tersisa 6,51 TB, sementara 106,8 TB telah digunakan. Secara persentase, ruang penyimpanan yang telah digunakan mencapai sekitar 94,2%, sedangkan kapasitas yang masih tersedia tersisa 5,7%.

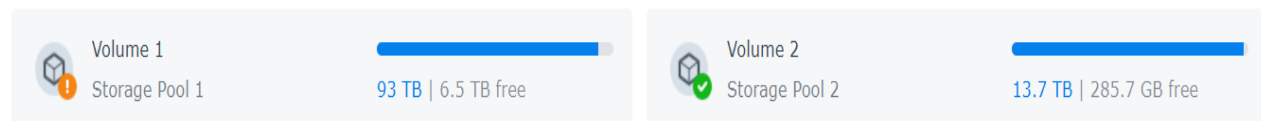


Warning

Issues have occurred to Storage Pool 1. Please go to the **Storage** page and refer to the suggestion of the corresponding storage pool.

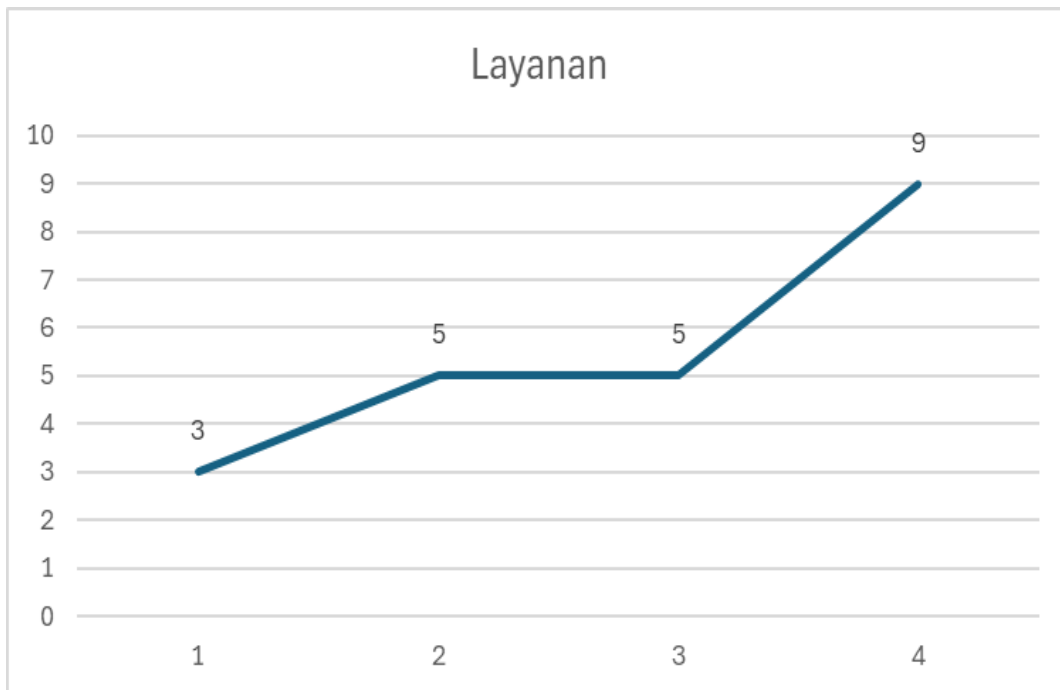
All storage pools ▾

Volume Usage



4. Pengelolaan Website intranet

Selama Tahun 2025, Timja Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi dan SPBE telah memberikan 22 layanan terkait Pengelolaan Website Intranet. Layanan tersebut mencakup reset password dan Pembukaan ruang rapat sekjen Lantai 4.



Grafik layanan website triwulan 1-4

5. Penyusunan Risk Register Manajemen Risiko Biro Humas dan TI

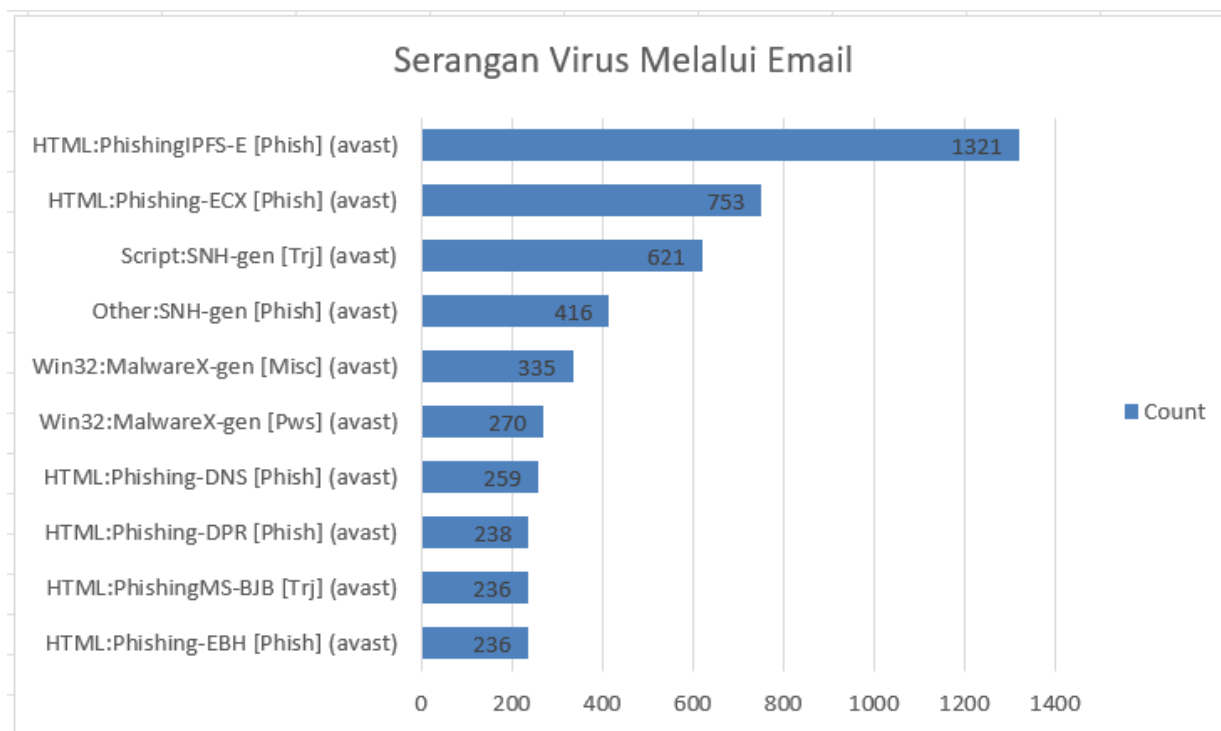
Grafik ini menyajikan statistik jenis ancaman malware yang terdeteksi oleh sistem Mail Gateway, yang merepresentasikan pola serangan virus dan malware melalui media email selama periode pengamatan. Mail Gateway berperan sebagai lapisan pertahanan awal dalam memfilter lalu lintas email masuk, sehingga data ini mencerminkan kondisi riil ancaman siber yang menysasar pengguna melalui komunikasi elektronik sehari-hari.

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa serangan phishing berbasis HTML mendominasi secara signifikan dibandingkan dengan jenis ancaman lainnya. Ancaman dengan jumlah deteksi tertinggi adalah HTML:PhishingIPFS-E [Phish], yang menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan lampiran file HTML pada email untuk mengarahkan korban ke halaman phishing. Modus ini umumnya menyamar sebagai halaman login, pemberitahuan akun, atau notifikasi layanan resmi guna mengecoh pengguna. Selain itu, HTML:Phishing-ECX [Phish] juga tercatat dalam jumlah yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa variasi teknik phishing terus berkembang dan masih aktif digunakan.

Di luar phishing, Mail Gateway juga mendeteksi Script:SNH-gen [Trj], yang menandakan adanya upaya penyebaran trojan melalui script berbahaya yang

dikirimkan sebagai attachment atau melalui tautan dalam email. Sementara itu, kategori malware lain seperti pencuri kredensial dan malware umum turut teridentifikasi, meskipun jumlahnya relatif lebih rendah dibandingkan ancaman phishing.

Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa email masih menjadi salah satu vektor serangan siber paling efektif, terutama untuk phishing, karena mengandalkan kelengahan dan kurangnya kewaspadaan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan keamanan pada Mail Gateway, termasuk peningkatan filtering lampiran HTML, pemantauan berkelanjutan terhadap pola serangan, serta edukasi keamanan siber kepada pengguna agar risiko serangan virus dan malware melalui email dapat diminimalkan.



Grafik serangan virus melalui email mailgateway

Hasil monitoring terhadap penggunaan storage Sisdatin selama Tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan kapasitas penyimpanan yang berlanjut dibandingkan periode sebelumnya. Pada Triwulan I, sisa kapasitas tercatat sebesar 22,74 TB, kemudian menurun menjadi 16,18 TB pada Triwulan II, pada Triwulan III kembali turun menjadi 11,78 TB hingga pada Triwulan IV turun menjadi 6,51 TB. Dengan demikian, dalam kurun waktu dua triwulan terakhir, kapasitas penyimpanan berkurang total 9,67 TB, atau rata-rata sekitar 4,84 TB per triwulan.

5. Layanan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Internet

Kegiatan yang telah dilakukan Tim/Kelompok Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Internet selama Triwulan IV tahun 2025, yaitu:

1. Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi dan Jaringan

Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi dan Jaringan terutama ditujukan untuk membantu pengguna secara langsung dan memastikan bahwa layanan TI yang diterima oleh pengguna sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan ini dibagi lagi menjadi dua sub-kegiatan yaitu:

a. Pemeliharaan Jaringan

Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan bahwa layanan internet dan koneksi ke aplikasi dan data yang digunakan oleh pengguna, tetap dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Pada Tahun 2025, Ombudsman RI Pusat hanya menggunakan satu ISP, yaitu Nexa namun dengan bandwidth yang lebih besar yaitu 600 Mbps.

Pada triwulan keempat, telah dilakukan pekerjaan pembenahan jaringan dan ruang server oleh vendor pada tanggal 18 November – 9 Desember 2025 meliputi:

- Perapihan kabel jaringan di ruang switch tiap lantai
- Pemasangan rak switch ke dinding
- Penggantian Access Point di Keuangan
- Perapihan server dan kabel di ruang server
- Assessment jaringan

Selain pekerjaan tersebut, terdapat pekerjaan rutin pada jaringan yang difasilitasi oleh ISP Nexa yaitu:

- 1) Koordinasi Bandwidth on Demand (BoD) dengan Nexa setiap hari Senin Pukul 09:00 – 10:00 dan Jumat Pukul 15:00 – 16:00 untuk keperluan Apel
- 2) Testing Perangkat Starlink dari Nexa pada tanggal 13 Januari 2025. Perangkat ini merupakan salah satu layanan dari ISP Nexa di Tahun 2025.
- 3) Penggantian 16 Access Point dari Mile ke Nexa pada tanggal 22 dan 31 Januari 2025
- 4) Pemasangan 2 Access Point Baru Ombudsman di Lantai 5 (Ruang Akuntansi) dan Lantai 6 (KU2) pada tanggal 22 dan 31 Januari 2025

- 5) Pemasangan Switch UniFi US-24-250W di Lantai Ground, 4 dan 5 menggantikan Switch Linksys pada tanggal 22 Januari 2025
- 6) Setting Jaringan kabel baru di Ruang Call Center 137 pada tanggal 31 Januari, 1 dan 4 Februari 2025
- 7) Koordinasi BoD dengan Nexa pada tanggal 8 Mei 2025 untuk keperluan acara Latjang Asiten dan Diskusi
- 8) Perbaikan dan Monitoring jaringan internet yang tidak stabil pada tanggal 19 Mei 2025
- 9) Monitoring Jaringan saat acara Rakernas di Gedung Ombudsman tanggal 20 – 22 Mei 2025
- 10) Perbaikan dan Monitoring Jaringan di UKPBJ tanggal 21 – 23 Mei dan 2 Juni 2025
- 11) Perbaikan dan Monitoring jaringan internet yang terputus (FO cut) pada tanggal 14 Agustus 2025 jam 17:00. Akses internet selanjutnya menggunakan Link Backup Nexa selama proses perbaikan jalur. Link utama kembali aktif pada tanggal 16 Agustus 2025 jam 09:18
- 12) Perbaikan dan Monitoring jaringan internet yang tidak stabil pada Link utama Nexa pada tanggal 28 Agustus 2025 jam 00:05. Akses internet selanjutnya menggunakan link backup selama proses perbaikan jalur. Link utama kembali aktif pada jam 08:13
- 13) Perbaikan perangkat Distribusi pada Link Backup Nexa tanggal 2 Oktober 2025
- 14) Perbaikan dan Monitoring jaringan internet yang tidak stabil pada Link utama Nexa pada tanggal 17 November 2025

Selain itu terdapat pekerjaan perbaikan link JIP (Jaringan Intra Pemerintah) yang difasilitasi oleh PDN Komdigi pada tanggal 19 Juli, 3, 9 dan 12 September, 14 Oktober, 4 – 5 November serta 24 November 2025.

b. Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi

Kegiatan ini meliputi perbaikan hardware berupa Komputer dan Laptop, pemeliharaan software dan juga instalasi aplikasi di komputer atau laptop. Format Berita Acara Perbaikan mulai tahun 2025 menjadi standar dokumentasi untuk perbaikan PC/Laptop menggantikan format Nota Dinas

Berikut ini adalah detail kegiatan pemeliharaan perangkat teknologi informasi yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan 31 PC/Laptop yang memerlukan perbaikan ke *Service Center* melalui Berita Acara Perbaikan Laptop/PC

- 2) Perbaiki Scanner sebanyak satu kali
- 3) Perbaiki Aplikasi Office sebanyak dua kali
- 4) Setting Menu ADMS pada Mesin Absensi setelah implementasi Server proxy untuk Aplikasi Absensi (September 2025)
- 5) Fasilitasi Ujian Kompetensi Sertifikasi Pengadaan pada tanggal 11 September 2025. Konfigurasi dan optimalisasi laptop yang digunakan peserta dilakukan pada tanggal 10 September 2025 bersama dengan Tim dari LKPP.
- 6) Pendaftaran 1 Pramubakti di Mesin Absensi Pusat pada tanggal 10 Oktober 202

Selain secara langsung, kegiatan perbaikan juga telah dilakukan secara remote menggunakan Team Viewer.

No	Tanggal	PIC	Nomor Berita Acara	Pengguna Barang	Kerusakan	Model	SN
1	08 May 2025	Bayu	B/526/RT.04.03/V/2025	Adrianus	keyboard huruf A rusak	Asus TUF F15 FX506LH	L8NRCX01V909324
2	06 May 2025	Nurwalid	212/RT.04.03/V/2025	Aat Sugihartati	Baterai Drop	Asus Vivobook	M3NOCX119138128
3	06 May 2025	Nurwalid	213/RT.04.03/V/2025	Oktaviyani Daswati	LCD rusak	Dell P126G	6DXGZ93
4	06 May 2025	Nurwalid	210/RT.04.03/V/2025	Anita Widyaning Putri	Tombol keyboard rusak	Macbook Air	WN47VQ49M1
5	19 May 2025	Yasin	B/636/RT.04.03/V/2025	Devi Z	LCD rusak	Acer TravelMate P214 series	UNVU7SD02T34700D060601
6	22 May 2025	Yasin	B/658/RT.04.03/V/2025	Bellinda	Mati Total	Acer TravelMate P214 series	UNVLFSD037147000680601
7	22 May 2025	Yasin	B/657/RT.04.03/V/2025	Yeni	Mati Total	Acer TravelMate P214 series	UNVU7SD02Q3400002E0601
8	26 June 2025	Nurwalid	463/RT.04.03/VI/2025	PC CSIRT	RAM Error	Dell Inspiron 3881	CHKLL83
9	26 June 2025	Nurwalid	461/RT.04.03/VI/2025	Irsalina	SSD NVME Bad Sector	Lenovo 82KA	PF3C4NCW
10	25 June 2025	Yasin	B/825/RT.04.03/VI/2025	Nugroho Andriyanto	Keyboard	Dell Inspiron 5406 2n1	BNZCN93
11	25 June 2025	Yasin	B/824/RT.04.03/VI/2025	Gunanjar Septianto	Baterai Kembang	HP ENVY Laptop 13-aq0xxx	8CG9248S93
12	25 June 2025	Yasin	B/824/RT.04.03/VI/2025	Tri Astanto	Baterai Lemah	HP ENVY Laptop 13-aq0xxx	8CG9248X1M
13	26 June 2025	Yasin	B/850/RT.04.03/VI/2025	Leni Milana	Port USB dan LCD	Lenovo 82A3	LT106N54
14	07 Jul 2025	Yasin	B/971/RT.04.03/VII/2025	Sri Dewi	Harddisk SSD tidak detect	Lenovo Yoga Slim 7	LT106N30
15	11 Jul 2025	Bayu	B/1011/RT.04.03/VII/2025	Nita Lilis	Wifi dan Bluetooth tidak Detect	Lenovo V14 G2	PF3C4SW4
16	16 Jul 2025	Bayu	B/1029/RT.04.03/VII/2025	Heru Tjahjono	Keyboard rusak dan Laptop Lemot	Dell Inspiron 14	
17	25 Jul 2025	Bayu	B/1134/RT.04.03/VII/2025	Dedy Purnomo	Harddisk dan RAM rusak	HP Spectre x360	5CD5522RNF
18	01 Aug 2025	Yasin	B/1173/RT.04.03/VIII/2025	Edro Agusta	Layar Laptop Mati	Axioo Mybook ProK5	00A22430002588034
19	07 Aug 2025	Bayu	B/1223/RT.04.03/VIII/2025	Ida Bagus	Charger Mati Total	HP ENVY I3-AQ0017TX	8CG9248X2B
20	27 Aug 2025	Bayu	B/1362/RT.04.03/VIII/2025	Ahmad Yusuf	Harddisk Rusak	LENOVO ideacentre A340-22IWL All-in-One (ideacentre)	MP1N59D5
21	29 Aug 2025	Yasin	B/1450/RT.04.03/IX/2025	Rachmad Ramdhan	Keyboard Rusak	Dell Inspiron 14 5000	FOYGZ93
22	09 Sep 2025	Yasin	B/1614/RT.04.03/X/2025	Yuni Susita Dewi	Cover bawah terbuka dan Baterai Laptop Drop	HP ENVY Laptop 13-aq0xxx	8CG9248X1D
23	09 Sep 2025	Yasin	B/1614/RT.04.03/X/2025	Oscar Gideon	Cover belakang patah dibagian engsel	LENOVO 82KA	PF3C4NFB
24	09 Sep 2025	Yasin	B/1614/RT.04.03/X/2025	Abdul Muhaimin	Layar Laptop mati	Dell Vostro 3400	
25	14 Oct 2025	Bayu	B/1678/RT.04.03/X/2025	Parjan	Laptop tidak bisa menyala dan charger rusak	ASUS P1412CE	P1412CEA-EK7810WS
26	04 Nov 2025	Yasin	B/1865/RT.04.03/XI/2025	Hawa Nur Rahma	Charger rusak	ACER Travel mate P214	UNVU7SD02T347008C00601
27	08 Nov 2025	Aprilisty	B/1883/DI.01.03/XI/2025	Aprilisty Dwi Hanafi	Engsel rusak	Victus by HP Laptop 16-d1xxx	5CD2225QZD
28	19 Nov 2025	Yasin	B/1913/DI.01.03/XI/2025	Niken Nurjanah	Tombol keyboar rusak, Charger Rusak	VivoBook_ASUSLaptop X415IAB_A416JA	MAN0CX13L931419
29	01 Dec 2025	Nurwalid	1532/RT.04.03/XII/2025	Saputra Malik	Charger Rusak	Asus Vivobook	M3NOCX119355125
30	05 Dec 2025	Yasin	B/2222/RT.04.03/XII/2025	Abdul Muhaimin	Charger Rusak	Lenovo 82KA	PF3C4YO3
31	10 Dec 2025	Nurwalid	1587/RT.04.03/XII/2025	Taufik Saleh	Harddisk bad sector dan RAM tidak terbaca	HP 20-r124d	3CR6100CS6

Daftar Perbaikan Laptop/PC Tahun 2025

c. Perpanjangan Lisensi Office (Microsoft 365 Business Standard)

Lisensi Office habis masa berlakunya pada 13 Agustus 2025. Nama resmi dari Office adalah Microsoft 365 Business Standard. Dengan pertimbangan bahwa fitur Microsoft Teams tidak diperlukan karena sudah ada lisensi Zoom, maka spesifikasi software berubah pada periode tahun 2025 dengan pengurangan fitur Microsoft Teams.

Proses pengadaan telah dimulai sejak Bulan Juli 2025 dan telah didapatkan pemenang yaitu PT MIS (PT Mitra Integrasi Solusi). Pada tanggal 12 Agustus 2025 telah dilakukan rapat penandatanganan kontrak dengan PT MIS. Lisensi baru diterima pada tanggal 13 Agustus 2025 sebanyak 185 user

d. Pengadaan Internet Tahun 2026

Proses pengadaan untuk jasa sewa internet telah dilakukan mulai Bulan November sampai Bulan Desember 2025. Pada tanggal 19 – 22 November 2025 telah dilakukan kunjungan ke Kantor Pusat Nexa di Semarang untuk keperluan evaluasi penggunaan Internet di Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat perubahan spesifikasi pada jasa Internet untuk Tahun 2026 sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Sehubungan dengan performa yang baik maka Penyedia Jasa Internet untuk Tahun 2026 kembali dikerjakan oleh Nexa dengan perubahan spesifikasi seperti diatas. Selanjutnya telah dilakukan rapat pada tanggal 24 Desember 2025 dengan pihak Nexa untuk meminta kesanggupan pemenuhan spesifikasi Baru dan rapat lanjutan pada tanggal 31 Desember 2025 untuk finalisasi proses pengadaan.

No	Spesifikasi	Semula	Menjadi
	Main Link IP Transit 1:1 (Menggunakan 2 link upstream yang berbeda)	600Mbps	700 Mbps
	Backup Link IP Transit 1:1	700 Mbps	700 Mbps
2	Media	Fiber Optic	Fiber Optic
3	SLA	99,90%	99,90%
4	BOD (<i>Bandwidth on Demand</i>)	4 kali setahun dengan Bandwidth 50Mbps	4 kali di luar kantor
5	<i>Engineer on Site</i>	<i>By Request</i>	<i>By Request</i>
6	<i>Managed Service</i>		
	· Access Point	25 Unit	26 Unit
	· Switch PoE	2 Unit	2 Unit
	· Starlink	1 Unit	-
	· Jasa Penarikan kabel UTP	-	12 Titik
	· Wildcard SSL untuk domain ombudsman.go.id	1 Tahun	1 Tahun
	<i>Wifi Landing Page</i> untuk tamu	-	
7	Monitoring	MRTG/PRTG	MRTG/PRTG
8	Sharing Knowledge TI	2 kali setahun	2 kali setahun

Perubahan Spesifikasi Internet Tahun 2026

2. Penerapan dan Konfigurasi Aplikasi di Lingkungan Server

Penerapan dan konfigurasi aplikasi di lingkungan server merupakan langkah krusial dalam memastikan sistem berjalan dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Kegiatan ini mencakup proses instalasi, konfigurasi, serta penyesuaian aplikasi agar dapat beroperasi secara efisien dalam lingkungan server yang tersedia. Jika Servernya belum ada, maka pembuatan server virtual juga termasuk dalam rangkaian kegiatan ini. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aplikasi yang diterapkan telah dikonfigurasi sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku, sehingga mendukung kinerja sistem secara keseluruhan.

Selama tahun 2025, kegiatan yang berkaitan dengan penerapan dan konfigurasi aplikasi telah dilakukan yaitu:

- a. Migrasi Aplikasi Unifi Controller dari Server Colocation ke Server di Ruang Server Lantai 7

Aplikasi Unifi Controller digunakan untuk mengelola Access Point Unifi yang ada di Ombudsman. Sebagai bagian dari kegiatan migrasi server colocation maka telah dilakukan migrasi Controller Unifi yang dilakukan dari tanggal 12 – 19 Januari 2025 dan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Pembuatan Server Virtual baru unifi3. Berikut ini adalah spesifikasi dari server baru tersebut:

- Sistem Operasi : Ubuntu 24.04
- CPU : 4 vCPU
- Memory : 8 GB
- Harddisk : 50 GB
- Aplikasi : UniFi Controller

unifi3

Guest OS: Ubuntu Linux (64-bit)
 Compatibility: ESXi 6.0 and later (VM version 11)
 VMware Tools: Yes
 CPUs: 4
 Memory: 8 GB
 Host name: unifi3

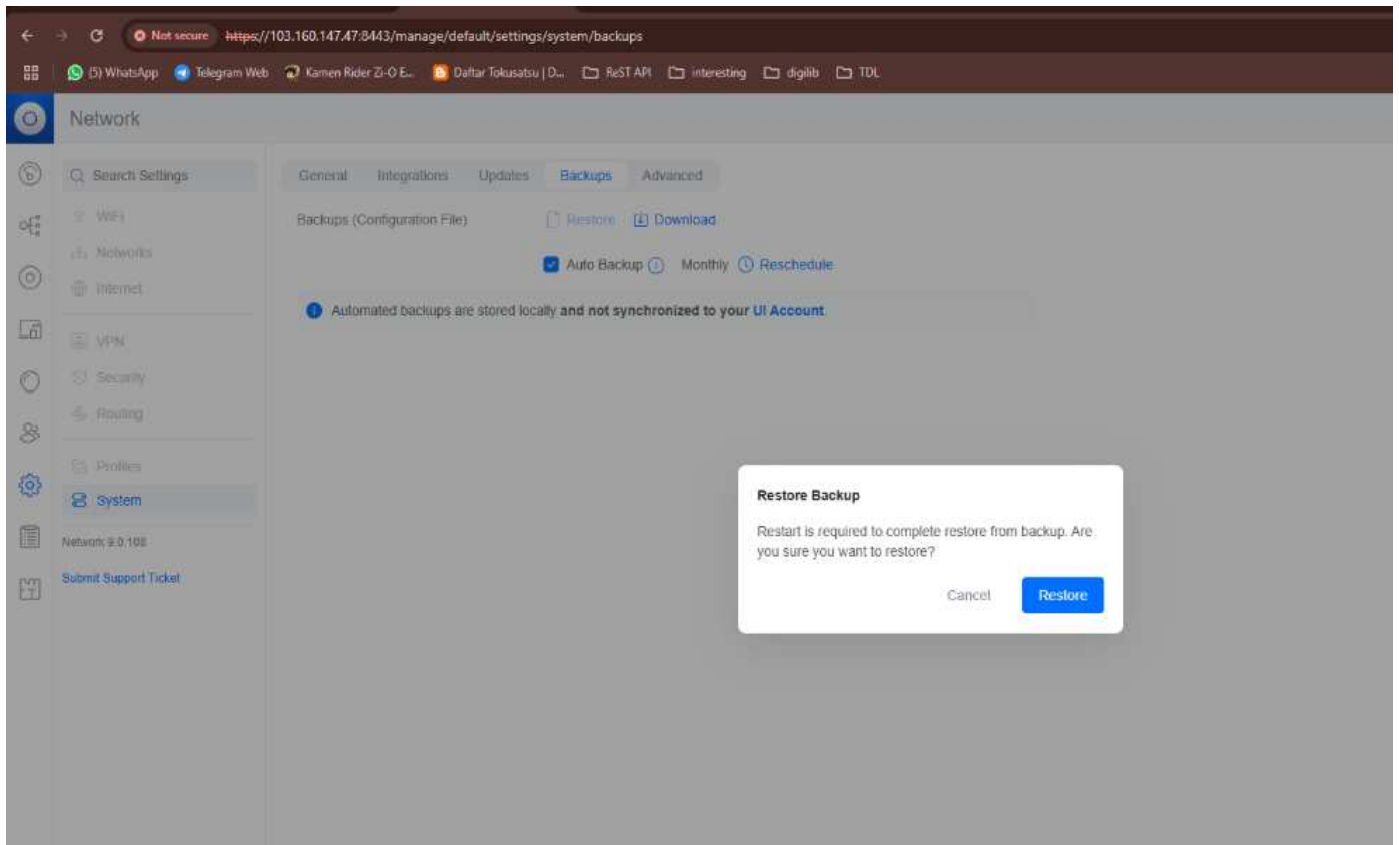
CPU: 123 MHz
 MEMORY: 7.98 GB
 STORAGE: 88.09 GB

General Information	
Networking	
Host name	unifi3
IP addresses	1. 172.16.1.6 2. fe80::20c:29ff:fe88:8c83
VMware Tools	Installed and running
Storage	1 disk
Notes	Edit notes

Hardware Configuration	
CPU	4 vCPUs
Memory	8 GB
Hard disk 1	50 GB
USB controller	USB 2.0
Network adapter 1	DMZ1 (Connected)
Video card	4 MB
CD/DVD drive 1	ATAPI /vmfs/devices/cdrom/mpx.vmhba1:C0:T0:L0
Others	Additional Hardware

Spesifikasi Server unifi3

- 2) Update Versi Controller dan MongoDB ke versi terbaru pada server lama unifi2
- 3) Instalasi Aplikasi Controller dan MongoDB pada server unifi3
- 4) Backup konfigurasi server lama
- 5) Export site dan backup data dari server unifi2 dan kemudian melakukan import site dan restore data ke unifi3



Proses Restore Data Controller UniFi

- b. Koordinasi Pemindahan Setting auto-deploy SIMPeL 4 dari git2 Komdigi ke Gitlab Ombudsman

Setelah dilakukan serah terima aplikasi dari Komdigi ke Ombudsman selanjutnya pihak sangkuriang melakukan pemindahan sistem CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery/Deployment) dari git2 Komdigi (<https://git2.layanan.go.id>) ke gitlab Ombudsman RI (<https://gitlab.ombudsman.go.id>). Dari pihak Ombudsman RI yang dilakukan adalah melakukan clone source code pada tanggal 17 Januari 2025 dari git2 ke gitlab Ombudsman RI sebanyak lima aplikasi yaitu frontend, simpel-loop, report, appsmanager dan referensi.

Proses konfigurasi untuk lingkungan dev telah selesai pada tanggal 23 Januari 2025 dan untuk lingkungan production pada tanggal 5 Maret 2025. Pada tanggal 6 Maret ditemukan error pada SIMPeL 4 sehingga kemudian dilakukan rollback di frontend pada sisi rancher. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat error pada sisi frontend pada saat melakukan merge dari dev ke prod. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, perbaikan pada kode frontend di gitlab Ombudsman RI masih belum selesai dilakukan oleh sangkuriang.

c. Penerapan dan Konfigurasi Aplikasi Helpdesk

Aplikasi Helpdesk berbasis NodeJS dengan Framework React+Vite dan terdiri dari tiga aplikasi yaitu:

- 1) Frontend (<https://gitlab.ombudsman.go.id/helpdesk/frontend.git>)
- 2) Admin (<https://gitlab.ombudsman.go.id/helpdesk/admin.git>)
- 3) Backend (<https://gitlab.ombudsman.go.id/helpdesk/backend.git>)

Aplikasi Helpdesk disetting pada server web-sipaten yang didalamnya sudah berisi aplikasi SIPATEN dan text2voice (keduanya berbasis container).

Konfigurasi Docker Container memungkinkan banyak aplikasi diinstall di satu server dan masing-masing memiliki *namsespace* sendiri. Tahapan dalam penerapan aplikasi Helpdesk dilakukan dari tanggal 7 – 16 Maret 2025 sebagai berikut:

- 1) Modifikasi dump PostgreSQL yang telah didapatkan dari pengembang. Tanpa modifikasi maka proses restore akan gagal
- 2) Setting Database PostgreSQL berupa pembuatan role, database dan import database
- 3) Modifikasi boilerplate docker-compose dari aplikasi manusia untuk digunakan sebagai basis dari aplikasi Helpdesk
- 4) Dockerisasi tiga aplikasi Helpdesk. Proses ini adalah perubahan arsitektur aplikasi menjadi berbasis docker container
- 5) Setelah tiga aplikasi berhasil up, selanjutnya dilakukan proses push ulang aplikasi ke repository terpisah di gitlab Ombudsman RI. Hal ini dilakukan karena sebelumnya tiga aplikasi diatas diupload di gitlab sebagai satu repository.
- 6) Aplikasi yang pertama dapat diakses adalah frontend dan berada pada alamat <https://helpdesk.ombudsman.go.id>
- 7) Setting nginx sebagai reverse-proxy dan modifikasi backends sehingga aplikasi admin dapat diakses pada alamat <https://helpdesk.ombudsman.go.id/admin>. Modifikasi ini diperlukan karena pada awalnya aplikasi admin mempunyai subdomain sendiri.
- 8) Setting nginx dan modifikasi aplikasi backend sehingga proses pemanggilan websocket tidak error. Modifikasi ini sekali lagi diperlukan sehingga backend dan socket keduanya dapat diakses pada alamat <https://helpdesk.ombudsman.go.id/api>
- 9) Setting autodeploy pada tiga aplikasi

The screenshot shows the web interface of the HelpDesk HMTI. The browser address bar displays 'helpdesk.ombudsman.go.id'. The page header includes the Ombudsman Republik Indonesia logo and the text 'HelpDesk HMTI'. Below the header, there is a description of the application: 'NotiALaHuTi adalah aplikasi untuk pengelolaan permintaan layanan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Pengguna akan mendapatkan notifikasi melalui email mengenai proses formulir yang diajukan.' and contact information: 'Biro Humas dan TI @ 2021'. The main content area is titled 'Formulir Pelayanan' and contains a form with the following fields: 'Email', 'Nama', 'Pilih Unit Kerja' (a dropdown menu), and 'Permintaan Layanan' (a text area). Below the form, there are two buttons: 'UPLOAD DOKUMEN (OPSIONAL)' and 'SUBMIT'. A small 'Privacy - Terms' link is visible in the bottom right corner of the page.

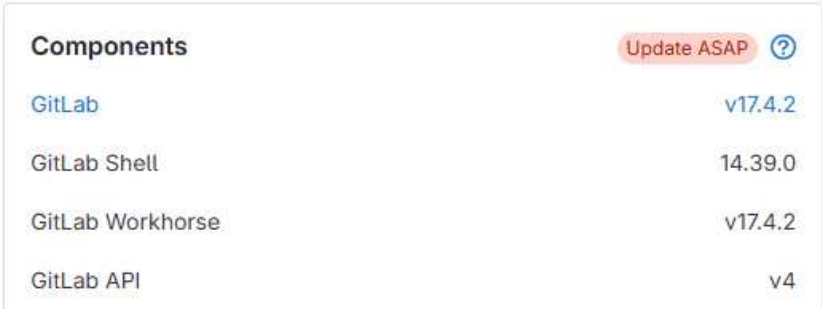
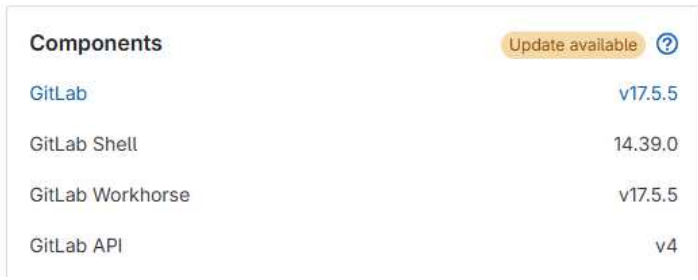
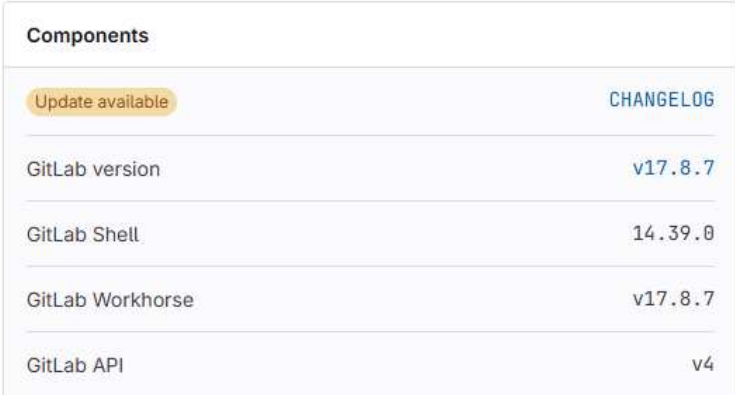
Aplikasi Helpdesk

d. Update Patch GitLab Bulan April 2025

GitLab termasuk komponen utama dalam deployment aplikasi ke server secara otomatis. Secara berkala, Gitlab akan merilis versi terbarunya dan beberapa diantaranya bersifat critical. Berikut ini adalah data teknis dari Aplikasi GitLab:

- 1) IP Address : 172.16.1.18
- 2) Sistem Operasi : Ubuntu 20.04
- 3) Gitlab Type : Omnibus Community Edition
- 4) URL : <https://gitlab.ombudsman.go.id>

Berikut ini adalah data update patch pada Bulan April 2025, dari versi 17.4.2 ke versi 17.8.7.

Tanggal Update	Versi	Screenshoot	Sifat
Versi Awal	v17.4.2	 <p>The screenshot shows a 'Components' list with the following items and versions: GitLab (v17.4.2), GitLab Shell (14.39.0), GitLab Workhorse (v17.4.2), and GitLab API (v4). A red 'Update ASAP' button with a question mark icon is visible in the top right corner.</p>	Critical
Update 16 April 2025	v17.5.5	 <p>The screenshot shows a 'Components' list with the following items and versions: GitLab (v17.5.5), GitLab Shell (14.39.0), GitLab Workhorse (v17.5.5), and GitLab API (v4). A yellow 'Update available' button with a question mark icon is visible in the top right corner.</p>	Recommended
Update 25 April 2025	v17.8.7	 <p>The screenshot shows a 'Components' list with the following items and versions: GitLab version (v17.8.7), GitLab Shell (14.39.0), GitLab Workhorse (v17.8.7), and GitLab API (v4). A yellow 'Update available' button and a blue 'CHANGELOG' link are visible in the top left corner.</p>	Recommended

Update Patch GitLab Bulan April 2025

- e. Update SSL pada Server Web-ASP
 Server web-ASP merupakan server Windows yang berisi IIS dan digunakan untuk hosting aplikasi pengetahuan (<https://pengetahuan.ombudsman.go.id>). Sertifikat SSL yang sebelumnya telah expired pada tanggal 6 Februari 2025 masih belum diupdate. Server IIS memerlukan sertifikat SSL dengan format PFX, dimana sertifikat SSL yang ada sebelumnya berformat CRT/PEM.

```

w3b0rixm@webbudsman2:~
login as: w3b0rixm
w3b0rixm@10.88.0.4's password:
Last login: Thu Apr 17 12:23:03 2025 from 172.17.0.51
[w3b0rixm@webbudsman2 ~]$ cd /etc/nginx/conf
-bash: cd: /etc/nginx/conf: No such file or directory
[w3b0rixm@webbudsman2 ~]$ ls
backup_web-202405.sql.zip  ppid.conf
builds                    read.php
composer-installer.php   w3b0rixm_dbxml989_20240712.sql
decrypt.psl              w3b0rixm_dbxml989_20240713.sql
docker-libre-2.2.5.tar   w3b0rixORI_PPID137_20240713.sql
garuda                   w3bmgz0ri_db2387.sql
logs                     wazuh-agent-4.9.0-1.x86_64.rpm
ori2025.crt              welcome.mp3
ori2025.key              www
[w3b0rixm@webbudsman2 ~]$ openssl pkcs12 -export -out ori2025.pfx -inkey ori20
25.key -in ori2025.crt
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:
[w3b0rixm@webbudsman2 ~]$

```

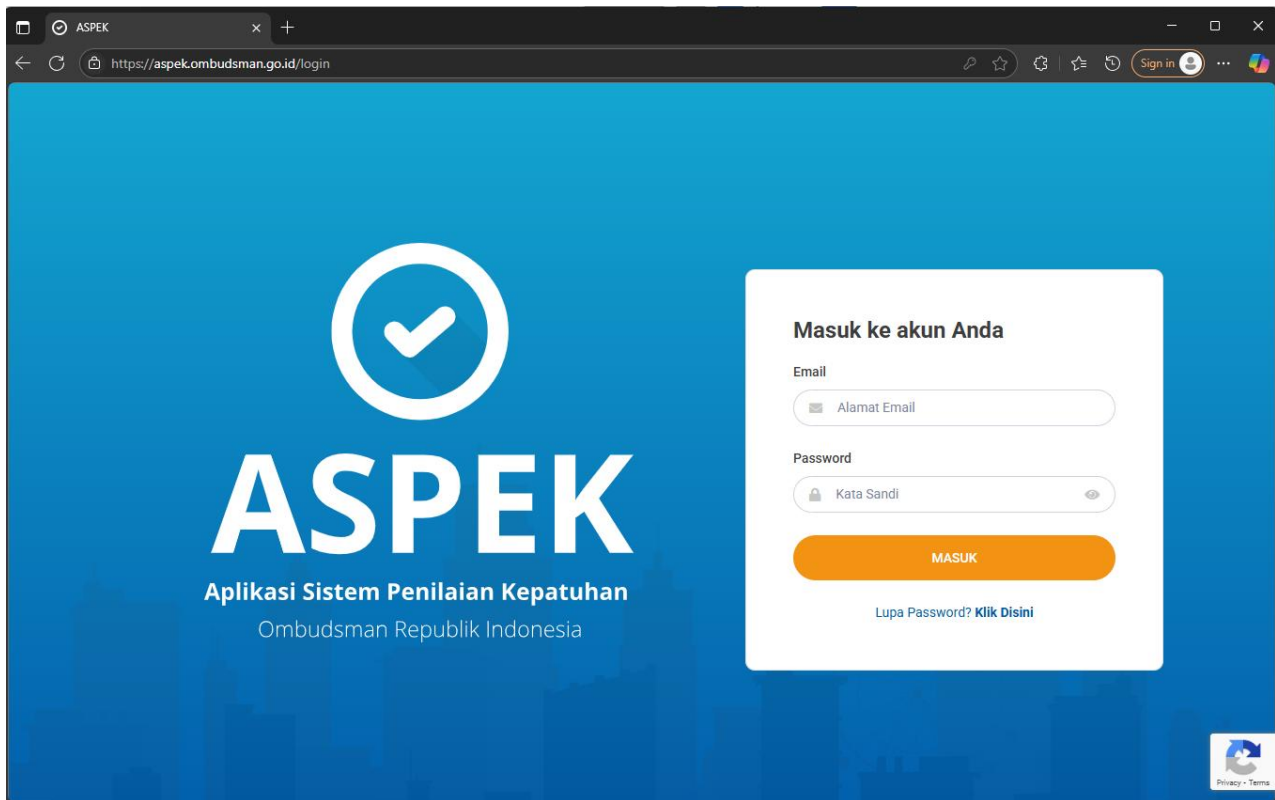
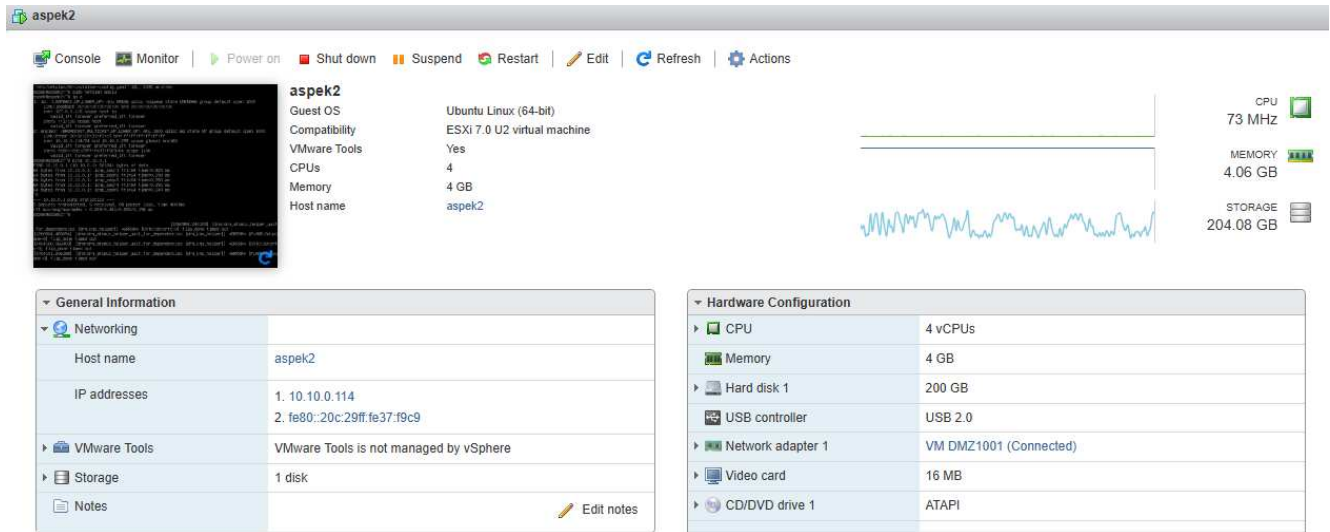
Proses Konversi Sertifikat dari Format CRT/PEM ke Format PFX

f. Pembuatan Ulang Server ASPEK

Aplikasi ASPEK saat ini berstatus *read-only* namun memiliki spesifikasi storage sebesar 1TB. Untuk menghemat space harddisk, maka server ASPEK akah dibuat ulang dengan storage yang lebih kecil. Berikut ini adalah spesifikasi server ASPEK yang baru.

- vCPU : 4
- vRAM : 4GB
- Storage : 200GB
- OS : Ubuntu 20.04
- Aplikasi : nginx dan php-fpm7.3

Pembuatan Server dan transfer data dilakukan dari tanggal 5 – 6 Mei 2025.



Spesifikasi Server Baru ASPEK dan Aplikasi ASPEK

g. Deployment Aplikasi Monitoring Kinerja Perwakilan Kalimantan Selatan

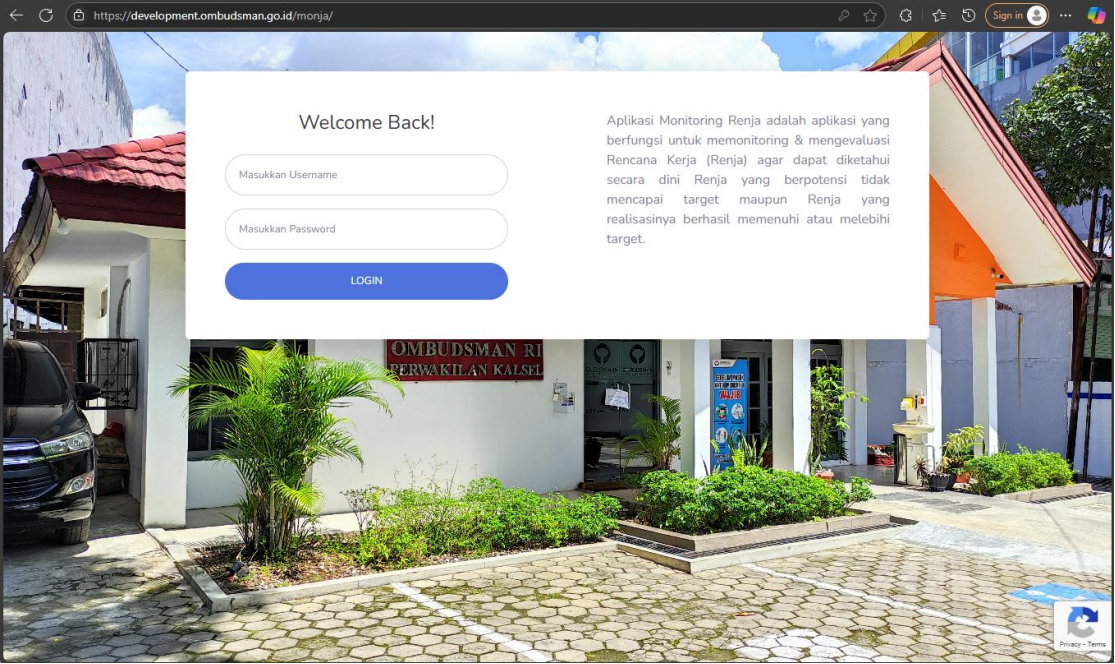
Biro Humas dan TI pada tanggal 20 Juni 2025 telah menerima Nota Dinas dari Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. 7/DI.01.01-22/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025. Dalam Nota Dinas tersebut, Perwakilan Kalimantan

Selatan meminta bantuan kepada Biro Humas dan TI untuk menggabungkan aplikasi mereka ke infrastruktur TI di Pusat. Sebelumnya mereka telah melakukan hosting sendiri untuk aplikasi Monitoring Kinerja dan Buku Tamu pada alamat (bukutamu.ombudsmanrikalsel.com) dan (monitoringrenja.ombudsmanrikalsel.com)

Biro Humas dan TI mendasarkan penerimaan Nota Dinas tersebut berdasarkan Permenkominfo No.5 Tahun 2015 yang melarang satu institusi untuk memiliki domain lebih dari satu.

Berikut ini adalah data teknis dari deployment aplikasi Monitoring Kinerja Perwakilan Kalimantan Selatan:

Data Teknis Deployment Aplikasi Monitoring Kinerja Perwakilan Kalsel

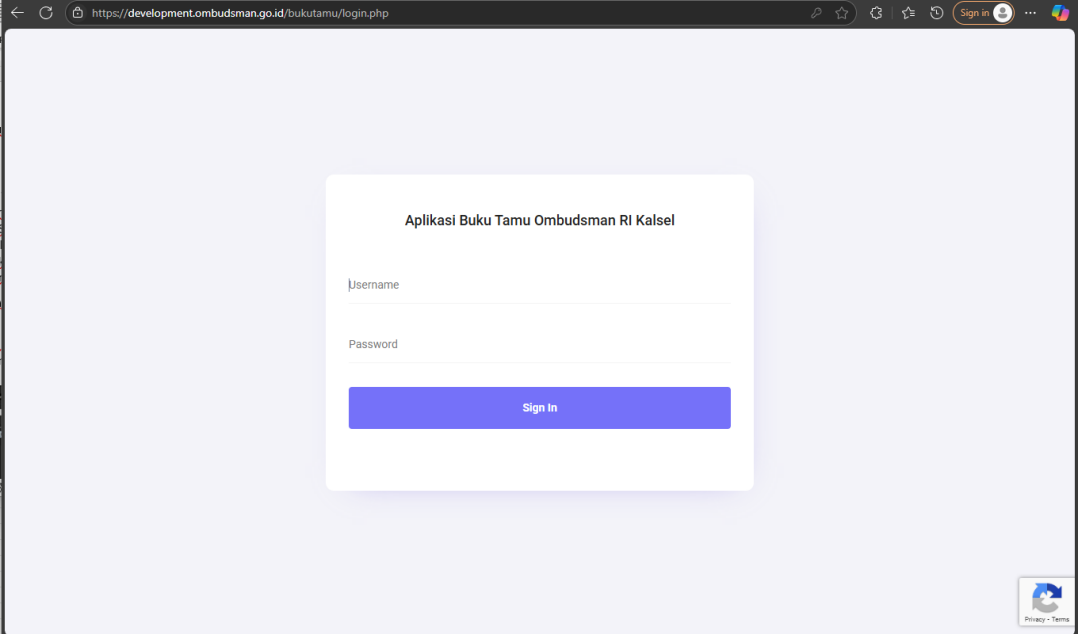
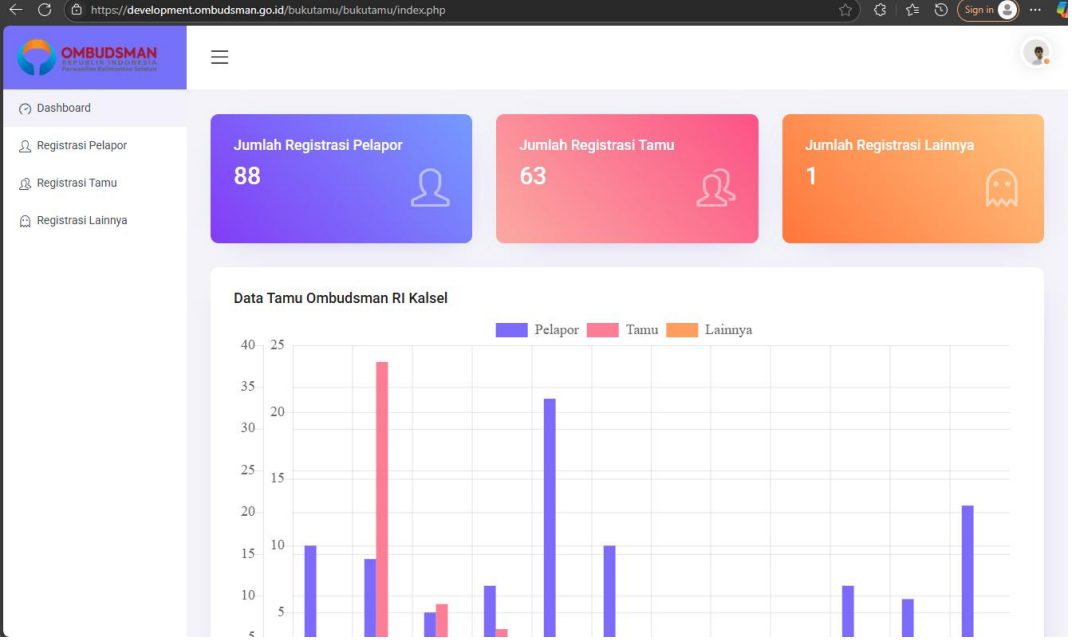
Item	Development	Production
Server Aplikasi	Development	web-php
Server Database	Development	dMySQL3
Lokasi Server	PDN	PDN
Branch	dev	main
URL	https://development.ombudsman.go.id/monja	https://monitoringrenja-kalsel.ombudsman.go.id/
Framework	Native PHP dengan Theme SbAdmin2	
GitLab Repo	https://gitlab.ombudsman.go.id/kalsel/monja.git	
Tampilan Web		

Item	Development	Production
Tampilan Dashboard		

h. Deployment Aplikasi Bukutamu Perwakilan Kalimantan Selatan
 Biro Humas dan TI pada tanggal 20 Juni 2025 telah menerima Nota Dinas dari Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No. 7/DI.01.01-22/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025. Dalam Nota Dinas tersebut, Perwakilan Kalimantan Selatan meminta bantuan kepada Biro Humas dan TI untuk menggabungkan aplikasi mereka ke infrastruktur TI di Pusat. Sebelumnya mereka telah melakukan hosting sendiri untuk aplikasi Monitoring Kinerja dan Buku Tamu pada alamat bukutamu.ombudsmanrikalsel.com serta monitoringrenja.ombudsmanrikalsel.com. Biro Humas dan TI mendasarkan penerimaan Nota Dinas tersebut berdasarkan Permenkominfo No.5 Tahun 2015 yang melarang satu institusi untuk memiliki domain lebih dari satu.

Berikut ini adalah data teknis dari deployment aplikasi Bukutamu Perwakilan Kalimantan Selatan:

Item	Development	Production
Server Aplikasi	Development	web-php
Server Database	Development	dMySQL3
Lokasi Server	PDN	PDN
Branch	dev	main

Item	Development	Production
URL	https://development.ombudsman.go.id/bukutamu	https://bukutamu-kassel.ombudsman.go.id/
Framework	Native PHP	
GitLab Repo	https://gitlab.ombudsman.go.id/kassel/bukutamu.git	
Tampilan Web		
Tampilan Dashboard		

i. Migrasi DNS Server dari NS1 di Colocation ke PDNS

Domain Name System (DNS) adalah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan (resolve) nama domain yang mudah diingat oleh manusia (seperti sikd.ombudsman.go.id) menjadi alamat IP numerik yang digunakan komputer untuk saling berkomunikasi. Server yang menyediakan layanan DNS disebut DNS Server.

Salah satu jenis DNS Server adalah Authoritative DNS Server, yaitu server yang menyimpan zona DNS untuk satu domain tertentu dan hanya menjawab kueri untuk domain tersebut.

Untuk domain ombudsman.go.id, Authoritative DNS Server terdiri atas:

- 1) NS1 (ns1.ombudsman.go.id) — berperan sebagai Primary (Master) DNS Server yang mengelola data utama, sebelumnya berlokasi di cloud milik vendor colocation.
- 2) NS2 (ns2.ombudsman.go.id) — berperan sebagai Secondary (Slave) DNS Server yang mereplikasi zona dari NS1, dan berlokasi di server Ombudsman yang di-hosting di colocation.
- 3) NS3 (ns3.ombudsman.go.id) — juga berperan sebagai Slave DNS Server, dan berlokasi di Ruang Server Lantai 7 Gedung Ombudsman RI

Kehadiran tiga server di lokasi berbeda memastikan ketersediaan dan keandalan layanan DNS jika salah satu server mengalami gangguan.

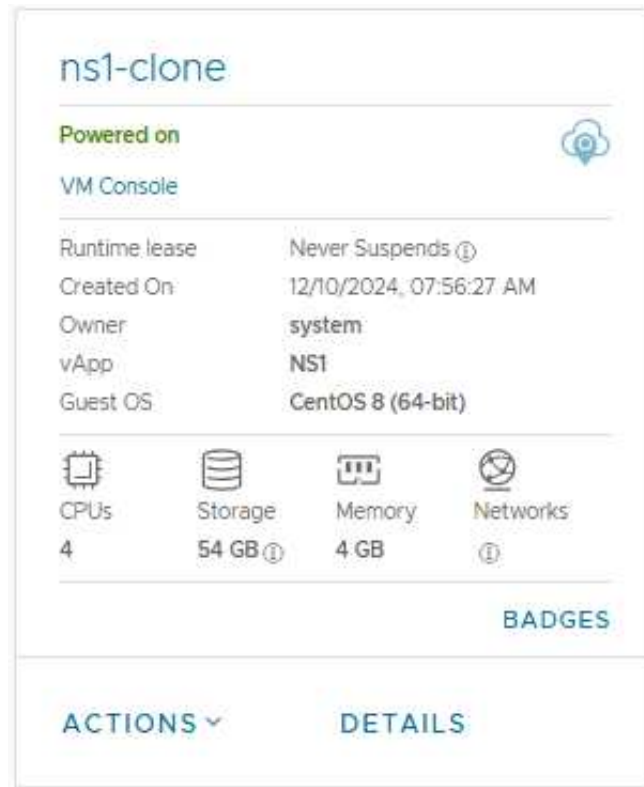
Pada April 2025, seluruh server Ombudsman yang sebelumnya berada di colocation dipindahkan ke Ruang Server Lantai 7. Akibatnya, NS2 menjadi berada di lokasi dan blok IP yang sama dengan NS3, sehingga keberadaannya tidak lagi relevan. Oleh karena itu, server NS2 kemudian dinonaktifkan.

Selama ini, manajemen NS1 masih dikelola oleh vendor colocation, bahkan setelah Ombudsman RI tidak lagi menyewa layanan colocation tersebut. Ombudsman tidak memiliki akses langsung ke NS1 dan hanya memiliki akses penuh (*root*) ke NS3. Upaya koordinasi dari bulan Januari 2025 untuk memindahkan pengelolaan NS1 ke PDNS (Pusat Data Nasional) milik Ombudsman tidak berjalan lancar.

Akhirnya, pada Juli 2025, Ombudsman RI memutuskan untuk melakukan migrasi NS1 secara mandiri ke PDNS.

Pembuatan server NS1 baru di PDNS sebenarnya telah selesai sejak Januari 2025 sebagai bagian dari persiapan berakhirnya kontrak colocation tahun 2024. Namun, proses konfigurasi tambahan seperti pemasangan EDR (Endpoint Detection and Response) di PDNS memerlukan waktu cukup lama. Berikut ini adalah spesifikasinya:

- vCPU : 4
- vRAM : 4 GB
- Storage : 50GB
- OS : AlmaLinux 9.6
- Aplikasi : BIND 9.16.23-R



Spesifikasi Server NS1

Berikut ini adalah langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka migrasi Server NS1:

- 1) Melakukan troubleshooting jaringan server NS1 yang error bersama teknisi PDNS.
- 2) Instalasi BIND di server NS1.
- 3) Ekstraksi database record DNS dari NS3.
- 4) Konfigurasi BIND di NS1 agar berfungsi sebagai Master Authoritative DNS Server.
- 5) Pindahan konfigurasi DNS NS1 dari alamat IP lama ke IP baru di registrar domain.go.id yang dikelola oleh Kominfo/Komdigi melalui laman <https://domain.go.id>
- 6) Pengujian dan pemantauan (testing dan monitoring) layanan DNS.
- 7) Permintaan delegasi reverse DNS (PTR zone) ke IDNIC (*Indonesia Network Information Center*).

- 8) Pengaktifan DNSSEC (*Domain Name System Security Extensions*) untuk peningkatan keamanan DNS.
- 9) Penyusunan panduan pengelolaan DNS bagi administrator internal

Proses pemindahan dan aktivasi Server DNS NS1 di PDNS selesai dilaksanakan pada 21 Juli 2025.

j. Migrasi Server esign-prod ke PDNS

Aplikasi esign (<https://esign.ombudsman.go.id>) yang diinstall di Server esign-prod lokasinya berada di server Dell R910 yang salah satu haddisknya sudah rusak. Meskipun menggunakan konfigurasi RAID5 yang memungkinkan server masih bekerja, namun kerusakan tersebut membuatnya rawan kehilangan data.

Pembuatan server esign-prod telah dilakukan bulan Maret 2025 dengan spesifikasi sebagai berikut:

- vCPU : 8
- vRAM : 16 GB
- Storage : 80 GB
- OS : Ubuntu 24.04.2 LTS
- Aplikasi : docker v28.3.2 dan docker-compose v2.38.2

Esign-prod di PDNS menggunakan Load Balancer bawaan dari PDNS dan menerapkan pembatasan IP Address yang akan mengaksesnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi serangan hacker. Setting Server esign-prod dilakukan pada tanggal 25 - 28 Juli 2025.

The screenshot displays the configuration and resource usage for a virtual machine named 'esign-prod'. The VM is currently 'Powered on'. Key configuration details include: Runtime lease set to 'Never Suspends', Created On '11/19/2024, 02:35:24 AM', Owner 'admin', vApp 'web-LB1', and Guest OS 'Ubuntu Linux (64-bit)'. Resource usage is shown as 8 CPUs, 192 GB Storage, 16 GB Memory, and Networks. The interface includes buttons for 'VM Console', 'BADGES', 'ACTIONS', and 'DETAILS'.

Property	Value
Powered on	
VM Console	
Runtime lease	Never Suspends
Created On	11/19/2024, 02:35:24 AM
Owner	admin
vApp	web-LB1
Guest OS	Ubuntu Linux (64-bit)
CPU	8
Storage	192 GB
Memory	16 GB
Networks	

Spesifikasi Server esign-prod

The screenshot shows the web application interface for 'eSign Client Service'. The header includes the logo of 'Balai Sertifikasi Elektronik'. The main content area features the title 'eSign Client Service' and a subtitle 'Aplikasi eSign untuk penerapan tanda tangan elektronik berbasis cloud'. A prominent 'DOKUMENTASI API' button is visible. The background is blue with a network diagram and icons representing a cloud, server, and mobile devices.

Aplikasi Esign

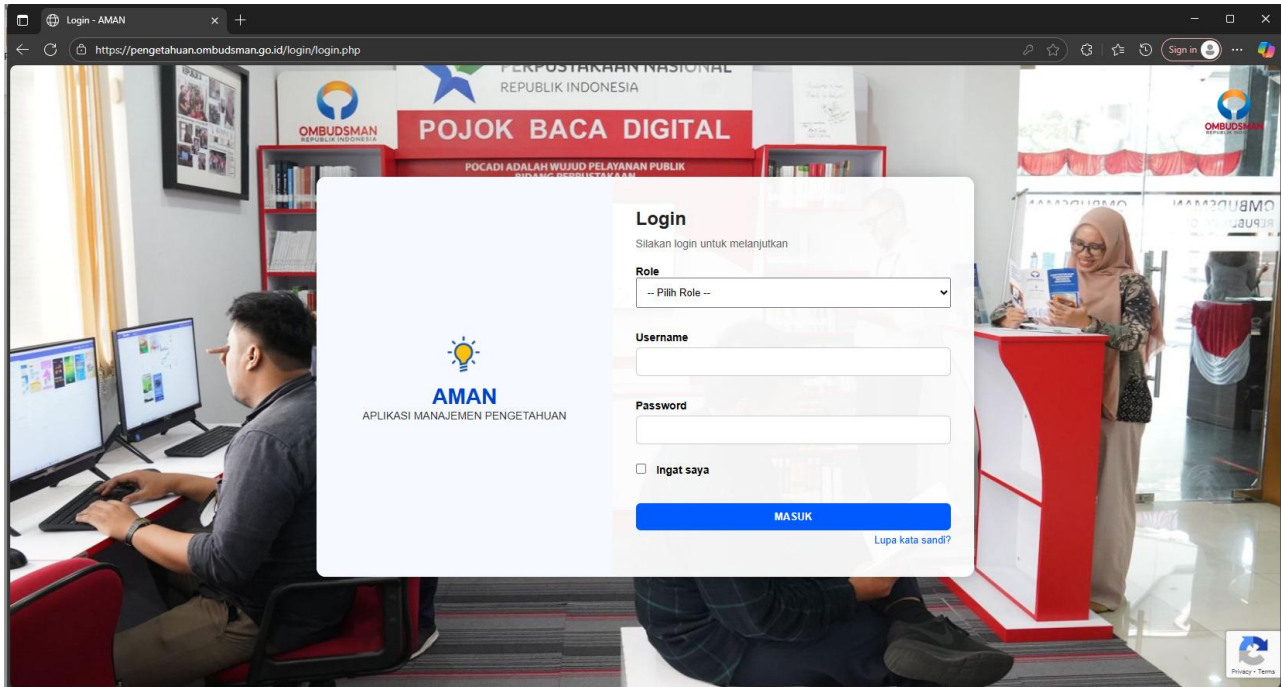
k. Deployment Aplikasi Manajemen Pengetahuan

Aplikasi Manajemen Pengetahuan dibuat oleh KUMPM dan telah meminta Biro Humas dan TI untuk menguploadnya ke Server. Aplikasi ini kemudian diupload di Server Development di PDN dan disetting auto deploy melalui gitlab Ombudsman (<https://gitlab.ombudsman.go.id>). Setting dan deployment dilakukan dari tanggal 6 sampai 22 Agustus 2025. Server development dipilih karena server tersebut aksesnya masih terbatas hanya internal Ombudsman RI.

Untuk dapat diakses oleh public, maka prasyarat keamanan harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya vulnerability assessment dari Tim Keamanan Informasi.

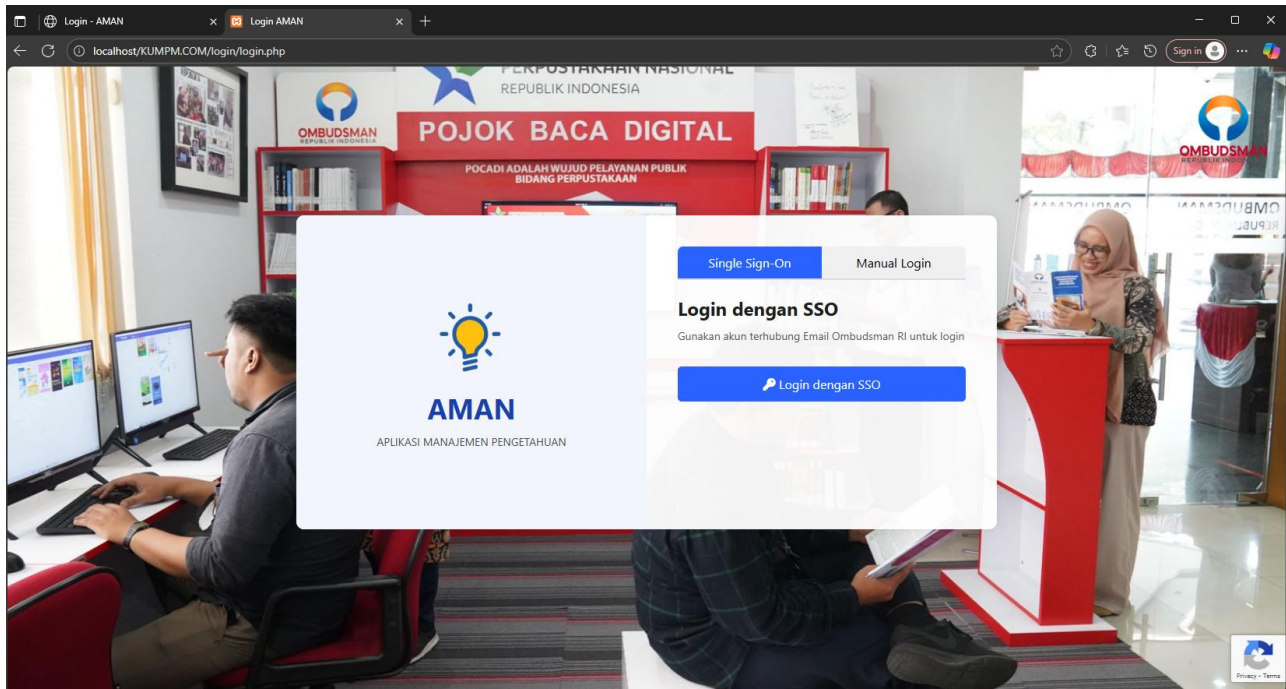
Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian deployment aplikasi:

- 1) Copy file ke Server Development.
- 2) Membuat user dan database serta me-restore databasenya
- 3) Inisialisasi git untuk Project Pengetahuan di server development
- 4) Setting tag pengetahuan-prod pada gitlab-runner (tagar)40
- 5) Membuat script .gitlab-ci.yml dan variable yang dibutuhkan untuk auto deploy
- 6) Push project ke gitlab.ombudsman.go.id
- 7) Setting DNS subdomain pengetahuan.ombudsman.go.id, dan pada tahap ini aplikasi sudah dapat diakses pada Alamat <https://pengetahuan.ombudsman.go.id> dari jaringan internal Ombudsman RI
- 8) Penambahan reCAPTCHA Google pada halaman logi



Aplikasi Manajemen Pengetahuan

Selain penambahan reCAPTCHA, login melalui SSO keycloak juga sudah disiapkan namun belum diaplikasikan pada production.



Aplikasi Manajemen Pengetahuan dengan Login SSO

I. Deployment Aplikasi Penilaian (Production dan Development)

Survey Kepatuhan pada Tahun 2025 akan menggunakan aplikasi Opini dengan beberapa perubahan. Untuk memfasilitasinya, maka kemudian Aplikasi Opini di-kloning menjadi Aplikasi baru yang untuk sementara disebut dengan Aplikasi Penilaian. Adanya Aplikasi yang berbeda dengan Opini memastikan bahwa perubahan-perubahan pada aplikasi baru tidak akan mempengaruhi data pada Survey Tahun-tahun sebelumnya di Aplikasi Opini.

Terdapat dua lingkungan untuk pengembangan yaitu Production dan Development. Server Production akan berisi dua aplikasi yaitu Opini dan Penilaian yang berbasis docker, sedangkan Server Development juga berisi aplikasi yang sama. Untuk mengakomodasi penggunaan dua aplikasi docker yang sama pada satu server maka terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan yaitu:

- 1) Penambahan nama project dan port dinamis di file .env, memungkinkan satu project diimplementasikan di dua environment yang berbeda
- 2) Menambahkan container nginx sebagai reverse-proxy pada server development

Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian deployment aplikasi penilaian (production dan development):

- 1) Melakukan git clone Aplikasi Opini dan menamakannya Aplikasi Penilaian
- 2) Membuat database penilaian. Untuk user menggunakan user database yang sama dengan Opini
- 3) Backup database Aplikasi Opini dan me-restorenya ke database Aplikasi Penilaian
- 4) Meng-copy konfigurasi nginx dari Opini ke Penilaian
- 5) Membuat reCAPTCHA Google untuk domain penilaian.ombudsman.go.id dan dev-penilaian.ombudsman.go.id
- 6) Setting DNS Server untuk subdomain baru

Daftar Subdomain Penilaian

No	Subdomain	Env	Fungsi
1	penilaian.ombudsman.go.id	Production	FrontEnd
2	apipenilaian.ombudsman.go.id	Production	Backend
3	pkpm.ombudsman.go.id	Production	PPM

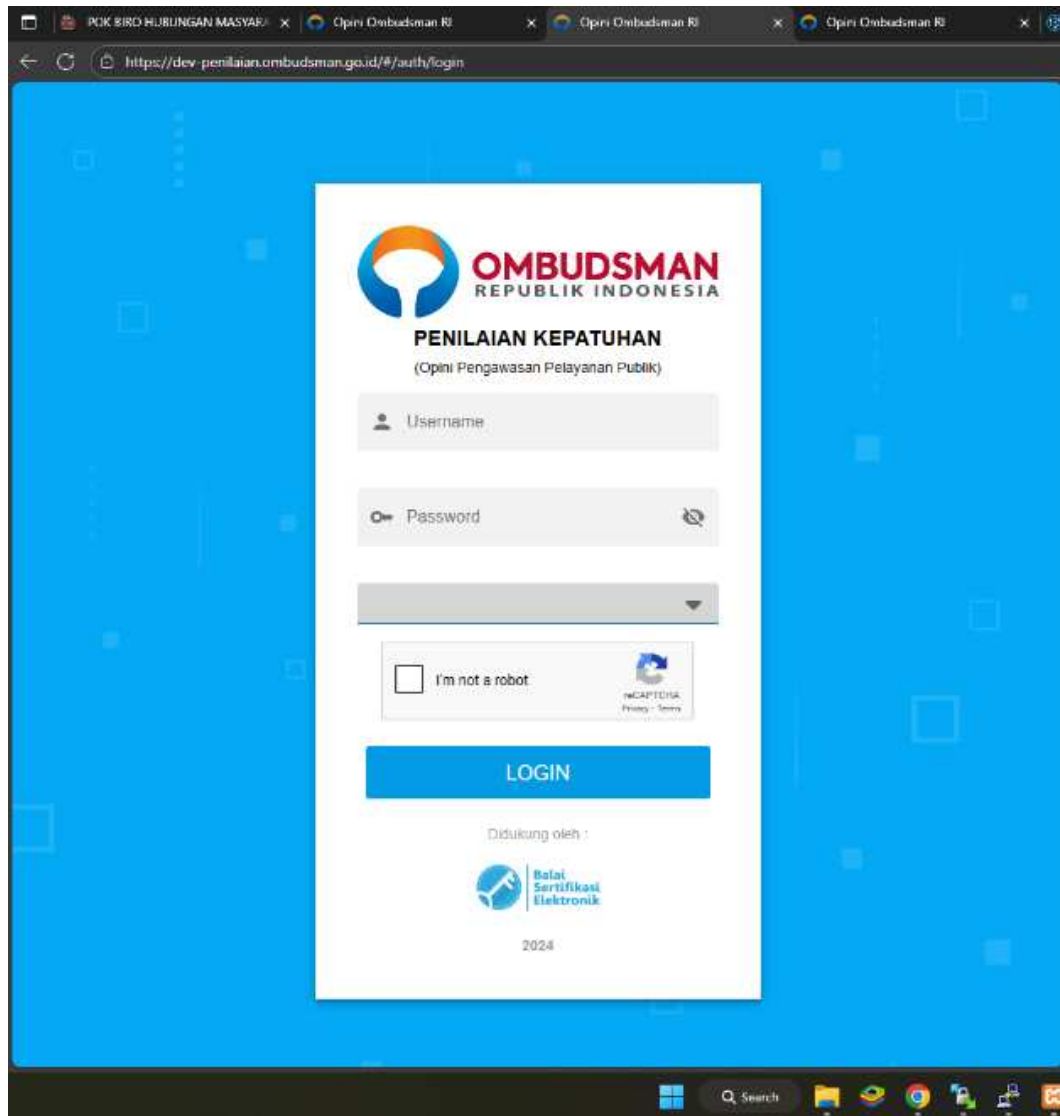
4	dev- penilaian.ombudsman.go.id	Deveopment	FrontEnd
5	dev- apipenilaian.ombudsman.go.id	Production	Backend
6	dev-pkpm.ombudsman.go.id	Production	PPM

- 7) Setelah Aplikasi online, selanjutnya dilakukan git push ke Gitlab untuk Project baru Aplikasi Penilaian

Daftar Project Gitlab untuk Aplikasi Penilaian

No	Project Gitlab	Fungsi	Project URL
1	web-penilaian	Boilerplate Template	https://gitlab.ombudsman.go.id/penilaian/web-penilaian.git
2	opini-2025	FrontEnd	https://gitlab.ombudsman.go.id/penilaian/opini-2025.git
3	backend_opini_2025	Backend	https://gitlab.ombudsman.go.id/penilaian/backend_opini_2025.git
4	opini-pkpm	PPM	https://gitlab.ombudsman.go.id/penilaian/opini-pkpm.git

- 8) Penyesuaian file .gitlab-ci.yml sehingga auto deploy dapat bekerja Kembali



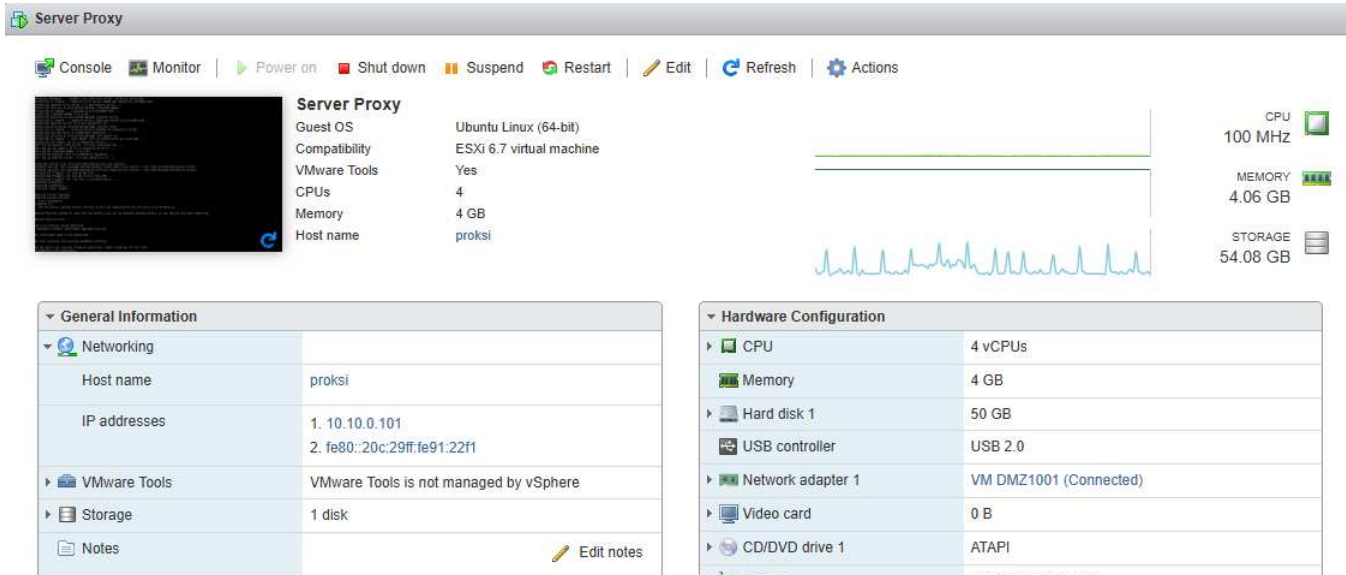
Aplikasi Penilaian (Development)

m. Pembuatan Server Proksi

Pembuatan Server reverse proxy semula dimaksudkan untuk menjawab temuan pada Aplikasi WDMS yang masih menggunakan versi Apache lama. Apache pada Aplikasi WDMS tidak memungkinkan untuk di-upgrade karena menjadi satu dengan Aplikasi WDMS yang digunakan. Dengan adanya reverse proxy yang ada di depan Server WDMS, maka Aplikasi WDMS menjadi terlindungi. Pembuatan server reverse proxy dengan nama Proksi dilakukan pada tanggal 8 September 2025 dengan spesifikasi sebagai berikut:

- vCPU : 4
- vRAM : 4 GB
- Storage : 50 GB
- OS : Ubuntu Server 24.04.3 LTS

- Aplikasi : nginx v1.24.0



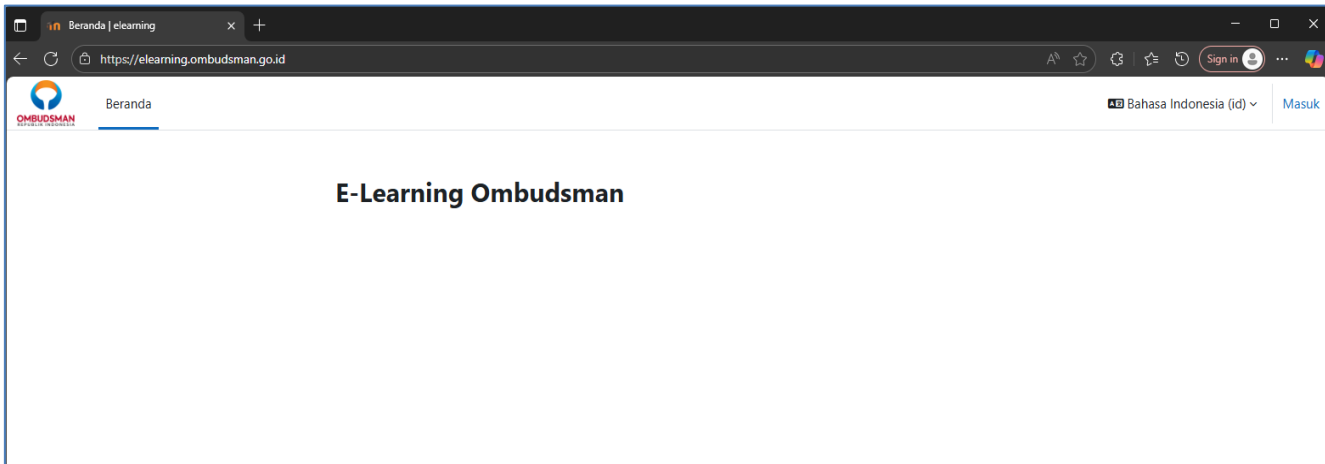
Server Proksi

- n. Migrasi akses Aplikasi Elearning dari Jaringan Internal ke Jaringan Publik
Migrasi akses aplikasi elearning (<https://elearning.ombudsman.go.id>) dari jaringan internal ke jaringan publik dilakukan setelah aspek keamanannya ditingkatkan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah:
- 1) Update versi Moodle dari v4.3.3 ke v5.0.1 pada 1 Agustus 2025
 - 2) Mengaktifkan reCAPTCHA Google versi2 pada halaman login pada 10 Agustus 2025

Sehubungan dengan hal tersebut dan rencana penggunaannya untuk Bimtek PVL, maka kemudian dilakukan pemindahan Aplikasi Elearning ke Akses Publik. Aplikasi Moodle sendiri diinstall di Server Development (10.88.0.21) dan aksesnya ke Internet dilakukan melalui Load Balancer milik IGCP yang juga menyediakan SSL. Load Balancer ini hanya dapat diakses oleh jaringan internal di Ombudsman.

Pada tanggal 2 – 3 September 2025 dilakukan instalasi Moodle pada server simpan (10.88.0.106), namun ternyata problem pada konfigurasi **FastCGI Split Path** menyebabkan berkas **CSS** dan **JavaScript** tidak termuat dengan benar. Selain itu, ternyata Versi MariaDB pada Server Database Production (dbmysql3) masih belum mencukupi (v10.9.8) untuk Moodle v5.0.1 dan perlu diupgrade ke v10.11.0. Tindakan ini memerlukan perhitungan matang karena terdapat aplikasi lain yang juga menggunakan server Database yang sama.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka strategi yang digunakan untuk mengubahnya ke Publik diubah dengan mengganti akses SSL dari Load Balancer IGCP ke Reverse-Proxy Publik pada tanggal 4 September 2025. Subdomain Aplikasi Elearning (<https://elearning.ombudsman.go.id>) selanjutnya diganti mappingnya di DNS Server ke IP Publik dari reverse-proxy.



Aplikasi Elearning (<https://elearning.ombudsman.go.id>)

o. Deployment Aplikasi Journal OJS ke Server Development

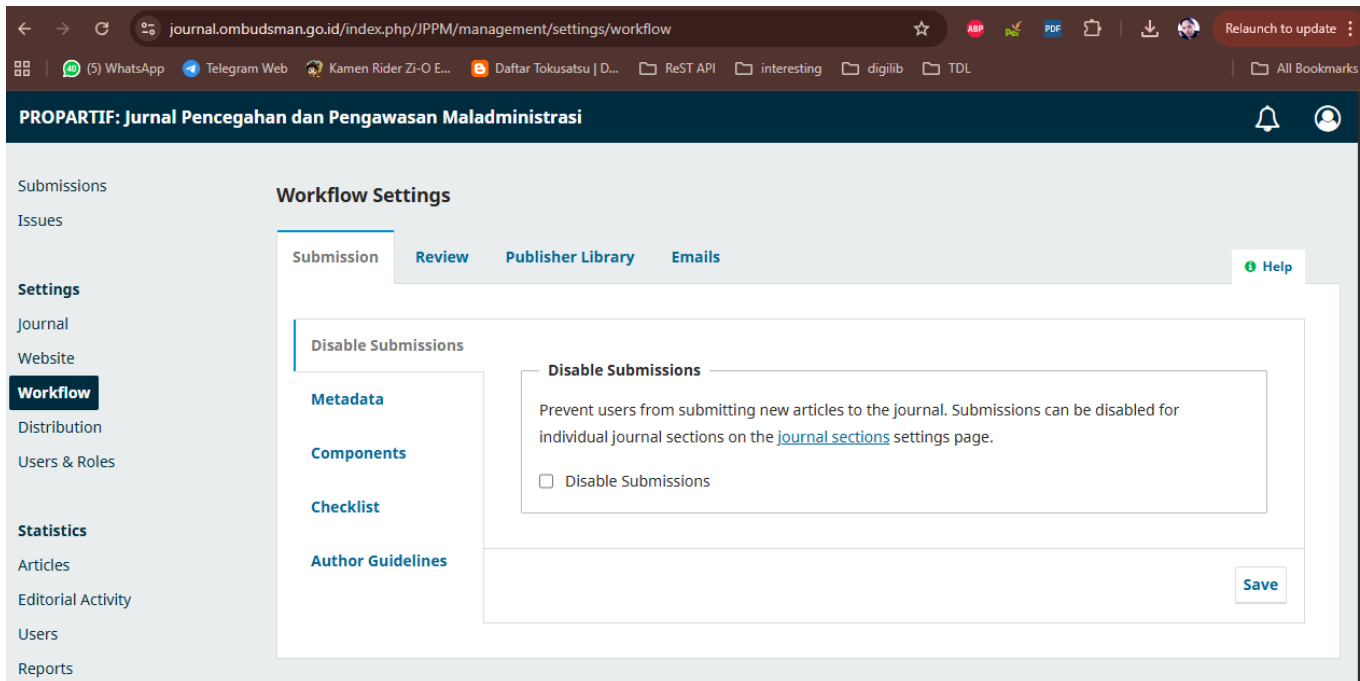
Aplikasi Journal digunakan untuk memublikasikan Journal yang diterbitkan oleh Ombudsman RI. Aplikasi ini berbasis OSJ (*Open Journal System*), yaitu perangkat lunak open-source berbasis web yang berfungsi untuk mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah secara online. Aplikasi ini dikembangkan oleh PKP (*Public Knowledge Project*) dan banyak dipakai oleh kampus, lembaga penelitian, maupun penerbit jurnal di seluruh dunia.

Versi yang digunakan adalah versi 3.3 yang merupakan versi Long Term Support (LTS). Pembahasan dengan pihak pengembang dilakukan pada 2 September 2025 melalui Zoom Meeting.

Instalasi awal dilakukan pada **Server Portal2**, yaitu server yang sama dengan **Aplikasi Perpustakaan**. Namun, ditemukan masalah pada konfigurasi **FastCGI Split Path**, yang menyebabkan berkas **CSS** dan **JavaScript** tidak termuat dengan benar. Permasalahan ini serupa dengan yang pernah terjadi pada **Aplikasi Moodle (e-Learning)**.

Berdasarkan hasil evaluasi, diputuskan untuk memindahkan instalasi OJS ke **Server Development (10.88.0.21)** - server yang juga digunakan oleh Moodle - pada **4 September 2025**.

Proses instalasi tergolong sederhana, hanya melibatkan ekstraksi berkas aplikasi dan *restore* basis data **MySQL**. Aplikasi kemudian diakses melalui subdomain <https://journal.ombudsman.go.id>



Aplikasi Journal

p. Deployment Aplikasi Kanusa ke Server Sipaten

Aplikasi Kanusa terdiri dari Backend dan Frontend yang masing-masing menggunakan NodeJS Express dan Code Igniter4. Keduanya digabungkan dalam satu docker compose dan diinstall pada server web-sipaten (10.88.0.103) di PDN. Proses deployment aplikasi dilakukan dari tanggal 15 – 23 September 2025. Tahapan dari proses deployment adalah sebagai berikut:

- 1) Upload Project Frontend dan Backend oleh pengembang (Gunawan dan Ganjar) di Gitlab Ombudsman
- 2) Kontainerisasi Frontend dan Backend, meliputi pembuatan File Dockerfile yang sesuai
- 3) Pembuatan docker-compose boilerplate yang akan menggabungkan container Frontend dan Backend dalam satu docker-compose
- 4) Setting nginx di dalam docker-compose yang akan memungkinkan aplikasi Frontend dan Backend dapat diakses dari luar server
- 5) Setting auto deploy atau CI/CD (*Continuous Integration/Continuous Deployment*) pada Frontend, Backend dan docker-compose. Setting CI/CD diwujudkan dengan melakukan setting gitlab-runner pada server dan membuat file `.gitlab-ci.yml` pada masing-masing project

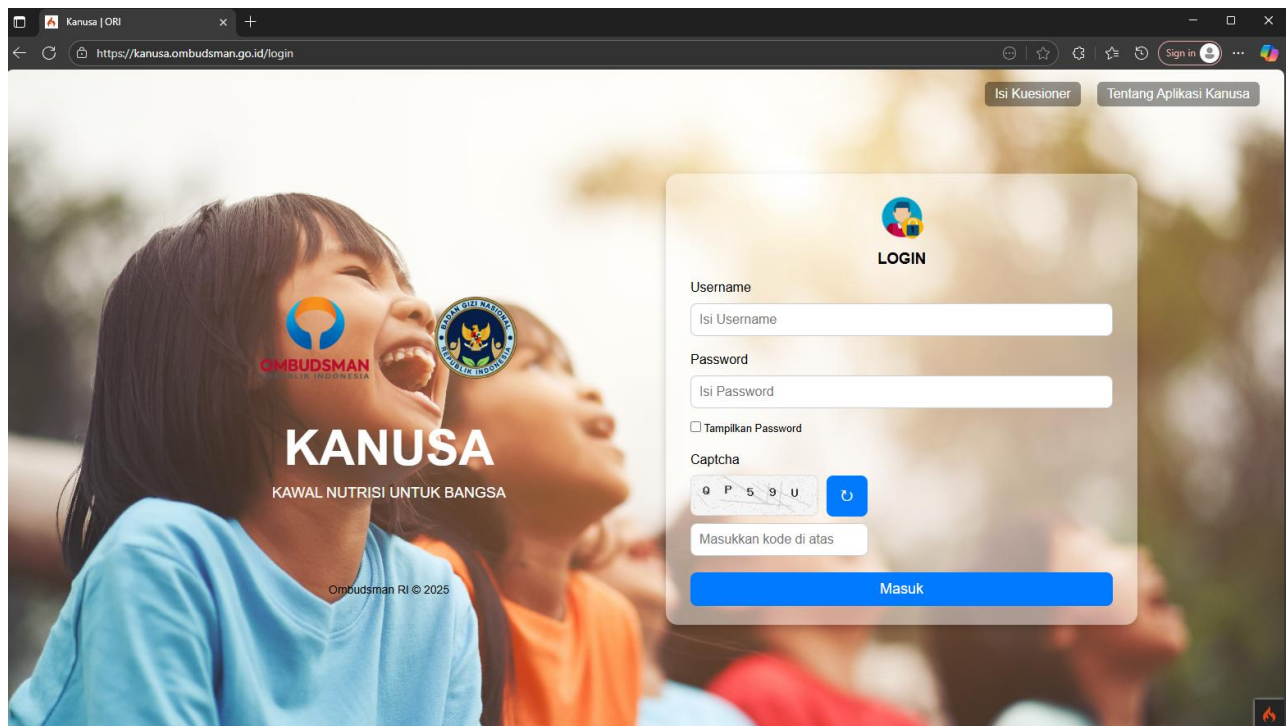
Berikut ini adalah setting DNS untuk subdomain baru, backend dan frontend:

No	Repository	Fungsi
1	https://gitlab.ombudsman.go.id/prambanan/web-template.git	Docker-compose boilerplate
2	https://gitlab.ombudsman.go.id/prambanan/kanusa.git	Frontend
3	https://gitlab.ombudsman.go.id/prambanan/backend.git	Backend

Tabel Data Project Gitlab untuk Aplikasi Kanusa

Berikut ini adalah setting DNS untuk subdomain baru, backend dan frontend:

- Frontend: <https://kanusa.ombudsman.go.id>
- Backend: <https://kanusa.ombudsman.go.id/api>



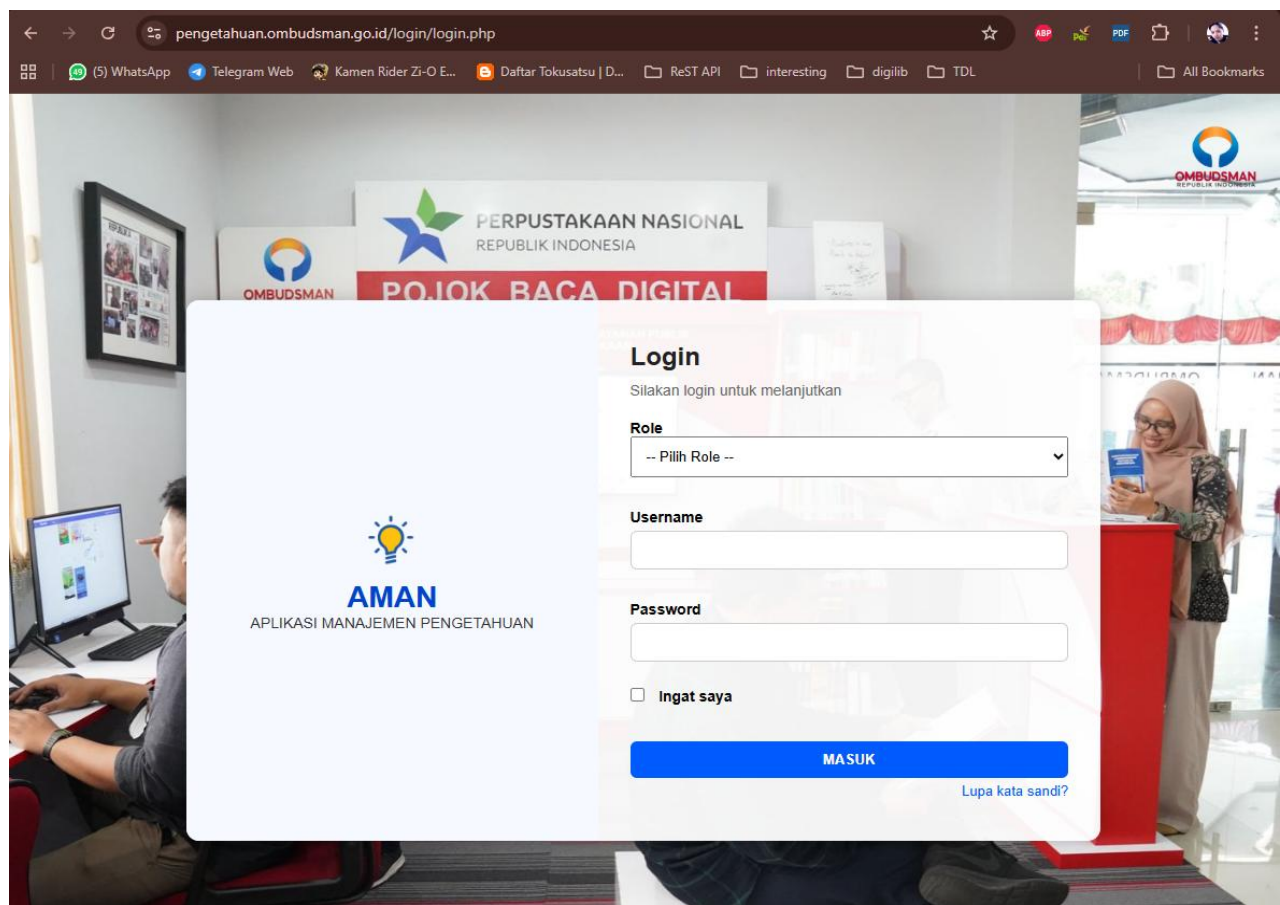
Aplikasi Kanusa

- q. Migrasi Akses Aplikasi Manajemen Pengetahuan ke Publik
 Aplikasi Manajemen Pengetahuan (<https://pengetahuan.ombudsman.go.id>) dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi (KU MPM). Setelah dilakukan pentest pada aplikasi tersebut oleh Tim Keamanan serta telah penambahan CAPTCHA pada halaman login, maka aplikasi telah siap untuk dipindahkan ke akses public.

Pada tanggal 2 – 3 Oktober 2025 telah dilakukan langkah-langkah berikut ini untuk proses pemindahan:

- 1) Menyalin file aplikasi dari server development (lama) ke server simpan (baru)
- 2) Pembuatan konfigurasi proxy, karena server simpan menggunakan reverse-proxy
- 3) Update IP Publik di DNS Server

Untuk database masih menggunakan server lama di development karena server production dbmysql3 di PDN masih belum diupdate. Setelah mariadb di server dbmysql3 diupdate ke versi 10.11 pada tanggal 6 November 2025, proses migrasi database kemudian dilakukan pada tanggal 12 Desember 2025.



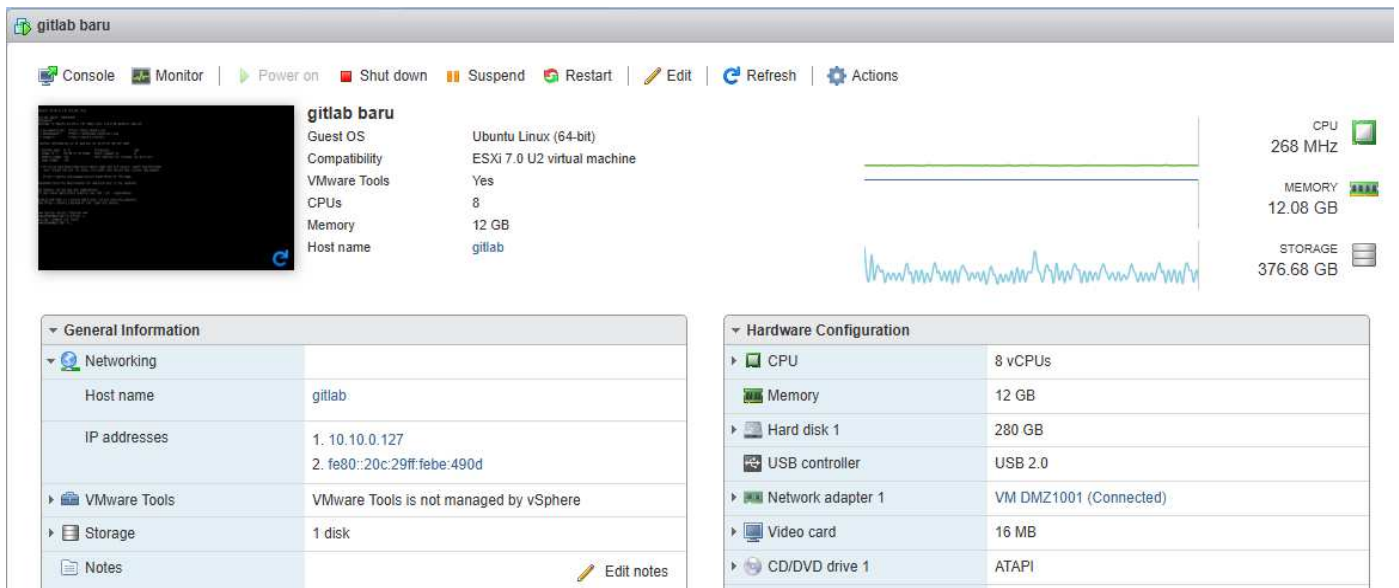
Aplikasi Manajemen Pengetahuan

- r. Migrasi Server GitLab karena Storage Host VMWare sudah penuh
Aplikasi Gitlab (<https://gitlab.ombudsman.go.id>) merupakan aplikasi yang digunakan untuk manajemen *Source Code* menggunakan versioning system yang memudahkan tracking dan deployment aplikasi di server. Aplikasi ini

sudah memakan storage sebanyak 90% dari 1 TB kapasitas server Host VMWare, padahal ukuran aslinya adalah 280 GB. Hal ini terjadi karena banyaknya Snapshot sehingga ukuran penyimpanan juga semakin besar. Menghapus snapshot saja tidak akan mengurangi penggunaan dan harus dilakukan *Disc Consolidation*. Namun demikian hal ini tidak memungkinkan karena tidak ada lagi spare pada Host VMWare, dimana *Free Space* tinggal 10% dari kapasitas keseluruhan.

Langkah pertama yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2025 adalah melakukan transfer file VMWare secara langsung menggunakan protokol SCP dari server fisik lama ke server fisik baru. Setelah proses transfer selesai dan VM diaktifkan, ternyata tetap tidak bisa membaca storage. Hal ini karena metode penyimpanan yang berbeda (File VMDK) antara server lama dan server baru, dimana server baru juga menggunakan versi VMWare yang baru. Karena metode tersebut tidak berhasil, maka dilakukan cara kedua, yaitu membuat server baru. Server baru dibuat dengan spesifikasi yang sama yaitu:

- vCPU : 8
- vRAM : 12 GB
- Storage : 280 GB
- OS : Ubuntu 24.04.3 LTS
- Aplikasi : gitlab-CE v17.8.7



General Information	
Networking	
Host name	gitlab
IP addresses	1. 10.10.0.127 2. fe80::20c:29ff:febe:490d
VMware Tools	VMware Tools is not managed by vSphere
Storage	1 disk
Notes	

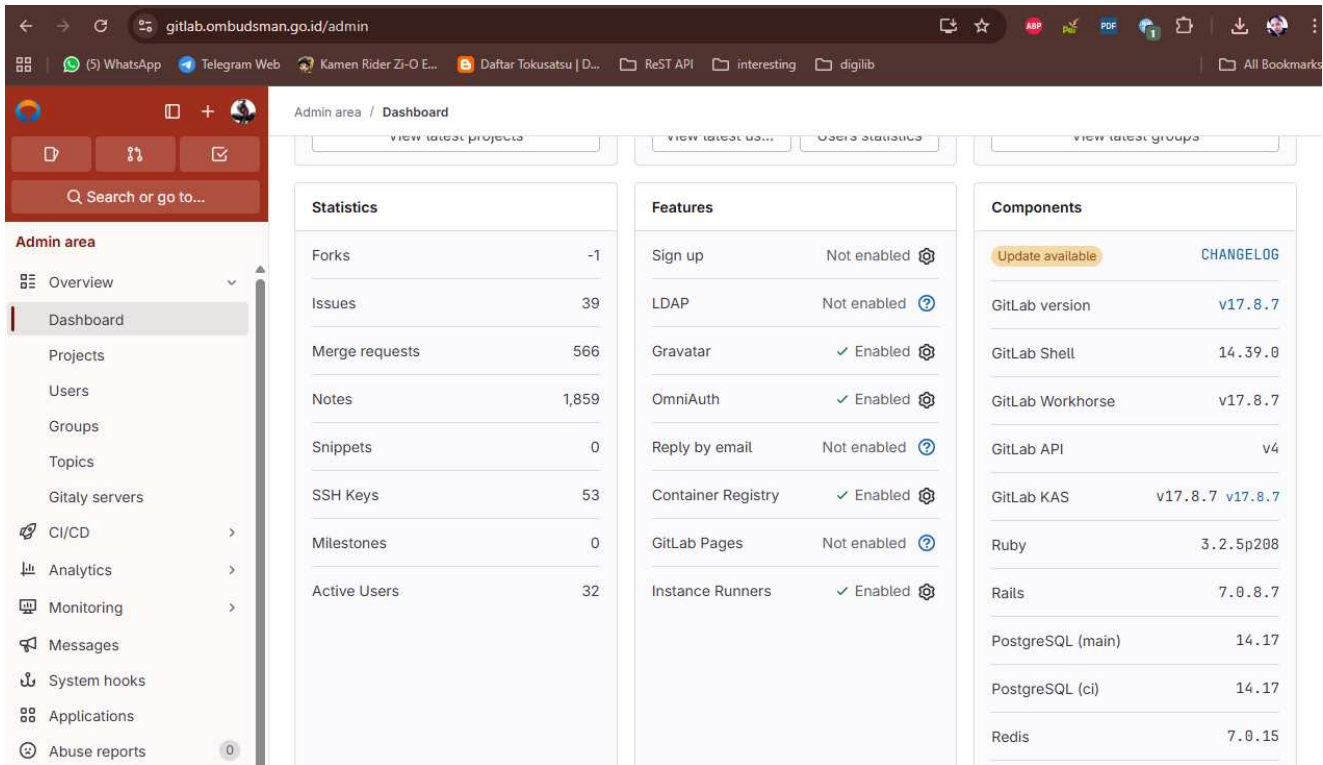
Hardware Configuration	
CPU	8 vCPUs
Memory	12 GB
Hard disk 1	280 GB
USB controller	USB 2.0
Network adapter 1	VM DMZ1001 (Connected)
Video card	16 MB
CD/DVD drive 1	ATAPI

Spesifikasi Server gitlab-baru

Instalasi gitlab-CE kemudian dilakukan dengan tahapan berikut:

- 1) Mematikan service gitlab dan melakukan backup
- 2) Instalasi gitlab-CE dengan versi yang sama
- 3) Proses restore konfigurasi dan data gitlab
- 4) Memperbaharui SSH Key pada client Gitlab
- 5) Testing CI/CD pada client gitlab dan proses pengiriman email

Proses migrasi Aplikasi Gitlab selesai pada tanggal 5 Oktober 2025.



Aplikasi Gitlab

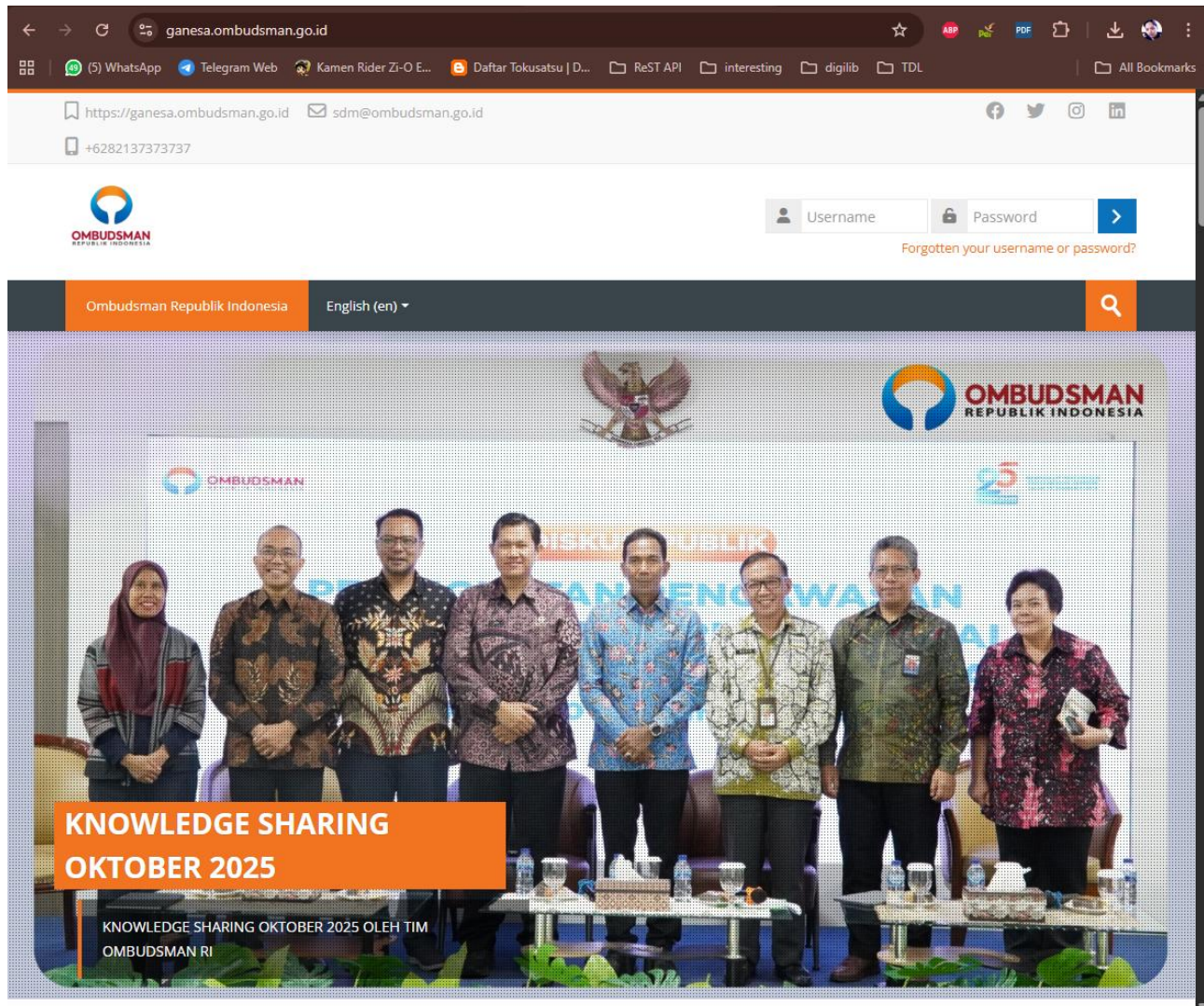
s. Deployment Aplikasi Ganesa

Aplikasi Ganesa merupakan sebuah *Knowledge Management System* (KMS) atau Aplikasi Manajemen Pengetahuan berbasis Moodle v4 yang telah dimodifikasi oleh pihak ketiga PahamSEO. Aplikasi ini kemudian mulai diinstall pada tanggal 6 Oktober 2025 pada server yang sudah ada yaitu Simapan yang sebelumnya digunakan untuk aplikasi Simapan namun sudah tidak digunakan lagi. Untuk Server Database MySQL masih menggunakan server development karena versi MariaDB telah diperbaharui ke v10.11. File aplikasi dari pihak ketiga terdiri atas:

- File Aplikasi Moodle yang telah dimodifikasi
- File Data Moodle

- Dump Database MySQL

Ketiga file tersebut selanjutnya diupload ke server Simpan dan Development (untuk Database). Setelah selesai instalasi selanjutnya Aplikasi Ganesa dapat diakses pada Alamat <https://ganesa.ombudsman.go.id>.



Aplikasi Manajemen Pengetahuan Ganesa

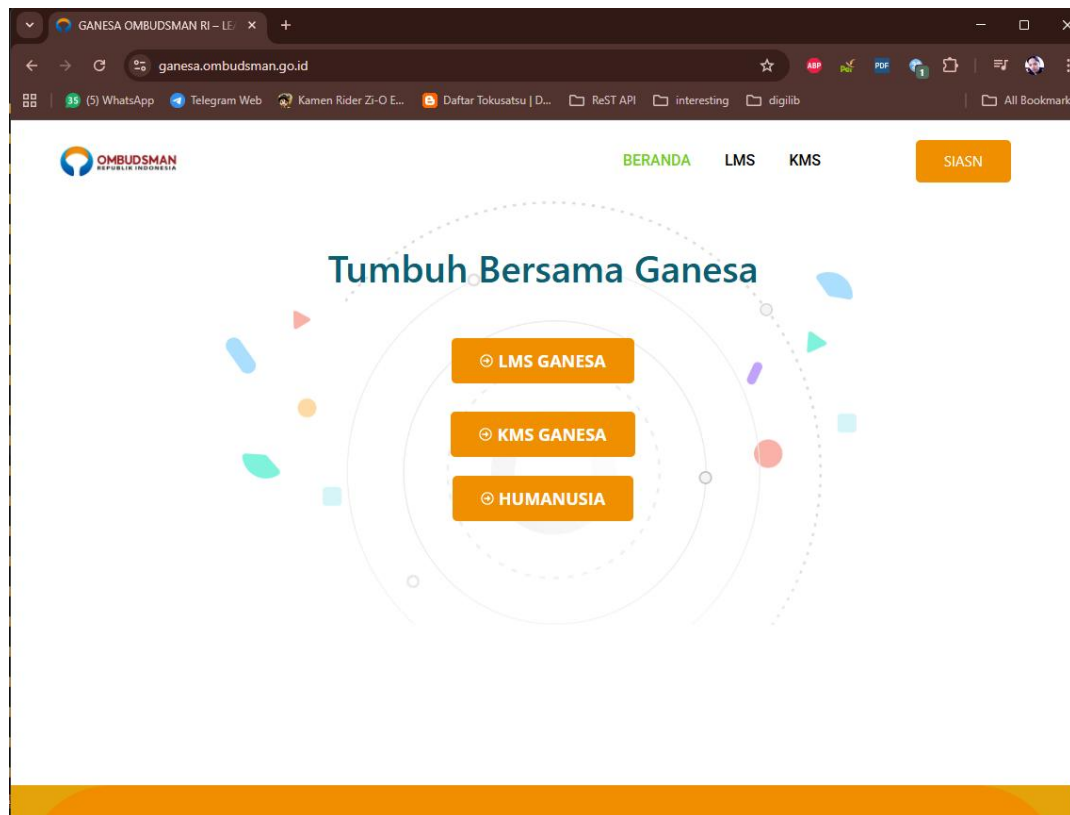
Pada Bulan November 2025, terdapat perubahan konsep dengan penambahan *Learning Manajemen System* (LMS) atau Aplikasi Manajemen Pembelajaran pada Ganesa. LMS ini menggunakan basis yang sama yaitu Moodle v4. Keduanya, KMS (sebelumnya Ganesa) dan LMS adalah system yang terpisah dengan login masing-masing. Keduanya dikumpulkan pada

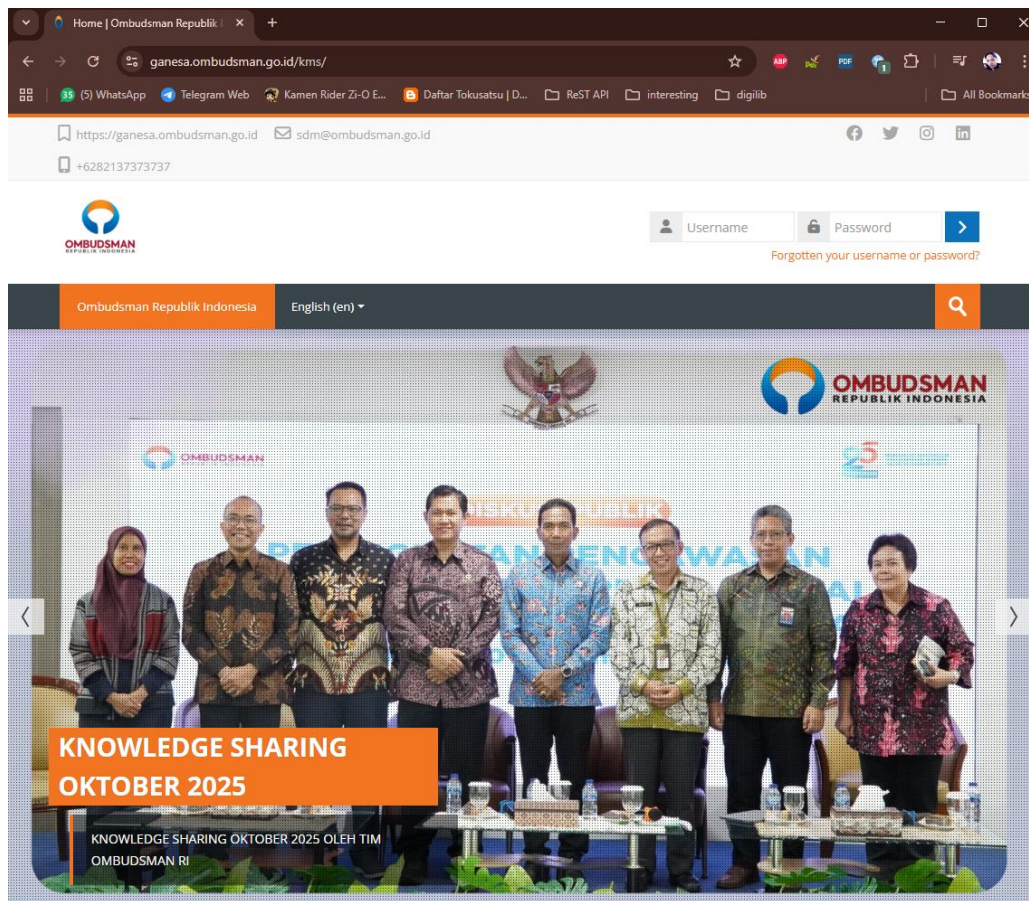
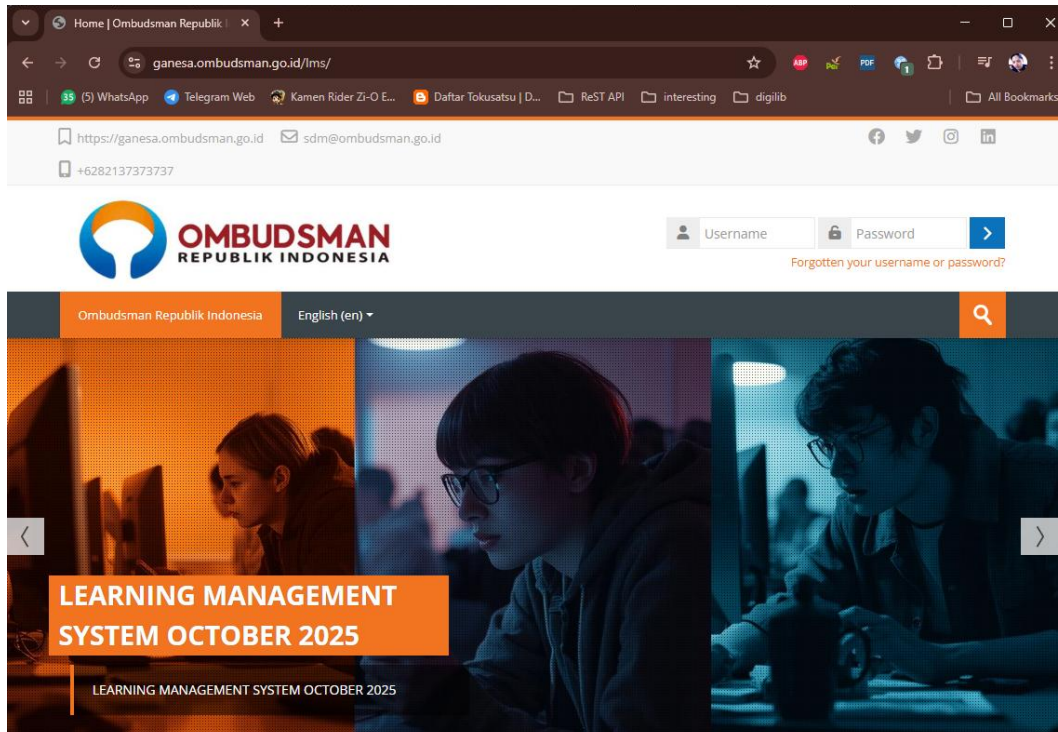
satu Dashboard Ganesa yang berbasis Wordpress. Berikut adalah pengaturan isinya untuk memudahkan pengguna:

No	Tautan	Isi	Basis
1	https://ganesa.ombudsman.go.id	Ganesa Dashboard	Wordpress
2	https://ganesa.ombudsman.go.id/kms	Ganesa KMS	Moodle v4
3	https://ganesa.ombudsman.go.id/lms	Ganesa LMS	Moodle v4

Dengan demikian, maka pengguna hanya perlu mengingat satu subdomain saja untuk Ganesa. Dengan adanya momen instalasi ketiga aplikasi tersebut pada tanggal 3 – 4 Desember 2025 maka kemudian dilakukan juga kegiatan tambahan pada tanggal 17 – 18 Desember 2025 yaitu:

- Pemindahan database dari Server Development ke Server dbMySQL3
- Pengaturan lanjutan pada folder permission pada MoodleData sehingga aplikasi Ganesa menjadi lebih lancar
- Instalasi PHP7.4 (downgrade dari 8.2) untuk meningkatkan kompatibilitas dengan Moodle v4





Aplikasi Dashboard, LMS, dan KMS Ganesa

t. Pembuatan Server NS3 Baru

Server ns3 saat ini berada di Server Dell R910 (SN B6MP8X1) yang saat ini kondisinya adalah satu drive mengalami kerusakan. Server baru kemudian dibuat pada tanggal 28 – 30 November 2025 di Server HP ProLiant DL380 Gen10 (SN SGH105VM6C) yang dalam kondisi bagus. Berikut ini adalah spesifikasi dari server yang baru:

- vCPU : 4
- vRAM : 4 GB
- Storage : 40 GB
- OS : AlmaLinux 9.7

ns3

Guest OS	CentOS 9 (64-bit)
Compatibility	ESXi 7.0 U2 virtual machine
VMware Tools	No
CPUs	4
Memory	4 GB

CPU: 18 MHz
MEMORY: 1.02 GB
STORAGE: 44.08 GB

VMware Tools is not installed in this virtual machine. VMware Tools allows detailed guest information to be displayed as well as allowing you to perform operations on the guest OS, e.g. graceful shutdown, reboot, etc. You should install VMware Tools.

General Information

- Networking
- VMware Tools: VMware Tools is not installed.
- Storage: 1 disk
- Notes

Hardware Configuration

- CPU: 4 vCPUs
- Memory: 4 GB
- Hard disk 1: 40 GB
- USB controller: USB 2.0
- Network adapter 1: VM DMZ1721 (Connected)
- Video card: 16 MB
- CD/DVD drive 1: ATAPI
- Others: Additional Hardware

Server Baru NS3

Setting bind dan DNS belum dilakan dan akan diteruskan di Tahun 2026.

u. Migrasi Server SIKD-Perwakilan dari Server Dell ke HP

Aplikasi SIKD-Perwakilan berada di Server Dell R910 (SN B6MP8X1) yang saat ini kondisinya adalah satu drive mengalami kerusakan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tanggal 23 – 30 Desember 2025 dilakukan migrasi dan konfigurasi ulang Aplikasi SIKD-Perwakilan di Server

Baru. Lokasi Server Virtual baru adalah di Server HP ProLiant DL380 Gen10 (SN SGH105VM6C) yang masih lebih bagus kondisinya.

Berikut ini adalah spesifikasi dari server baru yang dibuat yaitu:

- vCPU : 12
- vRAM : 24 GB
- Storage : 1 TB
- OS : Ubuntu 24.04 LTS
- Aplikasi : NGINX dan PHP5.6-FPM serta Docker

The screenshot displays the VMware vSphere interface for a virtual machine named 'skd-perwakilan'. The interface includes a console window on the left, a central summary area, and two detailed configuration panels at the bottom.

Summary Information:

- Guest OS: Ubuntu Linux (64-bit)
- Compatibility: ESXi 7.0 U2 virtual machine
- VMware Tools: Yes
- CPUs: 12
- Memory: 24 GB
- Host name: skd-perwakilan

General Information Panel:

General Information	
Networking	
Host name	skd-perwakilan
IP addresses	1. 10.10.0.128 2. fe80::20c:29ff:fec8:9f94
VMware Tools	VMware Tools is not managed by vSphere
Storage	1 disk

Hardware Configuration Panel:

Hardware Configuration	
CPU	12 vCPUs
Memory	24 GB
Hard disk 1	1,024 GB
USB controller	USB 2.0
Network adapter 1	VM DMZ1001 (Connected)
Video card	16 MB

Spesifikasi Server SIKD-Perwakilan Baru

3. Monitoring Perangkat Server dan Jaringan

Monitoring perangkat server dan jaringan merupakan aktivitas penting dalam menjaga kinerja dan stabilitas infrastruktur teknologi informasi. Kegiatan ini mencakup pemantauan server dan jaringan secara *real-time* menggunakan Zabbix, pemeliharaan berkala pada server untuk memastikan keandalan sistem, serta monitoring internet guna mengoptimalkan penggunaan jaringan. Dengan implementasi monitoring yang efektif, potensi gangguan dapat dideteksi lebih awal, sehingga memungkinkan tindakan preventif dan korektif yang cepat guna menjaga kelangsungan layanan TI secara optimal.

Berikut ini adalah detail untuk tiap sub kegiatan:

a. Konfigurasi dan Pemeliharaan Monitoring Zabbix

Kegiatan ini memastikan bahwa proses monitoring server oleh Zabbix tidak terganggu. Kegiatan yang dilakukan Adalah:

- 1) Perbaikan SNMP Engine pada Router BGP
- 2) Perbaikan template nginx pada host WDMS
- 3) Perbaikan Zabbix-agent pada server gitlab.
- 4) Penambahan host baru yaitu Sophos (firewall), AD-ORI dan unifi3 pada Aplikasi Zabbix
- 5) Update Zabbix-agent pada server tableau dan postgres3
- 6) Pembuatan Virtual Machine Zabbix-DB-Slave sebagai Slave Database MySQL dari Zabbix-DB

Pembuatan server slave untuk Zabbix-DB dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang terjadi saat proses backup database Zabbix pada dini hari. Masalah yang dimaksud adalah aplikasi Zabbix berhenti berfungsi selama sekitar dua jam saat proses backup berlangsung. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas harian pada aplikasi Zabbix, sehingga proses backup menambah beban pada server database dan menyebabkan gangguan pengiriman data. Pembuatan dan konfigurasi Slave Database dilakukan pada tanggal 9 – 12 Mei 2025.

Berikut ini adalah spesifikasi dari Server Zabbix-DB-Slave:

- vCPU : 8
- vRAM : 32 GB
- Storage : 300GB
- OS : Ubuntu 24.04.2
- Aplikasi : MariaDB 10.11.13

ZABBIX-DB-SLAVE

Guest OS: Ubuntu Linux (64-bit)
 Compatibility: ESXi 6.0 and later (VM version 11)
 VMware Tools: Yes
 CPUs: 8
 Memory: 32 GB
 Host name: zabbix-db-slave

General Information

Networking	
Host name	zabbix-db-slave
IP addresses	1. 172.16.1.4 2. fe80::20c:29ff:fe4f:4774
VMware Tools	Installed and running
Storage	1 disk

Hardware Configuration

CPU	8 vCPUs
Memory	32 GB
Hard disk 1	300 GB
USB controller	USB 2.0
Network adapter 1	DMZ1 (Connected)
Video card	4 MB

Server Zabbix-DB-Slave

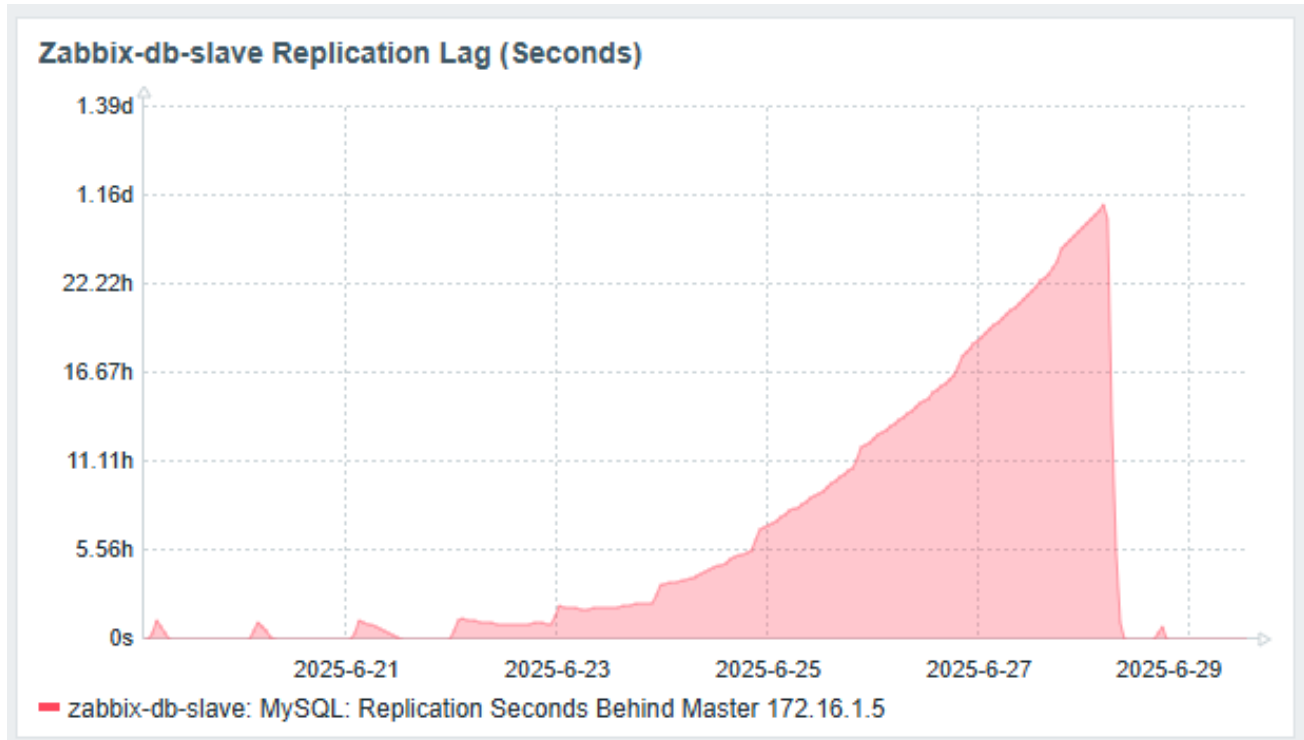
7) Instalasi Zabbix-Agent pada Server Zabbix-DB-Slave

Instalasi Zabbix-Agent pada Server Zabbix-DB-Slave dilakukan pada tanggal 16 Mei 2025 dan digunakan untuk memonitor status replikasi dari Database Zabbix.

8) Troubleshooting Problem Replication Lag yang terlalu Tinggi pada Server Zabbix-DB-Slave

Nilai Replication Lag mengukur seberapa jauh transaksi pada Database Slave tertinggal dari transaksi pada Database Master (diukur dalam detik). Jika nilainya lebih dari 30 menit dalam kurun waktu 5 menit maka akan men-trigger peringatan pada Monitoring Zabbix. Upaya perbaikan dilakukan pada tanggal 19 – 21 Mei, 1 – 2 Juni dan 28 Juni 2025. Secara garis besar langkah perbaikan yang dilakukan adalah:

- Optimasi setting InnoDB Buffer Pool Size
- Perbaikan error GTID Slave State
- Mengubah replikasi menjadi parallel



Grafik Replication Lag pada Zabbix-DB-Slave setelah Perbaikan

- 9) Instalasi Zabbix-Agent pada Server gitlab-baru
Instalasi Zabbix-Agent dilakukan pada Server esign-prod baru pada tanggal 15 Oktober 2025 setelah proses instalasi gitlab selesai.
 - 10) Instalasi Zabbix-Agent pada Server SIKD-Perwakilan baru
Instalasi Zabbix-Agent dilakukan pada Server SIKD-Perwakilan baru pada tanggal 30 Desember 2025 setelah proses instalasi aplikasi selesai.
- b. Pemeliharaan Server
Aplikasi Zabbix Server akan memberikan notifikasi ke System Admin pada saat ditemukan error pada host yang dimonitoring. Saat hal tersebut terjadi maka System Admin akan segera melakukan perbaikan. Berikut ini adalah daftar pemeliharaan server yang telah dilakukan pada tahun 2025.

Daftar Pemeliharaan Server Virtual

No	Server	Pemeliharaan	Tanggal
1	SIKD-PWK	Setting fitur keamanan fail2ban dan <i>disable</i> HTTP/1.1	01-Jan-2025
		Perbaiki backup script setelah penggantian Firewall ke Sophos	24-25 Jan 2025
		Perbaiki permission pada script backup ke sisdatin	13-Feb-2025
		troubleshooting sikd-pwk error karena proses backup penuh	04-Mar-2025
		modif script sikd-pwk untuk parallel rsync dan compressing	07-Mar-2025
		Penambahan storage sikd-perwakilan dari 400GB ke 500GB	24-Mar-2025
		Perbaiki sendmail pada SIKD-Perwakilan	28-Apr-2025
2	Tableau	Penambahan RAM dari 140GB ke 160GB	03-Jan-2025
3	WDMS-PC	Restart WDMS-PC karena RAM penuh	21-Jan-2025
		Restart Server WDMS karena penggunaan memory yang tinggi	21 April dan 12 Juni 2025
		perbaiki koneksi wdms ke proksi	17-Oct-2025
4	wazuh	Penambahan heap space karena error dengan cara mengedit file <code>/etc/wazuh-indexer/jvm.options</code>	21-Jan-2025
		Perbaiki open search pada Server Aplikasi Wazuh	26-Apr-2025
5	Zabbix-DB	Pembuatan backup script	20-Jan-2025
		Troubleshooting backup script Zabbix-DB	2 - 4, 6, 10 - 11 Feb 2025
6	Semua Server	Update SSL pada semua server ke LetsEncrypt sebagai solusi sementara sampai SSL dari Comodo dikirimkan oleh vendor)	05-Feb-2025
		Update SSL pada semua server SSL dari Comodo	6, 10, 12, 19, 20 Feb 2025
7	SIKD-PROD	Perbaiki permission pada script backup ke sisdatin	13-Feb-2025
8	ns1-clone	Troubleshooting setting EDR pada ns1-clone	12, 14 Feb 2025
9	dbmysql4	perbaiki permission pada script backup dbmysql4	14, 17 Feb 2025

No	Server	Pemeliharaan	Tanggal
		Restart Service MySQL dbmysql4 karena koneksi dari WDMS penuh	14-Oct-2025
10	Humanusia	Update reCAPTCHA pada humanusia menggunakan Google Cloud Console	20, 28 Feb 2025
		create new script backup for humanusia	24 - 25 Feb 2025
		ujicoba script switch captcha di humanusia	4 -5 Mar 2025
		menambah set captcha ke script switch	15-Mar-2025
11	sonarqube	Update sonarqube ke versi community 25.2	20-Feb-2025
12	web-sipaten	server web-sipaten resize-storage	18 - 31 Mar 2025
13	Drbackup2	Perbaikan network server drbackup2 dan backup dari humanusia ke drbackup2	3 & 17 April 2025
		Perbaikan network VM (PDN)	3 Juli 2025
14	SIMAORI	Koordinasi dengan PDN untuk kekurangan resource pada SIMAORI	10 April – 6 Mei 2025
		Update Script Backup pada Aplikasi SIMAORI	23-24 Oct 2025
15	SIKD-DB	Restart Service MySQL pada Server SIKD-DB karena tidak merespon	16 Juni 2025
16	Opiniv2-Dev	Reaktivasi Opiniv2-Dev setelah migrasi server Colocation	19 Juni 2025
17	SIMPeL4 Dev, Registry SIMPeL4 dan pgadmin	Perbaikan Server Aplikasi Registry SIMPeL4 yang menyebabkan SIMPeL4-Dev dan pgadmin down	24 – 25 Juni 2025
18	Simpel4-stg-node2	Perbaikan crashing metrics	1 Juli 2025
19	Esign-prod	Penambahan Storage dari 100GB ke 150GB	3 Juli 2025
		Penambahan Memory pada VM esign-prod di PDNS	16-Oct-2025
20	Opiniv2	Perbaikan network VM (PDN)	3 Juli 2025
		Perbaikan network VM (PDN)	27 Agustus 2025
		Update Script Backup pada Aplikasi Penilaian	15-17 Oct 2025

No	Server	Pemeliharaan	Tanggal
		penyesuaian upload penilaian ke 25MB (extra ke 30MB)	18-Nov-2025
21	Zabbix-proxy2	Perbaiki network VM (PDN)	8 Juli 2025
22	Simpel4-dev-node2	Troubleshooting server tidak terhubung ke cluster simpel4-dev	30 Juli 2025
23	NS1	Perbaiki routing NS1	9 Juli 2025
		Setting DNS CAA	28 Agustus 2025
24	Simpel4-prd-node1, simpel4-prd-node2 dan simpel4-prd-node3	Error Volume karena storage penuh yang diakibatkan oleh log error saat koneksi ke dockerHub	3 – 11 September 2025
25	jdih	Network VM jdih putus (PDN)	29-Sep-2025
26	simpel4-prd-node3	Restart simpel4-prd-node3 karena not responding	06-Oct-2025
27	satudata	Restart Service CKAN karena error	07-Oct-2025
		Troubleshooting Network pada VM Satudata di PDNS	15-Oct-2025
28	WBS2	Update reCAPTCHA karena perubahan T&C Google	13-14 Oct 2025
		Update reCAPTCHA karena perubahan T&C Google	13-14 Oct 2025
29	webombudsman	Update reCAPTCHA karena perubahan T&C Google	13-14 Oct 2025
		Perbaiki widget twitter (X) v2	1-3 Nov 2025
		Disable autoplay video di gallery dan testimoni	2-4 Nov 2025
		Perbaiki charset table cms_pages yang menyebabkan inputan gagal	06-Nov-2025
30	calasori	Update reCAPTCHA karena perubahan T&C Google	13-14 Oct 2025
31	development	Update reCAPTCHA karena perubahan T&C Google	13-14 Oct 2025
32	seleksi	Update reCAPTCHA karena perubahan T&C Google	13-14 Oct 2025
33	web-php	penambahan storage web-php dari 150GB ke 300GB	21-22 Oct 2025

No	Server	Pemeliharaan	Tanggal
		troubleshoot web-php mati	19-Nov-2025
34	dbMySQL3	upgrade mariadb ke 10.11 di dbmysql3 PDN	06-Nov-2025

No	Server	Pemeliharaan	Tanggal
1	HP ProLiant DL380 Gen9 (CN77330DYM), HP ProLiant DL380 Gen9 (CN77390L9F), HP ProLiant DL380 Gen9 (CN77390L9J), HP ProLiant DL380 Gen10 (SGH105VM6C), dan ASUS RS520-E9-RS8 V2 (M8S0CG0000U2)	Pemindahan 5 Unit Server di Colocation ke Ruang Server Lantai 7. Aplikasi terdampak adalah Zimbra, SIKD Pusat dan Opiniv2-Dev	25 – 27 April 2025
2	HP ProLiant DL380 Gen10 (SGH105VM6C)	Rest Password iLO pada Server HP	12 Juni 2025
3	Dell PE R710 (SN: 252GC2S)	Pembebasan ruang penyimpanan fisik dari server yang menyebabkan aplikasi gitlab error	01-Sep-2025
4	Seluruh server	Mematikan dan menghidupkan server saat Maintenance PLN	13-14 Dec 2025

Daftar Pemeliharaan Server Fisik

4. Fasilitasi Rapat Daring

Fasilitasi rapat daring dilakukan menggunakan Zoom Meeting. Jenis kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah:

a. Setting Akun Zoom Meeting Baru

Pada Tahun 2025 telah dilakukan dua kali pengadaan Zoom Meeting. Pengadaan pertama dilakukan di awal tahun 2025, tepatnya 3 Januari 2025, and dilakukan untuk memperpanjang akun sebelumnya di tahun 2024. Mengingat pada saat itu frekuensi rapat daring telah menurun, maka jumlah

pemesanan akun Zoom Meeting dikurangi menjadi 15 Akun Zoom Meeting Business dengan dua add on Large Meeting 1000.

Kemudian pada tanggal 22 Januari 2025, keluar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, berlaku sejak 22 Januari 2025 tentang efisiensi anggaran. Hal ini kemudian berlanjut dengan keluarnya arahan tentang Work from Anywhere (WFA) dan mengakibatkan kebutuhan adanya akun Zoom Meeting tambahan. Oleh sebab itu, kemudian dilakukan pengadaan Akun Zoom Meeting kedua mulai bulan Maret 2025 sebanyak 15 akun Zoom Meeting Business.

Detail akun Zoom Meeting yang saat ini dimiliki oleh Ombudsman dapat dilihat pada tabel di bawah.

No	Email	Lisensi	Kapasitas	Expired	Penggunaan
1	zoom-1@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
2	zoom-2@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
3	zoom-3@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
4	zoom-4@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
5	zoom-5@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
6	zoom-6@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
7	zoom-7@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
8	zoom-8@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
9	zoom-9@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
10	zoom-10@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
11	zoom-23@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Book Website
12	zoom-21@ombudsman.go.id	Business + Large Meeting	1000	3 Jan 2026	Book Website
13	zoom-13@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	Perencanaan
14	ukpbj@ombudsman.go.id	Business	300	3 Jan 2026	UKPBJ

No	Email	Lisensi	Kapasitas	Expired	Penggunaan
15	zoom-1000@ombudsman.go.id	Business + Large Meeting	1000	3 Jan 2026	Backup TI
16	zoom-11@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Backup TI
17	zoom-12@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
18	zoom-22@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
19	zoom-24@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
20	zoom-25@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
21	zoom-26@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
22	zoom-27@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
23	zoom-28@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
24	zoom-29@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
25	zoom-30@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
26	zoom-31@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
27	zoom-32@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
28	zoom-33@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
29	zoom-34@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
30	zoom-35@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website
31	zoom-36@ombudsman.go.id	Business	300	20 Mar 2026	Book Website

Daftar Penggunaan Akun Zoom Meeting Tahun 2025

b. Layanan Booking Zoom Melalui website

Booking Zoom untuk pengguna dilayani melalui intranet website pada alamat <https://ombudsman.go.id/admin>. Berikut ini adalah rincian jumlah fasilitasi zoom melalui website yang telah dilayani selama tahun 2025.

Pengelolaan Rapat Daring menggunakan Zoom Meeting

Jan-Des		241 Hari
Fasilitasi Rapat Hybrid	103	
Fasilitasi Kamera	1	
Fasilitasi Rapat Daring	113	
Total Fasilitasi Rapat oleh TI	217	
Claim Host Mandiri	2326	
TOTAL		2543

TW I		60 Hari
Fasilitasi Rapat Hybrid	17	
Fasilitasi Kamera	1	
Fasilitasi Rapat Daring	35	
Total Fasilitasi Rapat oleh TI	53	
Claim Host Mandiri	682	
TOTAL		735

TW II		51 Hari
Fasilitasi Rapat Hybrid	15	
Fasilitasi Kamera	0	
Fasilitasi Rapat Daring	21	
Total Fasilitasi Rapat oleh TI	36	
Claim Host Mandiri	551	
TOTAL		587

TW III		66 Hari
Fasilitasi Rapat Hybrid	37	
Fasilitasi Rapat Daring	25	
Total Fasilitasi Rapat oleh TI	37	
Claim Host Mandiri	530	
TOTAL		567

TW IV		64 Hari
Fasilitasi Rapat Hybrid	34	
Fasilitasi Rapat Daring	32	
Total Fasilitasi Rapat oleh TI	34	
Claim Host Mandiri	563	
TOTAL		597

c. Layanan Fasilitasi Hosting Rapat

Layanan ini menyediakan penggunaan kamera, baik menggunakan ruangan khusus maupun tidak. Sejumlah rapat hybrid yang telah difasilitasi diantaranya adalah:

- 1) Pengangkatan Kembali Kepala Perwakilan Kalimantan Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 – 2029 (3 Jan 2025)
- 2) Apel Rutin (6 Jan 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 3) Rapat Pengarahan Sekjen (7 Jan 2025) di Ruang Aula Lantai 1.

- 4) Apel Rutin (13 Jan 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 5) Perayaan Natal Ombudsman RI (16 Jan 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 6) Konpers Hasil Penyelesaian Laporan KU Resmon T.A. 2024 (16 Jan 2025) di Ruang Antonius Sujata Lantai Ground.
- 7) Apel Rutin (20 Jan 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 8) Apel Sore (31 Jan 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 9) Pelantikan Kaper dan JF (3 Feb 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 10) Launching Dashboard Monitoring Penyelesaian Laporan Masyarakat dan Sosialisasi Fitur Tracking Laporan Masyarakat dan Website Ombudsman Versi Bahasa Inggris (6 Feb 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 11) Apel Rutin (10 Feb 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 12) Apel Sore (28 Feb 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 13) Pelantikan JF Pranata Komputer dan Pranata Humas (7 Mar 2025) di Ruang Serbaguna Lantai Ground.
- 14) Apel Rutin (3 Mar 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 15) Apel Rutin (10 Mar 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 16) Apel Rutin (17 Mar 2025) di Ruang Aula Lantai 1.
- 17) Monitoring LHP Pertambangan kepada Kementerian ESDM (20 Mar 2025) di Ruang Abdurahman Wahid.
- 18) Rapat ORI OCO (9 April 2025) di Ruang SEAOF di Ruang Rapat SEAOF
- 19) Apel Sore (11 April 2025) di Ruang Aula Lantai 1
- 20) Halal Bihalal Ombudsman RI (15 April 2025) di Ruang Aula Lantai 1
- 21) Sosialisasi Produk GOP dan The Power Of Hajj dari BSI (17 April 2025)
- 22) Pemaparan Program KORPRI Tahun 2025 (24 April 2025) di Ruang Serbaguna Lantai Ground
- 23) Apel Rutin (28 April 2025) di Ruang Aula Lantai 1
- 24) Konferensi Pers Hasil Uji Petik Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi (29 April 2025) di Ruang Antonius Sujata Lantai Ground

- 25) Penyerahan Rekomendasi kpd Pemkab Raja Ampat (30 April 2025) di Ruang Antonius Sujata Lantai Ground
- 26) Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 (2 Juni 2025) di Halaman Lobby Depan
- 27) Monitoring LHP Sektor Pertambangan dengan Kementerian ESDM dan Pelapor (5 Juni 2025) di Ruang Meeting Ajudikasi
- 28) Apel Rutin (16 Juni 2025) di Ruang Aula Lantai 1
- 29) Apel Rutin (23 Juni 2025) di Ruang Aula Lantai 1
- 30) Penyerahan Rekomendasi kepada Pemkot Semarang (24 Juni 2025) di Ruang Antonius Sujata Lantai Ground
- 31) Konpers KUPP (25 Juni 2025) di Ruang Serbaguna Lantai Ground
- 32) Pembahasan Rencana Perpanjangan Kerja Sama antara Ombudsman RI dan POLRI (26 Juni 2025) di Ruang Serbaguna Lantai Ground
- 33) Pembahasan Rencana Perpanjangan Kerja Sama antara Ombudsman RI dan Kepolisian Negara RI (30 Juni 2025) di Ruang Serbaguna Lantai Ground
- 34) Rapat ORI OCO (9 April 2025) di Ruang SEAOF di Ruang Rapat SEAOF
- 35) Apel Sore (11 April 2025) di Ruang Aula Lantai 1
- 36) Halal Bihalal Ombudsman RI (15 April 2025) di Ruang Aula Lantai 1
- 37) Sosialisasi Produk GOP dan The Power Of Hajj dari BSI (17 April 2025)
- 38) Pemaparan Program KORPRI Tahun 2025 (24 April 2025) di Ruang Serbaguna Lantai Ground
- 39) Apel Rutin (28 April 2025) di Ruang Aula Lantai 1
- 40) Konferensi Pers Hasil Uji Petik Gapoktan sebagai Penyalur Pupuk Bersubsidi (29 April 2025) di Ruang Antonius Sujata Lantai Ground
- 41) Penyerahan Rekomendasi kpd Pemkab Raja Ampat (30 April 2025) di Ruang Antonius Sujata Lantai Ground
- 42) Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 (2 Juni 2025) di Halaman Lobby Depan

- 43) Monitoring LHP Sektor Pertambangan dengan Kementerian ESDM dan Pelapor (5 Juni 2025) di Ruang Meeting Ajudikasi
- 44) Apel Rutin (16 Juni 2025) di Ruang Aula Lantai 1
- 45) Apel Rutin (23 Juni 2025) di Ruang Aula Lantai 1
- 46) Penyerahan Rekomendasi kepada Pemkot Semarang (24 Juni 2025) di Ruang Antonius Sujata Lantai Ground
- 47) Konpers KUPP (25 Juni 2025) di Ruang Serbaguna Lantai Ground
- 48) Pembahasan Rencana Perpanjangan Kerja Sama antara Ombudsman RI dan POLRI (26 Juni 2025) di Ruang Serbaguna Lantai Ground
- 49) Pembahasan Rencana Perpanjangan Kerja Sama antara Ombudsman RI dan Kepolisian Negara RI (30 Juni 2025) di Ruang Serbaguna Lantai Ground
- 50) Apel Sore dan Pelepasan Atlet Pornas (3 Oktober 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 51) Diskusi Publik: Peringatan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (7 Oktober 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 52) Apel Pagi (13 Oktober 2025 di Ruang Aula (Lantai 1)
- 53) FGD dalam rangka “Investasi dan Hilirisasi di Daerah dalam Mendukung Upaya Indonesia Keluar dari Middle Income Trap” (Gladi Resik tanggal 21 dan Pelaksanaan tanggal 22 Oktober 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 54) Peluncuran Buku Sawit: antara emas hijau dan duri pengelolaan²⁰ (23 Oktober 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 55) Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 (28 Oktober 2025) di Halaman Depan Lobby
- 56) Pengarahan Pemagangan Nasional Ombudsman RI (24 November 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 57) Pelaksanaan SP4N-LAPOR! Pusat (27 November 2025) di Hotel Manhattan

- 58) Bimbingan Teknis Optimalisasi Manajemen Data dan Kinerja (27 November 2025) di Ruang Rapat Sekjen Lt 4
- 59) Diskusi Publik dan Penyerahan Laporan Hasil Kajian Layanan Pemeriksaan Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional dan Penerapan All Indonesia (27 November 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 60) Rapat Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat dan Gelar Laporan Hasil Verifikasi LM (28 November 2025) di Ruang Hotel Manhattan
- 61) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional (1 Desember 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 62) Pengangkatan Sumpah Janji Jabatan Asisten Ombudsman Republik Indonesia (3 Desember 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 63) Undangan Diskusi Pengesahan KUHAP (3 Desember 2025) di Ruang Ajudikasi Lantai 2
- 64) Diskusi Tematik bertajuk “Reformasi POLRI dan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat” (5 Desember 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 65) Klarifikasi Aduan WBS KUMM (5 Desember 2025) di Ruang Antonius Sujata (Lantai Ground)
- 66) Pelatihan Media Sosial (8 dan 9 Desember 2025) di Ruang Rapat Sekjen Lantai 4
- 67) Rapat terkait Catatan Akhir Tahun bersama Pengampu (8 Desember 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 68) Rapat Focus Group Discussion “Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik” (8 Desember 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 69) Rapat PPK (8 dan 9 Desember 2025) di Ruang Hotel Manhattan
- 70) Peluncuran Buku “Mengawal Mutu Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI” (9 Desember 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 71) Diskusi Publik dan Penyerahan Kajian Evaluatif 10 Tahun Layanan BPJS Ketenagakerjaan (10 Desember 2025) di Ruang Aula (Lantai 1)
- 72) Monitoring Laporan Masyarakat Sektor Pertambangan (10 Desember 2025) di Ruang Hotel

- 73) Konsinyering KU V (11 Desember 2025) di Ruang Hotel
- 74) Rapat Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat dan Gelar Laporan Hasil Verifikasi (12 Desember 2025) di Ruang Hotel
- 75) Penyerahan LHA SR KU V di Ruang Aula (Lantai 1) dan dilanjutkan dengan Konferensi Pers LHA SR KU V (17 Desember 2025) di Ruang Antonius Sujata (Lantai Ground)
- 76) Catatan Akhir Tahun Ombudsman RI: Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kepemimpinan Yeka Hendra Fatika Periode 2021–2025 (18 Desember 2025) di Ruang Antonius Sujata (Lantai Ground)
- 77) Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 (22 Desember 2025) di Halaman Depan Lobby

C. DATA STATISTIK SERVER

Berikut ini adalah ringkasan dari data statistik pengelolaan server, baik fisik maupun virtual di Tahun 2025.

STATUS SERVER	JUMLAH	PERSENTASE
Development	13	15,85%
Mati	12	14,63%
Production	51	62,20%
Read-Only	6	7,32%
Grand Total	82	100,00%

Jumlah Server Virtual berdasarkan Status Penggunaan

TIPE PENGGUNAAN	JUMLAH	PERSENTASE
APLIKASI	49	59,76%
UTILITY	33	40,24%
Grand Total	82	100,00%

Jumlah Server Virtual berdasarkan Tipe Penggunaan

LOKASI PUSAT DATA	JUMLAH	PERSENTASE
PDN	33	40,24%
Server Lt7	49	59,76%
Grand Total	82	100,00%

Jumlah Server Virtual berdasarkan Lokasi Pusat Data

LOKASI PUSAT DATA	JUMLAH	PERSENTASE
Tidak Termonitor	9	17,65%
Termonitor	42	82,35%
Grand Total	51	100,00%

Jumlah Server Virtual untuk Production yang Termonitor oleh Zabbix

LOKASI PUSAT DATA	JUMLAH	PERSENTASE
Jumlah Sumber Daya termonitor	82	72,57%
Jumlah Sumber Daya Total	113	100,00%

Jumlah Sumber Daya Server yang Termonitor pada Zabbix

3.3 Realisasi Anggaran

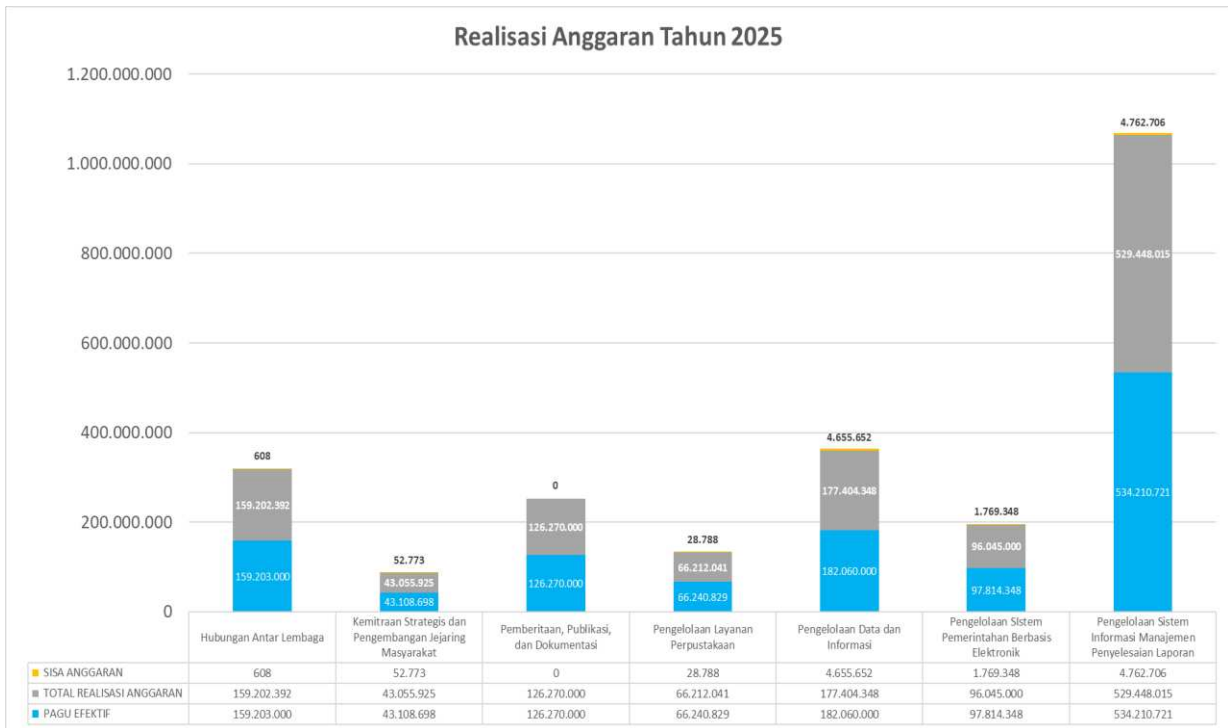
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2025 (periode Januari-Desember) ini Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi (*Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi*) Program Dukungan Manajemen Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) Rincian Output/Layanan (RO) didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 yang telah mengalami sebanyak 11 (sebelas) kali revisi sepanjang Tahun 2025.

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Unit Kerja sebesar Rp 4.947.127.000, dengan jumlah anggaran yang diblokir (Efisiensi Anggaran) sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya senilai Rp. 929.046.000 (dikarenakan pada Triwulan III dibuka blokir anggaran).

Sehingga anggaran PAGU Efektif yang bisa digunakan senilai Rp 4.018.081.000, perlu disampaikan juga bahwa efisiensi Anggaran menghambat penyerapan dan realisasi kegiatan yang telah direncanakan karena buka blokir baru terlaksana menjelang akhir tahun. Anggaran tersebut dibagi dalam 2 kegiatan, yaitu:

- *Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi – 4192.EBA* (Layanan Dukungan Manajemen Internal) sebesar Rp 2.112.477.000, dengan jumlah anggaran yang diblokir (Automatic Adjustment) senilai Rp 903.569.000, sehingga anggaran PAGU Efektif senilai Rp 1.197.637.721; dan
- *Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan – 5094.EBA* (Layanan Perkantoran - Operasional dan Pemeliharaan Kantor) sebesar Rp 2.834.650.000, dengan jumlah anggaran yang diblokir (Automatic Adjustment) senilai Rp 25.477.000, sehingga anggaran yang bisa digunakan senilai Rp 2.803.303.025.

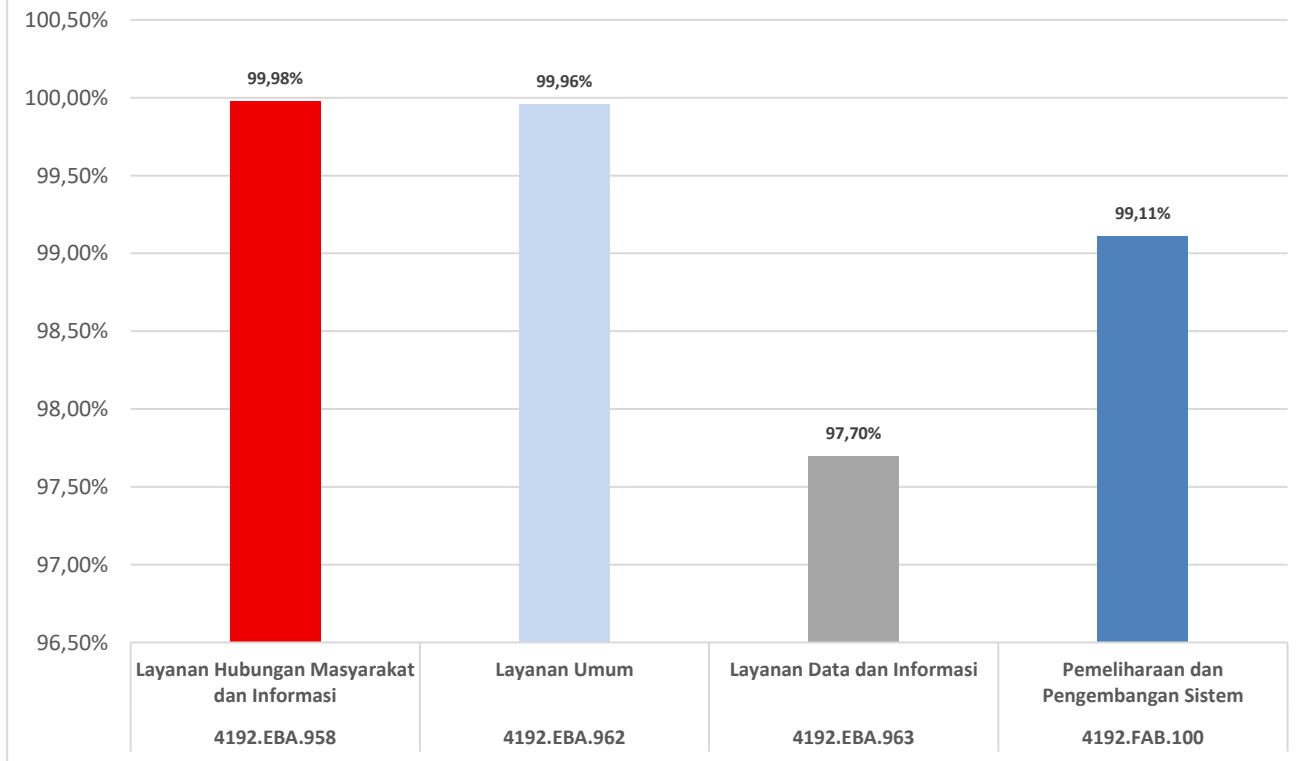
Realisasi atau penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi (*Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi – 4192.EBA*) sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.000.940.746 atau sebesar 99,57% secara keseluruhan berdasarkan POK (Data Realisasi Biro HMTI berdasarkan aplikasi SAKTI). Berikut rincian Pagu:



RO (Rincian Output)		PAGU			Total Serapan	Sisa Anggaran	Persentase
		DIPA	DIPA Aktif	Blokir			
	Dukungan Manajemen	4.947.127.000	4.018.081.000	929.046.000	4.000.940.746	17.160.254	99,57%
	Kehumasan, Data dan Sistem dan Teknologi Informasi	2.112.477.000	1.208.908.000	903.569.000	1.197.637.721	11.290.279	99,07%
4192	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.362.477.000	674.697.000	687.780.000	668.189.706	6.527.294	99,04%
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	637.187.000	328.582.000	308.605.000	328.528.317	53.683	99,98%
51	Hubungan Antar Lembaga	236.610.000	159.203.000	77.407.000	159.202.392	608	
52	Kemitraan Strategis dan Pengembangan Jejaring Masyarakat	136.050.000	43.109.000	92.941.000	43.055.925	53.075	
53	Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentasi	264.527.000	126.270.000	138.257.000	126.270.000	0	
EBA.962	Layanan Umum	182.217.000	66.241.000	115.976.000	66.212.041	28.959	99,96%
51	Pengelolaan Layanan Perpustakaan	182.217.000	66.241.000	115.976.000	66.212.041	28.959	
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	543.073.000	279.894.000	263.199.000	273.449.348	6.444.652	97,70%
51	Pengelolaan Data dan Informasi	203.729.000	182.080.000	21.669.000	177.404.348	4.675.652	
52	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	339.344.000	97.814.000	241.530.000	96.045.000	1.769.000	
FAB.100	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	750.000.000	534.211.000	215.789.000	529.448.015	4.762.985	99,11%
51	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan	750.000.000	534.211.000	215.789.000	529.448.015	4.762.985	
5094.EBA	Layanan Perkantoran	2.834.650.000	2.809.173.000	25.477.000	2.803.303.025	5.869.975	99,79%
994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.834.650.000	2.809.173.000	25.477.000	2.803.303.025	5.869.975	

**Rincian Realisasi, dan Sisa Anggaran
Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi (Januari-Desember) 2025**

Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025



Realisasi Kinerja dan Rincian Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

(1 Januari-31 Desember) TA 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	PAGU	BLOKIR *	PAGU EFEKTIF	TAHUN		
					TOTAL REALISASI ANGGARAN	%	SISA ANGGARAN
110.01.WA	Program Dukungan Manajemen	4.941.527.000	929.046.562	4.012.480.438			
4192	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	2.112.477.000	903.569.404	1.208.907.596	1.197.637.721	99,07%	11.269.875
4192.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.362.477.000	687.780.125	674.696.875	668.189.706	99,04%	6.507.169
4192.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	637.187.000	308.605.302	328.581.698	328.528.317	99,98%	53.381
051	Hubungan Antar Lembaga	236.610.000	77.407.000	159.203.000	159.202.392	100,00%	608
052	Kemitraan Strategis dan Pengembangan Jejaring Masyarakat	136.050.000	92.941.302	43.108.698	43.055.925	99,88%	52.773
053	Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi	264.527.000	138.257.000	126.270.000	126.270.000	100,00%	-
4192.EBA.962	Layanan Umum	182.217.000	115.976.171	66.240.829	66.212.041	99,96%	28.788
051	Pengelolaan Layanan Perpustakaan	182.217.000	115.976.171	66.240.829	66.212.041	99,96%	28.788
4192.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	543.073.000	263.198.652	279.874.348	273.449.348	97,70%	6.425.000
051	Pengelolaan Data dan Informasi	203.729.000	21.669.000	182.060.000	177.404.348	97,44%	4.655.652
052	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	339.344.000	241.529.652	97.814.348	96.045.000	98,19%	1.769.348
4192.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	750.000.000	215.789.279	534.210.721	529.448.015	99,11%	4.762.706
4192.FAB.100	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	750.000.000	215.789.279	534.210.721	529.448.015	99,11%	4.762.706
051	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan	750.000.000	215.789.279	534.210.721	529.448.015	99,11%	4.762.706
5094	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	2.829.050.000	25.477.158	2.803.572.842			2.803.572.842
5094.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	2.829.050.000	25.477.158	2.803.572.842	2.779.536.343	99,14%	24.036.499
5094.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.829.050.000	25.477.158	2.803.572.842	2.779.536.343	99,14%	24.036.499
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.829.050.000	25.477.158	2.803.572.842	2.779.536.343	99,14%	24.036.499

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2025		SISA
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	674.717.000	668.189.706	99,03 %	6.527.294
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	328.582.000	328.528.317	99,98 %	53.683
051	Hubungan Antar Lembaga	159.203.000	159.202.392	100,00 %	608
051.0A	Media Relations	47.310.000	47.310.000	100,00 %	0
051.0B	Media Monitoring	106.793.000	106.792.392	100,00 %	608
051.0C	Fasilitasi Koordinasi Antar Lembaga	5.100.000	5.100.000	100,00 %	0
052	Kemitraan Strategis dan Pengembangan Jejaring Masyarakat	43.109.000	43.055.925	99,88 %	53.075
052.0A	Kampanye/Edukasi Publik	33.409.000	33.407.950	100,00 %	1.050
052.0B	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	9.700.000	9.647.975	99,46 %	52.025
053	Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi	126.270.000	126.270.000	100,00 %	0
053.0A	Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan	126.270.000	126.270.000	100,00 %	0
EBA.962	Layanan Umum	66.241.000	66.212.041	99,96 %	28.959
051	Pengelolaan Layanan Perpustakaan	66.241.000	66.212.041	99,96 %	28.959
051.0A	Pengelolaan Perpustakaan	41.091.000	41.062.525	99,93 %	28.475
051.0B	Pojok Baca Ombudsman	25.150.000	25.149.516	100,00 %	484
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	279.894.000	273.449.348	97,70 %	6.444.652
051	Pengelolaan Data dan Informasi	182.080.000	177.404.348	97,43 %	4.675.652
051.0A	Pengumpulan dan Penyajian Data dan Informasi	75.480.000	75.443.498	99,95 %	36.502
051.0B	Monitoring Evaluasi Data dan Informasi	106.600.000	101.960.850	95,65 %	4.639.150
052	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	97.814.000	96.045.000	98,19 %	1.769.000
052.0A	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	97.814.000	96.045.000	98,19 %	1.769.000
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	534.211.000	529.448.015	99,11 %	4.762.985
FAB.100	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	534.211.000	529.448.015	99,11 %	4.762.985
051	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan	534.211.000	529.448.015	99,11 %	4.762.985
051.0A	Pengembangan Aplikasi	384.060.000	383.169.500	99,77 %	890.500
051.0B	Monitoring dan Evaluasi	150.151.000	146.278.515	97,42 %	3.872.485

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman Republik Indonesia atas pelaksanaan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja, dan dapat memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian capaian indikator, menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang ditetapkan masuk kategori berhasil memenuhi target.

Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah “Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data, Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas”. Dalam mencapai hal tersebut diukur melalui indikator Indikator kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi dengan target 212 laporan kegiatan hubungan Masyarakat dan informasi, 1 layanan pengelolaan perpustakaan, 2 layanan pengelolaan data dan informasi, 1 sistem informasi pemeliharaan dan pengembangan sistem, 1 layanan pengelolaan operasional. Realisasi yang dicapai yaitu 238 laporan kegiatan hubungan Masyarakat dan informasi, 1 layanan pengelolaan perpustakaan, 2 layanan pengelolaan data dan informasi, 1 sistem informasi pemeliharaan dan pengembangan sistem, 1 layanan pengelolaan operasional

Total penyerapan dari pagu Rp 4.947.127.000 direalisasikan Rp 4.000.940.746 (99,57%), dengan tercapainya semua target di tahun 2025, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 17.140.254. Dokumen hasil kinerja capaian output selama tahun 2025 : Nilai keterbukaan informasi publik, Indeks SPBE, Indeks kepuasan pengguna layanan Biro, Nilai SAKIP, Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku, Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai, Nilai pengelolaan arsip, Rasio pegawai yang meningkatkan kinerjanya melalui *coaching/mentoring/counseling* (CMC), dan Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu. Biro Hubungan Masyarakat

dan Teknologi Informasi telah menyusun 6 dokumen Laporan Kinerja 2025, Laporan Triwulan I, II, III, dan IV 2025, Laporan Tahunan 2025 sesuai target perjanjian kinerja.

Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2025

- Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman RI pada tahun 2025 sangat baik. Biro ini telah berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan, baik dalam hal realisasi anggaran maupun indikator kinerja.
- Capaian indeks kinerja mencapai 112%, yang menunjukkan bahwa kinerja biro sangat baik dan positif. Ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kerja dan produktivitas.
- Realisasi anggaran mencapai 99,57%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat efisien. Ini berarti hampir seluruh anggaran yang dialokasikan telah digunakan sesuai dengan perencanaan.
- Semua rincian output yang telah ditetapkan telah mencapai target. Ini menunjukkan bahwa Biro HMTI telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.
- Secara keseluruhan, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman RI pada tahun 2025 sangat baik. Biro telah berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi. Dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan, diharapkan kinerja biro dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Organisasi dan eksternal, khususnya stakeholder Ombudsman RI.
- Seluruh Laporan Biro HMTI sepanjang tahun dapat diakses dalam tautan berikut:

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dodi Wahyugi
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
TEKNOLOGI INFORMASI,

Dodi Wahyugi
NIP. 198106222003121003

Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2025

PERJANJIAN KINERJA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2025*	Capaian (%)**	Keterangan***
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data, Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Jumlah Laporan Kegiatan Hubungan Masyarakat dan Informasi	212 Laporan	238 Laporan	112%	- Januari = 16 - Februari = 25 - Maret = 18 - April = 13 - Mei = 18 - Juni = 10 - Juli = 15 - Agustus = 10 - September = 22 - Oktober = 38 - November = 31 - Desember = 14
	Jumlah Pengelolaan Layanan Perpustakaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
	Jumlah Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	2 Layanan	2 Layanan	100%	
	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	
	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional	1 Layanan	1 Layanan	100%	

Catatan:

*Diisi dengan realisasi tahun 2025

**Rumus mengisi capaian (%): $\frac{\text{Realisasi Tahun 2025}}{\text{Target}} \times 100\%$

***Kolom keterangan diisi dengan penjelasan terkait indikator yang telah direalisasikan/ tahapan kegiatan yang sedang dilakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOTA DINAS
NOMOR : 19/PR.06/I/2026

Kepada : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
Hal : Penyampaian Data Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Biro
Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Tahun 2025
Tanggal : 7 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1631/PR.06/XII/2025 hal Permintaan Data Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja di lingkungan Ombudsman RI, dapat kami sampaikan bahwa kami telah menyelesaikan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan data realisasi dan capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Teknologi Informasi,




Dodi Wahyugi

Tembusan: Yth.
Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.



Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19
Kuningan Jakarta Selatan 12
Telp. 021 - 2251 3737
www.ombudsman.go.id

 (021) 2251 3737
137 (*Call Center*)



OmbudsmanRI137